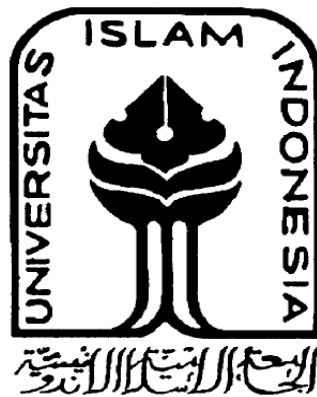


PARTAI PENGUASA DALAM REAKSI KADER

(Sikap Kader terhadap Budaya Organisasi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan di Lingkup Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Farid Nur Hidayat
Nomor Mahasiswa : 12321158
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Bidang Konsentrasi : Komunikasi strategis

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN SOSIAL BUDAYA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PARTAI PENGUASA DALAM REAKSI KADER

(Sikap Kader terhadap Budaya Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di
Lingkup Kabupaten Magelang)



Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan
tim penguji skripsi

الجمعة الاكبر الالاندوية
22 OCT 2018
Tanggal:

Dosen pembimbing Skripsi,

Ali Minanto, S. Sos., M.A.

NIDN 0510038001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTAI PENGUASA DALAM REAKSI KADER

(Sikap Kader terhadap Budaya Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di
Lingkup Kabupaten Magelang)

Disusun oleh

Farid Nur Hidayat

12321158
ISLAM

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 22 OCT 2018

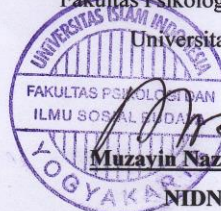
Dewan Penguji:

1. Ketua: Puji Rianto, S.I.P., M.A.
NIDN. 0503057601

2. Anggota: Ali Minanto, S. Sos., M.A.
NIDN. 0510038001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Muzayin Nazaruddin, S. Sos., MA
NIDN: 0516087901

HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farid Nur Hidayat

Nomor Mahasiswa : 12321158

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama masa penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah yang saya buat sebagai penulis dan peneliti, bukan merupakan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

Yang menyatakan



(Farid Nur Hidayat)

NIM 12321158

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di setiap masalah pasti ada jalan keluar (QS. Al-Insyirah ayat 5-7)

Urip iku urup, aja nganti adigang adigung adiguna, tetep eling lan waspada, tetep nyekel ilmu padi.

-

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Ibu dan Bapak, semoga lekas sehat seperti dulu

Seluruh keluarga besar Mulyadi

Terimakasih telah sabar menasihati dan mendidiki sampai saat ini.

Serta untuk seluruh pegiat organisasi, dan pencari ilmu pengetahuan khususnya sosial.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur *Alhamdulillah*, penulis haturkan kepada Allah SWT atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Partai Penguasa dalam Reaksi Kader (Sikap Kader terhadap Budaya Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di lingkup Kabupaten Magelang)”. Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang mengantarkan kita sebagai umatnya dari zaman Jahiliyah ke zaman yang sangat beradab sekarang ini. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi di Yaumul akhir kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (S1) pada program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan dan bantuan dari segala pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

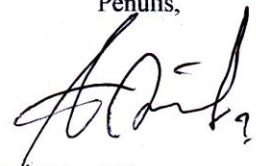
1. Bapak dan Ibu tercinta, Mulyadi dan Sugiyarti selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan dengan penuh kesabaran, keiklasan dan kasih sayang kepada penulis untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya sampai hari ini.
2. Empat saudara kandung penulis yang jauh lebih senior daripada penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan berupa apa pun itu.
3. Kakak-kakak ipar beserta keponakan penulis Ayla, Sani, Afiq, Baim, dan yang paling baru Jihan, terimakasih telah membuat penulis lebih semangat dalam belajar dan belajar.
4. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A. selaku Ketua program studi Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Indonesia, yang juga sebagai mentor dalam berorganisasi bagi penulis selama di kampus.
5. Bapak Ali Minanto, S. Sos., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan kritik, saran dan nasehat, hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Raden Narayana Mahendra Prasetya, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing akademik yang bersedia membimbing penulis selama masa perkuliahan yang panjang ini.
7. Bapak Budi Supriyanto, S.S, dan Bapak Sakir, S.Sos selaku pengurus DPC sekaligus anggota DPRD kabupaten Magelang dari PDI Perjuangan, Bapak Drs. Subagijo, M.Pd selaku kader partai sebagai badan pemenangan Pemilu, serta Bapak Suroso sebagai kader partai yang pernah menjabat sebagai struktural di Pengurus Anak Cabang, terimakasih banyak telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yang selalu menjadi tempat untuk bercerita, bersenang-senang dan bermimpi bersama; Mesum group, Aziz, Masri, Dewo, Fatur, Jaka, Bela, Laras, Caca, Afton, dan Dhita. Serta seluruh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan.
9. Teman-teman Himakom dan IMIKI, Je, Faldi, Gilang, dan semua yang satu periode dengan penulis dan berjuang bersama di dalam organisasi intra kampus.
10. Sahabat yang ada di Kartasura, Feri, Arif, Galih, Risna, Tyas, Futiha, Uyun, Karangtaruna IMM, sahabat PAC GP Ansor Kartasura, MPK Smanra, dan masih banyak teman lainnya disana yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Serta pihak-pihak lain yang memiliki kontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis tunjukan kepada pihak-pihak tersebut di atas dengan setulus hati. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan selalu diberikan karunia, rezeki dan rahmat-Nya. Amin Ya Rabb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis,



Farid Nur Hidayat

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI ORGANISASI	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
a. Penelitian Terdahulu	6
b. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	22
a. Jenis Penelitian	22
b. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
c. Narasumber/ Informan Penelitian	23
d. Pengumpulan Data.....	23
e. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KABUPATEN MAGELANG: DOMINASI TIGA PERIODE BANTENG MERAH	27
A. PDI Perjuangan dalam Mata Sejarah Hingga Saat Ini	27
B. Pegangan Kuat Menjalankan Organisasi PDI Perjuangan	30
C. PDI Perjuangan Dalam Lingkup DPC	37
D. Rekam Jejak Politik Praktis PDIP di Kabupaten Magelang	38
E. Kaderisasi dalam PDI Perjuangan Kabupaten Magelang	40
BAB III PDI PERJUANGAN DALAM BALUTAN BUDAYA ORGANISASI	43

1. Kontruksi Perseptual Kader Mengenai Partai	44
2. Partai Banteng dan Rasa Emosi Di Dalamnya	77
3. Partai dan Konatif dari Kader	82
BAB IV MEMBAHAS SIKAP KADER BANTENG ATAS BUDAYA ORGANISASI	85
.....	85
A. Budaya organisasi yang dirasakan oleh kader di lingkup DPC PDIP Kabupaten Magelang	85
1. Pembentukan Budaya Organisasi	85
2. Peran Budaya organisasi.....	90
B. Budaya Politik dan Proses Transformasi Nilai Partai	100
1. Budaya Politik dalam Partai	100
2. Kontruksi Budaya Politik dan Proses Transformasi Nilai Partai	103
C. Sikap yang Timbul atas Budaya Organisasi Partai Di Lingkup DPC PDIP Kabupaten Magelang	104
1. Norma-norma atau aturan.....	105
2. Nilai dan ideologi	106
3. Tokoh dan penokohan	107
4. Pengelolaan organisasi	108
5. Pengaderan organisasi	109
6. SDM Partai	110
7. Keputusan organisasi	112
8. Peran dan tugas kader	112
9. Komunikasi antar kader	113
10. Kenyamanan dalam berpartai	113
D. Catatan Kritis Peneliti dalam Budaya Politik Partai.....	114
BAB V KONKLUSI.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Keterbatasan Penelitian.....	117
C. Saran	117
1. Saran bagi pengelolaan kader dilingkup DPC	117
2. Saran bagi penelitian selanjutnya	118
DAFTAR PUSATAKA.....	119
LAMPIRAN	123

ABSTRAK

Farid Nur Hidayat, (12321158). *Partai Penguasa dalam Reaksi Kader (Sikap Kader terhadap Budaya Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lingkup Kabupaten Magelang)*. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Dalam kancah perpolitikan nasional, nama PDI Perjuangan menjadi sorotan utama untuk saat ini karena mampu memenangkan pemilu sampai ke pada tahap jabatan presiden. Kesuksesan tersebut juga diimbangi bayaknya kader yang menjabat dan berpengaruh di level daerah. Kader-kader yang dimiliki partai tidak jarang menjadi terkenal karena keputusan strategisnya, sikapnya, dan pola kepemimpinannya. Seperti Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, maupun Rismaharini di Surabaya, menjadi kader yang menonjol dan diidolai oleh publik wilayahnya masing-masing. Namun disisi lain, partai ini juga dipandang mempunyai kader yang banyak keluar seperti Bibit Waloyo dan Rustriningsih. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana budaya organisasi pada partai ini sehingga mampu menciptakan kader yang demikian?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sikap yang dipadukan dengan teori budaya organisasi. Budaya organisasi yang digunakan juga dipadukan dengan teori fungsi partai politik. Sudut pandang budaya organisasi yang digunakan adalah sudut pandang dari kader yang ada pada lingkup kabupaten Magelang. Kemudian setelah diketahui budaya organisasinya, sikap yang terwujud oleh kader menjadi bahasan utama pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang mandalam dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Pada penelitian ini kader yang menjadi informan dipilih secara acak namun mewakili antara kader struktural dan kader non struktural.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terwujudnya budaya organisasi di dalam partai terbentuk karena set asumsi, nilai dan perspektif yang di dominasi oleh pemimpin partai. Peran kader pada level bawah sangatlah minim. Kemudian sikap-sikap yang terbentuk kepada kader pada akhirnya selalu mendukung apapun keputusan dan mekanisme partai dengan landasan kuat adalah ideologi partai yang dipegang kader.

Kata Kunci: Partai, Budaya organisasi, Sikap, Kader.

ABSTRACT

Farid Nur Hidayat (12321158). The Ruling Party in the Reaction of Cadres (Cadres Standpoint toward the Culture of Indonesian Democratic Party of Struggle in the Scope of Magelang Regency). Thesis of Undergraduate. Communication Program, Faculty of Psychology and Socio Cultural Science, Islamic University of Indonesian. 2018

In the national political arena, the name of PDI Perjuangan become attention for now because it is win the election to the presidential stage. The success is also balanced by the cadres who served and influenced at the regional area. Party cadres are not infrequently known for their strategic decisions, attitudes, and leadership patterns. As Ganjar Pranowo in Central Java, as well as Rismaharini in Surabaya, became a prominent cadre and admired by the public of their respective territories. But on the other hand, this party is also seen to have a lot of cadres out like Bibit Waloyo and Rustriningsih. It's become a big question how an organization's culture in this party can create such cadres like this?

The theory that used in this research is standpoint theory combined with organizational culture theory. Organization's culture used is also combined with the theory of the function of political parties. The viewpoint of organizational culture here is the point of view of the existing cadres on the scope of Magelang district. Then after the organizational culture can be detected, the realization of the cadre's standpoint will be the main discussion in this study. The method in the research is descriptive qualitative. The data were collected from observation and interview. In this study the cadres who become informants were selected randomly but represented between structural cadres and non-structural cadres.

The results of this study reveal that the realization of organizational culture within the party is formed because the set of assumptions, values and perspectives are dominated by party leaders. The role of the cadre at the lower level is so minimum. Then the cadre's standpoint formed in the end, will always support any decision and party mechanism which is the strong foundation is the party ideology held by the cadre.

Keyword: Party, Organizational culture, Standpoint, Cadre.

BAB I

PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI ORGANISASI

Partai Politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Miriam Budiarjo

A. Latar Belakang

Partai politik sebagai organisasi tidak bisa lepas dari roda utama partai, yakni anggotanya. Anggota yang bisa disebut sebagai kader akan dapat bergerak dengan mekanisme yang ada dalam organisasi. Partai sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat banyak elemen termasuk anggota, menciptakan budaya tersendiri secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Brown (1998: 34) dikarenakan budaya organisasi cenderung diwujudkan oleh anggota organisasi. Uraian tersebut berarti menjadikan anggota objek dari budaya organisasi itu sendiri.

Anggota partai atau kader akan menjadi sorotan jika amanah yang dijalanannya melanggar aturan, begitu pun juga sebaliknya jika memiliki kelebihan dalam hal prestasi seperti kepemimpinan. Kader dan partai yang sedang disorot saat ini adalah kader dan partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini dikarenakan salah satu kader terbaiknya menjadi presiden terpilih Indonesia, dan beberapa kader lainnya menduduki jumlah kursi terbanyak daripada partai-partai pesaingnya. Keadaan tersebut membuat PDI Perjuangan menjadi sorotan utama karena menjadi penguasa saat ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memang tengah menjadi partai penguasa dengan memenangkan pemilu tahun 2014 lalu yakni dengan perolehan suara legislatif sebanyak 18,95% (Dani, 2014; Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Legislatif 2014; <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>, Diakses tanggal 14 Juni 2016). Tidak hanya menjadi partai yang mempunyai suara pemilih terbanyak, partai ini mendaulat Joko Widodo yang kala itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden RI. Pencalonan pun lancar dan alhasil Jokowi menang walaupun selisih tipis dengan kompetitornya: Prabowo.

Proses pencalonan Jokowi menjadi presiden RI, menuai pro kontra banyak pihak khususnya pemerintah yang ditinggalkannya, DKI Jakarta. Baru dua tahun menjabat menjadi Gubernur Ibu Kota, Jokowi diberi mandat oleh Megawati selaku Ketua Umum

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon presiden mutlak dari PDI-P. Seketika itu PDI-P, Megawati dan Jokowi menjadi buah bibir hangat oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya Jokowi yang jauh-jauh hari bersuara akan fokus menangani Jakarta menjadi lunak akan mandat tersebut. Jokowi dituding melanggar sumpah dan janji-janjinya.

Sedikit mengesampingkan pro kontra tersebut, PDI-P dengan Megawati Ketua Umumnya menjadi sebuah keunikan tersendiri di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Partai ini menjadi terlihat seperti partai yang menganut sistem oligarki walaupun menyematkan nama ‘demokrasi perjuangan’ di tengah namanya. Unsur keoligarkian partai ini terlihat pada keputusan dan mandat sang Ketua Umum yang menjadi mutlak dengan beralasan keinginan masyarakat (Tim Viva, 2014; Alasan Megawati Ajukan Jokowi Jadi Calon Presiden; <http://politik.news.viva.co.id/news/read/491509-alasan-megawati-ajukan-jokowi-jadi-calon-presiden>, diakses tanggal 14 Juni 2016). Padahal jika melihatnya dengan etika, terlihat Jokowi yang menjadi gubernur saat itu seperti menjadikan jabatan tersebut sebagai batu loncatan saja untuk menuju RI satu (Anton, 2014; Jabatan Gubernur Jadi Batu Loncatan Jokowi; <https://metropolitan.inilah.com/read/detail/2142161/jabatan-gubernur-jadi-batu-loncatan-jokowi>, diakses tanggal 14 Juli 2016). Dan akhirnya terbukti elektabilitas Jokowi setelah di Jakarta menjadi menaik tajam di urutan pertama.

Kemudian strategi dan manuver politik yang dilakukan oleh PDI-P pun dinilai cukup mulus setelah partai tersebut juga merangkul orang-orang penting di Indonesia dengan menonjolkan dan menjual nama Jokowi. Hasil dari strategi dan manuver politik tersebut membuahkan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang diisi partai-partai seperti PKB, Nasdem, PKPI, dan Hanura. Ditambah juga orang-orang non partai yang diusung sebagai cawapres, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan sebagai Ketua tim pemenangan Jokowi-JK. Disinilah terlihat kelihaihan strategi dan manuver politik PDI-P ditunjukkan. Kekuatan politik yang mengatasnamakan ideologi demokrasi semakin menunjukkan taringnya.

Terlepas dari cerita perjalanan Jokowi menjadi presiden, PDI-P memang dikenal sebagai partai yang sangat kuat dalam ideologi dan sistem politik yang dianutnya. Terbukti PDI-P memiliki kader-kader populer dalam hal kinerja yang sangat baik selain Jokowi yakni Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Rismaharini (Walikota Surabaya), sampai Pramono Anung yang dijuluki politisi sejati (anggota DPR RI yang sekarang diangkat menjadi Sekretaris Kabinet). Pengaderan partai ini dinilai cukup masif dari tingkat anak

ranting sampai tingkat pusat. Dan menjadi salah satu partai terkuat dan terbanyak dalam memperoleh kader baru.

Namun menjadi partai yang mempunyai kader berkompeten tidak lantas membuat partai ini kaya akan prestasi dan bebas masalah. Di luar lingkungan partai misalnya, partai ini disebut-sebut sebagai partai non islam. Hal ini dikarenakan para kader yang diajukan sebagai wakil rakyat sebagian besar beragama non islam (Voa Islam, 2014; Waspada 183 Caleg PDIP Non Muslim; <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/07/29775/waspada-183-caleg-pdip-non-muslim-banyak-dari-jil-dan-syiah/#sthash.EcxugtMs.Ifrs7daT.dpbs>, diakses tanggal 14 Juli 2016) . Isu-isu yang berbasis agama ini memanglah sangat berpengaruh dalam stabilisasi kepercayaan partai di hadapan rakyat. Apalagi di Indonesia yang terkenal sebagai negara muslim terbesar di dunia sangat sensitif terhadap isu-isu seperti ini. Selain masalah isu agama, partai ini dikenal sebagai partai terkorup di Indonesia pasca reformasi tahun 2002-2014. Seperti yang ditulis dalam portal berita JPNN (Jpnn, 2014; Demokrat: Kami Bukan Partai terkorup; <https://www.jpnn.com/news/demokrat-kami-bukan-partai-terkorup>, diakses tanggal 14 Juni 2016), PDIP menjadi jawara korupsi di Indonesia pada era tersebut. Padahal dalam kurun waktu tersebut, PDIP lebih banyak menjadi oposisi dibandingkan pro ke pemerintah.

Masalah selanjutnya pun adalah banyak kader hebat yang mampu dicetak partai ini, namun banyak juga yang keluar dari partai ini. Kita mengenal Kwik Kian Gie sebagai kader PDIP dan menjadi menteri keuangan di era presiden megawati. Namun pada akhirnya Kwik Kian Gie pun keluar dari partai ini dan terus mengkritisi secara kontra partai ini sampai sekarang. Ada lagi Bibit Waloyo yang seorang jenderal dan pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dan akhirnya di depak oleh partai ini. Dan juga Rustriningsih yang dijuluki srikandi masa kini dengan segudang kiprah kepemimpinannya yang pada akhirnya di keluarkan dari PDIP.

Keluar masuk kader di dalam partai memang dinilai cukup biasa, namun dalam hal ini PDIP menjadi sorotan utama. Bukan hanya nama biasa tapi juga nama orang-orang besar yang juga membuat nama PDIP tambah besar yang di depak. Banyak keluarnya kader partai mengingatkan peneliti terhadap salah satu ucapan Megawati ketika berpidato didalam lingkungan internal partai yang saat itu fase pencalonan Jokowi menjadi calon presiden. Seperti yang ditulis di portal CNN Indonesia (Aulia, 2015; Megawati: Jika Tak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!; <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150411145447-32-45908/megawati-jika-tak-mau->

disebut-petugas-partai-keluar/, diakses tanggal 14 Juni 2016), megawati mengemukakan bahwa ”jika tidak mau disebut sebagai petugas partai, keluar!”. Ketegasan ucapan megawati tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih banyak dari partai ini khususnya budaya organisasi yang dianut dalam mempengaruhi sikap para kadernya.

Budaya organisasi dominan yang dapat dipengaruhi dari salah satunya ideologi yang dianut partai ini, yakni marhaenisme menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti dalam partai ini. Mengingat ideologi ini adalah sebuah ideologi turunan yang dibawa oleh sang Ayah dari Ketua Umum PDI-P yakni Bung Karno (Soekarno). Marhaenisme yang mengambil sebagian besar ideologi dasar dari Marxisme namun tetap menyesuaikan dengan kondisi kehidupan di Indonesia, membuat partai ini selalu bersuara lantang akan keadaan “wong cilik”. Kelantangan suara tersebut tidak selaras dengan beberapa perilaku kader yang korupsi, bahkan menentang dengan keluar atau dikeluarkan dari partai. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti oleh peneliti, pasalnya ideologi yang cukup populer yang diangkat dari presiden pertama tidak mampu maksimal diterapkan khususnya di lingkungan partai sendiri dalam bentuk budaya organisasi.

Pelaksanaan komunikasi dan transformasi berbagai hal terkait partai yang akhirnya menjadi budaya organisasi yang berada di internal partai patut ditinjau lebih dalam. Hal ini dikarenakan tidak semua kader yang bergabung dengan sadar menjadi selaras dan melebur dengan budaya organisasi yang dimiliki. Alasan inilah yang menjadikan peneliti ingin meneliti sikap dari kader dari segi budaya organisasi yang telah dan sekarang dianut. Peneliti pun memilih jangkauan kader di lingkup Dewan Pengurus Cabang (DPC) Magelang. Karena peneliti menilai bahwa ditingkat ini dan di wilayah ini partai PDIP sangat kuat dalam dukungan masa beserta kuat pengaderannya. Hal ini menjadi tantangan menarik bagi peneliti untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai budaya organisasi yang diberlakukan.

Dari kegelisahan inilah peneliti berencana untuk membuat penelitian guna mengetahui budaya organisasi seperti apa yang ada dalam partai banteng ini. Namun yang lebih utama adalah bagaimana setiap kader untuk menyikapi budaya organisasi yang di dalamnya baik itu norma maupun ideologi yang diangkat atau bahkan pola komunikasi yang dianut partai tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut untuk melihat aspek pentingnya budaya organisasi partai yang mempengaruhi kadernya dalam bersikap di lingkungan partai maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan budaya organisasi yang dibangun dalam partai PDIP khususnya di DPC Kabupaten Magelang. Adapun rumusan masalah berikut antara lain:

1. Bagaimana proses terbentuknya budaya organisasi partai yang dirasakan dan dialami oleh kader PDI-P Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana kader PDI-P di DPC kabupaten Magelang baik yang ada dalam struktural dan non-struktural dalam menyikapi budaya organisasi yang ada di dalam parpol PDI-P khususnya lingkup Kabupaten Magelang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya budaya organisasi partai yang dirasakan dan dialami oleh kader PDI-P Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Magelang .
2. Untuk mengetahui sikap dari para kader pada tingkatan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Magelang terhadap budaya organisasi partai PDI-P.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dan pengembangan pengetahuan dalam bidang sosial politik khususnya komunikasi dan organisasi politik. Selain itu juga diharapkan untuk menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan datang serta juga sebagai tambahan referensi dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian komunikasi, budaya organisasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kajian budaya organisasi.

E. Tinjauan Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul Penerapan Budaya organisasi (studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago Bandung), oleh Arcaya Yudha, Herbasuki Nurcahyanto, Nina Widowati

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai budaya organisasi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Dago Bandung. Dengan memilih metode kualitatif deskriptif yang didapat dari data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu asisten manajer operasional, funding officer, petugas TKK dan layanan, dan on the job training auditor.

Teori yang menjadi acuan penelitian ini adalah nilai-nilai budaya menurut Moeljono yakni integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan dan penghargaan pada sumberdaya manusia. Yang akhirnya menjadikan hasil penelitian menjawab teori tersebut satu persatu. Dimulai dari integritas bahwa hasil penelitian menyebutkan setiap pekerja menerapkan nilai integritas dengan memberikan dedikasi yang tinggi kepada BRI cabang Dago. Namun terdapat dedikasi yang berbeda pada pekerja kontrak karena pegawai kontrak hanya menjalankan masa kerjanya sesuai kontrak (1-2 tahun). Hal ini tidak mempengaruhi kinerja BRI secara langsung, tetapi menyebabkan nilai-nilai budaya organisasi yang diusung tidak dapat dipahami secara mendalam. Ini terbukti dari pegawai kontrak yang tidak begitu memahami produk-produk BRI karena masa pelatihan yang singkat sehingga sedikit mengurangi layanan yang prima terhadap nasabah.

Kemudian hasil penelitian menjelaskan nilai profesionalisme setiap pekerja. Dimana hasilnya menjelaskan bahwa setiap pekerja menjunjung tinggi nilai profesionalisme sesuai dengan ketentuan layanan dan sesuai dengan wewenang dari jabatan/tugas mereka masing-masing.

Kepuasan nasabah merupakan fokus dari pelayanan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Dago sehingga seluruh manajemen dan pekerja berupaya untuk memberikan pelayanan setulus hati. Dalam nilai kepuasan nasabah baik dari sisi nasabah eksternal maupun nasabah internal dinilai sudah cukup baik. Dalam nilai keteladananpun dinilai sangat baik, karena tidak adanya perilaku menyimpang dari seluruh pekerja yang ada.

Penghargaan yang diberikan terhadap sumber daya manusia di Bank BRI cabang Dago berdasarkan prestasi dari masa kerja yang dapat mempengaruhi gaji, bonus, promosi, dan insentif. Selain itu bagi pekerja yang melakukan tindakan indisipliner akan dikenakan sanksi yang tegas.

2. Penelitian dengan judul Kajian Budaya Organisasi Bina Nusantara Univeristy dalam upaya menuju A World Class University oleh Amia Luthfia, Agus Wasita dan Rosidah Syaukat

Penelitian dengan judul "*Kajian Budaya Organisasi Bina Nusantara Univeristy dalam upaya menuju A World Class University*". Jurusan Marketing Communication, Universitas Bina Nusantara. Yang dipublikasikan pada website marcomm.binus.ac.id pada tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pola budaya Bina Nusantara University secara mendetil dan komprehensif, menganalisis budaya organisasi Bina Nusantara University berdasarkan karakteristik budaya organisasi modern, serta memperoleh gambaran tentang apa dan bagaimana kekuatan dan kelemahan budaya organisasi Bina Nusantara University dalam upaya menuju World Class university. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori budaya organisasi modern oleh Pacanowsky dan O'donnell-Trujillo serta elemen dan dimensi budaya organisasi yang dikemukakan oleh Schein.

Kemudian diperoleh hasil penelitian yang berupa kekuatan dan kelemahan budaya organisasi binus dan hasil secara keseluruhan yang berjumlah tujuh poin. Kekuatan yang dimiliki Binus antara lain :

1. Teknologi informasi dan komunikasi yang sangat baik.
2. Pengelolaan organisasi yang terstruktur dan tersistem dengan baik.
3. Memiliki "hero" dan "penjaga budaya".
4. Budaya operasional yang sangat prosedural dan mendetil sangat kuat.
5. Sangat berorientasi hasil dan target — target dan sasaran sangat jelas dan terukur.
6. Orang-orang didorong untuk selalu mencapai target, berprestasi dan solutif.
7. Suasana kerja dan berinteraksi yang nyaman.
8. Kekeluargaan, hampir tidak ada jarak dan status yang menghalangi untuk berinteraksi dan berkomunikasi.
9. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, etika, dedikasi dan loyalitas.

10. Komunikasi yang terbuka.
11. Aturan dan pelaksanaan yang sejalan.
12. Semangat entrepreneurship pada mahasiswa cukup kuat.

Kelemahan :

1. Prestasi binusian masih bertujuan untuk kenaikan gaji dan memperoleh imbalan.
2. Ikatan *peer group* (kubu-kubu) yang sangat kuat pada mahasiswa dapat menghambat kolaborasi yang lebih luas walaupun untuk tujuan belajar dan berprestasi.
3. Beban kerja administratif yang cukup tinggi.
4. Mendukung *team work* tapi sistem imbalan sangat individualistik.
5. Ukuran-ukuran keberhasilan masih berdasarkan *number-oriented* dan *number-driven*, masih minim penilaian keberhasilan pada hal-hal yang *intangible / soft area*.
6. Budaya disiplin yang belum mengakar – bila tidak ditingkatkan akan menghambat peningkatan kualitas SDM dan organisasi.
7. Dominan ritual dan seremonial formal.
8. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang tidak sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan jumlah mahasiswa.

Poin penting hasil penelitian :

1. Bina Nusantara University telah membangun pondasi yang cukup baik dalam upayanya menuju “A World Class University”, terutama pada pembangunan sistem operasional dan budaya kerja yang baik.
2. Bina Nusantara University memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat baik untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang berfokus pada mutu sekaligus sebagai pilar utama dalam menjalankan pengelolaan universitas yang berasas sentralisasi operasional dan desentralisasi akademis.
3. Pengelolaan organisasi yang terstruktur dan tersistem dengan baik ditambah budaya operasional yang sangat prosedural dan mendetil, semakin menguatkan manajemen dalam rangka proses perencanaan dan pengambilan keputusan disetiap lini organisasi.
4. Suasana kerja yang menjunjung tinggi integritas , kejujuran, etika, penuh dedikasi dan loyalitas ditambah iklim komunikasi yang nyaman, serta rasa kekeluargaan yang tinggi dimana seluruh anggota organisasi sengaja menghilangkan sekat, jarak dan

status antara mahasiswa dengan dosen, pimpinan dengan staff membuat komunikasi menjadi terbuka untuk menunjang manajemen organisasi yang transparan.

5. Organisasi senantiasa berorientasi kepada hasil dan target. Dimana target dan sasaran ditentukan dengan sangat jelas dan terukur. Setiap anggota organisasi didorong untuk selalu mencapai target, berinovasi dan solutif dalam rangka untuk terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
6. Bina Nusantara University memiliki “hero” dan “penjaga budaya” yang menjadi kekuatan dan pilar untuk keberlangsungan nilai-nilai budaya yang positif untuk tetap ada dan mengakar pada setiap anggota organisasi.
7. Sebagai institusi pendidikan tinggi Bina Nusantara University tidak cukup hanya memiliki ke tujuh karakteristik budaya organisasi modern *innovation and risk taking, outcome orientation, attention to detail, people orientation, team orientation, aggressiveness* dan *stability*. Tujuh karakteristik itu adalah karakteristik standar yang seharusnya dimiliki oleh semua tipe organisasi modern. Oleh karena itu sebagai institusi pendidikan, Bina Nusantara University sebaiknya memiliki tambahan karakteristik yaitu : (1) *Role Model*; (2) *Spirit*; (3) *Character Building*.

3. Penelitian dengan judul *Peran Budaya Organisasi terhadap strategi pemasaran dalam upaya mencapai keberhasilan perusahaan (Studi di Margaria Group Yogyakarta)* oleh Cica Nayati

Penelitian Skripsi dengan judul “*Peran Budaya Organisasi terhadap strategi pemasaran dalam upaya mencapai keberhasilan perusahaan (Studi di Margaria Group Yogyakarta)*”, Jurusan manajemen dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2012.

Penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana peran budaya organisasi di Margaria group guna mencapai keberhasilan perusahaan, kemudian juga untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran margaria group guna mencapai keberhasilan perusahaan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap strategi pemasaran di Margaria Group Yogyakarta. Tujuan ini kemudian dijawab dengan pendekatan teori dimensi budaya menurut Robbins yang menyatakan bahwa inisiatif individu, toleransi risiko, arahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi konflik dan pola komunikasi masuk dalam dimensi budaya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran budaya organisasi terhadap strategi pemasaran adalah sebagai penopang bagi strategi pemasaran. Hal ini dibuktikan bahwa semua dimensi budaya memiliki peran terhadap strategi pemasaran. Seperti arahan pimpinan, dukungan perusahaan, kontrol pimpinan dan pola komunikasi. Semua elemen tersebut berperan sebagai pengendali kebijakan pemasaran perusahaan secara keseluruhan. Elemen lain seperti integrasi juga memiliki peran. Integrasi adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam melakukan koordinasi seluruh unit menjadi satu kesatuan gerak. Integrasi ini berperan menyelaraskan produk yang dihasilkan, menentukan harga jual produk dan mempromosikannya. Inisiatif individu berperan mengembangkan produk yang dihasilkan margaria dan bagaimana membuat produk tersebut laku di pasaran. Identitas mempunyai peran meneguhkan status perusahaan atau branding lewat produk yang dihasilkan dan bagaimana citra perusahaan juga dibangun lewat berpromosi. Sistem imbalan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan penjualan yang ditargetkan perusahaan. Inovasi berperan terhadap kreasi peningkatan daya tarik produk yang dihasilkan. Sedangkan toleransi konflik berguna untuk menampung ketidakpuasan pelanggan dan dapat meningkatkan citra baik perusahaan.

4. Penelitian *Budaya Organisasi (Studi Eksplorasi pada Universitas Muhammadiyah Semarang* oleh Triyono

Penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Value Aded, Volume 9, Universitas Muhammadiyah Semarang berjudul “*Budaya Organisasi (Studi Eksplorasi pada Universitas Muhammadiyah Semarang)*” tahun 2012. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana UNIMUS (Universitas Muhammadiyah Semarang) tergambarkan budaya organisasinya guna meningkatkan kemampuan mengembangkan diri sebagai perguruan tinggi berbasis Muhammadiyah. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah budaya organisasi UNIMUS mampu menyelesaikan beragamnya nilai identitas individu, juga institusi (semua fakultas dan unit) yang ada.

Dalam hasil penelitian ini, peneliti menguraikan gambaran budaya organisasi UNIMUS menggunakan pendekatan budaya Islam dan budaya setempat. Mulai dari pengamatan mengenai artefak sampai dengan observasi wawancara mengenai kepemimpinan (Islam), praktek manajemen SDM, cerita dan legenda hingga tradisi dan ritual. Semuanya seakan diceritakan kembali layaknya buku sejarah namun dikemas secara

rapi dan ilmiah layaknya penelitian kualitatif pada umumnya. Selanjutnya semua aspek yang terkandung diatas dikorelasikan dengan terbangunnya sebuah budaya organisasi di UNIMUS. Aspek-aspek tersebut diuraikan secara terperinci seperti halnya judul penelitian ini sebagai studi explorasi untuk mengetahui aspek-aspek yang memengaruhi atau membentuk budaya organisasi UNIMUS, yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kepemimpinan
 - Nilai dan keyakinan kepemimpinan
 - Kekaguman dan keteladanan
 - Prestasi dan tinggalkan yang ada
 - Saat pimpinan menghadapi krisis
2. Norma dan Praktik Manajemen
 - Rekrutmen
 - Karir dan motivasi
 - Syariat Islam dan ketaatan
 - Tugas Tri Dharma dan bimbingan etika
 - Pelayanan dosen dan karyawan
 - Pemilihan pimpinan
 - Kesejahteraan
 - Kehadiran dan kepuasan
 - Alumni
3. Cerita dan Legenda
 - Peran heroik dan kebesaran UNIMUS
 - Kesalahan yang dibuat
 - Jasa dan kesan
4. Tradisi dan ritual
 - Tradisi tahunan
 - Ritual agama
5. Simbol-simbol
 - Pakaian seragam dan denah kantor
 - Struktur organisasi dan logo

Semua aspek tersebutlah yang telah menggambarkan budaya organisasi di UNIMUS secara keseluruhan. Sekaligus juga menjawab kebragamannya nilai identitas individu, juga intitusi (fakultas dan unit) yang ada.

5. Penelitian dengan judul Budaya Organisasi Holcim Indonesia Tuban project (Studi Budaya Organisasi melalui communication performances) oleh Febriani Adelia Sabita

Penelitian yang dipublikasikan di journal UNAIR volume 3 dengan judul “*Budaya Organisasi Holcim Indonesia Tuban project (Studi Budaya Organisasi melalui communication performances)*” pada tahun 2014. Penelitian ini mengeksplorasi budaya organisasi Holcim Indonesia Tuban Project, yang dibentuk dan dipertunjukkan melalui interaksi anggota organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnograf. Dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan observasi langsung, interview, dan participant observation. Hasil dari penelitian ini pun adalah terdapat dinamika budaya organisasi, yakni sentralisasi pelaksanaan pekerjaan proyek oleh managers atau leaders sebagai cara yang paling memadai untuk menjalankan operasi Holcim Indonesia Tuban Project sebagai sebuah organisasi. Sebab, ideologi inilah yang pada akhirnya mendominasi pada anggota-anggota Holcim Indonesia Urban Project.

Hal menarik dalam penelitian ini yaitu adanya kemungkinan terwujudnya budaya organisasi yang seragam atau sesuai dengan yang ditetapkan manajemen. Alasan pertama adalah adanya konsistensi pesan budaya organisasi *care-delivery-partnership* yang muncul tidak hanya dalam media sosialisasi budaya organisasi, namun juga pada bentuk artefak organisasi seperti desain fisik kantor, kebijakan perusahaan, prosedur melakukan pekerjaan, bahkan pada cara managers berinteraksi dengan karyawan, secara disadari maupun tidak disadari. Alasan yang kedua, karena karyawan Holcim Indonesia Tuban Project merupakan orang Indonesia atau lokal, yang pada latar belakang sosiokultur mereka, bekerja *narratives/myth* untuk mensuperiorkan ekspatriat, dan para managers Holcim Indonesia Tuban Project merupakan ekspatriats. Sehingga karyawan Holcim Indonesia Tuban Project yang merupakan orang Indonesia atau lokal memberikan more power pada para managers tersebut. Power tersebut dapat mempengaruhi karyawan untuk memberi perhatian pada nilai budaya *care-delivery-partnership*.

Dari lima tinjauan pustaka yang peneliti pilih, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan lima tinjauan pustaka tersebut adalah peneliti ingin mengetahui budaya organisasi yang terbangun pada organisasi politik. Otomatis pokok bahasan yang diangkat akan lebih intim dan megkolaborasikan antara teori budaya organisasi yang dipadukan dengan teori partai politik yang kemudian dibungkus dengan teori sikap yang berasal dari kader. Kemudian dalam sudut pandang lain, peneliti ingin mengetahui budaya organisasi yang ada di lingkungan organisasi partai khususnya dengan dua sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang kader yang sedang duduk di dalam struktural dan sudut pandang kader yang berada di luar struktural.

b. Kerangka Teori

1. Teori Sikap

Dalam proses pencarian teori sikap, peneliti menemukan banyak sekali pandangan tentang sikap terutama pada perspektif psikologi. Salah satunya pandangan Riger tentang sikap yang *mainstream* dipakai oleh praktisi maupun akademisi komunikasi. Pemaparan yang dikutip dalam buku Pengantar Teori Komunikasi sebagai berikut:

Teori sikap (*standpoint theory-ST*) memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Teori ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang-orang yang mengakui bahwa individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri dan bahwa perspektif individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenal pengalaman mereka (Riger dalam Richard West dan Lynn H.Turner, 2008: 178).

Dalam pandangan tentang definisi sikap, La Pierre (dalam Azwar, 2013: 6) memaparkan bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon sebagai stimuli sosial yang telah terkondisikan. Sarnoff (dalam Sarwono, 2000: 68-69) lebih menggambarkan dengan ringkas bahwa sikap sebagai kesiediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap obyek-obyek tertentu.

Sebenarnya masih banyak definisi sikap menurut para ahli khususnya dibidang psikologi. Namun dari dua definisi diatas dirasa sudah cukup dan mampu disimpulkan bahwa sikap merupakan sebuah reaksi atau respon terhadap obyek yang sekiranya interest bagi seseorang.

Sikap terbentuk dalam tiga komponen struktur. Ketiga komponen itu adalah komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif dengan uraian sebagai berikut (Robbins, 2007: 22):

1. Komponen kognitif atau disebut juga komponen perseptual, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, atau persepsi pendapat, kepercayaan. Komponen ini menekankan pada proses berfikir yang mengandalkan rasionalitas dan logika. Nilai penting dari kognitif adalah kepercayaan yang bersifat penilaian yang dilakukan seseorang terhadap suatu obyek. Kepercayaan yang dilandasi berbagai aspek tersebut berujung pada sebuah penilaian baik atau buruk terhadap suatu objek yang sedang dibicarakan.
2. Komponen afektif atau bisa disebut komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang bisa disebut sebagai hal positif dan rasa tidak senang dengan hal negatif.
3. Komponen konatif atau seccara mudah disebut komponen perilaku, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku atas dasar obyek yang diangkat. Misalnya ramah, hangat, agresif, tidak ramah dan apatis, itu merupakan buah dari perilaku yang dilandasi dari obyek sikap. Tindakan-tindakan lain dapat juga diukur untuk menilai seberapa pengaruh dari obyek sikap terhadap seseorang.

Pembentukan sikap dari seseorang membutuhkan waktu yang tidak instan. Biasanya dimulai dari sebuah proses belajar dalam sebuah tatanan suatu obyek sikap. Seseorang dapat bersikap karena mampu menghubungkan antara satu titik peristiwa, pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan dengan obyek tertentu seperti orang, benda, dan peristiwa. Pada akhirnya proses menghubungkan antara satu dengan lainnya menjadi sebuah hasil dari pembentukan sikap terhadap suatu obyek. Azwar menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman pribadi

Pengalaman yang dialami secara langsung oleh seseorang, berperan penting dalam pembentukan stimulus sosial. Hal ini dilatarbelakangi adanya tanggapan terhadap suatu pengalaman dan menimbulkan terbentuknya sikap. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Orang-orang yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain.
3. Pengaruh Kebudayaan
Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita terutama kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan. Kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pula-lah yang memberi corak pengalaman-pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakatnya. Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat memudarkan dominansi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.
4. Media massa
Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Sebagai tugas pokoknya dalam menyampaikan informasi, media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, bila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah sikap. Walaupun pengaruh media massa tidak sebesar pengaruh interaksi individual secara langsung, namun dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan media massa tidak kecil artinya.
5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama
Kedua lembaga di atas, mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta ajarannya. Karena konsep moral dan ajaran agama sangat membentuk sistem kepercayaan maka tidak mengherankan kalau konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap sesuatu hal.
6. Pengaruh faktor emosional
Terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap ini dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang. Akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang dapat bertahan lama. (Azwar, 2013: 30)

2. Budaya Organisasi

Menurut pandangan sosiologi, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia lain. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia selalu membutuhkan orang lain agar kebutuhannya dapat terpenuhi maka individu maupun kelompok membentuk suatu organisasi. Weber mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem kegiatan interpersonal yang bertujuan untuk mengorganisasikan tugas individu. Dimana perbedaan antara organisasi dan kelompok terletak pada birokrasi. Organisasi memiliki sistem yang mengatur dirinya yaitu birokrasi namun tidak demikian halnya dengan kelompok yang bukan organisasi (Morrison, 2013: 390).

Dalam kajian lain, Weber juga menjelaskan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka praktek-praktek dari fungsi yang siap melayani untuk praktek mereka (Thoha, 1998: 23). Tidak berbeda dengan budaya yang mempengaruhi masyarakat, budaya juga mempengaruhi organisasi. Budaya organisasi juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi.

Budaya yang ada dalam sebuah organisasi dapat menciptakan iklim yang mampu mendorong anggota di dalamnya untuk bergerak sesuai kehendak organisasi. Budaya yang kuat akan menimbulkan sikap positif maupun negatif bagi anggotanya. Dengan demikian budaya organisasi dipahami sebagai perangkat nilai (value), keyakinan (belief's), asumsi atau norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diakui oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi (Sutrisno, 2010: 2). Begitu juga organisasi politik dalam bentuk peraturan tertentu juga memiliki budaya tersendiri.

Schein menjelaskan budaya dalam organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan dan dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan atau diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut (dalam Sanjaya, 2015; Pengertian Budaya Organisasi Definisi Menurut Para Ahli, Fungsi dan Karakteristik; <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-budaya-organisasi-definisi.html>,

diakses 18 April 2018). Budaya organisasi menjalankan sejumlah fungsi didalam suatu organisasi. Adapun fungsi budaya organisasi tersebut antara lain (Sutrisno, 2010: 10):

- a) Budaya mempunyai peran menerapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain.
- b) Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri pribadi seseorang.
- c) Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial.

Suatu organisasi selalu mempunyai budayanya sendiri yang tentu berbeda dengan organisasi lain. Budaya organisasi akan membentuk sikap dari para anggota organisasi dalam mengerjakan tugasnya. Menurut Wirawan (2007: 7) “Setiap organisasi mempunyai budaya organisasi yang mempengaruhi semua aspek organisasi dan perilaku anggotanya secara individual dan kelompok”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ada pengaruh dari budaya organisasi terhadap perilaku anggota dalam organisasi.

Menurut Wirawan (2007: 10) menjelaskan bahwa budaya organisasi didefinisikan sebagai norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi, melayani para masyarakat dan mencapai tujuan organisasi.

Budaya dalam suatu organisasi harus dibentuk untuk meningkatkan potensi dalam suatu organisasi. Budaya organisasi dapat dibentuk dengan cara menyebarkan nilai-nilai dan norma organisasi, meningkatkan interaksi dalam anggota organisasi, serta membentuk kebiasaan atau rutinitas organisasi. (Robet dalam Wirawan 2007: 127).

Pada dasarnya untuk membentuk budaya organisasi yang kuat memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Dalam perjalanannya sebuah organisasi mengalami pasang surut, dan menerapkan budaya organisasi yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Budaya bisa dilihat sebagai suatu hal yang mengelilingi kehidupan orang banyak dari hari ke hari, bisa direkayasa dan dibentuk. Terbentuknya budaya organisasi dimulai dari tahap pembentukan ide organisasi meski belum menjadi realitas sosial dan belum berwujud secara fisik, tahap ini merupakan titik awal (embrio) pembentukan budaya organisasi (Sobirin, 2007: 220).

Menurut Schein dalam Sobirin (2007: 220), mengatakan bahwa pembentukan budaya organisasi tidak dapat dipisahkan dari peran para pendiri atau pimpinan organisasi. Prosesnya mengikuti alur sebagai berikut:

1. Para pendiri atau pimpinan lainnya membawa serta satu set asumsi dasar, nilai, perspektif, artefak ke dalam organisasi dan menamakannya kepada para anggota dengan berbagai cara sosialisasi yang disesuaikan.
2. Budaya muncul ketika para anggota organisasi berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah-masalah pokok organisasi yakni masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal.
3. Secara perorangan, masing-masing anggota organisasi boleh menjadi sebagai pencipta budaya baru (cultur creator) dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan individu seperti persoalan identitas diri, control, dan pemenuhan kebutuhan serta bagaimana agar bisa diterima oleh lingkungan organisasi yang diajarkan kepada generasi penerus.

Setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda, tergantung dari apa yang dianut oleh pemimpin ketika membentuk organisasi tersebut. Budaya dapat bersifat kuat atau lemah, selain itu juga ada budaya yang salah dan sulit diubah. Semua itu tergantung pada komitmen yang ingin dicapai dalam mendirikan organisasi. Budaya organisasi banyak berpengaruh pada pola perilaku, nilai-nilai organisasi (masalah baik-buruk, masalah etika), suasana organisasi (bagaimana orang merasa dan beraksi), dan gaya kepemimpinan (dalam melakukan sosialisasi dan wewenang).

Budaya yang ada dalam suatu organisasi menjalankan sejumlah peran (Robbins, 2007: 218). Pertama, budaya sebagai suatu peran penyetap tapal batas, dimana budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan organisasi lain. Kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan organisasi.

Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk anggota organisasi yang berada dalam hirarki organisasi, misalnya bagi organisasi yang didominasi oleh pendiri, maka budaya organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi wahana untuk mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada anggota lainnya. Jika budaya terbentuk dari norma-norma moral, sosial dan perilaku dari sebuah organisasi yang didasarkan pada keyakinan, tindak-tanduk, dan

prioritas anggota-anggotanya, maka pemimpin secara devinitife adalah anggota dan banyak mempengaruhi perilaku-perilaku dengan contoh ketulusan anggota organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya memiliki visi dan misi yang jelas, wawasan yang luas, pandangan yang jelas terhadap situasi yang dihadapi, dengan demikian dapat membuat keputusan yang didasari oleh keinginan untuk mencapai tujuan bersama organisasi (Riani, 2011: 44).

Budaya organisasi mempunyai dua tingkatan budaya berbeda yang dapat ditinjau dari sisi kejelasan dan ketahanan terhadap perubahan. Pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat lebih dalam dan kurang terlihat, budaya merujuk kepada nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dalam kelompok dan cenderung bertahan sepanjang waktu bahkan meskipun anggota kelompok sudah berubah. Budaya organisasi mempunyai peran penting dalam organisasi dan mendapat perhatian khusus dalam kajian budaya organisasi, Wirawan (2007: 35) mengemukakan peran budaya organisasi antara lain:

1. Kesadaran identitas organisasi. Budaya organisasi menggambarkan identitas yang berbeda dari organisasi lain. Nilai-nilai dalam suatu organisasi dijunjung tinggi oleh setiap anggota dan organisasi.
2. Menyatukan organisasi. Budaya organisasi merupakan lem normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengoordinasi anggota organisasi. Norma, nilai-nilai, dan kode etik organisasi menyatukan pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Isi budaya organisasi mengontrol apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi.
3. Reduksi konflik. Pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi yang sama akan memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik di antara anggota organisasi. Jika terjadi perbedaan atau konflik, budaya organisasi mempunyai cara untuk menyelesaikannya.
4. Komitmen kepada organisasi dan kelompok. Budaya organisasi bukan hanya menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerja. Budaya organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya.
5. Reduksi ketidakpastian. Budaya organisasi menentukan ke mana arah, apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

6. Menciptakan konsistensi. Budaya organisasi menciptakan konsistensi berpikir, berperilaku, dan merespons lingkungan organisasi. Budaya organisasi memberikan peraturan, panduan, prosedur, serta pola memprouksi dan melayani masyarakat, pelanggan, atau klien organisasi.
7. Motivasi. Budaya organisasi merupakan energi sosial yang membuat anggota organisasi untuk bertindak. Budaya organisasi memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Kinerja anggota. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi anggota.
9. Sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam persaingan.

3. Partai Politik sebagai Organisasi

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok teroganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiarjo 2008: 160). Menurut David E. Apter, partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar-menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik disatu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri di atas berbagai kepentingan publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu bagian dari permainan partai (Efriza, 2012: 214).

Partai politik yang merupakan suatu wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara secara sederhana bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai ideologi tertentu. Partai politik sebagai suatu organisasi pastinya memiliki fungsi yang sangat berperan dari eksistensi partai itu sendiri. Dalam buku yang berjudul partisipasi dan partai politik sebagai bunga rampai, Miriam Budiarjo menjelaskan fungsi partai politik dapat dibagi menjadi enam antara lain (Efriza, 2012: 233) :

1. Sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan parpol dalam arus ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah.
2. Artikulasi kepentingan. Di dalam suatu masyarakat modern , apalagi yang luas wilayahnya, pendapatan dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan disalurkan, pendapat dan sikap yang bermacam-macam itu perlu diolah dan dirumuskan. Proses perumusan kepentingan-kepentingan ini dinamakan artikulasi kepentingan.
3. Agregasi kepentingan. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabung menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan dalam suatu sistem politik merupakan input yang disampaikan kepada instansi yang berwenang membuat keputusan yang mengikat. Dalam hal ini adalah dewan perwakilan rakyat, pemerintah dan sebagainya, untuk diolah atau dikonversi menjadi output dalam bentuk UU, kebijakan umum, dll. Dan hal ini dikenal sebagai program partai.
4. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara, partai, atau organisasi. Proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada. Proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
5. Rekrutmen politik. Proses melalui dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
6. Pengatur konflik. Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ini berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial, ekonomi dan agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-perikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan parpol, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-

akibat negatifnya seminimal mungkin. Namun dipihak lain, dilihat seringkali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada.

Partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang telah terarah fungsi dan tujuannya idealnya memiliki kemampuan organisasional partai politik. Kemampuan organisasional menurut Gibson, merupakan gabungan dari struktur organisasi, perilaku perorangan dan kelompok dalam organisasi, serta proses di dalamnya, yakni bagaimana komunikasi dan pengambilan keputusan dijalankan, sehingga membuat organisasi itu bergerak dan hidup. Sedikit berbeda menurut Albert K. Wickesberg, menurutnya kemampuan organisasional itu sangat bergantung pada tujuan, kegiatan, langkah-langkah mengatasi lingkungan, kecakapan teknis, kebutuhan sosial anggotanya, serta luasnya organisasional itu sendiri (Efriza, 2012: 238).

Kemampuan organisasi politik telah dipaparkan diatas dari berbagai pandangan. Yang apabila pandangan-pandangan di atas dihubungkan dengan hakikat partai politik (sebagai organisasi sosial praktik), fungsi dan tujuan parpol, maka kemampuan organisasi partai politik merupakan integrasi dari struktur organisasi suatu partai politik (termasuk aturan dasar, AD/ART-nya). Nampak bahwa kemampuan organisasional sebuah partai dari sebuah kesinambungan kerja dalam tubuh partai yang menyangkut beberapa elemen yang dipaparkan sebelumnya, yang berdampak positif pada eksistensinya terlihat dari luar partai politik.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Meleong, 2007: 201). Penelitian ini mempunyai lima macam karakter, yaitu :

1. Penelitian sebagai instrumen utama langsung mendatangi sumber data.
2. Data yang dikumpulkan cenderung berbentuk kata-kata dari pada angka-angka
3. Penelitian ini lebih menekankan proses, bukan semata-mata pada hasil
4. Peneliti melakukan analisis induktif cenderung mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati,
5. Kedekatan peneliti dengan responden sangat penting dalam penelitian.

Sesuai dengan karakter tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendekati informasi selengkap mungkin mengenai informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan (anggota organisasi). Pendekatan kualitatif memfokuskan diri lebih pada proses dan makna bagaimana manusia memberi makna pada proses kehidupannya serta menuntut untuk bertindak sebagai instrument utama penelitian.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2016 dengan lokasi penelitian di tempat atau kedudukan kantor Dewan Pengurus Cabang PDI-P Kabupaten Magelang, dan di rumah masing-masing para kader yang menjadi objek penelitian.

c. Narasumber/ Informan Penelitian

Teknik yang dipakai dalam memilih informan adalah dengan menggunakan kriteria untuk calon informan. Kriteria yang akan digunakan adalah antara lain dari keanggotaan partai atau menjadi kader, lama keanggotaan, jabatan keanggotaan di dalam partai dan yang sudah tidak menjadi kader partai. Kemudian informan yang dituju oleh peneliti adalah para kader yang statusnya telah di verifikasi dan di pilih oleh peneliti sesuai kapabilitas dan relevansinya terhadap penelitian skripsi ini. Dan tentunya informan penelitian berada pada lingkup kabupaten Magelang.

d. Pengumpulan Data

Sumber data dan jenis data terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (Meleong, 2007: 157). Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif, maka pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999: 77). Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi sistematis. Faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. Dengan kata lain wilayah atau ruang lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian (Rachman 1999: 80). Dalam hal ini objek yang menjadi pengamatan adalah sikap para kader PDI-P mengenai budaya

organisasi yang dibangun. Observasi dilaksanakan dengan peneliti terjun langsung ke lapangan yakni pada Dewan Pengurus Cabang PDI-P Magelang.

2. Wawancara

Teknik wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait atau subjek penelitian. Dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1999:96). Dengan demikian jelaslah bahwa dokumentasi merupakan catatan atau laporan yang tertulis serta bukti otentik lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Penggunaan metode dokumentasi akan membantu peneliti memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid.

e. Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles, 1992: 17). Dalam penelitian ini, data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi digabung menjadi satu. Kemudian dipilah dan diambil pokok-pokok bahasan yang disini sesuai konteks penelitian. Terutama data-data pokok yang berkaitan dengan budaya organisasi partai, dan sikap para kader PDI-P DPC Kabupaten Magelang yang kategorisasinya disesuaikan dengan kerangka teori dalam penelitian ini.

2. Sajian Data

Sajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan (Miles, 1992: 17). Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dengan berupa teks naratif dan

table matriks guna memudahkan dalam membaca data tersebut. Pengorganisasian dalam menyusun data antara budaya organisasi partai dengan sikap kader PDI-P DPC Magelang diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir dari analisis data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian (Miles, 1992: 17).

4. Validitas Data

Agar data disajikan dalam penelitian ini memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, maka perlu dilakukan validitas data. Dalam penelitian ini, validitas data akan dilakukan dengan teknik Triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2007: 330-331).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dan dibagi dalam lima bab. Bab satu berisi latar belakang masalah yang diangkat menjadi topik skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Dari latar belakang sampai kerangka teori memaparkan penjabaran budaya organisasi dan sekaligus mengkolerasikannya dengan permasalahan yakni kader partai politik PDI-P Dewan Pengurus Cabang Magelang.

Kemudian disambung dengan bab dua yang berisi gambaran umum obyek penelitian. Disini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian mulai dari lokasi,

latarbelakang partai di DPC Kabupaten Magelang, jabatan dan sebagainya. Dalam BAB berikutnya yakni BAB tiga menjabarkan tentang temuan data yang diperoleh setelah melakukan observasi terhadap objek penelitian. Data dalam hal ini khususnya mengenai kader PDI-P di DPC Kabupaten Magelang. Kemudian, pada bab empat memuat pembahasan-pembahasan data guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni bagaimana proses penerimaan budaya organisasi partai yang dirasakan dan dialami oleh kader PDI-P serta bagaimana kader PDI-P yang sudah keluar, yang baru masuk dan kader yang sudah lama dalam partai menyikapi budaya organisasi yang ada di dalam parpol PDI Perjuangan. Dua pertanyaan besar tersebut pastinya dilihat berdasarkan lokasi objek yang telah ditentukan peneliti yakni Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Magelang.

Pada bab terakhir yakni bab lima, peneliti menyimpulkan berdasarkan pengkajian seluruh bab yang kemudian menjadi kesimpulan penelitian skripsi ini.

BAB II

KABUPATEN MAGELANG: DOMINASI TIGA PERIODE BANTENG MERAH

Secara historis, jalan ideologi PDI Perjuangan bersumber dari pemikiran-pemikiran Bung Karno yang dituangkan dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan Trisakti.

Hasto Kristiyanto

A. PDI Perjuangan dalam Mata Sejarah Hingga Saat Ini

Dalam kancah perpolitikan nasional, nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang sangat matang. Tidak hanya dari segi umur, strategi politik dan sistem kepartaiannya, tetapi juga dari kader-kadernya yang dinilai banyak yang matang dalam berpolitik dan mengelola organisasi. Pendidikan dan dinamika politik yang panjang dari berdirinya partai banteng sampai hari ini menjadikan para kader matang dan bahkan mempunyai nama besar. Daya tarik dari partai ini pada kacamata kadernya yakni mengusung sebuah ideologi dari presiden pertama RI; Bung Karno.

Ideologi dan semangat bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan negara ini, dituangkan dengan lengkap ke dalam partai ini. Mulai dari asas dan semangat politik partai yang berazaskan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam pidato Ketua Umum partai, Megawati Soekarnoputri pada 1 Juni 2010, dengan mengutip kalimat Bung Karno bahwa Pancasila adalah realisasi untuk menjadi bangsa yang bersatu, negara yang merdeka, dan anggota dunia yang merdeka, dengan syarat menyelenggarakannya adalah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan (DPP PDIP, 2015:44). Dengan semangat kalimat Bung Karno tersebut, Megawati secara tersirat menyebut para pendukungnya dengan pejuang pancasilais.

PDIP sendiri sebelum tahun 1993 memiliki nama tanpa akhiran Perjuangan. PDI berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Berdiri atas fusi yang dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru dengan 5 partai yakni PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Bung Karno, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang didirikan oleh para tentara pada massanya, dan terakhir Murba (Musyawwarah Rakyat Banyak) didirikan oleh Tan malaka, Sukarni, Chaerul Saleh dan Adam Malik (DPP PDIP, 2009; Sejarah Partai PDI Perjuangan; <http://www.pdi-perjuangan.or.id/info/sejarah-partai-pdi-perjuangan/>, Diakses 18 April 2018). Fusi tersebut

akhirnya menjadikan kelima partai bubar dan menyisakan tiga partai pada waktu itu yakni PDI sendiri, PPP dan Golkar yang kemudian bersaing pada kontestasi pemilu 1997 (Pamungkas, 2011:121).

Dalam perjalanan politik partai ini pada era orde baru, tidak luput dari konflik internal sampai dari kongres pertama sampai kongres kelima berlangsung. Campur tangan Orba untuk menjadikan pemimpin partai pro pemerintah lah salah satu penyebabnya. Puncaknya dari konflik yakni mimbar terbuka yang dilakukan oleh massa Pro Megawati hasil kongres IV. Sabtu kelabu 27 Juli menjadi sebutan pada hari itu tahun 1996. Bentrokan berdarahpun tak terhindarkan antara massa Soerjadi, Ketua Umum PDI versi kongres pemerintah, dengan massa PDI Pro Megawati. Konflik ini pun tidak hanya dirasakan di Ibu Kota, di daerah-daerah pun gerilya massa pro Megawati terhadap Pro Soerjadi juga berlangsung. Tak terkecuali di daerah kabupaten Magelang. Ini menunjukkan konflik internal sudah mengakar sampai daerah (cabang).

Pada tahun 1998 tepatnya pada kongres kelima PDI di Denpasar, PDI mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan agar kemudian hari bisa ikut serta pemilu. Karena yang diakui pemerintah tetap PDI yang dikomandoi Soerjadi, meskipun rezim orba sudah lengser. Dari kongres ke V sampai dengan hari ini, PDI Perjuangan yang selalu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri menjadi partai yang cukup stabil dari konflik internal dibandingkan dengan partai lain. Megawati dinilai menjadi alat pemersatu yang kuat bagi seluruh kader yang bernaung di partai banteng ini.

Sampai saat ini, pedoman yang selalu diunggulkan dalam partai ini sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945. Semangat Bung Karno lagi-lagi di gunakan untuk berpijak dalam kancah politik. Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni tersebut menjelaskan secara gamblang maksud Pancasila yang telah disetujui bersama. Partai ini juga memegang nilai untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, semangat sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi serta alat untuk menghidupkan semangat gotong-royong.

Dalam sikap politik partai ini, menegaskan untuk menjalankan Trisakti adalah satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (DPP PDIP, 2016; Sikap Politik; https://pdiperjuangan.id/article/category/detail/110/Media_Center/Sikap-Politik-, diakses 18 April 2018). Selain itu keberpihakannya pada rakyat Marhaen untuk mengawal jalannya

sistem ekonomi neo-liberal dan neo-kapitalis, menjadi sikap politik yang mampu memikat hati ‘wong cilik’. Semua sikap politik tersebut tertuang dalam sikap politik partai pada kongres IV PDIP.

Kepemimpinan Megawati secara di DPP mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sejumlah 26 orang. Kewenangan mengangkat pengurus DPP, mutlak di tangan Ketua Umum dan dapat diubah sesuai kehendaknya juga. Termasuk bidang yang didirikan di dalamnya juga kehendak Ketua Umum sesuai kebutuhan partai. Kepengurusan partai tingkat pusat di PDIP saat ini sebagai berikut (DPP PDIP, 2016; Kepengurusan; https://pdiperjuangan.id/article/pengurus/child/01/Partai/Pengurus_Partai, diakses 18 April 2018):

1. Ketua Umum : Megawati Soekarno Putri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai : Burhanudin Watubun
3. Pemenangan Pemilu : Bambang Dwi Hartono
4. Ideologi dan Kaderisasi : Idham Samawi
5. Keanggotaan dan organisasi : Djarot Saeful Hidayat
6. Politik dan keamanan : Puan Maharani
7. Hukum HAM dan Perundangan : Trimedya Pandjaitan
8. Bidang Perekonimian : Hendrawan Supratikno
9. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Muhammad Prakosa
10. Kemaritiman : Rohmin Dahuri
11. Pemb. Manusia dan kebudayaan : Andreas Hugo Pareira
12. Penanggulangan bencana : Ribka Tjiptaning
13. Buruh Tani dan nelayan : Mindo Sianipar
14. Kesehatan dan anak : Sri Rahayu
15. Pendidikan dan kebudayaan : I Made Urip
16. Koperasi dan UMKM : Nusirwan Sujono
17. Pariwisata : Wiranti Sukamdani
18. Pemuda dan Olahraga : Sukue Nababan
19. Keagamaan dan kepercayaan : Hamka Haq
20. Ekonomi Kreatif : Prananda Prabowo
21. Sekretaris jendral : Hasto Kristiyanto
22. Wasekjen Bidang Internal : Utut Adiyanto
23. Wasekjen Bidang Kerakyatan : Erico Sotarduga

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 24. Wasekjen Bidang Pemerintahan | : Ahmad Basarah |
| 25. Bendahara Umum | : Olly Dondo Kambey |
| 26. Wabendum Internal | : Rudiyanto Chen |
| 27. Wabendum Program | : Yuliari Peter Batubara |

B. Pegangan Kuat Menjalankan Organisasi PDI Perjuangan

Untuk menjalankan organisasi partai politik ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki aturan-aturan agar tujuan tercapai dan meminimalisir hambatan termasuk konflik internal. Mengingat ini bukan organisasi biasa, atau organisasi politik yang tujuan utamanya adalah kekuasaan. Aturan tersebut berasal dari Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta aturan dari Ketua umum Megawati Soekarno Putri, sesuai dengan amanat pada kongres V PDI. Kongres tersebut memberi kewenangan penuh kepada Ketua umum secara organisatoris untuk memajukan partai.

1. Keanggotaan

Sesuai amanat AD/ART PDIP, anggota partai terdiri dari anggota biasa, anggota, kader, dan anggota kehormatan. Beda dari anggota biasa dan anggota, yakni pada anggota partai telah mengikuti pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang dilaksanakan partai. Sedangkan anggota biasa hanya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan partai tanpa perlu mengikuti pelatihan.

Anggota partai bisa disebut kader partai apabila seorang kader partai lulus dari Pendidikan kader dan juga terbuktinya dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada partai dan masyarakat luas. Jenjang seorang kader untuk mencapai puncak yakni kader utama cukup panjang dan harus dimulai dari anggota biasa terlebih dahulu. Diluar jenjang kader seperti kader pratama, kader madya dan utama, partai membolehkan WNI yang memiliki kemampuan bidang tertentu secara professional untuk diangkat sebagai anggota partai. hal itu boleh dilakukan atas dasar penugasan dari partai. Partai juga mempersiapkan WNI yang memiliki kecakapan professional tertentu untuk ditetapkan sebagai anggota partai dalam rangka ditugaskan oleh partai, seperti yang dijelaskan dalam ADART PDI Perjuangan pasal 15 pada kader partai (DPP PDIP, 2015:70-72).

Kemudian ada anggota kehormatan yang mana pada strata ini disematkan kepada WNI yang berjasa luar biasa kepada partai. Selain itu pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan asas, jati diri, watak dan tujuan partai.

2. Disiplin dan Sanksi Partai

Pengeloan terhadap anggota perlu sebuah aturan yang mengikat agar tidak seenaknya sendiri dalam berpartai. Seperti diberi hak dan kewajiban yang menjadi peraturan normatif pada umumnya. Kewajiban yang tertuang normatif seperti memegang teguh asas partai dan menaati peraturan partai. Selain itu anggota juga mempunyai kewajiban menjalankan tugas jika mendapat penugasan dari partai. Anggota partai pun mempunyai hak menyampaikan pendapat sampai hak politik untuk dipilih dan memilih.

Aturan partai yang perlu dijalankan berupa larangan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Pasal 22. Anggota partai dilarang menjadi anggota organisasi politik lainnya. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan partai. Membocorkan rahasia partai. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan partai. Dan terakhir melakukan kekerasan fisik dan intimidasi mengatasnamakan partai.

Jika ada aturan seperti diatas, pasti ada sanksi yang menanti jika melanggarnya. Sanksi partai tersebut berjenjang dan tergantung tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut berupa:

- a. Peringatan
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan partai dan atau jabatan atas nama partai
- c. Pembebasan dari jabatan partai dan atau jabatan atas nama partai
- d. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai.

Pemecatan disini tidak bisa dilakukan oleh semua strata hierarki kepengurusan partai. Hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan DPP partai. Anggota yang terkena sanksi pemecatan juga masih punya hak untuk protes atau menolak pemecatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP partai untuk diputuskan pada kongres partai.

3. Organisasi

Penyelenggaraan organisasi tidak luput dari struktur hierarki organisasi. Apalagi organisasi tersebut berada pada tataran nasional dan mengakar sampai tingkat paling kecil yakni RW atau dukuh. Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut (DPP PDIP, 2015:79):

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya
- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/ dukuh/kampung/ RW atau sebutan lainnya.

Struktur hierarki organisasi tersebut juga masih didampingi dengan struktur organisasi. Struktur organisasi setiap tingkatan pun berbeda-beda bahkan dalam tataran DPC juga dapat berbeda-beda antar daerah tergantung kebutuhan di daerah tersebut. Semua komponen struktur sudah diatur dengan rapi di dalam AD ART PDIP.

Sebagai contoh pada Dewan Pimpinan Pusat tidak diatur berapa jumlah dari setiap orang yang akan mengurus. Semua berdasarkan keputusan mutlak dari Ketua Umum. Tapi diatur pos yang dapat diisi secara umum untuk memudahkan kerja dari Ketua Umum. Pos jabatan tersebut seperti ketua-ketua bidang, sekretaris jenderal dan wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil-wakil bendahara umum, serta yang terakhir departemen.

Beda struktur kebutuhan yang ada di DPP dengan DPD dan DPC adalah tidak adanya bagian departemen. Selain itu tidak adanya ketua bidang tapi wakil ketua bidang, dan tidak adanya sekretaris jenderal dan wasekjend tapi sekretaris dan wakil sekretaris. Struktur tersebut juga sama dengan yang ada pada DPLN serta PPLN.

Sedangkan pada struktur Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting hanya diisi pada posisi ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Pada pengurus anak ranting sedikit berbeda dan lebih sederhana yakni hanya diisi jabatan ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator kerja. Semua tingkatan kepengurusan dari pusat sampai anak ranting, mempunyai masa bakti 5 tahun. Setelah lima tahun akan diberlakukan pembentukan pengurus baru, namun pengurus lama berhak menempati jabatan sebelumnya atau jabatan baru pada strata yang berbeda jika hasil keputusan tiap tingkatan mengizinkan.

Untuk jumlah dari masing-masing tingkat kepengurusan berbeda-beda. Untuk tingkat DPP jumlahnya menjadi hak prerogratif ketua umum. Pada DPD berjumlah minimal 17 orang dan maksimal 23 orang. Di tingkat PDC, berjumlah minimal 11 orang dan maksimal 19 orang. Tingkat bawahnya lagi yakni PAC, berjumlah antara 5 sampai 11 orang. Di Pengurus Ranting maksimal jumlah pengurus 9 dan minimal 5. Jumlah maksimal 5 hanya ditujukan ke pengurus Anak Ranting. Sedangkan pada tingkat DPLN, jumlahnya sama dengan DPC. Kemudian PPLN jumlahnya juga sama dengan PAC.

Sebagai pelengkap jalannya organisasi agar teratur dan dapat menggapai tujuan politik, PDIP dilengkapi dengan Pusat Analisa dan Pengendali Situasi yang (Situation Room). Posisi Situation room diluar bidang dan bertanggungjawab langsung kepada ketua umum partai. Situation room hanya ada ditingkat pusat dan memiliki tugas menyediakan data, informasi, analisa dan fasilitas kelengkapan bagi ketua umum partai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Selain itu tugas dari situation room untuk mengelola data base serta mengolah informasi yang strategis dan komprehensif untuk dukungan langsung Ketua Umum partai dalam menjalankan tugas terkait hal-hal yang bersifat strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPP dilengkapi dengan alat kelengkapan untuk memudahkan kerja partai dan tetap menjaga eksistensi partai. Alat kelengkapan partai tersebut juga ada di ranah DPD dan DPC yang pada khususnya bertanggung jawab atas kontestasi politik di daerahnya. Di DPP alat kelengkapan partai berupa Mahkamah Partai, Fraksi Partai, Badan-badan Partai dan sekretariat partai. Sedangkan di DPD dan DPD hanya tidak ada alat kelengkapan berupa Mahkamah Partai.

Badan-badan yang menjadi alat kelengkapan partai terdiri dari:

- a. Badan Pendidikan dan Pelatihan disingkat BADIKLAT
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan disingkat BALITBANG
- c. Badan Pemenangan Pemilihan Umum disingkat BP PEMILU
- d. Badan Saksi Pemilu Nasional disingkat BSPN
- e. Badan Penanggulangan Bencana disingkat BAGUNA
- f. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi disingkat BBHA
- g. Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan disingkat BPEK; dan
- h. Badan Kebudayaan Nasional disingkat BKN

Selain badan tersebut, masih ada Komunitas Juang, Satuan Tugas (Satgas) Partai dan Komite partai yang semuanya masuk dalam tanggungjawab partai. Komunitas Juang

Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya. Komunitas Juang dibentuk sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis partai. Sedangkan satuan tugas (satgas) partai bertugas untuk menjalankan fungsi keamanan dan protokoler serta menjalankan fungsi kepanduan. Satgas Partai ini diberi nama sebagai Satgas Cakra Buana. Kemudian yang terakhir Komite partai yang menjadi sebutan untuk staff ketua-ketua bidang DPP partai. Komite partai terdiri dari seorang koordinator dan anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan bidang masing-masing. (1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP Partai. (2) DPP Partai secara periodik mengevaluasi kinerja DPD, DPC dan DPLN Partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (3) DPD Partai mengevaluasi kinerja PAC Partai. (4) DPC Partai mengevaluasi kinerja Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai. (5) Hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengurus Partai dapat dijadikan dasar pembebasan dari jabatan Partai. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengevaluasian kinerja pimpinan dan pengurus Partai diatur dengan Peraturan Partai

4. Aturan dan rapat-rapat partai

Dalam sistem kepartaian, tentunya memiliki hierarki aturan yang telah disepakati bersama seperti negara yang ada Pancasila, UUD 1945, UU dan seterusnya. Dalam partai politik juga sama, mempunyai aturan mainnya. Aturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disusun secara hierarki sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Partai
- b. Anggaran Rumah Tangga Partai
- c. Peraturan Partai
- d. Peraturan DPP Partai
- e. Peraturan DPD Partai, dan
- f. Peraturan DPC Partai.

Dalam hierarki aturan tersebut, pastinya tidak boleh tumpang tindih aturan yang ada di atasnya. Selain itu landasan aturan dibawah tingkatan selalu memakai aturan yang ada di atasnya. Kemudian tidak adanya peraturan PAC, Ranting dan anak ranting, membuat DPC lebih bertanggung jawab dengan membuat peraturan yang adil kepada struktur organisasi dibawahnya.

Tanpa adanya kewenangan membuat peraturan, PAC, Ranting dan anak ranting tetap berkenan mengadakan rapat untuk menindaklanjuti perintah, intruksi atau himbauan

yang ada di atasnya. Secara aturan rapat yang di perkenankan dalam partai adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Tingkat Pusat, yang terdiri dari:
 1. Kongres
 2. Rapat DPP Partai
 3. Rapat Kerja nasional
 4. Rapat Koordinasi nasional
 5. Rapat Koordinasi bidang nasional
 6. Rapat tiga pilar partai tingkat nasional
- b. Rapat di tingkat Provinsi, terdiri dari:
 1. Konferensi daerah
 2. Rapat DPD partai
 3. Rapat kerja daerah
 4. Rapat koordinasi bidang daerah
 5. Dan rapat tiga pilar partai tingkat daerah
- c. Rapat di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 1. Konferensi cabang
 2. Rapat DPC partai
 3. Rapat kerja cabang
 4. Rapat koordinasi cabang
 5. Rapat tiga pilar partai tingkat cabang
- d. Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri, terdiri dari:
 1. Konferensi perwakilan luar negeri
 2. Rapat DPLN partai
 3. Rapat PPLN partai
- e. Rapat di tingkat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Musyawarah anak cabang partai
 2. Rapat PAC partai
- f. Rapat di tingkat Ranting, terdiri dari:
 1. Musyawarah ranting partai
 2. Rapat pengurus ranting partai
- g. Dan yang terakhir Rapat di tingkat Anak Ranting, terdiri dari:
 1. Musyawarah anggota anak ranting partai
 2. Dan rapat pengurus anak ranting partai

Jenis rapat tiga pilar merupakan rapat untuk menampung aspirasi dan keluhan terbesar pada tingkatannya dengan mempertemukan penyelenggara negara atau daerah dengan struktural dan rakyat. Biasanya pada tingkatan nasional dihadiri oleh orang-orang besar yang mempunyai jabatan baik presiden, wakil presiden, Menteri bahkan anggota DPR. Rapat tersebut membahas permasalahan yang cukup besar seperti pengangguran di suatu wilayah dan didiskusikan untuk mencari penyelesaiannya bersama pemerintah. Begitu juga rapat tiga pilar yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Orang-orang penyelenggara daerah lah yang diundang bersama pengurus partai dan masyarakat daerah.

Cukup banyak jenis dan strata rapat yang ada di organisasi politik PDIP ini. Mengingat jaringannya mengakar kuat sampai ke anak ranting, maka diperlukan sistem yang kuat untuk mengikatnya salah satunya dengan rapat untuk konsolidasi internal dan peraturan agar tidak keluar jalur yang sudah ditetapkan. Agar meminimalisir konflik maka diaturlah sistem rapat seperti dalam pengambilan keputusan. Dalam hal tersebut maka rapat-rapat partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dalam rapat, dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat. Kemudian apabila tetap tidak mencapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.

5. Keuangan dan pembendaharaan partai

Partai tanpa keuangan di zaman sekarang akan susah berkembang, apalagi untuk pendidikan politik. Sumber daya keuangan partai selain dari hibah partai oleh pemerintah, juga dari banyak sumber seperti iuran anggota, iuran anggota fraksi, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lainnya yang sah.

Dalam pengelolaannya, Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus Partai pada tingkatannya. Pengelolaan harta kekayaan Partai di masing-masing tingkat, diutamakan guna dicapai efisien dan efektifitas penggunaan harta kekayaan Partai. Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.

Biasanya tugas dari bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya. Maka dari itu, bendahara harus siap jika sewaktu-waktu diminta pelaporan oleh pihak yang berwenang guna kepentingan partai apa politik kedepannya.

C. PDI Perjuangan Dalam Lingkup DPC

Dalam melaksanakan tugas kepartaian, sesuai amanat dari ADART, diperlukan sekretariat untuk tempat admistrasi dan kepentingan politik lainnya. Kantor atau sekretariat DPC DIP berada di Jl. Magelang – Jogja Kilometer 13, Muntilan, Kabupaten Magelang. Lokasi tersebut dengan kantor sekretariat DPC Partai Persatuan Pembangunan. Di Sekretariat selalu ada dua staff selama lima hari kerja yang mengurus segala urusan administratif kepartaian. Tempatnya sangat luas, ada ruang besar yang cukup untuk menampung 200 orang untuk rapat, dan ruang tamu yang cukup nyaman untuk menampung petinggi partai.

Di tingkat PAC, Ranting, dan anak ranting, tidak selalu memiliki sekretariat namun beberapa kader membuat rumahnya sendiri sekaligus menjadi sekretariat pada tataran PAC, ranting dan anak ranting. Jumlah dari PAC di Kabupaten Magelang yakni 21 Pengurus Anak Cabang. Namun untuk pendataan jumlah ranting dan anak ranting, belum peneliti ketahui karena data dari DPC belum lengkap dan belum disusun. Beberapa masih data juga masih berada di PAC seperti kepengurusan ranting yang aktif, yang berganti dan yang sudah non aktif. Pendataan sampai anak ranting juga dinilai cukup berat, mengingat wilayah Kabupaten Magelang yang begitu besar dan kader yang ke kantor DPC tidak hanya mengurus administrasi pendataan struktur. Kepentingannya berbeda-beda sampai ke ranah aspirasi ke pada para wakil dari partai ini.

Restrukturisasi DPC mengikuti jadwal sesuai kongres di gelar. Masa jabatannya selama lima tahun, sama dengan kepemimpinan di pengurus pusat. Adapun Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang pada periode 2015-2020 sebagai berikut:

1. Ketua : Saryan Adi Yanto, SE
2. Wakabid Kehormatan dan organisasi : S. Domo
3. Wakabid Kaderisasi dan Ideologi : Y. Sri Windaryatmi
4. Wakabid Pemenangan Pemilu : Hery Suyanto
5. Wakabid Komunikasi Politik : Dwi Heru Sutapa

- | | |
|--|--------------------------|
| 6. Wakabid Politik hukum dan
Keamanan | : Bambang Prayitno |
| 7. Wakabid Pemerintahan Daerah
Dan Pembangunan Desa | : Zaenal Arifin, SIP |
| 8. Wakabid Ekonomi Pembangunan
Manusia dan kebudayaan | : Sri Minjayati |
| 9. Wakabid Buruh Tani dan Nelayan | : Jumat |
| 10. Wakabid Perempuan dan Anak | : Dra Tri Indarti |
| 11. Wakabid Pemuda Olahraga dan
Komunitas Seni Budaya | : Joko Susilo |
| 12. Wakabid Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif | : Budi Supriyanto, S.S. |
| 13. Sekretaris | : Grengseng Pamuji, S.pt |
| 14. Wakil Sekretaris bidang internal | : M. Najib Fahmi, S.Pd |
| 15. Wakil Sekretaris bidang External | : Muh Anas |
| 16. Bendahara | : Sakir, S.sos |
| 17. Wakil Bendahara | : Suyanti, SH |

D. Rekam Jejak Politik Praktis PDIP di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu basis suara dari PDIP yang ada di Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan memenangkan pilihan bupati atau kepala daerah berturut-turut sejak diadakan pertama kali tahun 2004 sampai dengan periode 2013-2018. Sejatinya basis warga di kabupaten Magelang adalah hijau Nahdlatul Ulama. Hal itu dibuktikan dengan diangkatnya seorang Kiai bernama Drs. H. Hasyim Affandi menjadi bupati Kabupaten Magelang oleh DPRD.

Sejak adanya Pilkada, PDIP selalu berkoalisi dengan PKB yg sejatinya saingan berat dalam perebutan kursi legislatif. Jumlah kursi pada tahun 2014 hampir sama yakni 10 kursi untuk PDIP dan 9 kursi untuk PKB. Koalisi tersebut menjadi lebih memudahkan keduanya menang mengingat kantong suara ada di kedua partai tersebut.

Walau menjadi penguasa dalam kurun waktu hampir 3 periode, tidak lantas membuat partai ini menang telak. Pada tahun 2009, PDIP mengumpulkan kursi lebih banyak yakni 12 kursi. Pada tahun 2014 menjadi turun, salah satu faktornya adalah melejitnya partai baru Gerindra. Partai Gerindra pada tahun 2014 berhasil menduduki 9

kursi, menyamai kursi PKB. Gerindra menjadi ancaman nyata PDIP, mengingat selain menjadi basis massa NU karena banyak pesantren, di Kabupaten Magelang juga basis Militer. Pendidikan terkenal bukit Tidar menjadi ciri khas kabupaten dan kota Magelang.

Adanya kantung-kantung suara yang hampir sama jumlahnya membuat tantangan dan optimisme tersendiri. Terlebih lagi optimisme itu jika berhasil merangkul koalisi dari PKB. Kekuasaan yang berhasil dipegang di Kabupaten Magelang, juga memuluskan pada Pilgub 2013 dan Pilpres 2014. Ganjar Pranowo waktu itu menang telak di kabupaten Magelang. Sementara pada Pilpres yang sedikit berat, karena ada partai hijau yang bersebrangan dan ditambah pengaruh militer yang ada di kabupaten tersebut. Hasilnya walaupun di kabupaten tersebut memenangkan Jokowi-JK dengan 407.458 suara, namun hanya selisih 57.000 suara dari pesaingnya Prabowo Subianto.

Luas wilayah kabupaten Magelang dengan dibagi 21 kecamatan menjadi keuntungan tersendiri bagi PDIP. Dengan menjadi partai turunan PNI, massa simpatisan Bung Karno merapat dan meregenerasi untuk bergabung di partai ini. Jumlah anggota maupun kader yang bisa difungsikan juga bukan main. Jika jumlah pengurus PAC itu minimal 5, maka sudah ada 105 anggota aktif. Kemudian ada pengurus ranting minimal 5 orang dan masing-masing kecamatan ada 5 ranting, maka ada 525 anggota atau kader yang aktif menjadi structural diluar PAC, DPC dan anak ranting. Belum lagi anak ranting yang para pengurus tingkat atasnya juga kurang tahu jumlah pastinya.

Basis kader yang sangat banyak itu memudahkan para caleg dari PDIP mendapatkan kursi minimal satu kursi pada setiap daerah pemilihan. Biasanya kader yang terpilih untuk maju juga asal tempat tinggal dari daerah tersebut dan berjenjang dari ranting naik ke PAC, yang kemudian baru bisa dicalonkan jika sudah menjabat menjadi ketua. Jika ketua PAC tidak berkenan maka hak untuk dicalonkan bisa diberikan kepada anggota yang lain.

Dari enam daerah pemilihan, dengan total 444 kontestan untuk memperebutkan 50 kursi di DPRD kabupaten Magelang. 48 kader dikirimkan dari dapil yang berbeda-beda. Hasilnya memenangkan tiap dapil, bersaing ketat dengan PKB dan Gerindra. 10 kader yang lolos, 2 diantaranya adalah perempuan.

Pada dapil satu meliputi wilayah kecamatan Borobudur, Mungkid dan Mertoyudan jumlah calon legislatif yang terpilih berjumlah 2 orang. Yakni Saryan Adi Yanto, SE yang sekarang menduduki ketua DPC sekaligus Ketua DPR dan Tri Wahyuningsih. Untuk

daerah pilihan dua, meliputi daerah kecamatan Tempuran, Salaman, dan Kajoran juga dimenangkan oleh dua orang sekaligus, yakni Sakir, S.Sos dan Jumat. Sedangkan pada dapil tiga, di kecamatan Kaliangkrik, Windusari dan Bandongan, lolos satu caleg untuk duduk di kursi legislatif bernama Zaenal Mahfud. Pada daerah pilihan empat, Grengseng Pamuji, S.Pt, dan Mul Budi Santosa menjadi wakil dari PDIP yang terpilih. Daerah dapil empat meliputi kecamatan Secang, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak.

Suyanti, yang menjabat wakil bendahara di DPC juga lolos terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Magelang. Dapil lima yang menjadi wilayah berpolitiknya meliputi Kecamatan Pakis, Tegalrejo, Candimulyo, dan Sawangan. Terakhir, pada dapil enam, menjadi wilayah yang paling banyak jumlah kecamatannya. Kecamatan tersebut yakni Muntilan, Dukun, Srumbung, Ngluwar dan Salam. Pada wilayah ini dimenangkan oleh dua kader yaitu Gunawan dan Budi Supriyanto, SS yang juga menjabat struktural DPC.

E. Kaderisasi dalam PDI Perjuangan Kabupaten Magelang

Dalam aturan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, pada bagian rekrutmen dan keanggotaan, partai melakukan rekrutmen terhadap seluruh WNI untuk menjadi anggota. Jenjangnya tidak bisa langsung menjadi kader, melainkan dari anggota biasa, anggota, kemudian kader dan terakhir anggota kehormatan. Menjadi kader pun juga mempunyai jenjang, yakni menjadi kader Pratama, kemudian Kader Madya dan terakhir kader Utama. Diluar semua jenjang tersebut, partai juga melakukan rekrutmen kader sesuai kecakapan profesional yang dimiliki. Rekrutmen jenis ini dalam rangka untuk ditugaskan pada lembaga politik dan lembaga publik serta kelembagaan yang bersifat strategis lainnya.

Penerimaan anggota partai secara detail tidak diatur dalam AD/ART namun dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sistem penerimaan anggota disiapkan oleh DPP partai. Jadi tidak ada metode khusus dalam perekrutan anggota yang kemudian bisa menjadi kader yang diatur dalam sebuah aturan yang mengikat. Seperti apakah menggunakan sistem perekrutan terbuka atau perekrutan tertutup. Namun persyaratan untuk menjadi anggota biasa, syaratnya yakni berusia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah. Diluar itu dengan kesadaran diri mau mengikuti kewajiban yang sudah di atur dalam partai.

Kaderisasi sampai level tertinggi partai yakni duduk dalam struktural DPP, memang melalui proses panjang dan sudah diatur dalam AD/ART. Seperti melaksanakan

kegiatan Pendidikan politik yang berisi penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno, pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kegiatan pendidikan politik juga bisa diterapkan dalam kegiatan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban WNI dalam membangun etika dan budaya politik serta juga dalam pendidikan kaderisasi anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan kader yang tergolong dalam tahapan kaderisasi, juga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dalam pasal 81 tentang kaderisasi partai. Jenjang pendidikan kader tersebut seperti pelaksanaan pendidikan kader pratama berada pada ranah DPC. Kemudian untuk pendidikan kader madya berada pada ranah DPD dan yang terakhir pendidikan kader utama dilaksanakan pada level DPP. Selain melaksanakan pendidikan kader secara berjenjang, DPP juga mempunyai tanggungjawab untuk melakukan seleksi kader utama guna ditunjuk sebagai kader pendidik yang fungsinya sebagai pelaksana Pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Semua yang dijabarkan dalam sistem kaderisasi di atas, didukung dengan dua penelitian yang peneliti dapati pada daerah kota Kediri dan kecamatan Jebres, Surakarta. Bahwa pada kota Kediri, partai selalu membuka seluas-luasnya perekrutan anggota baru. Artinya tidak ada pembatasan kapan harus menerima dan harus menolak. Tapi keinginan dan inisiatif masyarakat sendiri untuk bergabung menjadi titik utama dalam adanya anggota baru. Selain itu, ajakan dari internal partai menjadi penting untuk adanya anggota baru guna regenerasi dan membesarkan partai. Pada kecamatan Jebres malah lebih di dukung dengan KTA nisasi ketika ada warga masyarakat yang bersedia untuk menjadi kader partai PDI Perjuangan. Setelah menjadi anggota barulah mekanisme partai dengan memberikan penugasan dan pendidikan politik diberikan kepada anggota tersebut.

Dalam kaderisasi keanggotaan partai dilingkup DPC Magelang yang pada akhirnya sangat berperan dalam membesarkan nama partai khususnya dalam tiga periode, peneliti menemukan kaderisasi bersifat ajakan personal dan persuasif. Pastinya dimulai dengan prosedur yang ada yakni dari bawah, minimal pada strata ranting. Namun nama-nama besar hari ini yang mengisi jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang, juga tidak lepas dari kader yang mempunyai ikatan darah dari pengurus sebelum-sebelumnya. Misalnya Sakir yang orang tuanya dulu adalah wakil rakyat dari PDI pada era 70-an. Begitu juga dengan ketua dan sekretaris DPC yang masih muda yakni Saryan Adi dan Grengseng Pamuji yang juga orang tuanya adalah pengurus partai pada massanya.

Semangat ideologis yang turun secara biologis tersebut menjadi kekuatan luar biasa yang mampu membawa nama besar partai sampai memenangkan Pilihan bupati tiga kali beruntun. Selain itu, pendidikan kader yang dilakukan walaupun tidak secara rutin bisa dilakukan juga menjadi alat penunjang partai pada tingkatan ini untuk mencapai tujuannya yakni; berkuasa.

BAB III

PDI PERJUANGAN DALAM BALUTAN BUDAYA ORGANISASI

*Tidak ada demokrasi tanpa politik,
dan tidak ada politik tanpa partai.*

Clinton rossiter

Pada bagian ini, peneliti berusaha menjelaskan budaya organisasi yang ada pada lingkup organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang. Hasil dari observasi dan wawancara yang menjadi data primer di lapangan serta data sekunder lainnya. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan September – November 2016 dengan berhasil mewawancarai empat orang yang menjadi kader PDI Perjuangan di DPC kabupaten Magelang. Selain itu peneliti juga melakukan permohonan data sekunder di kantor sekretariat DPC berupa daftar-daftar peserta pemilu beserta hasilnya dan pengurus DPC.

Untuk memudahkan dalam pembacaan dan penyajian data yang peneliti peroleh, maka dibuatlah poin-poin yang menghubungkan antara komponen dari sikap dengan komponen dari budaya organisasi dan organisasi partai politik berdasarkan paparan dari setiap informan penelitian. Komponen pembentukan sikap tersebut antara lain komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Namun sebelum menjabarkan hasil penelitian menjadi beberapa poin tersebut, peneliti akan memperkenalkan informan beserta latarbelakangnya dalam bentuk narasi seperti berikut ini.

Informan pertama, bernama Budi Supriyanto, S.S, yang selanjutnya pada bagian ini oleh peneliti ditulis dengan nama panggilan Budi. Budi merupakan kader PDI Perjuangan yang menjabat pada struktural Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Magelang pada periode 2015-2020. Jabatannya di DPC PDIP Kabupaten Magelang sebagai wakabid Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Selain menjabat di DPC, Budi juga masuk dalam fraksi PDIP di DPRD kabupaten Magelang. Budi tinggal di kecamatan Borobudur, namun alamat aslinya berada pada kecamatan Muntilan yang juga menjadi salah satu daerah pemilihannya dalam memenangkan pemilu legislatif 2014.

Kemudian informan kedua yang peneliti temui adalah Sakir, S. Sos. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti akan menyebut informan ini dengan nama Sakir. Sakir merupakan kader partai yang saat ini menjabat sebagai bendahara DPC dan sekaligus

menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang. Sakir tinggal di dukuh Probolinggo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Sakir merupakan kader yang cukup matang mengingat usia dan perjalanannya dalam berpartai dimulai dari bawah (ranting) dan saat ini telah duduk menjadi anggota DPRD untuk kedua kalinya.

Narsumber yang ketiga bernama Bandung Suroso. Bandung Suroso menjadi informan peneliti yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda dari informan lainnya. Bandung Suroso yang selanjutnya peneliti panggil dengan Suroso hanyalah lulusan PGA P (Pendidikan Guru Agama Pertama) setingkat SLTP. Suroso mempunyai semangat yang tinggi tentang ideologi partai yang *Soekarnois* namun dirinya tidak duduk di level tertinggi partai di kabupaten Magelang. Mempunyai pekerjaan sebagai buruh serabutan dan tinggal di Kelurahan Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Usianya sudah menginjak 63 tahun tepat pada 12 Desember 2018. Sebagai *gesrut* yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, Suroso pernah menjabat Ketua PAC Mertoyudan, sebuah jabatan yang cukup *prestigious* karena bisa dicalonkan menjadi calon legislatif.

Informan yang terakhir ini peneliti berhasil mewawancarai kader yang bisa dikatakan sebagai kader baru. Bernama Drs. Subagijo, M. Pd yang dalam penelitian ini akan dipanggil Subagijo. Subagijo merupakan kader yang dibawa langsung oleh Bupati terpilih waktu itu, Singgih Sanyoto yang juga menjabat sebagai ketua DPC periode 2005-2010 dan 2010-2015. Subagijo bisa dikatakan kader yang istimewa karena sebelum diajak menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu, dirinya menjabat sebagai PNS kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan di kabupaten Magelang. Subagijo lahir di Yogyakarta, 13 Agustus 68 tahun silam. Tinggal di Bayanan Wetan, RT 01, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

1. Kontruksi Perseptual Kader Mengenai Partai

Kerangka kognitif atau juga disebut perseptual menjadi landasan nilai seorang kader untuk berpartai. Begitu juga proses kognitif yang dialami para informan penelitian yang dalam hal ini adalah kader PDI Perjuangan Kabupaten Magelang. Peneliti membagi proses kognitif ini dalam beberapa sub kategori berdasarkan sistem kepartaian yang ada di PDIP itu sendiri. Pengelompokan proses kognitif dibagi menjadi tiga antara lain berpartai dan kepartaian, pengelolaan dan budaya organisasi serta yang terakhir pengalaman dalam politik.

1.1 Proses Berpartai

Dalam proses karir berpartai yang dilalui keempat informan yang peneliti wawancarai mempunyai latar belakang dan proses yang berbeda-beda. Budi misalnya, pada awalnya merupakan seorang simpatisan dari PDI. Sejak kecil (usia 5 tahun) sudah dikenalkan dengan partai berlambang banteng yakni PNI yang digawangi oleh Bung Karno. Orang tua dan eyang dari Budi merupakan simpatisan dari partai PNI.

Sebelum resmi menjadi kader, Budi merupakan seorang guru yang artinya waktu itu sebagai simpatisan beliau tidak bisa terjun langsung dalam proses politik partai ini. Seiring berjalannya waktu karena alih profesi dari guru menjadi musisi, Budi merasa bebas untuk menentukan sikap berpolitiknya. Dimulai masuk menjadi struktural ranting di kelurahan Gulon, kecamatan Salam. Kemudian menjabat struktural di PAC kecamatan tersebut namun sebelum masuk struktural PAC beliau vakum dalam struktural di tingkat manapun. Alasannya untuk masuk kembali ke dalam struktural adalah melihat keadaan SDM di Salam yang dirasanya kurang.

“Saya bukan ketua PAC, karena waktu itu setelah jadi ketua ranting, saya break tidak masuk di struktural, saya hanya melihat. Tapi saya prihatin dengan kondisi di Salam. Di Salam itu banyak orang pintar, tapi pengurusnya SDM nya seperti itu, untuk mengelola partai saja kayaknya tidak mampu dengan partai sebesar itu” (percakapan wawancara dengan Budi).

Keresahan tentang keadaan SDM kader yang ada di Desa Salam, ditegaskan oleh Budi dalam pernyataannya sebagai berikut

“Saya terpanggil untuk duduk di struktural, karena bagaimanapun juga struktural sangat berpengaruh. Besarnya partai di masyarakat itu kan tergantung juga dari strukturalnya. Ketika seorang ketua ranting, ketua ranting itu kan sama saja dengan kepala desa, ketika ketua ranting salah satu desa itu tidak populer, dan dia justru bertentangan dengan masyarakat, kan tidak akan laku PDI Perjuangan di masyarakat” (percakapan wawancara dengan Budi)

Setelah satu periode dilalui sebagai bendahara PAC, Budi kemudian menjabat struktural DPC sampai saat ini periode keduanya. Dirinya beranggapan bahwa posisinya di struktural DPC karena totalitasnya saat menjadi kader di tingkat PAC. Berkat kerja kerasnya di tingkat PAC tersebut, Budi diberi kesempatan oleh partai untuk menjajal kontestasi politik legislatif tahun 2009. Namun pada tahun tersebut belum terpilih sebagai wakil rakyat di Kabupaten Magelang. Sampai pada akhirnya, saat ini Budi bisa duduk di bangku parlemen tingkat II menjadi anggota komisi bidang pariwisata dan menjadi wakil ketua DPC bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hampir sama dengan Budi, Sakir yang saat ini seorang kader yang duduk di struktural DPC dan di fraksi pada DPRD Kabupaten Magelang, mempunyai ketertarikan dengan politik sudah dirasakan sejak SLTA. Sakir menganggap bahwa partai politik itu penting karena salah satu pilar dari demokrasi. Melalui lembaga politik, Sakir percaya bahwa suatu lembaga politik nantinya dapat mencetak pemimpin-pemimpin. Di sisi lain, ketertarikan Sakir terhadap PDIP karena alasan ideologis yang bersinggungan langsung dengan dirinya. Orang tua dari Sakir merupakan seorang kader PDI pada masanya dan pernah menjadi anggota legislatif pada kabupaten yang sama. Secara alamiah, Sakir merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan orang tua terhadap negara melalui jalur politik.

Selain alasan biologis-ideologis, kekaguman akan sosok Bung Karno yang dianggap sebagai pahlawan proklamator juga menjadi alasan Sakir dalam memilih partai ini.

“Kenapa saya memilih PDI?, karena Salah satu partai yang melanjutkan ideologi Bung Karno. Yaitu wawasan kebangsaan dengan Pancasila 1 Juni 45, ini kan digali oleh Bung Karno. Makanya saya memilih PDI Perjuangan” (percakapan wawancara dengan Sakir).

Senada dengan Sakir yang menyukai ideologi Bung Karno, pada proses pengenalan partai yang dialami oleh Suroso, seorang kader yang sangat merepresentasikan gesrut dari partai ini, menjelaskan bahwa proses ketertarikannya terhadap partai dimulai ketika dirinya masih berusia belasan tahun. Landasannya menjadi simpatisan PDI pada pemilu tahun 77 adalah kecintaannya terhadap sosok Bung Karno. Suroso yang pernah ikut seorang mayor polisi di Jakarta, sering membaca buku tentang Bung Karno salah satunya berjudul Dibawah Bendera Revolusi. Kekaguman terhadap Bung Karno membuatnya berkecimpung di partai ini hingga menjadi ketua PAC Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Suroso sangat merepresentasikan massa dari partai ini yang selalu menyebut partai *wong cilik*, karena dirinya bukan orang yang mempunyai kemampuan harta seperti informan lainnya, dan tidak tamat pendidikan di bangku setingkat SLTA. Walau demikian, kecintaannya terhadap ideologi dan sosok Bung Karno sangat mengagumkan. Dirinya sering bercerita tentang alasan-alasan mengapa Bung Karno memilih hari Jum'at untuk proklamasi, memilih pakaian putih dalam membacakannya dan menceritakan apa itu Marhaenisme itu. Suroso fasih menceritakan itu semua, seperti mempunyai latar belakang Pendidikan yang lebih dari SLTA.

“... Marhaen itu kan istilahnya penemuan Bung Karno waktu beliau masih mahasiswa ketika di Bandung. Itu kan waktu itu jalan-jalan bersepeda kemudian menemui seseorang yang bernama marhaen. Kebetulan petani kecil yang bisa mengolah sendiri, menjual sendiri dan hasilnya untuk keluarga kecilnya. Itu penemuan pertama, sebetulnya Bung Karno sendiri yang namanya Marhaen itu kan gabungan mar nya adalah marxisme, he itu Hegel dan en nya Engles. Jadi ketiga tokoh dunia itu sosialisas-sosialis itu. Tapi kan tahunya Marhaen itu Pak Marhaen sebenarnya di Dibawah Bendera Revolusi itukan marhaen itu ada Marx itu kan tokoh dan disana itu namanya Jerman itu Hitler itu belum seberapa nya dengan yang namanya Jengis Khan dia menguasai separuh dari benua Asia. Hitler hanya seberapa cuma dibesar-besarkan.” (percakapan wawancara dengan Suroso).

Masa bakti Suroso dalam menjadi struktural telah purna pada tahun 2015 lalu dengan jabatan menjadi ketua PAC. Dirinya sendiri terlibat dalam struktural PDI dimulai pada tahun 96, ketika itu menjabat sebagai koordinator Bankorcam (bantuan koordinator kecamatan). Sampai pada akhirnya dia bisa menjabat sebagai ketua PAC pada tahun 2001 sampai terakhir 2015.

Pada diri informan lain yang bernama Subagijo, mempunyai jalan yang berbeda dengan kader lainnya, karena dirinya adalah kader ‘instant’ yang dibawa oleh bupati waktu itu, Singgih Sanyoto. Subagijo awalnya adalah seorang PNS yang mempunyai pendidikan tinggi sampai strata-2 dan juga menjabat jabatan strategis di Kabupaten Magelang, yakni sebagai kepala dinas pendidikan. Subagijo sendiri pensiun sebagai kepala dinas pendidikan pada tahun 2006. Dan baru tahun 2013 ketika ada pemilihan Bupati, dirinya dilirik dan diajak oleh Singgih Sanyoto untuk menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk PDI Perjuangan. BP Pemilu sendiri adalah sebuah jabatan strategis dalam kontestasi politik, apalagi ini pemilihan bupati. Tidak sembarang kader yang bisa menjadi ketua BP pemilu.

Pada akhirnya, kepercayaan Singgih Sanyoto untuk menjadikan Subagijo ketua BP Pemilu, terbayar dengan memenangkan pasangan yang diusung PDIP waktu itu, Zaenal Arifin – Zaenal Arifin (ZAM-ZAM). Pada pemilu selanjutnya Subagijo juga dipercaya untuk mengawal sebagai ketua BP Pemilu legislatif 2014 dan bagian dari tim pemenang presiden tahun 2014. Walau sudah membantu dalam kemenangan pemilu, Subagijo enggan disebut kader, tapi menyatakan diri sebagai simpatisan.

“Iya, tapi kan nggak terus saya ini lho kader. Saya simpatisan karena sudah bantu pak singgih ya sudah pasti saya simpatisan kalo saya bukan simpatisan dan tidak sejalur pasti saya nggak mau ditugasi itu. Orang sini sudah melihat bahkan pada waktu pilleg ditempat saya pasang bendera PDI, biar orang yang menilai saja lah saya berani mengibarkan bendera di depan rumah ini untuk kemenangan PDI. Jadi semata mata saya berjuang bukan karena ingin diakui sebagai kader nggak, biar

masyarakat yang menilai. Biar PDI yang menilai” (percakapan wawancara dengan Subagijo).

Subagijo adalah kader yang paling unik karena diminta langsung oleh Singgih Sanyoto yang waktu itu adalah Bupati Kabupaten Magelang. Kedekatan dengan Singgih Sanyoto juga dirasakan oleh Suroso. Banyak Informasi tentang partai yang didapat oleh Suroso dari Singgih. Suroso pun mengaku bahwa sebelum dan selama menjadi pengurus sering berkomunikasi dengan Singgih. Kedekatan dan kekaguman Suroso akan sosok Singgih yang banyak berjuang untuk partai di Kabupaten Magelang, menjadikannya sangat semangat untuk berperan dan menjalankan tugas-tugas yang ada di partai, termasuk juga membandingkan kepemimpinan Singgih dalam partai dengan kepemimpinan di DPC Kabupaten Magelang saat ini.

Lain halnya dengan Suroso dan Subagijo, Sakir mendapat informasi pertamanya tentang partai berasal dari orang tuanya yang dulu juga sebagai kader PDI pada zamannya. Kepercayaan informasi yang didapat dari orangtuanya baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi alasan Sakir perlu untuk meneruskan perjuangan orang tuanya di dalam partai.

Keresahan terhadap partai yang dilihat langsung oleh Budi di wilayah rantingnya, membuat Budi bergairah untuk terjun langsung di dalam partai. Informasi tentang partai yang didapatnya yakni dari temannya yang menyampaikan bahwa akan ada musyawarah tingkat ranting. Budi tanpa pikir panjang, akhirnya memulai karir politiknya tersebut di tingkat ranting pada tahun 1996, setelah dirinya mengundurkan diri dari profesi gurunya.

1.2 Pemahaman Ideologi partai

Menjadi simpatisan partai boleh saja untuk tidak paham dan tahu tentang ideologi partai yang dibawa. Asal ada sosok yang disukainya, seseorang bisa saja menjadi simpatisan terhadap suatu partai. Namun tidak untuk kader, apalagi kader yang sudah mendapatkan penugasan dari partai. Pemahaman tentang pemikiran dan ideologi partai harus diketahui dan menjadi alat pijakan untuk bergerak khususnya di bidang politik.

Bagi Budi, memilih menjadi kader PDIP di kabupaten Magelang, agama dan pendidikan menjadi salah satu landasan selain ideologi partai yang disukainya. Budi memiliki pandangan bahwa jika PDIP hanya mengakomodir khusus non muslim, mungkin dirinya tidak akan masuk ke partai ini. Karena agama menjadi isu sensitif yang ada di kabupaten tersebut. PDIP yang nasionalis tidak membedakan agama dan suku, menjadi pilihannya dalam berkarir politik. Dari segi pendidikan sendiri, Budi yang merupakan

sarjana merasa ingin memperbaiki dan mengubah pandangan masyarakat bahwa kader PDIP di Kabupaten Magelang tidak hanya lulusan SLTA, walaupun mayoritasnya demikian.

Kematangan partai dalam berideologi menjadi salah satu landasan mendasar Budi untuk memantapkan diri menjadi kader partai. Kematangan berideologi partai ini Budi tekankan dengan mengatakan bahwa partai ini adalah partai yang tertua dan partai pelopor di republik ini. Dimulai dari PNI, kemudian menjadi PDI dan selanjutnya menjadi PDI Perjuangan. Selain menjadi partai yang besar karena sejarahnya, partai ini merupakan partai yang solid. Kesolidan itu dibuktikan dengan menggerakkan massa PDI itu tidak sulit serta konsolidasi yang dilakukan itu gampang. Kemudian yang terakhir kematangan berideologi partai ini ditekankan pada kejelasan alur hirarki dari mulai tingkat gesrut sampai tingkat pusat.

Kebanggaan Budi akan ideologi partai yang diwariskan oleh Bung Karno yakni marhaenisme, menjadi kepercayaan tersendiri baginya bahwa sampai kapanpun ideologi ini tidak akan hilang ditelan masa. Kerelevanan ideologi tersebut ditekankan dengan pandangan bahwa orang kecil tidak akan hilang sampai kapanpun walaupun Indonesia sudah maju seperti apapun.

“Karena partai ini adalah partainya wong cilik, dan kita harus pro dengan rakyat kecil, dan itu akan selamanya relevan menurut saya. Karena ketika negara ini pun maju, tidak mungkin akan hilang orang-orang kecil seperti itu, pasti ada walaupun Indonesia sudah maju seperti apapun. Walaupun perlahan-lahan akan berkurang tingkat kemiskinannya, yang namanya wong cilik tidak akan pernah habis.”

Dalam kacamata Budi sebagai kader dan struktural, nilai positif yang dimiliki partai ini sekarang jelas yakni menjadi partai penguasa. Tidak ada rasa malu lagi baginya mengakui sebagai seorang kader PDI Perjuangan karena diperhitungkan baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Tapi sisi negatif partai ini yang menjadi sorotan Budi adalah orang-orang yang duduk dipartai tidak semua orang-orang bersih.

“Jadi ada orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Sehingga ada juga keterlibatan temen-temen di pusat yang melawan hukum, yang menyalahgunakan kekuasaan, mungkin korupsi, itu juga salah satu kelemahannya.”

Selain itu nilai minus dari partai ini adalah pada keadaan di daerah PDI Perjuangan masih ditempati oleh orang-orang kelas bawah. Bukan orang-orang elite seperti partai lain yang sengaja merekrut orang elite. Basis yang berasal dari akar rumput, membuat kelemahan dimanapun pada kemampuan SDM-nya.

Pada pandangan lain tentang ideologi yang ada di partai, Sakir yang merupakan teman Budi di kursi dewan dan kepengurusan DPC berpendapat bahwa dalam memilih partai PDIP tidak perlu mencampur urusan antara keagamaan dengan politik. Latarbelakang Sakir yang beragama islam tidak serta merta menjadi landasan untuk memilih partai. PDIP yang menjadi partai nasionalis lebih mengedepankan pluralisme daripada agama. Sedangkan latarbelakang pendidikan Sakir yang lulusan sarjana tidak dirasa bersangkutan dengan politik. Sakir berpolitik karena alasan ideologi bukan pendidikan.

“Kuliahnya sosial tapi kan saya masuk di partai ini sejak SMA. Dan SMA saya latar belakangnya adalah pertanian. Sehingga saya tidak ada menyangkut pautkan masalah pendidikan ke partai PDIP Perjuangan.”

Sakir sendiri mulai aktif dalam berpartai dimulai sejak menjadi pengurus ranting. Sakir tidak menjelaskan tahun berapa waktu itu. Tapi Sakir mengaku melewati peristiwa Kudatuli yang berarti waktu itu PDI Perjuangan masih bernama PDI. Ranting pada rentan waktu tersebut masih bernama kordes, kepanjangan dari koordinasi desa. Ranting yang menjadi saksi perjuangannya yakni di Desa Selomerah, kecamatan Ngablak. Pemaparan Sakir ini membuat pesan tersirat bahwa dirinya sudah lama dipartai dan sudah cukup paham tentang partai ini.

Sakir sangat menyukai nilai dan ideologi yang terbangun dalam partai ini. Seperti nilai senasib seperjuangan, nilai gotong-royong dan nilai prularisme. Nilai ini sangat cocok menjadi wadah kaum nasionalis dari latar belakang yang berbeda-beda. Keidentikan PDI Perjuangan dengan partainya wong cilik dan partai yang meneruskan ajaran Bung Karno juga menjadi landasan Sakir menyukai partai ini. Ideologi dan nilai yang diusung tersebut dinilai Sakir menjadi pembeda partai ini dengan partai yang lain. Arah perjuangan yang tidak hanya semata-mata kekuasaan tapi juga menjalankan amanah untuk menyelamatkan negara kesatuan ini.

Nilai *plus* dari partai berlambang banteng ini digambarkan oleh Sakir bahwa partai ini selalu menjaga keutuhan NKRI. Partai ini mengedepankan asas demokrasi dan gotong royong. Asas tersebut terlihat ketika ada seorang kader partai yang layak secara kualitas, kapasitas dan kapabilitas untuk maju dalam pilihan kepala daerah atau presiden, tapi kader tersebut tidak punya materi. Maka dengan asas yang diusung, kader yang tidak punya materi bisa mengabdikan dirinya menjadi pemimpin.

Nilai *minus* dari PDIP di mata Sakir yakni ketika dalam mengelola partai belum menggunakan cara partai modern. Hal ini menjadikan pengelolaan partai tidak maksimal. Penyebabnya karena masih berpatokan dari ketokohan Megawati. Selain itu sumber daya manusianya juga menjadi nilai kurang yang ada di partai ini. Walaupun masih banyak kekurangan, partai ini tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pandangan politik partai bagi Sakir sudah sesuai dengan pandangan politik dirinya sendiri. Partai yang memegang nilai ajaran Bung Karno seperti berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dengan budaya Indonesia selalu berusaha Sakir terapkan dalam bentuk perjuangan aspirasi di legislatif.

Kecintaan akan ideologi Bung Karno yang diturunkan di dalam partai, lebih ditekankan oleh Suroso. Suroso bahkan lebih mencintai dan mengagungkan pemikiran dan jasa dari Bung Karno daripada kebesaran partai ini.

“...partai nasionalis yang walaupun bukan PDI yang penting partai-partai nasional. Partai Nasional harus merasa bahwa guru-guru Partai Nasional itu adalah Bung Karno. Baik itu Nasdem maupun Hanura maupun apa itu ketemunya itu kan para pemimpin bangsa. Tapi kalau PKB maupun PPP karena kadang arahnya itu pimpinannya bapaknya itu hari ini itu siapa Hasyim Ashari itu kan kalau Muhammadiyah ya Ahmad Dahlan yaitu jadi panutan. Kalau PDI ya Bung Karno. Bung Karno itu kan setara dengan Mao Tse Tung waktu itu setara dengan John F Kennedy, Amerika waktu itu maupun presiden Kuba namanya Castro, maupun Abdul Nashir dari Mesir maupun Joseph kosteto setara dengan itu. (Percakapan wawancara dengan Suroso)

Asal-usul Suroso yang menjalani pendidikan agama pada jenjang SLTP, tidak membuatnya untuk menjadi simpatisan partai berbasis agama. Suroso bahkan mengaku bangga memilih menjadi seorang yang nasionalis, walaupun dasarnya para kakek neneknya berasal dari bendera biru. Walaupun nasionalis, Suroso tetap memegang teguh ajaran islam, dan berusaha mengejawantahkan pemikiran islam yang ada pada diri Soekarno untuk terus dia pegang dan sampaikan kepada orang lain.

“.....Seperti soekarno sendiri kan islam, karena soekarno dididik oleh haji Umar Said, Cokroaminoto dari Surabaya itu kan jadi ketua partai serikat islam. Dia dipimpin dia dididik mondok istilahnya di sana. Selama 6 tahun di sana kan dia nyelesaikan SMP dan SMA, tapi malemnya dia ngaji digembleng oleh itu, haji Umar Said dan Cokroaminoto. Maka setelah beliau mau menjelang proklamasi itu harus diingat bahwa Indonesia itu harus memilih proklamsinya itu hari jumat, karna hari jumat itu Saiyidul Ayyam, maka yang dipilih itu jam 10, 10 menit itu bersama-sama simpatisan waktu itu gak cuman islam tok, dipersiapkan bodyguard-bodyguard macam karate ada silat ada apa itu kan dibuat di sudut-sudut jalan. Nah pangdam-pangdam itu kan dipersiapkan. Nah alasannya itu kan sebelum jumat, jadi kita mendahulukan nasionalisme dulu, daripada ya kita islam tapi islam yang yang nasional. Mangkanya hari jumat itu diambil hari yang terbagus. Andaikata itu

setelah jumat maknanya sudah berbeda, wah negara Indonesia itu jadi negara islam, nah ini orang Kristen orang katolik, bali kan tidak setuju, itu kan masih ada nilai-nilai gaib, maksudnya itu merangkum dari segala suku dari segala agama.” (Percakapan wawancara dengan Suroso)

Pandangan politik PDI Perjuangan sekarang ini dinilai oleh Suroso belum sesuai dengan pandangan politiknya. Menurutnya partai ini harus mengembalikan kepada ideologi Soekarno dengan benar. Selain kalangan atas yang mendapat pemahaman tentang ideologi, menurutnya kalangan juga perlu digalakkan kembali khususnya agar pemahaman tentang ajaran Bung Karno dan Pancasila bisa terus berlanjut. Menurut Suroso jika penggalakan penanaman ideologi tidak digalakkan maka bisa jadi tersusul partai lain. Apalagi partai lainnya bisa melakukan penanaman ideologi dengan mengadakan kegiatan agama, yang artinya akan lebih mudah untuk menggaet massa.

“Kalau sekarang itu hal ini kita lanjut-lanjutkan (tidak mau bekerja kalau tidak ada uang), mungkin di tahun 2045 atau 2050 kita bisa tersalip PKS atau atau tersalip PAN. Karena disana itu dikawal dengan jihad tapi kalau kita patriotis. Kadang partai PDIP kayak gitu kadang-kadang berdekatan dengan minum dengan ini kan repot. Kalau namanya PKS itu musholah-mushola ditanam kemudian berkembang-berkembang. Sekarang saja demonya kaya gitu. Harusnya harusnya tetap islam yang nasionalis.” (Percakapan wawancara dengan Suroso)

Sedikit berbeda nasib karir dengan kader lainnya, Subagijo mengaku bahwa dirinya sebelumnya tidak tertarik untuk ikut partai politik khususnya PDI lantaran dirinya adalah PNS. Walaupun demikian, Subagijo sudah menyukai PDI sejak lama namun secara nyata dirinya tidak bisa memperlihatkankannya. Subagijo mengaku secara jiwa dirinya adalah PDI, maka dari itu dirinya mau ketika diajak oleh Pak Singgih untuk memimpin Pemenangan Pemilu.

Rasa suka Subagijo terhadap PDI Perjuangan berlandaskan karena ideologi yang dianut partai ini. Dirinya merasa cocok dengan ideologi yang dibawa oleh bung Karno dengan ideologi Marhaen dan ideologi Pancasila.

“Ya karena ideologinya saja. Kan dengan baca sejarah pendirinya Bung Karno dengan ideologi Marhaen dan ideologi Pancasila itu saja. Dan PDI juga partai yang nasionalis juga tidak memandang tidak berafiliasi kepada salah satu mahdzab tapi akan memperjuangkan ideologi Pancasila, dan tetap melestarikan ajarannya Bung Karno.” (Percakapan wawancara dengan Subagijo).

Nilai lebih yang dilihat oleh Subagijo adalah bahwa partai PDI Perjuangan punya panutan sendiri, punya alat pemersatu yakni dengan melihat sosok Bu Mega dan Bung Karno. Sedangkan dari kaca mata negatif Subagijo, bahwa partai ini dananya berasal dari gotong royong antar anggotanya. Bagi Subagijo, partai lain seperti Demokrat, Gerindra, mempunyai keunggulan keuangan dengan bergabungnya orang-orang berduit di dalam

sana. Berbeda dengan PDIP yang rata-rata berasal dari barisan akar-rumput. Walaupun partai sudah mendapatkan dana bantuan politik dari pemerintah, namun dirasa oleh Subagijo masih kurang untuk mendanai seluruh kegiatan partai apalagi sampai tingkat ranting.

Akar pemededa partai ini dengan partai lainnya seperti Golkar, menurut Subagijo adalah bahwa partai ini merupakan partai yang paling tua dan tahan uji. Pandangan tentang partai ini salah satunya membuat Subagijo yakin karena telah memilih partai yang tepat.

“Paling tua dan tidak pecah. Golkar kan sudah pecah-pecah. Kemudian yang partai baru itu kan juga. Tapi menurut saya partai ini paling tua dan tahan uji. Di goyang masih tetep terus, baik dulu dipemerintahan atau nggak.”

1.3 Pengelolaan dan Budaya Organisasi

Dalam tahap pengelolaan kader khususnya pada tataran tingkat kepengurusan cabang, pengurus yang duduk di cabang pastinya akan lebih paham. Disini Sakir dan Budi yang juga sebagai Bendahara dan Wakil Ketua DPC lebih banyak membahas tentang pengelolaan kader. Sedangkan pada Suroso sendiri, dirinya hanya bisa menilai bagaimana pengelolaan organisasi pada tingkatan ini bekerja. Pada pandangan Subagijo sendiri, pengelolaan partai lebih dipaparkan secara general. Hal itu menjadi cukup rasional karena Subagijo sendiri tidak pernah terlibat dalam suatu kepengurusan apapun di dalam partai khususnya dilingkup DPC.

Budi dan Sakir lebih banyak berperan dalam menyajikan data pada pengelolaan partai kali ini daripada Suroso dan Subagijo. Pemaparan Budi yang lebih lengkap dalam pengelolaan partai menjadi banyak dikutip pada kali ini, disamping itu pemaparan Sakir yang selalu senada juga akan di selipkan pada pengelolaan partai. Namun keunggulan Sakir di pengelolaan adalah lebih mengetahui pengelolaan dalam bidang keuangan partai. Di samping itu, pandangan kader partai mengenai pengelolaan kader dan budaya yang ada di dalamnya, juga akan dipadukan dari pandangan Suroso dan juga Subagijo.

Pengelolaan partai diawali dengan perekrutan kader, PDI Perjuangan mempunyai tingkatan yang mana di kabupaten Magelang, kader yang ingin berjuang harus memulainya dari anak ranting atau ranting. Untuk perekrutan kader secara terbuka memang belum dilakukan pada lingkup DPC ini. Artinya pengaderan dilakukan dengan berproses dari bawah sekaligus didampingi dengan Pendidikan kader pada setiap tingkatannya.

Pada tingkatan DPC, setelah musyawarah cabang selesai, anggota mengajukan usulan calon ketua DPC ke DPD. Calon ketua tersebut jumlahnya bisa empat, bisa lima.

Dari lima orang yang diusulkan, DPD merekomendasikan tiga nama untuk menjadi calon ketua. Tidak ada voting disini, melainkan musyawarah dari ketiga nama itu saja. Jika mencapai kemufakatan dari ketiga nama yang diusulkan untuk menjadi ketua terpilih, maka tinggal membentuk kepengurusan dan disahkan SK (surat keputusan) oleh DPP. Namun jika tidak ada kemufakatan dari ketiga nama yang bermusyawarah tersebut, maka rekomendasi calon ketua terpilih akan ditunjuk langsung oleh DPD tanpa melemparkan opsi voting kepada kader di tingkat DPC.

Begitu juga pada tingkatan PAC, mekanismenya sama yakni yang mengusulkan nama adalah ranting-ranting yang kemudian dikerucutkan pada tiga sampai lima nama. Dari nama-nama yang diusulkan, dilakukan *fit and proper test* untuk kelayakan menjadi calon ketua PAC. Dari calon-calon yang lolos, bisa tiga sampai lima nama, diusulkan kepada DPD untuk menyetujui usulan. Setelah disetujui barulah mekanisme yang sama seperti DPC dilakukan. Kemudian yang mengesahkan kepengurusan PAC adalah DPD dan yang menyerahkannya adalah DPC.

Fit and proper test berisi dengan beberapa materi tentang ideologi partai, tentang wawasan kebangsaan, tentang ajaran Bung Karno, dan tentang kondisi kewilayahan yang ditempati. Sakir beranggapan bahwa dengan adanya pemahaman tentang kepartaian melalui *fit and proper test* akan memunculkan calon pengurus yang muncul dalam sebuah rekomendasi dari penanggungjawab penyelenggara *fit and proper test*. Hasil dari *fit and proper test* kemudian memunculkan tiga orang yang akhirnya diadakan musyawarah mufakat untuk memilih ketua dari ketiganya. Kalau musyawarah mufakat dari ketiganya tidak terwujud kesepakatan, maka akan dikembalikan ke hierarki di atasnya, alias keputusan dilakukan oleh penanggungjawab perekrutan. Kalau di DPC akan dikembalikan ke DPD kemudian DPP akan mengambil keputusan partai.

Kemudian untuk ranting dan anak ranting, prosesnya hampir sama seperti DPC dan PAC, namun kewenangannya bukan pada DPD melainkan pada DPC. Semua proses tersebut berbeda dengan proses dua atau tiga periode lalu yang mana untuk memilih ketua ditentukan dengan adanya voting terbanyak.

Dalam hal status dan tanggungjawab kader, Budi melihat kader yang tidak menjabat di struktural di lingkup kabupaten Magelang itu tergolong sedikit. Artinya ada kemungkinan seorang kader tidak duduk di posisi struktural partai. Biasanya kader-kader yang mempunyai potensi dan punya dedikasi yang baik terhadap partai sudah dimasukan

ke struktural. Tapi ketika ada kader yang tidak duduk di struktural partai, bisa saja suatu ketika dipanggil untuk ditugasi oleh partai. Jadi disini ada perbedaan antara kader yang menjadi struktural partai dan kader non-struktural.

“Jadi ada perbedaan bahwa satu kader yang duduk di struktural, dan kader non-struktural. Kalau kita pada sistem pencalegan beda dengan sistem pilkada. Jadi kalau pencalegan biasanya rata-rata dari PDI Perjuangan adalah kader yang dari struktural. Entah itu DPC, itu PAC itu orang-orang yang duduk di struktural dan termasuk kuota perempuannya sekalian itu juga dipilih dari orang-orang yang duduk dari struktural baik dari PAC maupun DPC. Tapi ketika pilkada baik itu Gubernur maupun Bupati, Walikota, itu bisa menunjuk seorang kader yang diluar struktural.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Jalan lain perekrutan kader yang disampaikan Budi diatas juga disampaikan Sakir bahwa hal tersebut menjadi salah satu peluang partai dalam melakukan rekrutmen kader. Walaupun alur yang ada dalam partai pun jelas yakni harus berjenjang, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perekrutan kader diluar jenjang tersebut. Diluar alur itu, ada perekrutan jalan lain yakni melalui penokohan yang kuat pada daerah atau nasional.

“Kecuali ada memang walaupun tidak melalui jenjang itu memang secara ketokohan, secara kapasitas kapabilitas juga bisa walaupun tidak melalui proses itu tapi itu adalah tokoh. Mungkin tokoh dari sebuah lembaga dan secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan itu mungkin bisa terakomodir disitu.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Dalam melakukan perekrutan kader, menurut Sakir partai melakukannya belum secara optimal. Menurutnya anggota yang ada kurang representatif dengan anak muda. Anak muda sebagai pemilih pemula mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Namun di lain sisi anak muda tidak tertarik dengan politik.

“Memang butuh kemasan sayap-sayap partai yang akan kita gunakan mungkin dengan PMP-nya (Pendidikan moral Pancasila), taruna merah putih nya, untuk merangkul pemilih pemula.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Mendapatkan kader yang mempunyai potensi berupa sumber daya manusianya yang bagus dan punya pemahaman ideologi yang baik pula, menjadi harapan tersendiri dari Sakir. Ketika nanti yang tua-tua sudah purna, bisa ada yang menggantikannya. Karena bagi Sakir sendiri kader merupakan anggota partai yang sudah masuk dalam struktural. Otmatis kader harus bisa menjalankan setiap perintah oleh partai dan segala kewajibannya. Ketika mendapatkan kader yang bagus, akan memudahkan menjalankan kewajibannya di partai. Untuk menjadi seorang kader, pertama harus menjadi anggota partai. Ada jenjang waktunya untuk mengubah status anggota menjadi kader. Karena rata-rata di PDIP baru di

sebut kader kalau sudah masuk pengurus struktural atau menjadi anggota sayap-sayap partai.

Ketidakoptimalan dalam perekrutan kader, juga dirasakan oleh Budi sendiri. Alasan ketidakoptimalan dalam perekrutan tersebut adalah orang-orang yang terekrut berasal dari akar-rumput atau gesrut. Artinya kadang SDM yang berasal dari gesrut itu kualitasnya kurang. PDI Perjuangan tidak merekrut dengan sengaja kader-kader yang terpelajar seperti kader-kader dari PKS sekarang. Karena PDI Perjuangan betul-betul merekrut orang dari gesrut, dari kaum Marhaen itu sendiri, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kader PDIP itu isinya preman. Kenyatannya memang tidak demikian, walaupun memang gesrut PDIP itu rata-rata lulusan SD dan SMP. Dan ini yang menyebabkan susah untuk mendudukan kader di dalam struktural.

“Di Salam, dari 10 pengurus PAC yang saya bentuk, ketua PAC nya itu Cuma SMP, Sekretaris PAC SMP, bendaharanya S1, wakil ketua yang lain ada SD, SMP, rata-rata SMA. Rata-rata di tempat-tempat yang lain SMP-SMA yang duduk di PAC. Belum ketua rantingnya, ada yang tidak berijazah, ada yang hanya SD, hanya petani. Tapi ya bagaimana, kita lebih memilih orang yang berideologi daripada orang yang pintar. Maka partai PDI Perjuangan itu kan selalu terjaga ideologinya. Kalau orang-orang pintar itu pada akhirnya dia duduk di dalam struktural itu dia cuma punya pamrih. Artinya dia berjuang itu tidak tulus, tapi punya tendensi. Dia akan menghitung, apa yang akan dia dapatkan di partai dia sudah menghitung.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Kekurangan dari sistem perekrutan dalam mendapatkan kader tersebut, membuat jalannya transformasi keorganisasian terhambat. Kalau ada urusan administrasi berupa laporan, mapping, prosentase, dan sebagainya, pengurus di tingkat PAC banyak yang tidak mampu menyampaikan secara hitam diatas putih. Dan akhirnya hanya bisa menyampaikan hal-hal tersebut lewat bicara. Cara mengatasinya biasanya dari DPC berusaha menempatkan dan menghimbau ke PAC pengurus yang khususnya di secretariat minimal berpendidikan SMA. Sehingga bisa faham dan tau tentang komputer.

Usaha untuk menempatkan kader berpendidikan minimal SMA di tingkat PAC karena ingin mengubah pandangan bahwa PDI Perjuangan itu tidak seperti PDI di zaman dulu. Sekarang cukup lumayan di dalam jajaran DPC sendiri yang asalnya dari PAC Pendidikan rata-rata SMA walaupun sarjana juga banyak. Dan di PAC sedang diusahakan demikian, yang juga disertai landasan bahwa ketika seorang PAC tidak berpendidikan minimal SMA, maka dia tidak akan mendapatkan *reward* atau tiket mencalonkan diri ke legislatif.

“Mau tidak mau ya sudah dia hanya bekerja di PAC tapi dia tidak punya tujuan ke depan untuk menjadi legislatif. Tapi itu justru bagus, karena dia tidak punya tendensi apa-apa. Dia mengabdikan di partai itu tidak karena ingin jabatan di legislatif, tapi betul-betul karena mengabdikan.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Walau ada hambatan dengan adanya kualitas SDM partai sendiri, pengurus partai berusaha memberikan Pendidikan kader yang disertai penanaman ideologi guna meningkatkan kualitas kader partai itu sendiri. Sasarannya yakni untuk ketua PAC terlebih dahulu diberikan pendidikan kader pratama yang kemudian pendidikan kader jenjang tersebut juga diberikan kepada jajaran kader PAC yang lain. Pendidikan tingkat ini mengajarkan hal yang paling mendasar khususnya tentang ideologi partai. Kemudian tingkat berikutnya kader madya, dan tingkat berikutnya yang paling tinggi adalah tingkat utama.

Selain hambatan kualitas kader, proses menjadi kader partai tidak serta merta menjadikan setiap kader berjalan sesuai keinginan partai. Menurut Sakir karena ini partai politik yang kental dengan kepentingan, ada yang tidak bisa menjalankan komitmennya dalam berpartai. Walaupun awalnya bahwa kader masuk di PDIP karena kesamaan ideologi, tapi parakteknya tidak seperti itu.

“Kadang ada yang mengambil jalan yang mungkin kurang pas atau kurang beretika. Karena kita politik itu hanya yang ada itu kalau sudah kepentingan bersama, kepentingannya sama baru kita menjadi kawan. Karena di politik ada idiom bahwa tidak ada teman yang sejati dan tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi, itu yang melekat. Dunia politik seperti itu.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Kader partai dapat mengawali karier strukturalnya pada hierarki kepengurusan anak ranting. Namun pada kabupaten Magelang, tidak setiap dusun mempunyai anak ranting. Hal ini dikarenakan kenyataan di lapangan bahwa tidak semua dusun mempunyai kader dan basis dari PDIP. Misalnya dalam satu dusun mayoritas adalah selain partai PDIP dan hanya mempunyai dua kader, tempat tersebut tidak bisa membentuk kepengurusan anak ranting sendiri dan bisa digabung dengan dusun yang lain. Petunjuk teknis dari DPD yang menjadi pijakan DPC kabupaten Magelang menggabungkan beberapa anak ranting.

Diluar kontestasi politik dan segala persiapannya, untuk selalu menjaga ritme gairah berorganisasi biasanya diadakan rapat. Rapat tersebut berupa rapat rutin yang paling lambat diselenggarakan tiga bulan sekali. Dalam suatu kasus bisa juga berupa rapat insidental membahas sebuah isu atau program publik yang sedang berjalan di Pemerintah. Kegiatan lainnya adalah pada bulan Juni, Juli, Agustus biasanya berturut-turut

melaksanakan kegiatan bulan Bung Karno dan agustusan. Selain itu setelah habis lebaran ada kegiatan halal bi halal para kader. Ada juga pelatihan kader pratama untuk ketua-ketua PAC baru tapi yang mengadakan DPD.

Sedangkan kalau waktu Pilkada kegiatannya berupa membentuk suatu tim pemenangan yang kemudian dijadwalkan sosialisasi di tingkat PAC. Nanti PAC yang bertanggungjawab sosialisasi di tingkat ranting dan anak ranting. Intinya waktu pilkada fokus utamanya memaksimalkan kerja dari struktural dari tingkat anak ranting sampai DPC. Masing-masing anak ranting dan ranting mempunyai tanggungjawab langsung untuk mensosialisasikan calon itu kepada masyarakat, tidak harus mengundang masyarakat tapi bisa menggunakan pendekatan personal seperti ngobrol waktu di sawah.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan program lainnya pasti ada saja hambatan. Misalnya dari struktur di tingkat PAC maupun ranting, mereka bisa solid. Tapi, ketika harus turun ke masyarakat, di tengah masyarakat terjadi perbedaan pilihan dan muncul pertanyaan “kalau aku milih calonmu bakal dikasih apa?”. Begitulah kenyataan dilapangan yang disampaikan oleh Budi.

“Dan ketika kita mensosialisasikan, mengajak orang untuk memilih calon dari PDI Perjuangan, pasti orang akan tanya kalau aku milih calonmu dikasih apa?, ditengah masyarakat kan sekarang seperti itu. jadi kan kita memang tidak menggunakan sistem money politik. Money politik yang diberikan langsung kepada pemilih kan tidak. Hanya memang kita harus memakai uang untuk operasional kegiatan yang harus dibiayai oleh DPC, dan juga oleh calon.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Setelah semua tugas dan program terlaksana, barulah diadakan evaluasi. Masing-masing menggunakan mapping semacam kirka. Setelah sosialisasi jalan, diadakan kumpul rutin yang kemudian PAC membuat pelaporan kepada DPC.

“Dari ranting maupun anak ranting nanti akan muncul kendala atau hambatan apa itu perlu disampaikan. Misalnya di salah satu ranting di suatu PAC, itu ketika sosialisasi masyarakat sudah menuntut seperti meminta kaos dan sebagainya itu kan meminta sarana untuk pemasangan gambar dan sebagainya. Atau bahkan ketika alat-alat kampanye kita bagikan (kaos, gambar dll), ada yang dengan sukarela, tapi ada juga yang meminta biaya pemasangan.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Kemudian bentuk evaluasi selanjutnya ketika sudah semua di sosialisasikan, PAC mempunyai tanggung jawab untuk memetakan di masing-masing ranting. Dusun satu misalnya, ketua rantingnya sudah menjalankan tugas, kemudian berapa persen perkiraan suara yang bisa masuk, itu wajib untuk di laporkan. Jadi misalnya desa satu, pendukungnya yang bisa diharapkan bisa memperoleh 50%. Nanti dusun dua juga melaporkan sudah

jalan, ditargetkan 80%. Terus sampai semua dusun, sehingga di rata-rata dari semua laporan, kira-kira jumlah ada berapa persen dari jumlah desa yang ada. Sehingga ketika sudah mendekati akhir kampanye, daerah yang masih rendah perkiraan suaranya diusahakan prosentasinya dinaikan. Caranya apakah harus mendatangkan dari tim, artinya tim kampanye yang datang, ataukah tim siluman dalam arti pasukan gorong-gorong, karena PDIP juga ada pasukan gorong-gorong. Ataukah perlu ditambahi alat untuk memperkenalkan calon. Karena semua langkah politik tersebut membutuhkan gerakan dari kader, khususnya untuk kampanye dan sosialisasi, anak ranting dan rantinglah yang akan menjadi ujung tombak dalam bersentuhan dengan masyarakat. Baik semua pemilihan Pilkada, pilgub dan pilpres.

Tindakan yang diambil DPC kepada pengurus yang tidak kerja untuk sosialisasi dan sebagainya, tidak langsung diganti. Karena di dalam kepengurusan, tidak bisa sertamerta mengganti orang per-orang ketika orang itu tidak loyal kepada partai. Harus menggunakan mekanisme dan mengetahui alasan mengapa seorang kader missal ketua ranting tidak bekerja untuk mensosialisasikan calon yang diusung.

Untuk tolak ukur keberhasilan kader atau dalam sebuah kepengurusan struktural, yakni ketika pemilu dan memenangkannya di daerah kepengurusannya. Ketika menjadi ketua PAC maka keberhasilan itu akan otomatis mendapat tiket untuk maju di pemilihan legislatif. Itulah kebanggaan dari seorang kader yang sukses melaksanakan tugas dari partai.

Dalam melaksanakan tugas partai baik melaksanakan organisasi atau memenangkan pemilu, ada *reward* untuk kader yang memang dianggap berhasil melaksanakan. *Reward* itu bukan berbentuk materi melainkan adanya kenaikan tingkat kepengurusan seperti dari pengurus ranting ke PAC, PAC ke DPC dan seterusnya. Sedangkan *punishment* kepada kader bentuknya berupa teguran atau di evaluasi mengapa bisa terjadi demikian. Itu pun jika tidak melanggar aturan serius di AD/ART. *Punishment* yang lainnya bisa juga di reshuffle dari kepengurusan, artinya jika kader itu tidak berprestasi maka bisa diganti dengan kader yang lebih berpotensi. Hal ini dilakukan bukan berarti menyingkirkan tapi untuk kemajuan partai. Walaupun hanya jabatan di partai, itu suatu reward yang menjadi kebanggaan dari kader.

Biasanya seorang kader mendapatkan tugas sesuai dengan surat keputusan (SK) dari partai dalam hal ini struktural yang sah. Sakir sendiri mendapat tugas menjalankan organisasi dengan berperan sebagai bendahara partai. Selain itu tugas partai menjadi

bendahara, tugas partai lainnya yang sedang dijalani Sakir adalah sebagai anggota legislatif. Selain tugas yang berdasarkan SK organisasi, ada tugas umum yang harus dilakukan oleh kader. Tugas tersebut berupa membangun persepsi positif terhadap PDI Perjuangan.

“Itu yang paling penting yang akan timbul trust pada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan percaya kepada PDI Perjuangan. Tapi itu dilakukan dengan langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh kadernya.”

Mengenai peran kader ini, Sakir mempunyai pandangan bahwa setiap kader harus melakukan itu. Membangun persepsi positif terhadap partai itu merupakan kunci kesuksesan partai. Sakir berusaha melakukan itu dengan sisi kewenangannya di legislatif. Persepsi politik dibangun bisa dengan berbagai macam cara. Dimulai dari sisi kebijakan, sisi tingkah laku kader, dan masih banyak lagi sisi lain yang bisa dilakukan untuk membangun citra positif tentang partai.

Sejalan dengan fungsinya, Budi memandang kader adalah orang yang mempunyai respek terhadap partai PDI Perjuangan. Dia sanggup, dia respek dan pada akhirnya langkah kerjanya bukan semata-mata karena dirinya tapi karena dia ditunjuk dan ditugaskan oleh partai untuk menempati jabatan tertentu. Dalam arti suatu ketika dia harus menduduki jabatan tertentu, maka dia tetap harus peduli terhadap partai.

Kebutuhan struktur yang di dalamnya terdapat bidang-bidang dirasa oleh Budi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan jumlah dan jenis bidang sudah disesuaikan oleh DPP berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya jumlah pengurus 17 sampai 23. Jika kader dan penduduknya banyak maka bisa sampai batas maksimal, begitu pula sebaliknya. *“Kalau di kabupaten Magelang 19 dirasa cukup ya sudah 19 kepengurusan diisi ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua bidang. Itu sudah mendasari dari kebutuhan masyarakat.”* (Percakapan wawancara dengan Budi).

Struktur dan tugas yang jelas, membuat para kader tidak susah saling berkomunikasi. Komunikasi antar kader akan terjalin lebih maksimal membahas partai yakni ketika adanya program yang diwajibkan. Apalagi pada tataran PAC ke bawah, missal ada program yang diwajibkan untuk setiap PAC, maka komunikasi terjalin sangat maksimal. Diluar itu akan biasa saja dan seperlunya.

Sakir menyampaikan bahwa adanya komunikasi dan kerjasama antar kader salah satunya dengan mengandalkan tiga pilar. Tiga pilar yang berasal dari struktural, eksekutif dan legislatif harus selalu bersinergi. Yang di legislatif berkomunikasi dengan struktural

yang ada, eksekutif pun juga demikian. Begitu juga dengan struktural, harus membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif dan legislatif. Di PDIP sendiri ada kegiatan bernama musyawarah perencanaan pembangunan, gunanya untuk membahas sebuah kebijakan yang nantinya akan di sampaikan ke legislatif atau ke eksekutif dalam hal ini adalah Bupati.

Secara keorganisasian, Sakir menambahkan tentang komunikasi yang terbangun di dalam partai bersifat dua arah. Maksud dua arah tersebut yakni berupa satu yang arahnya terpimpin dari atas ke bawah. Seperti setiap ada keputusan, ada intruksi pasti itu dari atas ke bawah. Namun keputusan yang bersifat kebijakan tentunya mendasari aspirasi dari bawah. Maka akhirnya terwujudlah komunikasi politik dua arah tersebut.

Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan kader khususnya tentang kepartaian. Bagi Sakir yang seorang struktural DPC dan anggota legislatif, turun ke bawah merupakan salah satu untuk menjalin komunikasi. Selain itu dengan mengadakan agenda-agenda kegiatan.

“Yang jelas jaringan komunikasi PDIP Perjuangan di tingkat DPC sampai anak ranting pun berjalan dengan baik. Dengan konstituen pun juga kita selalu berkomunikasi melalui tangan kader kader yang ada di masing-masing dusun maupun desa.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Dengan sistem komunikasi yang sudah terbangun di partai, harusnya kader PDI Perjuangan itu saling kenal. Alasannya karena PDI Perjuangan gotong-royongnya kuat. Sakir mencontohkan ketika pilkada di daerah lain, DPC memberikan bantuan dengan cara gotong-royong sukarela. Hal ini menunjukkan kader itu solid, yang artinya juga memudahkan untuk saling mengenal.

Dalam sistem organisasi dan berpartai yang dianut PDI Perjuangan sekarang Budi menganggap tidak ada yang kurang, artinya hal ini oleh para pemikir dan pendiri partai sudah dirancah sedemikian rupa.

“Baik bagaimana cara perekrutan, bagaimana pergantian seorang anggota, semua pasal-pasal yang dibutuhkan sudah termuat dalam AD/ART. Bahkan kadang kita merasa mengurus partai itu tidak enteng, artinya banyak sekali tuntutan menjadi kader partai. Ya mungkin tidak kurang tapi belum dilaksanakan oleh kader.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Walau aturan sudah lengkap, sebagai seorang kader partai, Budi mempunyai harapan untuk memperoleh kader yang benar-benar memahami ideologi PDI Perjuangan itu sendiri dan bukan hanya pragmatis. Ideologi yang harus dipahami yakni marhaenisme, ideologi PDI sendiri dan ideologi Bung Karno.

Hampir senada dengan Budi, Sakir menganggap norma yang ada di dalam partai belum mampu seutuhnya menjadi pegangan bagi setiap kader, dan itu menjadi masalah tersendiri di partai ini. Belum semua kader menjadikan norma-norma yang ada di partai sebagai patokan. Masih ada kader-kader partai yang bergerak dan berjalan diluar hal-hal yang menjadi garis partai. Walaupun akhirnya mekanisme organisasi yang membatasinya juga. Maka dari itu partai selalu berbenah, karena jika tidak berbenah kepercayaan masyarakat kepada partai menjadi memudar.

Sakir juga menambahkan dari kacamata tanggungjawabnya sebagai bendahara bahwa kekuatan dari pengelolaan kader sendiri terdapat pada gotong-royongnya. Walaupun partai juga mendapat dana pemerintah melalui bantuan politik, tapi menurut Sakir itu hanya stimulus kecil. Penunjang pengelolaan sesungguhnya pada kegiatan yang seperti konsolidasi partai dan pendidikan politik pada kader. Untuk memudahkan dan mendukung pengelolaan, biasanya setiap PAC mempunyai budaya sendiri dengan mengadakan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Budi yang sebagai anggota fraksi di parlemen, menjelaskan tentang keuangan partai. Biasanya DPC memperoleh keuangan dari bantuan politik dari pemerintah daerah sebesar Rp. 140.000.000 per tahun. Bantuan tersebut termasuk bagian amanat undang-undang untuk pendidikan politik. Dari DPD dan DPP tidak ada yang memberi uang, paling ada dari sumbangan-sumbangan anggota yang tidak mengikat. Maka dari itu jika ada kegiatan dari partai maka sumber dana kekuarannya berasal dari iuran rutin dari para fraksi yang ada di parlemen.

Dalam hal pengelolaan kader, Sakir menginginkan secara keseluruhan bahwa partai harus berbenah. Berbenah melalui cara-cara kaderisasi yang baik dengan melakukan sekolah-sekolah politik yang baik. Walaupun untuk saat ini sudah dilakukan pendidikan politik melalui sekolah partai yang berupa sekolah tingkat pratama, kemudian madya lalu terakhir utama. Namun Sakir menilai usaha tersebut masih terbatas, tepatnya terbatas dengan anggaran. Padahal melalui Pendidikan politik yang dibuat partai, partai politik bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin.

Sebenarnya anggaran yang didapat dan dikelola oleh partai khususnya dalam pengawasan Sakir sebagai bendahara, hanya terpusat di DPC dan tidak dibebankan ke struktural di bawahnya. Walaupun di PAC juga ada bendahara, namun untuk jumlah anggaran diputuskan oleh DPC. Sehingga program kegiatan dari PAC ditentukan oleh DPC

kemudian uang itu dikasih. Jadi yang melakukan penghimpunan uang baik berupa iuran partai, bantuan politik dari pemerintah, dan bantuan-bantuan dari kader yang lainnya, itu adalah tanggungjawab dari DPC. Alur ini dimaksudkan agar PAC tidak mencari uang sendiri dan pegang uang sendiri. Karena ditakutkan kalau PAC boleh mengelola uang sendiri, nanti atas nama partai mencari sumbangan kemana-mana dan akhirnya partai yang dirugikan.

Biasanya organisasi mendapat pendanaan pengelolaan salah satunya dari iuran anggota. Namun sampai saati ini belum ada iuran anggota secara keseluruhan di kabupaten Magelang. Walaupun iuran itu ada tapi tidak menyeluruh untuk anggota dan itu tidak rutin. Namun iuran yang rutin perbulan dibebankan pada fraksi yang duduk di legislatif.

“Tapi sebenarnya memang idealnya harus begitu. jadi partai itu didanai dari anggota. Itu memang idealnya, tapi di Indonesia tidak jalan mas, tidak seperti di Amerika. Karena orang masuk ke politik saja rata-rata orientasinya bagaimana caranya aku bisa untung di partai, kan gitu. Saya kira kalau iuran secara rutin belum tapi isidentil ketika pada momen-momen politik, ada kerja politik, sampai tingkat anggota pun iya.” (percakapan wawancara dengan Sakir).

Dalam sistem organisasi dan kepemimpinan partai yang ada dalam lingkup DPC kabupaten Magelang, menurut Budi tidak ada sosok yang mencolok atau diagungkan. Sosok penggerak roda organisasi itu inisiatornya Ketua, Sekretaris dan bendahara. Jabatan tersebut adalah pengurus harian yang harus siap untuk selalu berdiskusi untuk menentukan program-program kegiatan. Sementara ketua bidang dibawahnya hanya mengikuti dari perintah Ketua, Sekretaris, bendahara dan jajaran bidang di tingkat atasnya seperti DPD, dan DPP.

Tidak adanya sosok yang diagungkan khususnya dalam setiap kebijakan yang di ambil di DPC, menurut Sakir alasannya karena pengambilan keputusan selalu dibarengi dengan musyawarah dan mufakat. Di dalamnya, tentunya setiap kader dalam hal ini punya peran masing-masing. Tidak ada yang menonjol atau sangat berpengaruh.

“Jadi tidak ada yang paling berpengaruh secara personal, kita di PDIP Perjuangan itu sama setiap kader. Yang membedakan itu ketika sudah mendapat perintah dari partai itu saja. kalau belum mendapat perintah partai, itu hanya dari sisi kewajibannya saja yang beda di lakukan. Tapi dia sebagai kader adalah sama.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Sedangkan pada tingkat nasional, bagi Budi sosok pemimpin di partai ini hanya Bu Mega yang berpengaruh. Menurutnya bapak Jokowi yang menjadi presiden sekarang ini pun tidak akan menjadi besar dan menjadi pemimpin negara ini tanpa campur tangan ibu ketua umum.

Senada dengan pendapat Budi, Sakir berpendapat bahwa sosok yang sangat berpengaruh di dalam partai ialah Megawati. Namun Sakir juga menambahkan ada tokoh-tokoh lain yang juga bagus di dalam partai seperti Cahyo Kumolo, Hasto Karyo selaku sekjend, ada Puan Maharani, dan ada Prananda Prabowo. Tokoh-tokoh itu menjadi inspirasi buat Sakir ketika menjalani proses politik di tingkat daerah.

Menurut Sakir pengaruh Megawati di dalam partai sangatlah besar. Megawati terbukti menjadi perekat dari semua kader PDI Perjuangan. Dan itu dibuktikan dengan adanya hasil kongres yang mayoritas mengamanatkan kembali Megawati menjadi ketua umum. Megawati dalam pandangan Sakir, sudah berjuang dari sebelum reformasi ketika orde baru mendominasi disitu Megawati sudah berani menyuarakan hal yang berbeda dari pemerintah. Di sisi lain, Mega juga mempunyai sikap yang sangat konsisten dalam politik.

“Contoh misalkan setelah reformasi pak SBY penguasa, karena Bu Mega PDI Perjuangan tidak tergiur iming-iming masuk ke dalam pemerintahan. Padahal waktu itu sudah ditawarkan, tapi dengan sikap konsisten bu Mega kita di oposisi.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Walaupun secara penokohan sangat berpengaruh, Sakir memandang kalau di PDIP pada setiap tingkatannya itu mempunyai proses masing-masing. Jadi tidak memandang bagaimana kepemimpinannya, melainkan semua itu sudah ada aturan main dari partai. Kepemimpinan dari masing-masing tingkatan pastinya tidak diragukan lagi karena sudah melalui berbagai test dan proses. Maka dari itu, Sakir lebih melihat kebijakan dari partai daripada segi kepemimpinan perseorangan.

Pola kepartaian yang terbentuk ini menciptakan budaya politik di lingkungan DPC kabupaten Magelang dipandang bagus oleh Budi. Hal itu didasari dari agenda partai bahwa partai di lingkup DPC mempunyai konsolidasi yang jelas dan terarah. Kepada kader, DPC selalu menyampaikan untuk berpolitik yang baik dan bersih seperti menghilangkan budaya-budaya pragmatis. Kemudian DPC juga menciptakan suasana untuk tidak mentorerir kepada teman-teman yang berkumpul untuk berbicara diluar alur politik yang jelas. Artinya pembicaraan politik harus terkontrol diranahnya. Jadi tidak bisa berinisiasi untuk membuat isu baru misalnya mendesak DPC untuk mencalonkan siapapun, di luar forum atau koordinasi resmi.

Sistem yang telah terbangun tersebut, tidak serta merta membuat setiap aspirasi yang tersaring dalam sebuah forum bisa diserap dalam bentuk kebijakan. Tentunya partai mempunyai pendekatannya sendiri dalam mengkaji aspirasi dan mengusahakannya menjadi kebijakan yang lebih luas. Pertimbangan pendekatan itu seperti pendekatan *bottom*

up, pendekatan *top down*, pendekatan birokrat, teknokrat dan pendekatan politis. Salah satu pendekatan yang condong dilakukan oleh partai politik tentunya pendekatan politis.

Sistem partai PDI Perjuangan hari ini dengan model dipimpin dan bukan liberal, sangat dipegang dan dipercaya oleh Sakir. Maka dari itu apapun keputusan partai, menurut Sakir seorang kader harus tunduk dan patuh terhadap keputusan partai yang ada. Karena partai disini ibaratnya kalau di pemerintahan punya trias politika. Partai yang membuat aturan, partai yang mengawasi, ketika ada yang melanggar maka partai juga yang mengadili.

“Sehingga apapun melawan partai, sekuat apapun kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hati nurani. Tapi kan ada forum-forum tersendiri, ketika kita tidak sependapat dengan apa yang menjadi keputusan partai, kan ada forum-forum ketika menyampaikan. Tapi PDI Perjuangan beda dengan partai lain, PDI Perjuangan selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat. Inilah demokrasi ala ketimuran ya begitu.” (Percakapan wawancara dengan Sakir)

Budaya politik yang bagus dilingkup DPC kabupaten Magelang, ditekankan oleh Budi bahwa juga tidak adanya politik transaksional dari perseorangan atau kelompok ke partai. Artinya tidak ada orang sengaja menyeter uang atau dimintai uang untuk kepentingan politik pencalonan legislatif maupun pilgub. Misalnya sudah terjaring menjadi caleg, ingin memilih di urutan satu dan bersedia membayar sekian ratus juta, itu tidak ada di PDIP. Kecuali urusan bayar membayar itu diperuntukkan kebutuhan membayar saksi dalam pemilu dan itu secukupnya tidak dilebihkan.

“Jadi kita setor karena ada kebutuhan untuk saksi ketika ada pemilihan legislatif, itu yang membayar adalah calon yang bersangkutan. Maka kita urunan (patungan), kebutuhan untuk jasa honor pada saksi itu. Ya kita hitung TPS di kabupaten Magelang ada berapa, dikali tiga ribu setiap orang dikasih seratus ribu rupiah. Otomatis kita membutuhkan dana tigaratus juta. Dana 300 juta itu darimana? Yasudah kita bagi dari yang mencalonkan diri. Yang serius nyaleg berapa orang? Dari tiap dapil kita taruh yang serius fight enam orang. Yasudah 300 juta kita bagi 10 dapil, kita bagi lagi setiap caleg yang serius, masing-masing 6 juta. Berarti ada caleg yang tidak bayar.” (Percakapan wawancara dengan Budi)

Dalam hal budaya politik, Sakir menilai bahwa di dalam lingkup DPC menjunjung tinggi *fatsun* politik atau etika politik. Seperti halnya menghormati yang lebih senior dan membangun politik ditengah masyarakat dengan santun.

Menanggapi proses pengelolaan partai dan budaya organisasi yang nampak dari luar struktural partai pada khususnya di ditingkat DPC, Subagijo setuju dengan sistem partai dengan prinsip tegak lurusnya. Bagi Subagijo sistem tersebut bagus untuk partai

politik karena kalau tidak tegak lurus, di tingkat bawah akan ada rebutan kekuasaan dengan permainan-permainan yang tidak sehat. Dengan sistem ini akan berdampak pada pemenangan partai di daerah yang ujungnya akan mendukung partai pada kontestasi pilpres. Di ranah DPC, Subagijo memandang bahwa ada kestabilan politik dengan bukti bahwa tidak adanya tuntutan sampai pada level tuntutan untuk pengurus DPC mundur.

“Ya menurut saya nggak ada, nah ini bisa dibuktikan karena sampai sekarang partai ini berjalan baik nggak ada yang nuntut ketua DPC dan lain-lain nggak ada. Kemudian ada pengurus yang minta diganti kan nggak ada. Ini menunjukkan semua sistem berjalan kalo nggak jalan kan pasti ada protes, andaikata ada protes kemudian diam-diam nggak sampai muncul kan juga bisa. Ini menunjukkan nggak terlalu besar gejolaknya.” (Percakapan wawancara dengan Subagijo).

Budaya yang tegak lurus dan mengandalkan musyawarah mufakat dalam pergantian kepengurusan dari tingkat anak ranting sampai DPC, membuat Subagijo memandang tidak adanya politik transaksional. Selain karena ketegasan partai tersebut, alasan kader yang berasal dari gesrut dan bukan dari orang kaya menyebabkan politik transaksional tidak akan berkembang di dalam partai.

Jika dilihat secara nasional, budaya partai yang tegak lurus menyerupai sistem feodal, menurut Subagijo lebih diperlukan dan sesuai pada era sekarang ini. Apalagi ditambah adanya sosok kuat bernama Megawati yang menurut Subagijo mempunyai sifat magnet di dalam partai. Subgaijo mencontohkan bahwa partai lain seperti Golkar dan PPP pada beberapa waktu terakhir mengalami konflik internal perebutan kekuasaan. Demokrat juga mengalami hal yang sama ketika Anas menduduki kursi ketua umum, yang pada akhirnya menjadi kembali stabil ketika SBY duduk kembali menjadi ketua umum.

“Boleh dikatakan feodal juga boleh. Tapi demi keutuhan kan baik yang mana, yang feodal atau yang liberal? Pasti semua ada kelebihan ada kekurangan.” (Percakapan wawancara dengan Subagijo)

Selama menjadi BP Pemilu, Subagijo melihat bahwa kekuatan partai ini khususnya di lingkup Kabupaten Magelang berada pada ranting. Karena ketika kampanye sebuah pemilu, yang banyak bekerja adalah kader-kader yang ada di ranting, khususnya untuk mensosialisasikan calon yang dimiliki partai. Namun pengaderan di ranting dinilainya masih *sporadic* dan kurang dibina dengan baik. Perekrutan kader pada tingkatan ranting terlihat hanya ketika menjelang pemilu khususnya ketika pileg.

“Ya itu tadi banyak yang dilakukan menjelang pileg, seharusnya kan itu ada atau tidak ada pileg, pengkaderan itu terus menerus. Harus bergerak dan tingkat karakteristik kader tiap tahun ditingkatkan pemahamannya tapi sekali lagi kalo itu

dilakukan butuh biaya, ya pendidikan ngumpulke orang mendatangkan pembicara.”
(Percakapan wawancara dengan Subagijo).

Dalam pengelolaan kader pada partai, menurut Subagijo pada tingkata DPP, DPD dan DPC sudah memiliki SDM yang memadai dengan banyaknya yang memiliki Pendidikan formal minimal S1. Selain itu, pemahaman tentang politik juga sudah banyak yang baik yang menandakan bahwa bukan berasal dari orang-orang karbitan. Artinya pada tingkatan DPP, DPD dan DPC sudah melakukan pengaderan yang baik. Apalagi pada tingkatan DPC, setelah menjadi pengurus ada diklat untuk pengurus. Namun Subagijo masih mengharapkan kinerja dari pengurus cabang untuk lebih ditingkatkan lagi. Walaupun ada beberapa yang juga menjabat legislatif, harusnya tetap tidak lupa pekerjaan yang ada di partai.

Sebagai kader partai, Subagijo memandang kepemimpinan setiap tingkatan itu penting. Karena dapat berpengaruh pada jalannya roda organisasi pada setiap tingkatan. Seperti halnya sosok yang berpengaruh dalam DPC harusnya adalah ketua DPC yakni Saryan Adi. Pada tingkatan Nasional, Subagijo menilai Megawati sebagai pimpinan partai adalah sosok yang tegas, punya karakteristik dan berwibawa. Sedangkan pada tingkatan DPC dan DPD yang dipimpin oleh Saryan Adi dan Bambang Pacul, Subagijo mengatakan bahwa belum layak dinilai karena baru sebentar menjabat.

Kesuksesan kader partai layak dikatakan berhasil dan berkualitas, menurut Subagijo adalah mampu membesarkan suara pemilu partai pada daerahnya. Subagijo mencontohkan Singgih Sanyoto yang berhasil karena pilihan Bupati dan Pileg di kabupaten Magelang masih mendominasi.

“..... Sekarang ukurannya kader-kadernya berkualitas. Tapi bagaimana bisa mengatakan dia berkualitas kalau hasil pilegnya nggak berhasil, berkualitas nggak dia? Ukuran kualitas itu karena apa, ukuran kualitas kader itu bisa dari hasil pilpres, hasil pileg, hasil pilbub. Kader e apik-apik pemilihan kalah. Berarti kalah baik dibanding partai yang lain. Kita mengatakan baik dan tidak kan ukurannya dibandingkan dengan partai yang lain. Kalau kemarin kita katakana Pak Singgih berhasil karena pilihan Bupati, Pileg, masih menang walaupun selisih satu.”
(Percakapan wawancara dengan Subagijo).

Sebagai bagian dari PDI perjuangan, Subagijo selalu mendukung sikap politik khususnya pada lingkup DPC. Karena baginya sikap politik partai ini hasil serapan dari aspirasi masyarakat. Aspirasi yang telah ditentukan kemudian akan dibahas dan diperjuangkan dalam rapat penyusunan anggaran belanja daerah. Aspirasi yang seharusnya diperjuangkan PDI Perjuangan yang pada basis massanya adalah masyarakat

kecil dan lemah, kaitannya dengan insfrastruktur, penambahan modal usaha kecil, jamkesmas, dan semua yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan dan penilaian terhadap pengelolaan partai dan budaya organisasi di dalamnya juga disampaikan oleh Suroso yang notabene seorang kader yang pernah menjabat pada tingkat PAC. Suroso melihat bahwa salah satu hambatan dari partai untuk terus maju dan berkembang adalah kurang dipegangnya norma-norma partai oleh para kader. AD/ART partai yang terus berubah membuat kader-kader ranting sampai dewan pun terkadang tidak paham dengan AD/ART. Bagi Suroso tidak terlalu memegang norma bahkan mengerti tentang AD/ART ada baiknya kader itu harus terus saling bersilaturahmi untuk menjaga konsolidasi dan pengetahuan politik serta partai. Namun sekarang pun jarang silaturahmi kepada kader-kader lama, hanya seperlunya saja.

Jarangnya antar kader untuk saling silaturahmi, membuat Suroso beranggapan banyak kader sekarang ini yang pragmatis. Misalnya ada kader yang jarang kelihatan baik di acara partai maupun berjuang dalam kampanye partai. Kemudian ketika ada anggota dewan yang silaturahmi ke dapil maupun PAC, kemudian ikut datang dan memuji-muji. Padahal waktu pemilihan tidak ikut memilih dan hanya mengaku-ngaku.

Struktur organisasi yang sekarang ada di dalam lingkup DPC ke bawah, Suroso menganggap hanyalah sebuah bentukan yang berwujud papan nama namun gerakannya kurang. Padahal gerakan dari partai itu yang lebih penting. Namun Suroso tetap menilai bahwa struktur yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan partai itu sendiri namun belum maksimal. Suroso tetap merasa partainya lebih baik daripada partai lain yang hanya melakukan pembentukan jabatan setelah itu ditinggal.

Di dalam internal partai, Suroso tidak menampik kalau ada konflik kepentingan antar kader walaupun baginya tidak begitu terlihat. Baginya itu pribadi masing-masing saja jika terjadi konflik. Karena setiap orang tidak bisa sama dan untuk melengkapi unsur dalam berorganisasi sebaiknya lebih mengutamakan perbedaan. Bagi Suroso yang terpenting setelah terpilih atau kalah berpendapat di dalam partai untuk tidak kesal. Apalagi karena perbedaan pendapat menjadikan saling bermusuhan. Karena yang namanya berpartai itu harus dewasa dan jangan sering-sering menghujat apalagi kepada teman sendiri.

Dalam pengelolaan SDM dan kader secara keseluruhan, Suroso mendukung setiap pengelolaan yang ada. Namun disamping itu tetap mengkritisi pergerakan dari masing-

masing ketua pada jabatan DPC, PAC dan seterusnya. Karena pengelolaan kader sebenarnya di tangan mereka. Apalagi pengelolaan kader di tangan sekjend Hasto Karyo dan bidang pengaderan, Idham Samawi, Suroso sangat respek dan mendukung.

Dalam segi kepemimpinan, Suroso memandang ketua umum Megawati bisa besar dan berpengaruh karena putra Bung Karno dan karena menjadi aktor utama pada peristiwa 27 Juli. Diluar itu dalam ketegasan dan keputusannya di partai, Suroso tidak selalu mendukung keputusan yang dibuat Mega. Namun, Suroso tetap melihat sebuah keputusan tergantung kebutuhan dan intinya adalah menguntungkan bagi rakyat dan partai. Seperti keputusan menunjuk Jokowi jadi calon presiden dan Ahok menjadi calon gubernur Jakarta. Banyak aspek yang dilihat dari keputusan itu khususnya kemenangan partai.

Dari segi kepemimpinan pada ketua umum, ketua DPD dan DPC, menurut Suroso semua sudah ada garis perintahnya dan ketua yang dibawah tinggal menyesuaikan saja.

“...sungai itu kan dari hulu, andaikata agak menyimpang itu ya dari partai jadi istilahnya satu perbuatan jadi mau bener atau nggak harus ngikut.”

Dalam pengelolaannya, tatanan di DPP sampai PAC memang saling berhubungan namun memiliki cara lari yang kadang berbeda. Begitu juga pada DPD yang membawahi langsung 30 kabupaten/kota. DPD mempunyai cara sendiri dalam mengelola partai pada tingkatannya, namun bagi Suroso pengelolaannya belum maksimal sampai bawah karena dirinya tidak pernah mendengar ada kumpul dari DPD. Demikian juga dari DPP, kalau yang turun ke bawah hanyalah perorangan dan membawa kepentingan pada tiap dapilnya.

1.4 Pengalaman dalam politik

Pengalaman politik khususnya di dalam partai memperjuangkan PDI Perjuangan menjadi penting untuk diulas bagi para informan. Hal ini dikarenakan dapat membuka sebagian budaya yang ada namun tidak terlalu mencolok dalam partai. Pengalaman dalam politik yang cukup menarik untuk diulas dalam data disini adalah pengalaman dari Budi. Budi dalam perjalanannya menjadi caleg dari PDI Perjuangan mendapati dirinya berbenturan dengan teman di partainya. Benturan tersebut dikarenakan kontestasi pileg pada tahun 2014.

Pengalaman kader lain yang menjadi informan memang tidak semenarik Budi. Namun informan yang lain mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam berpartai. Pengalaman berproses di partai yang cukup panjang tersebut dapat membuka alasan-alasan budaya yang timbul di dalam partai.

Di mulai dari Budi, dalam berpolitik bersama DPC PDIP kabupaten Magelang, Budi mendapati konflik politik dalam lingkungan DPC yang berbuah pada pemecatan pada kader tersebut. Keadaannya waktu proses pilihan bupati tahun 2013, dari PDIP merekomendasikan Zaenal Arifin beserta wakilnya Zaenal Arifin. Ada calon bupati lain yang namanya Susilo, yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris DPC. Ketika rekomendasi DPP turun, maka yang direkomendasikan Zaenal Arifin, bukan Susilo. Akhirnya Susilo diusung oleh partai lain. dan itu berakibat pecahnya PDIP yang pro rekomendasi DPP dengan mengusung Zaenal Arifin, dan yang mendukung majunya Susilo. Akhirnya Susilo di pecat dari DPP dengan alasan pencalonan yang di angkat oleh partai lain.

“.... Akhirnya PDIP pecah, PDI Susilo dan PDI Zaenal Arifin. PDI Zaenal Arifin saya katakana PDI yang pro dengan rekomendasi. Sementara PDI yang mendukung Susilo saya katakana yang tidak pro dengan rekomendasi. Ini otomatis di lapangan menjadi pecah, menjadi ramai. Ketika saya ajak sama-sama PDI ternyata dia ikut Susilo kan jadi pecah, karena kemarin juga kasusnya seperti itu. tapi ketika Susilo mendapatkan surat pemecatan langsung dari DPP, dia diberhentikan dengan tidak hormat karena di ampu dari partai lain, di PDI hukumnya seperti itu.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Adanya pencalonan dari Susilo yang saat itu menjabat struktural DPC PDI P juga dibenarkan oleh Suroso yang juga selaku teman Susilo. Suroso yang saat itu lebih memilih mengusulkan Zaenal kepada Singgih Sanyoto menyatakan bahwa majunya Susilo tidak dengan PDI Perjuangan dinilainya sebagai sebuah kewajaran. Alasanya karena politik dan ideologi itu hal yang berbeda. Partai politik bisa saja menjadi alat politik oleh politisi. Dalam hal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politik yang lain untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya. Akan berbeda jika PDI Perjuangan dianggap Susilo sebagai perjuangan ideologinya, maka akan memilih bertahan di PDI Perjuangan apapun yang terjadi.

Pemecatan itu menjadi senjata DPC untuk sosialisasi ke ranting dan anak ranting yang terpecah karena Susilo masih mengklaim bagian dari PDIP walaupun diangkat dari partai lain. Pada akhirnya pendukung Susilo di PDIP akhirnya mengerti dan mendukung rekomendasi DPP. Walaupun memang bagi yang sudah mendukung penuh Susilo susah untuk disadarkan. Pendukung Susilo yang ada di tubuh DPC tidak ikut dipecat, karena DPP hanya memunculkan surat pemberhentian kepada Susilo bukan kepada Susilo dan teman-temannya. Jadi yang mendukung Susilo tidak diberhentikan walaupun DPC tahu

siapa orang-orangnya. Walau demikian, mereka yang mendukung Susilo tidak akan dimasukkan dalam struktural periode selanjutnya.

Konflik itu ternyata bukan satu-satunya konflik politik atau friksi yang dilihat atau dirasakan Budi sendiri. Walaupun memang konflik tersebut tergolong konflik besar yang melibatkan para pendukung di dalam internal partai, tapi ada kondisi lain yang bisa menjadikan gesekan antar kader lebih besar terjadi. Yakni ketika adanya pemilihan legislatif, yang mana kondisi itu memaksakan untuk para kader saling berkompetisi bukan bekerja sama. Budi menceritakan adanya gesekan di lapangan ketika dia berkompetisi pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu. Konflik tersebut bersama salah seorang kader yang waktu itu juga duduk di jajaran DPC, bernama Gunawan. Gesekan akan kepentingan politik tersebut terjadi ketika turun dilapangan untuk sosialisasi di masyarakat. Ketika sosialisasi, sebagai seorang kader Budi berhak menggerakkan kader dibawahnya (PAC, ranting dan anak ranting) yang ada di wilayah dapilnya untuk sosialisasi ke masyarakat. Begitu juga dengan Gunawan, dia juga berhak untuk sosialisasi menggunakan struktural.

Dalam kenyataannya sosialisasi dengan menggunakan *money* politik pada pilihan legislatif memang benar adanya. Begitu juga yang dilakukan Budi dan Gunawan. Gesekan terjadi ketika kader struktural di wilayah tersebut menanyakan kesediaan membayar sejumlah uang untuk setiap suara yang bersedia.

“.....Kader saya mengatakan, pak, di wilayah saya ada 100 suara siap mendukung bapak, tapi mereka minta Rp.50000. Terus saya bilang oke 100 suara, a lima puluh ribu, berarti saya mengeluarkan lima juta. Kemudian pak Gunawan masuk di wilayah tersebut, (kader saya bilang) maaf pak disini sudah pak Budi, “Bayar piro pak Budi?.” lima puluh ribu pak (jawab kader). “Tujuh lima ikut saya” (Pak Gunawan). Nah, ketika masyarakat atau kader itu tidak bertanggungjawab, maka dia akan menerima yang 75 ribu itu, dan melupakan 50 ribu pemberian saya. Jadi saling tikam ditubuh sendiri.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Selain itu Budi juga menceritakan caleg lain yang menggunakan cara premanisme ketika berkompetisi dengannya dan caleg tersebut masih satu partai. Ketika masyarakat sudah menyatakan kesanggupan memilih dan Budi dengan memberi biaya transport. Dan terjadilah komitmen antara calon konstituen dengan Budi dengan jumlah 150 orang dan pemberian uang transport sebesar Rp. 30.000. Kemudian ada calon lain yang mendengar cara yang dilakukan Budi tersebut dan mengutus kader yang kebetulan kader tersebut sedikit ditakuti. Kader tersebut masuk ke rumah-rumah tidak sosialisasi namun dia minta amplop dari Budi dan memberi uang sebesar Rp. 40.000. Amplop yang ditarik tidak dikembalikan dan suara juga tidak masuk ke kantong Budi. Urusan ini akan jada ramai

ketika berhadapan dengan kader partai lain. Namun ini berhadapan dengan kader sendiri dan menjadi susah urusannya.

Budi mengklaim bahwa waktu pencalegan mengeluarkan 11000 amplop yang berisi 30 ribu – 60 ribu. Namun suara yang masuk hanya 5000-an. Padahal jika dirata-rata pengeluaran untuk amplop sekitar 450 juta, dan itu belum termasuk biaya alat-alat kampanye beserta saksi-saksi di tiap TPS.

Penyelesaian konflik yang dihadapi dengan Gunawan pada waktu pemilihan legislatif, Budi memilih diam, karena tidak berani menegur secara langsung dan tidak melaporkan keatasan. Kemudian memilih merubah strategi dalam berkampanye untuk mendapatkan suara dalam pileg. Jika akhirnya terjadi konflik secara verbal, ranahnya sementara untuk menyelesaikan konflik yakni di DPC dan paling dengan teguran.

Bagi Budi yang namanya *money politik* itu suatu kemasan yang sifatnya rahasia, tapi itu ada dalam pilihan legislatif. Walaupun kemudian para caleg mengatakan tidak menggunakan *money politik*, namun akhirnya berbagai cara di lapangan. Akhirnya terjadi konflik walaupun setelah selesai pileg semua juga berakhir.

Konflik yang berkaitan dengan pencalonan legislatif juga dirasakan oleh Sakir. Sakir mengaku bahwa ada yang melakukan negatif *campaign* kepada dirinya oleh kader yang ada di internal partai. Namun Sakir enggan menceritakan bagaimana negatif *campaign* itu terjadi.

Money politik ternyata tidak hanya ada dalam sebuah kontestasi pemilu. Suroso juga merasakannya ketika terjadi pencalonan pengurus dan ketua PAC Mertoyudan tahun 2007. Waktu itu ada tiga calon pada kecamatannya, dan itu termasuk Suroso. Salah satu calon menggunakan *money politik* untuk berusaha menjadi ketua PAC. Suroso bisa menangkap basah dan membuat musyawarah penentuan ketua PAC di pending sampai empat bulan lamanya. Akhirnya dalam waktu pending tersebut calon yang menggunakan uang untuk diberikan ke ranting-ranting tersebut tidak jadi dicalonkan. Calon pun akhirnya hanya dua, Suroso dan Abbas. Suroso kalah dalam persaingan waktu itu dengan Abbas, namun Abbas hanya mampu bertahan satu tahun dalam kursi ketua PAC.

Dalam sistem pencalegan di PDI Perjuangan, sudah ada aturan keterlibatan perempuan 30%. Dari 10 caleg yang diusung dalam satu dapil, maka ada 3 calon perempuannya. Namun kuota perempuan itu hanya untuk memenuhi syarat saja. Dengan adanya sistem proposional terbuka seperti sekarang ini, banyak caleg apalagi caleg

perempuannya tidak benar-benar bertarung menghadapi pileg. Ketidakmampuan caleg untuk benar-benar bertarung dikarenakan caleg tersebut amunisinya kurang, yang memang berasal dari gesrut. Hal ini otomatis menguntungkan caleg seperti Budi dan Sakir untuk serius berkontestasi politik apalagi dengan nama besar partai.

“Bahkan di dapil saya, yang nomor satu perolehan suaranya tidak lebih dari 1000. Itu memang tidak fight, karena dia tidak punya uang. Ditempatkan di nomor satu karena aturan dari DPD mengisyaratkan seperti itu. Sebenarnya dia memang mempunyai elektabilitas yang tinggi, tapi karena suaranya terbanyak bukan nomor, jadi dia tidak punya kemampuan untuk berjuang. Dia boleh saja berjuang, boleh saja sosialisasi, tapi ketika orang bertanya wani piro? Dia mundur otomatis, karena ditinggal pemilihnya.” (Percakapan wawancara dengan Budi)

Di DPC kabupaten Magelang, selain adanya persaingan dalam proses pemilihan legislatif dan penentuan calon bupati, masih ada lagi dinamika politik lain. DPC pernah terpecah ketika adanya agenda pemilihan struktural DPC yang baru. Waktu itu ketua DPC masih Singgih Sanyoto, mantan Bupati Magelang dua periode. Singgih menghendaki yang menjadi ketua DPC itu bupati sekarang yakni Zaenal Arifin. Namun yang terjadi adalah pemilihan yang mengalir sesuai suara dari anggota-anggota lain. DPD dan DPP mengamini calon-calon yang diusulkan diluar calon dari Singgih. Sehingga ketika surat rekomendasi tentang kepengurusan DPC yang baru keluar, otomatis pada kubu Singgih tidak punya kesempatan lagi. Dan yang mendukung dengan keinginan Singgih tidak ditempatkan pada struktural.

Dinamika tersebut berdampak sampai sekarang ini. Jadi di DPRD, fraksi PDIP mempunyai 10 kursi. Dari 10 kursi tersebut, 6 orang berasal dari struktural DPC yang baru dan yang mendukung kehendak Singgih Sanyoto 4 orang. Perpecahan kubu tersebut membuat fraksi tidak bisa akur.

“Ketika ada kegiatan-kegiatan partai yang mewajibkan pengurus fraksi atau anggota fraksi itu bisa datang kegiatan DPC partai, karena ada masalah itu jadi 4 orang ini tidak pernah bisa aktif. Itu menjadi pelanggaran sebenarnya karena pada dasarnya fraksi di DPRD itu kepanjang tangan dari partai.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Dinamika politik lain yang dialami oleh Budi sendiri selaku politisi yakni pernah diajak bergabung oleh partai lain, bahkan diajak ikut ajang pencalegan dari partai tersebut. Budi menilai pindah partai ini bisa terjadi apalagi di PDIP ada politik yang kurang sportif. Budi menceritakan ketika keponakannya di kabupaten Temanggung keluar dari partai dan bergabung ke partai Gerindra, yang kemudian menjadi anggota legislatif di Temanggung. Kepindahan itu dikarenakan adanya kelemahan politik dari PDIP yakni ketika ada orang

yang menonjol dan punya kemampuan, orang yang ada di jajaran atasnya menjadi takut. Daripada karir yang ada di atasnya mati secara karir politik, maka kader yang menonjol dimatikan karirnya.

“Maka sepupu saya tadi dibunuh, dia tidak dilibatkan apa-apa lagi baik di kegiatan, atau di apapun dia di non-aktifkan seolah-olah. Tiba-tiba dia di non-aktifkan hanya karena mengancam ini saja. Akhirnya keponakan saya keluar, mengundurkan diri dan akhirnya dia direkrut oleh Gerindra. Tidak hanya di kabupaten Magelang saya kira di semua daerah kader Gerindra itu mantan-mantan kader PDIP yang kecewa. Dipolitik itu kan hanya membunuh dan dibunuh.” (Percakapan wawancara dengan Budi).

Bunuh membunuh karir politik itu juga hampir dirasakan oleh Budi sendiri ketika berhadapan dengan Gunawan di Pileg. Mengingat Gunawan juga kader senior dan mempunyai kedekatan dengan Singgih Sanyoto, mantan Bupati Magelang. Jika akhirnya Budi melawan, maka akan terjadi perang dan diantara salah satunya akan mati karir politiknya. Walau demikian politik santun di tubuh PDIP masih berlaku walaupun tergantung kader itu sendiri.

Untuk pencalonan dalam pilihan bupati menurut Budi konflik internalnya tidak seketan pada pilihan legislatif. Namun hitung-hitungannya dan prosesnya lebih rumit dari mulai elektabilitas, kemampuan SDM, dan kemampuan keuangan untuk kampanye. Bahkan bisa juga mengusung kader dari partai lain dengan bentuk koalisi dengan kesepakatan tertentu atau mengusung tokoh diluar partai yang mempunyai penokohan yang luar biasa. Mengajak tokoh diluar partai juga tidak mudah, karena salah satu syaratnya harus mau menjadi petugas partai dan menjadi kader dari PDIP.

Sakir mengakui bahwa di lingkup DPC memang dinamika politik antar kader sendiri cukup kental. Pragmatisme kader menjadi salah satu dinamika politik yang disaksikan oleh Sakir sendiri. Pragmatisme tersebut bahkan menjurus ke arah politik transaksional. Ada kader-kader yang hanya mementingkan kepentingan ambisi pribadi maupun golongan dengan cara-cara yang pragmatis dan transaksional tersebut. Walaupun memang ada kondisi yang demikian, bagi Sakir itu bukanlah hal tersebut bukanlah ajaran dari partai.

Pragmatisme kader yang pernah dilihat dari Sakir ialah kader partai baru yang masuk partai karena ingin menjadi caleg maupun calon kepala daerah dari PDIP. Tapi disini partai punya mekanismenya sendiri untuk pencalonannya sendiri. Bahkan ditengah jalan dengan adanya mekanisme partai yang telah disepakati, ada kader partai yang membelot karena merasa tidak sesuai dengan keputusan. Sehingga kader tersebut memungkinkan untuk

melakukan hal-hal yang berbeda dari partai. Kepentingan masing-masing kader yang dibawa ke partai memang memungkinkan adanya konflik. Tapi semua konflik yang ada sudah diselesaikan ketika keputusan partai keluar. Rata-rata kader PDI Perjuangan, loyal dengan keputusan partai. Karena kalau tidak loyal bisa dipecat oleh partai.

Kondisi partai dengan berbagai dinamikanya, membuat Sakir tidak luput dari ajakan dari partai lain. PKB pernah menawarinya untuk bergabung. Ada juga dari partai-partai baru mengajak dirinya untuk bergabung. Namun ajakan itu tidak untuk dijadikan pengurus partai hanya sebagai anggota.

Proses yang cukup lama dalam berpartai akhirnya berbuah manis bagi Budi mendapatkan kursi di DPRD dengan segala fasilitasnya. Prosesnya dari mulai mengurus ranting, naik ke PAC sampai sekarang duduk di DPC itu *prestige* dan perjuangan baginya. Diluar kepengurusan, ketika dulu belum mapan seperti sekarang, Budi terus berusaha menyukseskan kegiatan partai sampai dengan menjual barang pribadi untuk mensupport kegiatan. Budi sadar tanpa adanya perjuangan di partai rasanya tidak mungkin bisa duduk di kursi dewan.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh kader kepada partai menjadi sangat penting untuk keberlangsungan dan kesuksesan partai. Sampai sekarang partisipasi Budi sebagai seorang kader tidak hanya tenaga dan pikiran namun juga keranah materi atau uang. Sebagai anggota dewan terpilih, biasanya kader tersebut mendapat potongan gaji untuk kegiatan politik di daerah lain dan untuk kegiatan program daerah sendiri. Tidak ada iuran wajib untuk para kadernya yang lain selain yang duduk di dalam fraksi. Bahkan untuk tingkat Anak cabang, ranting, dan anak ranting, diberikan uang transport setiap adanya rapat konsolidasi.

Tragedi politik yang paling diingat oleh Sakir selama berproses di partai yakni ketika adanya peristiwa Kudatuli (Kasus dua puluh tujuh juli 1996). Pada waktu itu PDI Perjuangan yang berusaha mengimbangi proses demokrasi selalu diintervensi dan diteror dengan berbagai macam upaya. Bagi Sakir peristiwa Kudatuli adalah arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru. Dari peristiwa tersebut dapat menjadi bahan renungan bagi partai untuk berbenah dan tidak melakukan hal seperti kudatuli.

Peristiwa 96 tersebut mengantarkan PDI Perjuangan menjadi partai besar sekarang ini. Megawati yang menjadi figur perlawanan akan campur tangan orde baru di dalam PDI pada tahun tersebut, menjadikan Suroso mempunyai pengalaman yang tidak terlupakan.

Pada tahun-tahun genting tersebut, di Kabupaten Magelang juga ada perpecahan dengan dua kubu PDI tersebut. Suroso yang sudah pasti Pro Megawati yang juga diidolai sebagai putri Bung Karno, ikut berperan dalam menggagalkan partai banteng pimpinan Suryadi untuk besar di Magelang. Salah satunya ketika ada konsolidasi tingkat kabupaten di kubu pro Suryadi, Suroso dan teman-temannya pada barisan Megawati dibawah komando Singgih Sanyoto membubarkan acara konsolidasi tersebut. Pembubaran itu sampai terjadi tindakan yang cukup ekstrem yakni pelucutan pakaian dari para anggota yang mengikuti konsolidasi.

Karena PDIP adalah partai besar, tidak bisa menampik isu negatif diluarnya. Apalagi menurut Budi kekuatan partai ini terletak pada gesrut. Isu negatif yang sering beredar dan sering didengar oleh Budi adalah bahwa partai ini partai urakan, partai preman, partainya orang yang tidak berpendidikan, partainya orang-orang kafir. Isu tersebut sudah tidak relevan karena di Kabupaten Magelang, karena yang mewarnai pemerintahan malah orang-orang PDIP. Di pemerintahan, orang-orang PDIP banyak berjuang, banyak berpendapat, banyak mengeluarkan ide-ide cemerlang.

Tidak beda dengan Budi, Sakir juga sering mendengar pandangan negatif bahwa PDIP dianggap partai yang tidak modern, karena masih tergantung pada ketua umum. Partai yang mempunyai banyak SDM yang kurang bagus. Partai yang kadernya banyak melakukan hal-hal negatif.

Isu negatif berupa penyebutan partai preman, membuat Suroso yang berasal dari gesrut tidak bisa mengelak bahwa partai ini memang ada preman di dalamnya. Walaupun terdapat preman khususnya di kabupaten Magelang, Suroso berpendapat bahwa untuk memenangkan partai tidak harus berisi orang-orang yang bagus. Semua golongan harus dirangkul untuk kepentingan partai.

“... Namanya untuk memenangkan kan gak harus orang yang bagus-bagus. Preman juga satu suara, jendral satu suara, pak lurah juga satu suara. yang penting satu deretan lokomotif itu kan bergerbong gerbongnya ada copetnya, ya ada ini ada ini ada pedagang, ya ada petani, yang penting untuk memenangkan. Kalau kita pilih yang santri yang ini itu ya tidak ketemu tidak jadi menang. Yang penting untuk memenangkan dulu. Di awal itu jangan di kotak-kotak, semua dirangkum dulu nanti ditata yang penting untuk memenangkan.” (percakapan wawancara dengan Suroso).

Didikan yang ada pada dinamika partai, membuat Suroso menjadi lebih berani dan tahan banting. Misalnya dia berani mengambil alih posisi ketua ketika ketua terpilih mundur karena salah satunya adanya tekanan dari petinggi partai di kabupaten Magelang.

Di desanya memang banyak yang cerdas, namun tidak diimbangi dengan keberanian. Jadi partai memang membangun keberanian bagi Suroso, khususnya untuk berani menyampaikan dan menegakkan yang benar. Menjadi pengurus partai khususnya ketua harus siap dikata-katain seperti hewan kaki empat dan sejenisnya, namun baginya kondisi tekanan yang demikian menjadi tantangan untuk terus berpartai.

Suroso cukup lihai memainkan peran dalam berkomunikasi tentang kedudukan politiknya di PAC Mertoyudan. Ketika akan mengganti kepengurusan dengan musyawarah, Suroso rajin mengunjungi pengurus ranting pada wilayah tersebut. Alhasil pada tahun 2001 yang waktu itu pola pemilihan adalah voting terbanyak dari ranting, Suroso memenangkannya dan berhasil menjadi ketua PAC. Walau cukup lihai dalam hal lobbiving, Suroso sadar diri ketika dirinya mendapat jatah maju pada pileg tahun 1999 dan 2004. Dia memilih untuk tidak memajukan dirinya dan memperjuangkan anggota lain, karena tidak punya modal uang dan mempertimbangkan harga diri kalau kalah.

Pengalaman-pengalaman politik khususnya di dalam PDI Perjuangan tidak terlalu banyak dirasakan oleh kader yang langsung menjadi ketua BP Pemilu 2013 dan 2014. Pengalaman Subagijo membesarkan partai hanya dalam waktu dua tahun tersebut, dengan tiga tanggungjawab yakni di Pilbup, Pileg dan Pilpres. Pengalaman yang paling menarik adalah ketika ada pengajuan tuntutan di MK kepada KPU oleh pasangan lawan. Walaupun yang dituntut KPU, Subagijo yang bersama pasangan ZAM-ZAM menjadi pihak terkait atas tuntutan tersebut. Subagijo mendampingi dari siding pertama sampai putusan terakhir yang pada puncaknya dinyatakan aman dan menang.

“Yang paling besar seumur-umur mengikuti siding di MK. Pengaduannya cepat, kan harinya dibatasi. Kan yang jadi yang dituntut kan KPU. Kalau kita kan yang terkait tapi kan juga sangat menentukan. Jadi disana itu kan ditanya, kemudian mengajukan saksi-saksi, kemudian diputuskan. Itu yang paling tertarik disana.” (Percakapan wawancara dengan Subagijo).

2. Partai Banteng dan Rasa Emosi Di Dalamnya

Proses berpartai tidak lepas dari sikap yang didasari dari emosi pribadi seseorang, baik itu positif maupun negatif. Seperti yang dirasakan oleh Budi, dan para informan lainnya yang melihat sebuah permasalahan terkadang melibatkan emosinya.

Kecintaan Budi terhadap partai dan kepercayaan yang tinggi kepada ketua umum Megawati Soekarnoputri menjadi landasannya. Salah satunya ketika berpendapat mengenai

keputusan partai memilih Ahok menjadi calon gubernur dari PDIP. Kepercayaan itu membuat sikap untuk patuh dan mendukung pencalonan Ahok.

“...Saya sendiri ya harus mendukung, apapun yang menjadi keputusan DPP, dalam hal ini ketua umum, kita siap mendukung. Termasuk Pilkada, apapun yang terjadi kita ya harus mendukung. Ketika itu tidak sesuai dengan hati nurani saya, ya saya tetap mendukung.”

Kesukaan dan kecintaan terhadap ketua umum dijelaskan oleh Budi cukup lengkap. Megawati adalah pendiri partai dan PDI Perjuangan tidak bisa lepas dari sosok ini. Artinya ibu Megawati adalah seseorang yang berpengaruh, termasuk berpengaruh dalam kehidupan berpolitik dari Budi sendiri. Walaupun jarang bertemu langsung dengan Megawati, tapi gagasannya dalam spirit partai sudah Budi jalankan.

“Saya sering memandang Ibu Mega adalah sosok yang betul-betul matang di dunia perpolitikan walaupun dia seorang perempuan dan dia punya karisma. Tapi saya tidak tahu ketika ibu Mega turun tidak menjadi ketua umum lagi, atau bahkan karena usia dia pasti akan meninggal, saya tidak tahu apakah kebesaran PDI Perjuangan akankah seperti sekarang ini.”(percakapan wawancara dengan Budi)

Orang memang banyak yang menentang keputusan dari Megawati, tapi kebanyakan keputusannya terbukti keputusan yang tepat. Nilai tambah dari Megawati sendiri adalah putri Bung Karo, penerus generasi dan ideologi Bung Karno secara langsung. Nilai itu yang membuat Budi berpandangan pesimis jika nanti Megawati lengser karena usia apakah partai ini bisa terus bersaing.

Dalam mengomentari ketegasan kepemimpinan partai pada tingkatan DPD, DPP dan DPC, Budi menilai bahwa ketegasan pada DPD dan DPC tidak bisa terlepas dari intruksi DPP. Bagi Budi ketegasan DPD maupun DPC tidak bisa bermain sendiri tanpa adanya intruksi yang datang dari DPP. “....*Jadi intruksinya jelas, semua intruksi sumbernya dari DPP. Jadi DPC tidak bisa membuat agenda partai yang diluar agenda DPP.*”

Pada pandangan Budi kepada kader lain, masih tidak terlepas dari kesukaan yang kuat terhadap partai. Seperti menilai Rustriningsih dan Bibit Waloyo yang pada periode 2008-2013 diusung oleh PDIP untuk menjadi Jateng satu dan dua. Kedua petugas partai tersebut dinilai kurang kontribusinya terhadap partai. Ketika keduanya tidak diusung kembali menjadi cagub dari PDIP, hal itu dianggap wajar oleh Budi karena kurangnya kontribusi tersebut. Bahkan kepada Bibit, Budi memandang bahwa Bibit lupa diri kalau bisa menjadi gubernur karena diusung dari partai PDIP.

Sikap bangga terhadap partai dan Megawati dibuktikan Budi dengan loyalitasnya terhadap partai dari mulai adanya pergolakan tragedi Palu. Waktu itu ada PDI Suryadi dan

PDI Megawati. Budi sudah setia menjadi kader banteng dan memegang trah Soekarno menjadi panutan.

Semua hal diatas membuat Budi nyaman menjadi kader sampai saat ini. Dia menikmati setiap proses yang ada dalam berpartai. Kenyamanan berpartai tersebut berusaha ia wujudkan dalam bentuk keberpihakannya kepada wong cilik pada posisi dewan maupun partai.

Rasa nyaman sebagai kader partai juga ditunjukkan oleh Sakir dengan di dukung dengan adanya rasa percaya terhadap pemimpin partai, Megawati Soekarnoputri. Menurut Sakir, Mega adalah sosok pemimpin partai yang paling baik saat ini. Seorang negarawan sejati yang selalu komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, Mega merupakan sosok pemersatu partai dan juga sebagai figur dalam konsistensi bersikap khususnya dalam lingkup politik. Walaupun sikap yang dikeluarkan terkadang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat umum, tapi Sakir sangat menghargainya. Terutama dalam pengelolaan partai, Mega dinilai sangat luar biasa.

Sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh Mega tidak hanya keputusan secara pribadi. Walaupun Mega selaku ketua umum mempunyai hak prerogatif untuk memberikan keputusan sendiri, namun keputusan yang dibuat tetap melalui proses yang ada di internal partai. Bagi Sakir, keputusan yang dibuat Mega selama ini sudah baik. Tidak hanya untuk kepentingan PDI, tapi juga untuk kepentingan luas yakni bangsa dan negara ini. Keputusan seperti menunjuk Ahok sebagai calon Gubernur Jakarta dari PDIP, yang dalam pandangan Sakir diartikan sebagai menonjolkan nilai kebhinekaan.

“Dia akan memperlihatkan bahwa negara Indonesia itu negara yang berbhineka, akan menunjukkan bahwa PDI itu memang menjunjung kebhinekaan itu. Sehingga Ahok yang dianggap minoritas, Ahok yang dianggap mungkin non muslim, tapi PDI selalu menampilkan kebhinekaan. Inilah kesan yang dibawa oleh Bu Mega menunjukkan pesan pluralismenya itu kan ada di situ. Tidak hanya sekedar Ahok itu jadi gubernur atau tidak tapi disitu ada pesan yang disampaikan bahwa Bu Mega bangun sebuah negara ini kebhinekaannya harus dijunjung tinggi. Tidak hanya sekedar Ahok itu banyak pro dan kontra, tapi pesan dan kesan yang dibawak oleh Bu Mega itu sebenarnya.”(Percakapan wawancara dengan Sakir).

Menurut Sakir, kepemimpinan partai yang di pegang oleh Megawati pada kemudian hari bisa saja ada yang lebih hebat. Di PDIP sendiri banyak kader yang bisa menggantikan Megawati. Apakah nantinya lebih baik daripada Megawati atau sebaliknya, semua itu membutuhkan proses dan tidak bisa dibandingkan sekarang.

Militansi seorang kader yang mengadadi di PDIP bisa dilihat dalam cara kader tersebut mengabdikan dirinya. Setiap kader akan bisa dinilai dari sisi kepentingannya dan sisi kecintaannya akan ideologi dan partai. Jika nantinya menjadi seorang kader karena kepentingannya sendiri, kemudian kepentingannya tidak terakomodir bisa menjadikan kader tersebut membangkang terhadap partai. Sikap membangkang dari kader terhadap keputusan partai bisa berujung keluarnya kader dari partai. Seperti pada Rustiningsih dan Bibit Waloyo yang keluar karena tidak puas akan keputusan partai yang tidak mengangkat dirinya untuk jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Walaupun secara ketokohan cukup berpengaruh, tapi ketika mereka keluar dari PDI Perjuangan tidak punya pengaruh apa-apa. Bagi Sakir banyak dilihat sekarang tokoh-tokoh PDIP yang masih berjuang bersama partai, tapi merasa membesarkan partai. Padahal tidak demikian, sebenarnya kader tersebut yang besar karena partai. Sikap-sikap kader yang membangkang dan merasa besar itu yang terkadang membuat partai bersikap tegas. Karena partai juga tidak mau hanya sebagai kendaraan mencari kekuasaan saja.

Sakir selalu mendukung sikap politik dari partai ini. Menurutnya semua sudah melalui mekanisme dan aturan main dari partai jadi harus didukung dan dipatuhi. Seperti sikap politik yang diambil oleh ketua umum, untuk menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Apapun bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh DPP, Sakir sebagai kader selalu harus siap menjalankannya.

Begitu juga dengan kebijakan partai mengenai penentuan calon legislatif dan eksekutifnya, Sakir juga mendukung. Alasannya karena mekanisme tersebut sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang. Intinya yang dikedepankan oleh partai dalam menunjuk kader untuk maju pileg atau pilkada adalah alasan ideologi. Apalagi kalau di legislatif, kalau tidak kader tidak mungkin menjadi caleg dari PDIP. Itu dibuktikan sekarang yang menduduki kursi legislatif kabupaten Magelang adalah kader yang juga duduk di PAC maupun di DPC. Tidak ada menugaskan orang yang belum berjuang di partai karena perjuangan di partai akan menjadi ukuran.

“Saya kira tidak ada persoalan kalau penentuan calon. Karena PDI Perjuangan selalu mengedepankan dari menghargai dari orang yang berjuang pada partai. Jadi tidak semata-mata kita butuh menang saja, tidak. tapi menang pun itu nanti tidak bisa menterjemakan apa yang menjadi garis partai, yang menjadi ideologi partai, kan susah juga.” (Percakapan wawancara dengan Sakir).

Sebagai kader partai walaupun diajak bergabung pada usia yang sudah sangat matang, Subagijo merasa nyaman dalam berproses bersama di dalam partai. Salah satu

alasan rasa nyamannya muncul karena tidak ada gangguan atau cibiran dari tokoh partai yang lain terhadap Subagijo yang baru bergabung dengan partai.

Landasan Subagijo akhirnya bergabung membantu PDI Perjuangan pada dasarnya bukan karena Singgih Sanyoto yang mengajak. Melainkan karena kesukaannya terhadap ideologi yang dipegang partai ini. Marhaen dan ideologi Pancasila menjadi alasannya bergabung membantu partai dalam kontestasi politik. Di lain sisi memang karena ajakan bergabung karena mengingat usianya setelah pensiun dari kepala dinas yang sudah berumur. Namun di sisi lainnya lagi Subagijo menganggap PDI Perjuangan adalah partai yang nasionalis yang tidak berafiliasi pada salah satu mahzab dan lebih memperjuangkan ideologi Pancasila daripada yang lain. Selain itu partai ini dinilai oleh Subagijo juga melestarikan ajaran Bung Karno, seorang yang dikaguminya dari referensi bacaan sejarah yang Subagijo baca.

Sampai pada saat ini, Subagijo merasa betah dan senang menjadi kader partai. Tidak ada keinginan baginya untuk pindah ke partai lain. Dirinya yang merasa dibutuhkan akan kemampuannya menjadikan Subagijo lebih *enjoy* dalam proses berpartai. Karena sebenarnya secara jiwanya sudah suka sejak lama terhadap partai ini. Namun secara real dirinya adalah PNS pada waktu itu, menjadikannya tidak bisa memilih bergabung. Atas dasar rasa suka dan nyamannya terhadap partai ini, Subagijo pun mengaku siap jika dibutuhkan kembali dikemudian hari.

“Ya saya seneng saja. Senang, enjoy, kemudian saya merasa dibutuhkan. Jika nggak merasa dibutuhkan saya nggak ada. Dan semua teman-teman kader, semua pengurus sikapnya terhadap saya baik. 2018, 2019 siap, selama teman-teman partai masih membutuhkan siap saya. Tapi kan nggak bisa saya menyodorkan diri kan nggak bisa. Karena pimpinan DPC nya kan Pak iyan.” (Percakapan wawancara dengan Subagijo).

Berbeda dengan informan dan kader yang lain, Suroso yang berasal dari gesrut menyatakan bahwa rasa betah berada di partai bukan karena kecintaannya terhadap PDI Perjuangan, melainkan kecintaan dirinya akan sosok Bung Karno. Baginya seandainya partai tidak membawa simbol Bung Karno, mungkin tidak akan menjatuhkan pilihan untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Karena menurut Suroso, Bung Karno yang meletakkan dasar negara, juga ikut serta menggali Pancasila dan dalam undang-undang Dasar 45.

PDI Perjuangan yang kental dengan ajaran Pancasila menjadi alasan Suroso menyukai partai ini. Namun dirinya tetap mengkritisi orang-orang yang bisa mengucapkan Pancasila tapi tidak dengan menghayatinya.

“Karena PDI itu kan dekat sekali atau kental dengan Pancasila tapi kadang-kadang orang bisa mengucapkan tapi untuk menghayati kan tidak mudah. Kita harusnya utuh maksudnya itu kita bisa melihat itu bukan hak saya kita bisa melihat tapi mata hati juga bisa melihat itu bukan hak saya, itu harusnya bisa rukun.” (Percakapan wawancara dengan Suroso).

Berbeda dengan kader lain yang mengidolai Megawati, Suroso terlihat tidak begitu suka dengan Ibu ketua umum. Suroso menganggap bahwa Megawati hanya putra Bung Karno secara ideologis, secara biologis kadang-kadang Suroso merasa berbeda. Suroso malah mengagumi tokoh lain seperti Idham Samawi dan Cahyo Kumolo secara nasional dan Singgih Sanyoto secara local kabupaten Magelang. Sikap kurang sukanya terhadap Megawati ditunjukkan dengan mengkritisi sikap Megawati ketika ada kongres di Bali.

“Ya akhir-akhir ini begitu. Bu Mega masih orang PDI, Tapi kan yang jadi harapan saya itu tidak itu itu saja. Maksudnya kalau bicara ya sudah, serahkan kepada kadernya, daripada saya salah-salah. Seumpama contoh di Bali, hey kamu kader partai, kepanjangan partai. Kan nggak begitu bicaranya sama presiden. Harusnya porsinya itu, kamu sudah jadi presiden, bagaimana seharusnya seperti ini.” (Percakapan wawancara dengan Suroso).

3. Partai dan Konatif dari Kader

Pada dasarnya konatif merupakan perilaku berdasarkan sikap. Namun perilaku disini akan digunakan untuk membuka budaya organisasi partai. Perilaku disini berlandaskan pada perilaku seorang kader dalam berproses dan menjalankan kegiatan atas dasar rasa cintanya kepada partai. Dalam data konatif kali ini, yang ditampilkan hanyalah perilaku Budi. Alasannya karena konatif atas partai dari seorang kader sudah terwakili seluruhnya dari Budi. Apalagi jika melihat atas rasa nyaman dan rasa cintanya setiap kader yang menjadi informan, maka bagi peneliti tidak perlu mengulangi data yang sama walaupun pada orang atau informan yang berbeda.

Sebagai seorang kader yang sekaligus petugas partai, ketika bersinggungan dengan masyarakat Budi selalu dan harus bersinergi dengan masyarakat. Ketika ada bantuan yang disalurkan lewat Budi, maka dirinya wajib menyalurkannya ke masyarakat tersebut. Begitu juga ketika masyarakat menyampaikan aspirasi kepadanya maka jika dia sanggup dan tidak terkendala oleh beberapa aturan, harus diteruskan aspirasi tersebut.

“.....Walaupun kita tidak bisa selamanya memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi ketika setelah disumpah dari awal bahwa kami harus memperjuangkan aspirasi masyarakat baik itu di komisi maupun di fraksi.”

Cara budi menyampaikan pandangan politik maupun aspirasi yang dibawa dari konstituennya biasanya dilakukan pada forum-forum rapat kalau itu di DPC. Misalnya

menjelang bulan Bung Karno, pasti ada kegiatan yang kemudian disampaikannya gagasan yang dimilikinya. Kegiatan yang berusaha diusulkan oleh Budi biasanya kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat. Bukan hanya seremonial semata yang tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut seperti pengobatan gratis, pasar murah, dan sejenisnya.

Dalam menjalankan tugasnya di partai secara optimal, Budi menyelaraskan apa yang dikerjakannya di kantor sebagai Dewan diusahakan sesuai dengan tugas kepartaian di DPC. Kebetulan juga jabatan di DPRD dan DPC hampir mirip yakni tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu tugas anggota Dewan seperti mendapat mandat memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan jumlah 40 rumah. Di dalam pembagian tersebut harus di diskusikan di DPC supaya bisa dipetakan secara adil dan merata.

Untuk menjaga harmonisasi dengan konstituen, Budi berkomitmen dengan konstituen ketika akan mencalonkan diri. Komitmen yang berupa kontrak politik itu seperti kesanggupan Budi untuk menyampaikan aspirasi setelah terpilih. Tidak hanya untuk struktural yang memperjuangkan Budi dalam mendapatkan suara ditengah masyarakat, tapi juga kepada masyarakat. Mengembalikan setiap kegiatan yang ada di lembaga dewan, bantuan atau apapun itu langsung kepada masyarakat itu merupakan perwujudan nyata nya memenuhi komitmen. Walaupun pada kenyatannya yang sering menuntut dan menanyakan bantuan adalah dari struktural memperjuangkan Budi ditengah masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh Budi kepada sesama kader supaya memudahkan dirinya bekerjasama dalam berpolitik dan berpartai yakni ketika ada forum. Pada kader yang ada di dalam fraksi, Budi setiap hari bertemu dan selalu berkomunikasi, baik dalam membuat pandangan umum ataupun dalam rapat fraksi. Pada kader di luar fraksi di tingkat DPC selalu berkomunikasi pada rapat rutin DPC. Sedangkan dengan kader yang ada di bawah DPC, seperti PAC bentuk komunikasinya juga dengan rapat rutin PAC walaupun hanya terkadang saja diundangnya. Karena Budi berangkat dari PAC Salam, maka komunikasi terus terjalin untuk membina struktural.

Komunikasi maksimal antar kader sendiri terjadi ketika akan melaksanakan program-program kegiatan yang ada di partai. Pada kesempatan itu komunikasi yang terbentuk bisa berupa saling sharing, bahkan bisa saling berdebat yang akhirnya

memutuskan sesuatu. Pada hari-hari biasa komunikasi yang terjalin hanya sebatas komunikasi yang tidak bersangkutan dengan kepartaian.

Tidak ada kesulitan dalam komunikasi antar kader, jadi kalau dilapangan secara intruksi DPC ke PAC tidak sulit karena DPC sudah memiliki kontak masing-masing PAC.

“Misalnya ada intruksi yang mendadak, bisa menggunakan telepon atau sms. Namun ketika ada hal yang sangat penting dan perlu dipertanggungjawabkan dengan bukti undangan, itu biasanya dibuatkan surat dan ada kurir yang keliling ke PAC-PAC se kabupaten. Dan seterusnya ketika PAC menghubungi ranting, semua PAC sudah punya nomor ketua ranting, sehingga intruksi itu sampai dengan cepat.”

Dalam pengelolaan kader sendiri selain membutuhkan komunikasi yang efektif, juga membutuhkan sebuah treatment untuk meningkatkan SDM kader. Bentuk dari treatment tersebut berupa pelatihan dan pembinaan. Budi sendiri masih membina secara langsung PAC tempatnya berasal. Selain itu selalu melibatkan PAC dalam setiap kegiatan-kegiatan di DPC itu merupakan salah satu langkah peningkatan SDM kader. Salah satu kegiatannya berupa pembagian kartu Indonesia Pintar. Pembagian itu melibatkan PAC, yang kemudian diberi pelatihan dalam membagikannya. Ada juga pelatihan kader untuk menjadi pandu juang yang dilatih oleh DPD langsung. Fungsinya untuk memelopori keberhasilan dalam suatu pilkada, dan itu juga untuk PAC ke bawah.

“....., Kan tidak mudah membagi sekian puluh ribu, dan tertarget sampai akhir bulan ini selesi. Kadang kartu Indonesia Pintar itu sudah diusulkan 3 tahun yang lalu, ketika masuk pada yang bersangkutan ternyata orangnya sudah lulus bahkan sudah drop out tidak sekolah lagi. Otomatis kan hilang, dicoret. Harus di return, harus dikembalikan. Bagaimana supaya pengembalian itu tadi tidak sia-sia, atau tidak hangus. Maka harus diganti diusulkan orang yang lain dengan bukti KK, KTP dan sebagainya. Itu semua kan butuh pelatihan.”

Diluar pengelolaan kader, untuk menjaga kestabilan organisasi Budi memilih mengambil sikap untuk diam ketika ada konflik internal yang bersinggungan dengan dirinya. Seperti konflik dengan Gunawan, sikapnya untuk didiamkan dinilainya lebih baik daripada harus berkonflik secara terbuka dan mengorbankan salah satunya. Berbeda jika ada konflik karena keputusan partai, maka harus berusaha tegak lurus sesuai perintah partai.

” Maka ketika partai yakni DPP, mengatakan A maka DPD, DPC sampai ranting harus bunyi A tidak ada yang lain. Maka jika berusaha membengkokkan akan ada sanksi seperti pak Susilo.”

BAB IV

MEMBAHAS SIKAP KADER BANTENG ATAS BUDAYA ORGANISASI

Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi.

Sigit Pamungkas

Pada bagian ini, peneliti akan mengklasifikasikan pembahasan dari hasil temuan data yang ada pada bab sebelumnya. Klasifikasi pembahasan tersebut antara lain:

1. Budaya organisasi yang dirasakan oleh kader
2. Pembentukan dan klasifikasi budaya politik partai
3. Sikap yang timbul atas adanya budaya organisasi partai
4. Catatan kritis terhadap budaya politik di PDI Perjuangan.

Kader dalam penelitian ini sebagai objek utama untuk diketahui sikapnya dalam setiap budaya organisasi yang ada di partai politik PDIP. Pembedahan budaya organisasi yang ada dalam partai sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sigit Pamungkas dalam buku *Partai Politik: teori dan praktik yang ada di Indonesia* (2011: 22). Sigit menjelaskan bahwa partai politik adalah entitas yang kompleks. Kompleksitas realitas partai politik itu disebabkan oleh asal-usul pembentukan, orientasi partai, pengelolaan organisasi, dan lain sebagainya.

Ungkapan Sigit tersebut sangat sesuai dengan salah satu peran dari budaya organisasi yang diungkapkan oleh Robiens (2003: 218). Bahwa budaya sebagai suatu peran penyetap tapal batas, dimana budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Maka dari itu dibutuhkan pengelompokan dari budaya ya terbentuk dalam organisasi khususnya yang ada pada lingkup DPC PDI Perjuangan kabupaten Magelang.

A. Budaya organisasi yang dirasakan oleh kader di lingkup DPC PDIP Kabupaten Magelang

1. Pembentukan Budaya Organisasi

Schein dalam Sobirin (2007:202) mengungkapkan bahwa pembentukan budaya organisasi tidak dapat dipisahkan dari peran para pendiri atau pemimpin lainnya yang membawa suatu set asumsi dasar, nilai, perspektif, dan artefak ke dalam organisasi. Selain itu Schein juga mengatakan bahwa interaksi antar anggota dalam memecahkan masalah

organisasi sebagai bagian dari pembentukan budaya organisasi. Namun interaksi antar anggota tersebut merupakan pembentukan budaya organisasi yang tingkatannya dibawah peran dari tokoh maupun pemimpin. Pembentukan budaya organisasi yang terakhir menurut Schein juga bisa ditentukan oleh perseorangan masing-masing anggota.

Jika dikaitkan dengan data yang telah peneliti temukan bahwa dalam PDI Perjuangan khususnya dalam lingkup kabupaten Magelang, kondisi atas pengaruh peran tokoh dan pemimpin secara nasional tidak dapat dipisahkan dari eksistensi partai sampai daerah Magelang. Pengaruh penokohan yang kuat sebagai simbol partai menjadi data dominan yang disepakati informan. Megawati sebagai ketua umum dan sebagai figur utama partai menjadi pegangan bagi para anggotanya. Megawati digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi pemersatu partai. Sampai saat ini belum ada yang menggantikan sosok Mega di dalam partai.

Penokohan Megawati sendiri terbentuk pada puncaknya ketika adanya kejadian Kudatuli. Mega yang sebelumnya sudah dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI, menjadi simbol perlawanan intrik politik Orde Baru yang masuk dalam partai PDI. Gesekan atas terpecahnya PDI pada tahun 1996 tersebut, dirasakan sampai kader di tingkat daerah. Waktu itu sudah banyak kader PDI yang mendukung Megawati. Salah satu alasannya karena Megawati adalah keturunan langsung dari Plokomator kemerdekaan Indonesia. Tentu itu menjadi nilai lebih, ditambah sikap para kader yang sudah mulai *resistance* dengan komposisi partai yang di intervensi pemerintah.

Sampai hari ini simbol penokohan partai begitu melekat kepada Mega. Namun disamping itu, ideologi yang terus disebar oleh Mega tentang keberpihakannya kepada wong cilik dan kaum Marhaen, menjadi nilai tersendiri dalam membentuk karakter organisasi. Penanaman ideologi tersebut diterima oleh kader dalam bentuk aturan yang tertuang di dalam AD/ART dan pesan-pesan untuk terus menjaga ideologi Bung Karno.

Nilai dan ideologi yang terus disebar oleh tokoh dan para pemimpin partai menjadi karakter yang kuat menimbulkan pandangan yang mengakar bagi setiap kadernya. Seperti bagi Budi, bahwa partai yang berpihak kepada wong cilik sampai kapanpun akan terus relevan karena wong cilik tidak akan habis walau kemiskinan berkurang. Bagi Budi wong cilik pada perspektif partai wajib diperjuangkan dan di bela. Bagi kader seperti Sakir, Subagijo dan Suroso juga demikian, bahwa karakter yang dimiliki partai saat ini menjadikan salah satu alasan mereka untuk merapat ke partai.

Dari segi penokohan pada tingkat daerah, ada sosok yang cukup berpengaruh dalam proses jalannya organisasi DPC PDIP. Yakni Singgih Sunyoto, seorang kader yang telah menjabat bupati kabupaten Magelang sebanyak dua kali. Namun kepengaruhan dari Singgih tetap tidak bisa mengendalikan mekanisme partai. Singgih merupakan sosok yang disegani, terutama bagi informan peneliti Suroso dan Subagijo. Di dalam internal DPC Singgih ingin membuat budaya baru yakni menjadikan bupati terpilih sebagai ketua DPC. Namun akhirnya tidak bisa, karena kader yang lain lebih ingin memegang budaya yang diturunkan oleh DPP atas hasil kongres dengan menjalankan mekanisme yang ada.

Keputusan partai dalam hal intruksi, tugas, bahkan hukuman mutlak untuk diikuti oleh kadernya. Ketegasan partai ini menjadi budaya partai yang ditangkap kader sebagai bentuk demokrasi terpimpin. Alur yang terbentuk sudah sangat sistematis dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing hirarki kepengurusan. Walaupun demikian, kewenangan DPP lebih besar dan kompleks karena menyangkut kader secara keseluruhan, menyangkut keputusan politik di daerah, keputusan politik nasional, dan kebijakan strategis lainnya dengan tujuan eksistensi partai.

Kondisi ini menandakan komunikasi partai lebih dominan dari atas ke bawah, namun masih ada kesempatan bagi kader pada hirarki terbawah seperti anak ranting untuk menyampaikan gagasannya melalui mekanisme kegiatan partai yang ada. Seperti rapat anak ranting yang menyepakati sebuah aspirasi kemudian akan diusulkan kembali ke rapat ranting, PAC, kemudian pada DPC. Jika aspirasi tersebut menyangkut kebijakan daerah, maka hanya di selesaikan pada tingkatan DPC atau DPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan provinsi.

Kerja pada partai akan terlihat dan maksimal ketika menjelang pemilihan umum. Karena partai adalah organisasi politik, maka hal ini menjadi wajar sebabnya target dari partai adalah jabatan politik. Pada hari-hari biasa jauh dari pemilu, maka akan jarang ada aspirasi politik kecuali itu bersangkutan dengan aspirasi tentang kebijakan publik.

Pengelolaan kader dan organisasi pada lingkup kabupaten Magelang, arah dan gairahnya ditentukan pada kader dengan jabatan ketua, sekretaris dan bendahara pada masing-masing hirarki. Di samping itu pastinya juga didampingi oleh hirarki yang ada di atasnya. Seperti menjalankan tugas sebagai kader untuk sosialisasi tentang partai di masyarakat waktu pilkada. DPC hanya sosialisasi dan membarikan materi kepada PAC,

kemudian PAC yang akan turun ke ranting dan ranting turun ke anak ranting sekaligus juga membantu sosialisasi langsung di masyarakat.

Di tataran kader baik di struktural maupun bukan, tidak diperkenankan membahas isu dan kondisi politik partai di luar ruang partai yang sudah ditentukan. Hal itu ditakutkan bahasan bisa menjadi liar dan tidak terkontrol. Maka partai sudah mengaturnya dalam agenda-agenda yang sudah disediakan untuk menyampaikannya seperti musyawarah cabang, rakorcab dan rapat-rapat partai yang lain. Aturan seperti itu yang sekarang diterapkan oleh DPC Kabupaten Magelang.

Dalam menjalankan tugas sebagai kader yang mempunyai tanggungjawab untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap partai, tentunya partai mempunyai sistem *reward* dan *punishment*. Namun *reward* tidak masuk dalam aturan tertulis partai yang disepakati. Artinya *reward* adalah sebuah kondisi yang muncul karena terciptanya prestasi seorang kader dengan balasan kedudukan pada reorganisasi partai selanjutnya. *Punishment* juga demikian ketika tidak melanggar aturan tapi juga tidak menjalankan tugas dari partai, maka akan ada konsekuensi untuk tidak masuk struktural. Orientasi dari *reward* maupun *punishment* tertuju pada jabatan politik struktural yang akhirnya bisa mengantarkan ke jabatan strategis lainnya seperti anggota dewan, kepala daerah bahkan presiden.

Interaksi antar kader yang seperti diungkapkan Schein dalam membentuk organisasi, terlihat pada DPC PDIP kabupaten Magelang ketika menjalankan agenda partai. Suasana yang baru akan terasa jika agenda lima tahunan berupa musyawarah cabang dilaksanakan. Disitu antar kader akan berusaha menyelesaikan masalah yang ada dan memutuskan komposisi baru. Komposisi tersebut akan berdampak pada pola dan ritme kerja organisasi khususnya di sini adalah DPC Kabupaten Magelang.

Interaksi antar kader untuk menyelesaikan masalah tidak bisa diterapkan secara maksimal pada momentum pencalonan politik, baik legislatif maupun calon bupati. Pada proses pencalonan Bupati, hal ini dikarenakan mekanisme partai yang membatasi lingkup DPC beserta hirarki dibawahnya hanya bisa merekomendasikan beberapa nama. Kemudian keputusan mutlak ada di DPP dengan membuat surat keputusan. Begitu juga pada proses pencalonan legislatif, hitung-hitungan yang rumit dan rawan menimbulkan konflik internal membuat keputusan calon dan penomoran calon legislatif tingkat kabupaten di putuskan oleh DPD.

Pada peran perseorangan yang bisa menciptakan budaya baru seperti yang diungkapkan Schein diatas, dalam lingkup DPC PDIP sebagai organisasi politik praktiknya sulit untuk menciptakan budaya baru kalau tidak mempunyai penokohan yang kuat. Karena hal tersebut didasari dari mekanisme partai yang kuat dan kepercayaan kader terhadap mekanisme partai tersebut.

Pola perekrutan kader atau anggota partai yang ada di lingkup kabupaten Magelang, sifatnya tidak terbuka. Tidak ada poster perekrutan kader untuk sebuah wilayah kepengurusan, atau perekrutan calon anggota legislatif untuk mengisi slot yang kosong. Perekrutan dilakukan dengan cara saling mengajak antara satu sama lain seperti yang dilakukan oleh Singgih Sanyoto kepada Subagijo maupun Suroso. Atau kesadaran pribadi seperti yang dialami oleh Budi dan Sakir yang pada dasarnya sudah mencintai partai sebagai gerakan ideologis yang meneruskan perjuangan orangtuanya. Pengaderan optimalnya bekerja pada saat pergantian struktural melalui musyawarah di masing-masing hierarki. Selalu ada nama yang mengisi pada kebutuhan struktur organisasi baik mulai anak ranting sampai DPC.

Dari pola-pola pembentukan budaya organisasi yang ditangkap dari pemaparan mengenai ideologi, pola rekrutmen, pola interaksi, pengelolaan partai dan pola kerja yang disampaikan dalam beberapa paragraf diatas, peneliti menemukan jenis atau tipologi partai yang dianut oleh PDIP. PDI Perjuangan yang sering mengagungkan kader dan besar karena kader yang berasal dari gesrut ternyata bukan penganut tipologi partai kader. Mengutip pemaparan dari Sigit Pamungkas dalam Partai Politik (2011:36), partai kader mempunyai ciri bahwa dalam dimensi organisasi keanggotaan partai atau posisi partai diakar rumput tidak eksis atau minimal. Sedangkan penemuan penelitian ini berkata lain bahwa kader atau anggota yang berada diakar rumput adalah tombak dari partai dan bisa juga berfungsi sebagai jenjang kesuksesan karir politik kader yang harus dimulai dari bawah. Partai massa menjadi tipologi politik yang dianut oleh partai ini, hal itu dilandaskan pada pemapran Sigit mengenai partai massa (2011:37), bahwa pada dimensi ideologi partai, basis bagi partai untuk berkompetisi dengan partai lain adalah ideologi dan perwakilan dari sebuah kelompok sosial. Hal ini sangat sesuai dengan partai ini yang mempunyai pegangan nilai untuk membela wong cilik sesuai ajaran Marhaen. Partai massa juga ditekankan pada dimensi organisasi bahwa kesukarelaan keanggotaan organisasi menjadi inti dari partai (2011:37). Besarnya PDI Perjuangan sampai hari ini tidak lepas

dari kesukarelaan para kader, anggota bahkan simpatisannya untuk membela partai atas nama ideologi.

2. Peran Budaya organisasi

Dari gambaran kenyataan di lapangan berdasarkan pengelompokan pembentukan organisasi yang dikemukakan Schein, peneliti akan menjelaskan lebih detail mengenai apa saja elemen yang masuk dalam kajian budaya organisasi berdasarkan perannya. Setelah itu peneliti akan memsukan unsur analisis dari teori adanya sikap kader partai. Instrumen pembentukan sikap kader yang akan peneliti masukkan dalam peran budaya organisasi partai yaitu (Azwar, 1995:30) pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan pembaga agama, serta pengaruh faktor emosional. Sedangkan peneliti mengambil pemaparan dari Wirawan (2007:35) mengenai peran Budaya organisasi untuk memudahkan pengelompokkan dari budaya organisasi.

1. Kesadaran identitas organisasi.

Dalam pengelompokan ini, budaya yang ada di PDI Perjuangan menjadi sebuah identitas yang berbeda dari organisasi lain. PDI Perjuangan memegang teguh nilai ideologi yang di bawa oleh Bung Karno. Ideologi Marhaen yang membela dan mengangkat hidup kelompok proletar khususnya petani dan buruh.

Bagi para kader, ideologi menjadi alasan untuk bergabung dengan partai ini. Ideologi yang selalu membela *Wong Cilik* dengan berusaha menerapkan nilai ajaran Bung Karno menjadi identitas yang kuat bagi partai ini. Selain itu nilai yang selalu ditonjolkan adalah isi dari Pancasila 1 Juni 1945 yang ada dalam pidato Bung Karno waktu itu. Bung Karno dalam pidatonya menjelaskan secara gamblang maksud Pancasila yang telah disetujui bersama. Dari mulai konsep Ketuhanan, persatuan hingga keadilan. PDI Perjuangan dalam AD/ARTnya juga memegang nilai untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta semangat gotong-royong.

Pembentukan sikap kader dalam hal kesadaran identitas organisasi dilatarbelakangi dari pengalaman pribadi dan pengaruh orang lain yang dianggap penting. Hal ini terbukti dari kader yang mengenal partai dari latarbelakang orang tua yang juga politisi partai PDI. Orang tua termasuk bagian dari orang penting dalam kehidupan kader sehari-hari.

Selain faktor dari orang tua, orang yang dianggap penting terjadi pada Subagijo. Dirinya bisa menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu karena diajak oleh Singgih Sanyoto yang waktu itu adalah Bupati Magelang.

Pengalaman pribadi yang dilihat dan dialami dari kader juga menentukan sikap kader dalam mengetahui ideologi partai. Pengalaman pribadi sampai mengikuti peristiwa kudatuli di Jakarta dan tidur di rumah Megawati seperti yang dilakukan oleh Suroso merupakan bentuk pembelaan atas kesadaran identitas organisasi. Dengan memiliki pengalaman pribadi tanpa ajakan dari orang lain, proses yang dialami oleh Suroso menjadi lebih panjang untuk mengenal ideologi partai.

2. Menyatukan organisasi.

Menyatukan organisasi mempunyai definisi bahwa organisasi berperan sebagai alat perekat dalam menyatukan berbagai unsur organisasi. Alat perekat tersebut seperti norma-norma, nilai dan kode etik yang berlaku di dalam organisasi. Dalam praktik berpartai dan berpolitik memang sering terjadi adanya gesekan. Karena dalam partai politik sendiri tempat berbagai macam kepentingan berkumpul. Tidak terkecuali di dalam DPC PDIP kabupaten Magelang.

Sebagai kader dan struktural Sakir dan Budi juga melihat di dalam partai ada praktik-praktik pragmatisme yang dilakukan oleh kader lain. Seperti pada tataran bawah mencoba mencari keuntungan dari pemilihan umum. Selain itu ada kader yang masuk partai karena menginginkan jabatan tertentu di partai. Seperti yang diungkapkan oleh Suroso bahwa ada praktik pembelian suara untuk mengusung calon ketua PAC Mertoyudan beberapa periode silam.

Dalam contoh kasus lain terjadi konflik pada acara musyawarah ranting se-kecamatan Bandongan pada tahun 2011. Dalam peristiwa itu tidak ada kata mufakat malah konflik karena merasa salah satu pihak melakukan kecurangan pada musyawarah tersebut. Di lain sisi ada pihak yang mengklaim bahwa keributan waktu musyawarah ranting terjadi karena kesalahpahaman.

Walaupun di dalam partai berkumpul berbagai macam kepentingan dan terjadi konflik semacam itu, maka disini yang pertama bekerja adalah nilai-nilai dan kode etik partai. Partai menghendaki semangat persatuan dan gotong-royong bukan perpecahan. Maka dari itu kader yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai akan kembali kepada jalur yang diinginkan organisasi. Dengan begitu berbagai kepentingan pribadi dan

golongan maupun adanya konflik bisa diredam karena aturan, nilai dan etika. Ke ranah yang lebih serius, konflik baru bisa diredam dengan mekanisme ketegasan partai berupa pemecatan.

Dalam peran budaya organisasi ini, sikap yang dimunculkan oleh kader terbentuk karena pengaruh kebudayaan. Kebudayaan disini adalah sistem, norma-norma dan kode etik yang dibangun oleh partai. Semua kader yang peneliti wawancarai sepakat dengan nilai yang diperjuangkan oleh partai. Sepakat dengan mekanisme yang dibangun oleh partai. Semua hal yang sudah melalui mekanisme partai dengan baik maka dipercaya oleh kader akan berjalan dengan baik untuk keberlangsungan partai. Walaupun dalam hal ini ada anggapan bahwa masih ada yang kurang dengan salah satu sistem. Yaitu sistem pengaderan yang dianggap masih kurang maksimal. Namun rasa atau anggapan kurang maksimal tersebut tidak mengurangi kepercayaan kepada partai terutama pada nilai yang dianut partai. Dengan adanya rasa percaya terhadap partai, maka menjadi timbul kesamaan pemikiran antara kader satu dengan kader lainnya dalam konteks kepartaian.

3. Reduksi konflik.

Organisasi pastinya tidak dapat terhindar dari konflik antar anggota. Baik itu konflik secara terang-terangan maupun secara tertutup. Hal ini karena di dalam partai terdiri dari banyak kepala dan kepentingan. Walaupun demikian, organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai *power* untuk melakukan reduksi konflik. Reduksi konflik secara langsung yakni dengan menjalankan aturan yang ada seperti memberikan mediasi, teguran, bahkan sanksi. Secara tidak langsung organisasi juga akan mereduksi konflik karena berposisi sebagai pihak yang memiliki karakter nilai untuk diperjuangkan. Karakter nilai tersebut menjadi tujuan utama para anggota daripada tujuan atau pandangan lainnya.

Sebagai contoh reduksi konflik secara langsung yang ada di dalam partai di lingkup kabupaten Magelang adalah ketika pencalonan Bupati tahun 2013. Waktu itu ada kader struktural DPC yang mempunyai basis massa bernama Susilo ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati. Tapi partai memutuskan lain untuk mencalonkan Zaenal Arifin yang berangkat dari anak cabang. Akhirnya konflik terjadi dengan terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu pendukung Zaenal dan kubu pendukung Susilo. Keadaan menjadi tambah panas ketika Susilo maju dengan diusung partai lain. Beberapa pendukung Susilo masih menganggap bahwa Susilo masih kader PDIP. Akhirnya dari DPP dengan ketegasannya

melakukan pemecatan kepada Susilo, karena alasan loyalitas. Beberapa kader PDIP pendukung Susilo masih bisa kembali ke *track* partai, dan beberapa yang kecewa tetap mendukung dan mengikuti jejak Susilo.

Kasus lain yang peneliti identifikasi sebagai reduksi konflik tidak langsung karena tidak diketahui partai secara langsung adalah konflik dari Budi Supriyanto dengan Budi Gunawan ketika pencalonan legislatif. Pada kasus tersebut perebutan daerah kantong suara secara tidak sehat menjadi latar belakangnya. Sama-sama menggunakan uang untuk merebut hati rakyat. Budi terbuka di dalam forum untuk memfasilitasi konstituen dengan biaya transportasi sedangkan Gunawan melakukan gerilya ke rumah-rumah dengan memberi uang lebih banyak dari Budi. Pasarnya sama dan sasarannya sama namun saling bersikutan menjadikan konflik ini terjadi. Jika konflik tertutup ini diketahui partai maka akan ada mekanisme yang berlaku untuk keduanya. Walaupun tidak diketahui partai, adanya sebuah nilai besar, menjadikan kader yang berkonflik memilih diam dan mengalir begitu saja. Karena jika konflik terbuka dan ditangani partai secara langsung dikhawatirkan akan berdampak pada karir politik diantara keduanya.

Dari kedua kasus diatas peneliti memandang partai hanya memiliki celah kecil untuk terjadinya konflik secara terbuka. Yakni ketika tujuan pribadi lebih besar daripada ideologi yang dipegang kader tersebut. Presentase adanya konflik yang terbuka menjadi lebih besar jika adanya kepercayaan terhadap partai berkurang. Itu bisa terjadi jika simbol-simbol partai seperti Megawati yang terus memprogandakan ideologi ayahandanya diganti dengan kader yang pragmatis dan cenderung kontraproduktif dengan keadaan sekarang.

Dalam peran budaya organisasi sebagai reduksi konflik, sikap kader dipengaruhi oleh faktor pengaruh kebudayaan. Karena kader sudah tertanam dalam pikiran untuk memperjuangkan ideologi partai yang dipilih. Para kader yang peneliti wawancarai memilih jalan partai PDI Perjuangan karena kesukaan dan kesamaan pemikiran atau keresahan diri dengan ideologi partai. Selain itu aturan partai yang menjadi pegangan para kader juga menjadi pandangan bahwa itu adalah norma yang tidak hanya dipatuhi tapi juga sebagai pegangan dalam berpartai.

4. Komitmen kepada organisasi dan kelompok.

Budaya organisasi mempunyai peran untuk memfasilitasi komitmen anggotanya. Dalam berpartai komitmen kader yang sudah terbukti difasilitasi dengan adanya kenaikan hirarki tingkat kepartaian. Dengan adanya kenaikan hirarki, maka kader akan lebih

mempunyai rasa memiliki terhadap partai. Dalam bentuk lain, fasilitas partai terhadap kader diberikan dengan mengadakan sekolah politik atau pendidikan politik dan sekolah kepemimpinan.

Dalam data yang peneliti peroleh bahwa fasilitas kedudukan struktural yang diperoleh kader tidaklah instan. Kader harus membuktikan komitmennya dengan berjuang dipartai melalui anak ranting atau ranting. Apalagi bagi kader yang baru masuk dan tidak mempunyai nama besar serta sumbangsih bagi partai. Jika dilihat dalam sudut pandang organisasi tingkat DPC, fasilitas tertinggi yang di dapat kader adalah sampai jenjang pencalonan kepala daerah tingkat kabupaten (Magelang). Fasilitas lainnya bagi kader yang mempunyai komitmen bagus yang dibuktikan dengan kerja di lapangan adalah dicalonkan sebagai anggota legislatif. Di sini kader minimal harus menjabat jabatan strategis di tingkat PAC.

Fasilitas lain bagi kader yang berkomitmen untuk berpartai di PDI Perjuangan adalah diikutkannya pada program sekolah kepemimpinan dari partai. Walaupun program ini jarang diadakan di Kabupaten Magelang karena keterbatasan anggaran partai, namun ini menjadi *privilege* tersendiri bagi kader yang memang berkomitmen. Selain itu memang ada sekolah partai yang berjenjang seperti pendidikan kader pratama yang terbatas untuk jajaran PAC, kemudian Pendidikan kader madya untuk pengurus tingkat DPC dan kader utama untuk pengurus pada tataran DPP.

Jika diklasifikasikan dalam pembentukan sikap, komitmen yang muncul dari seorang kader didasari dari faktor pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting serta pengaruh kebudayaan. Tiga faktor tersebut peneliti temukan pada keempat informan penelitian ini.

Bagi Budi misalnya yang tumbuh dari keluarga anggota PNI. Kemudian dirinya mulai terpengaruh terhadap nilai yang diusung oleh partai dan merasa cocok dengan idealisme diri. Akhirnya kesukaannya akan partai berlambang banteng menjadi sebuah komitmen untuk berpartai yang sekarang menghantarkannya duduk di kursi legislatif.

Sama halnya dengan Sakir yang orangtuanya merupakan kader PDI. Sakir merasa perlu melanjutkan perjuangan orangtuanya. Disamping itu nilai dan ideologi yang diusung partai juga cocok dengan pandangannya akan nasib wong cilik.

Sedangkan pada kader yang diluar struktural, Subagijo, pembentukan sikapnya akan komitmen kepada partai dilandasi atas pengaruh orang lain yakni Singgih Sanyoto.

Jika tidak ada ajakan kemungkinan dirinya tidak ikut bergabung menjadi tim pemenangan. Alasannya karena dirinya adalah pensiunan kepala dinas.

Pada kader lain yang juga di luar struktural namun sudah cukup lama berkarir di tingkat ranting dan PAC, Suroso, dia berkomitmen dengan partai karena pengaruh kebudayaan dan pengalaman pribadinya. Suroso sangat menyukai sosok Soekarno beserta pemikiran yang melekat pada Sang Proklamator. Suroso berkomitmen dengan partai tanpa melihat siapapun yang ada di dalamnya. Termasuk Megawati sendiri dinilainya saat ini bukan sosok yang spesial seperti Bung Karno. Namun berdirinya Suroso di barisan Megawati waktu Kudatuli menandakan bahwa Suroso menyukai partai ini karena landasan ideologis yang selalu digembar-gemborkan oleh putri biologis Bung Karno.

5. Reduksi ketidakpastian.

Partai politik pastinya mempunyai sebuah target organisasi yakni kekuasaan. Tidak hanya mengenai target, tapi juga bagaimana cara menuju kekuasaan itu harus mampu dijelaskan oleh budaya organisasi partai. Dengan data yang lengkap dan perhitungan yang terukur, membuat partai bisa lebih terarah dalam menggapai tujuan. Hal itu otomatis menambah kemudahan untuk memenangkan kontestasi perebutan kekuasaan melalui demokrasi.

Pada ajang pemilihan kepala daerah, DPC bertanggungjawab menjalankan mekanisme pencarian calon sampai penggerakan kader untuk sosialisasi dan kampanye. Walaupun calon diputuskan oleh DPP, tapi mekanisme penjaringan dilakukan oleh DPC. Dalam proses pemutusan calon, partai melalui DPC melakukan koalisi politik dengan hitung-hitungan kekuatan politik. Sampai saat ini koalisi yang terjadi di dasarkan atas kondisi sosial masyarakat yang pada kabupaten Magelang yaitu berbasis hijau Nahdhiyin. Sudah tiga kali ini PDIP berkoalisi dengan PKB yang notabene punya latar belakang NU.

Kemudian partai membentuk tim pemenangan yang ditugaskan untuk meramu strategi guna memenangkan si calon. Disisi lain partai dalam kewenangan ini DPC melakukan konsolidasi guna sosialisasi pada setiap lini yang ada. Mulai dari internal, kemudian konsolidasi ke PAC, PAC kepada ranting, dan ranting kepada anak ranting. Dalam konsolidasi akan dijelaskan tentang strategi, cara bersosialisasi, target, dan sasaran pada kantung-kantung partai. Pada momen ini semua kader bergerak untuk mencapai tujuan partai. Akhirnya karena sudah tersistem dengan baik dan matang, maka ketidakpastian akan kemenangan menjadi berkurang prosesntasanya.

Faktor pembentuk sikap kader yang ditemukan oleh peneliti dalam peran budaya organisasi reduksi ketidakpastian adalah pengaruh orang lain yang dianggap penting dan pengalaman pribadi. Kedua faktor tersebut peneliti temukan pada proses berkader yang dijalankan Subagijo.

Subagijo merupakan kader 'instan' yang diajak oleh Singgih Sanyoto untuk membantu memenangkan pemilu pada kabupaten Magelang. Pengalaman Subagijo dalam memandu tim untuk kompetisi olahraga dan sebagai kepala dinas Pendidikan kabupaten Magelang itulah yang mungkin menjadi bahan pertimbangan Singgih. Padahal sebelumnya tidak ada kedekatan personal antara Subagijo dengan Singgih Sanyoto. Atas kepercayaan Singgih tersebut Subagijo membuktikan pengalamannya dengan memenangkan pemilu kepala daerah 2013. Bahkan paska itu, pemilu legislatif juga diamanahkan kembali kepada Subagijo. Dan kemudian masuk tim pemenangan untuk Jokowi-Jk.

6. Menciptakan konsistensi.

Budaya organisasi dalam perspektif partai mampu menciptakan konsistensi dalam menjalani proses politik dan proses berorganisasi. Pola pikir yang tercipta di dalam partai yang diturunkan kepada para kader akhirnya menjadi refleksi kader dalam berperilaku dan merespon apapun yang ada dalam partai. Seperti pola pikir untuk berpihak kepada *wong cilik*. Maka dalam setiap usulan bahkan sampai ke perbuatan, harus selalu berpijak untuk mengangkat martabat orang kecil.

Sebagai partai politik, PDI Perjuangan harus mengejawantahkan ideologi yang dipegang dalam segala bidang organisasi termasuk dalam kebijakan publik pada ranah dan daerah yang dikuasai. Di dalam DPC pengejawantahan ideologi diterapkan pada mengelola kader, usulan kebijakan publik, dan program-program partai. Seperti dalam pengelolaan partai, kader yang tergabung di dalamnya kebanyakan dari *gesrut*. Barisan akar-rumput yang notabene adalah wong cilik menjadi tanda kekonsistenan partai untuk melakukan perjuangan politik dengan semangat *gesrut* yang ada di dalamnya.

Dalam bentuk kebijakan di kabupaten Magelang, keberpihakan partai kepada wong cilik dikemukakan oleh Sakir bahwa partai telah membantu advokasi pertanian. Selain itu melalui usulan di parlemen dan eksekutif, partai juga berusaha mencarikan bantuan-bantuan alat dan mesin pertanian serta sarana-sarana petani yang lainnya. Kebijakan itu juga ejawantah dari ideologi Marhaenisme yang dipegang teguh.

Nilai lain yang dipegang secara sangat konsisten dalam partai ini adalah nilai gotong-royong. Gotong-royong dalam partai sangat kuat secara pemikiran dan penerapannya kepada kader. Seperti dalam proses kampanye untuk pemilihan umum. Budi rela mengeluarkan uang sampai menjual barang-barang untuk keperluan kampanye partai. Semangat gotong-royong tersebut sampai mengakar karena landasan nilai ideologi partai. Walaupun kadang juga diciderai oleh oknum kader yang pragmatis.

Sakir mempunyai pandangan bahwa sisi gotong-royong yang paling kuat muncul ketika ada kader yang layak secara kapabilitas, kapasitas dan kualitas namun tidak memiliki uang untuk maju, maka kader yang lain akan berusaha terus gotong-royong untuk mengusungnya. Ungkapan itu senada dengan realitas yang dilihat Subagijo ketika Zaenal Arifin maju dengan gotong-royong dana dari Singgih Sanyoto. Minimnya anggaran partai membuat gotong-royong dilakukan oleh kader yang duduk di legislatif guna menggerakkan roda organisasi partai.

Melihat kenyataan tersebut, faktor yang mempengaruhi sikap kader adalah pengaruh kebudayaan. Pengaruh dari penanaman nilai dan pandangan akan perjuangan wong cilik dan gotong royong menjadikan nilai tersendiri yang identik dengan kata perjuangan yang ada pada partai.

7. Motivasi.

Budaya organisasi mampu menjadi energi sosial yang dapat membuat anggota organisasi bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam partai, kader dan anggota menjadi tombak utama untuk bekerja ketika sedang menjalani kontestasi politik. Terutama kader yang berada pada posisi ranting dan anak ranting. PDI Perjuangan pada khususnya DPC kabupaten Magelang, biasanya melakukan proses-proses motivasi kerja pada sosialisasi strategi politik.

Motivasi dilakukan oleh para elite partai ditingkat DPC baik untuk kader yang sedang berkontestasi maupun kader yang bergerak untuk membantu kontestasi. Motivasi untuk kepada kader juga diberikan partai melalui sebuah sistem kepartaian. Walaupun jarang disebutkan secara gamblang di dalam forum kepartaian, *reward* yang diberikan partai adalah motivasi dan kebanggaan tersendiri bagi kader yang mempunyai peran dan prestasi yang bagus. *Reward* nyata yang diberikan kepada kader khususnya yang berprestasi dalam melakukan sosialisasi politik dan menjadikan suatu wilayah lumbung dari suara adalah kenaikan strata jabatan atau hierarki pada suatu wilayah dari mulai anak

ranting sampai ke DPC. Puncak dari reward ditingkat DPC adalah diberikannya tiket untuk maju menjadi calon legislatif tingkat kabupaten yang notabene hanya diberikan kepada kader yang duduk di struktural DPC dan struktural inti DPC.

Motivasi yang didapati oleh kader secara menyeluruh baik di struktural maupun yang non struktural tapi juga mendapatkan penugasan adalah sama, yakni menggapai kebesaran partai dengan memenangkan kontestasi politiknya untuk berbagai level kontestasi. Kemenangan partai khususnya di kabupaten Magelang dari mulai pemilihan presiden, legislatif sampai pemilihan bupati, menjadi kebanggaan tersendiri bagi para kader jika mampu mendominasi semuanya. Kebanggaan akan menjadi partai pemenang menjadi energi sosial tersendiri bagi para kader supaya terus semangat dalam membesarkan partai. Kebanggaan akan partai menjadi sebuah emosi yang mampu memotivasi kader untuk bergerak demi kebesaran partai.

Seperti motivasi yang dirasakan kader Budi dan Sakir bahwa mereka turun dan ikut serta sebagai kader karena sebuah keresahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian termotivasi ikut membesarkan partai dalam lingkup kabupaten Magelang yang pada akhirnya mendapat reward untuk maju sebagai calon legislatif dan akhirnya berhasil. Pada Subagijo, yang menjadi motivasinya untuk melaksanakan tugas partai sampai akhirnya memenangkan tiga kali kontestasi pemilu adalah ajakan sekaligus tantangan dari Singgih. Disamping itu memang PDI Perjuangan menjadi partai yang disukainya ketika masih bekerja sebagai PNS.

Pada Suroso sendiri, energi untuk berjuang yang menjadi motivasinya dirasakan mulai masih muda. Dirinya yang sangat mengidolakan sosok Bung Karno yang kemudian pandangannya tersalurkan dalam fusi partai PDI Perjuangan.

Dari uraian tentang motivasi sebagai bentuk peran budaya organisasi khususnya disini partai sebagai organisasi, dapat ditarik garis lurus beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap kader terhadap peran ini. Motivasi menjadi energi dan penyemangat yang terbentuk atas dasar pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, dan pengaruh faktor emosional. Ketika faktor tersebut terdapat pada proses berpartai dari empat informan yang peneliti rujuk.

8. Kinerja anggota.

Seiring bertambah tuanya organisasi maka seharusnya organisasi bisa menciptakan iklim kinerja kondusif, meningkat, dan mempertahankan kinerja sebelumnya. Budaya

organisasi partai juga dapat memiliki peran untuk menciptakan kepuasan kerja dari anggota maupun kader, etos kerja dan semangat anggota. Dengan adanya beberapa elemen partai yang ada seperti petinggi partai, jabatan struktural, tokoh partai, nilai-nilai yang dianut sampai ke aturan-aturan partai, membuat organisasi dengan anggotanya saling mengikat satu sama lain. Keterikatan itu secara sadar maupun tidak bisa berimbas pada kinerja anggota secara sadar dan bangga.

PDI Perjuangan yang notabene lahir setelah kejadian kudatuli mampu menciptakan sebuah kinerja anggota untuk memperjuangkan kebesaran partai. Perlawanan terhadap orba yang mengobok-obok kepartaian membuat kader yang pro Megawati bersatu dan membentuk sebuah spirit untuk memperjuangkan kebesaran partai. Semangat kader yang awalnya sporadis karena sikap mendukung terhadap partai pimpinan Megawati, lama-kelamaan menjadi terarah dengan mekanisme partai yang ada. Mekanisme partai yang salah satunya termuat dalam bentuk AD/ART menjadikan pedoman nyata bagi para kader.

Terbukti sampai saat ini khususnya di kabupaten Magelang, mampu memenangkan kursi DPRD dan bupati dalam pemilu dua kali berturut-turut. Dengan persaingan politik yang semakin ketat, membuat partai kinerja partai lebih terarah dalam menggerakkan para kader. Misalnya ketika adanya pemetaan suara untuk pemilu bupati. Pada setiap daerah yang kurang suaranya maka akan ditambahi alat peraga, bahkan bisa ditambah kader untuk meningkatkan suara yang masuk kepada partai.

Ditatanan tertinggi, kinerja kader atau anggota partai secara personal akan mendapat kenaikan jabatan. Hal demikian menjadi *prestige* tersendiri bagi kader untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya kepada partai. Sebagai contoh para kader yang peneliti wawancarai kecuali Subagijo, merupakan kader yang berproses dari bawah. Karena kinerjanya yang bagus maka mekanisme partai membawanya kepada jabatan di struktural baik di DPC maupun di PAC. Berbeda dengan Subagijo, dirinya adalah pengatur strategi dalam memaksimalkan potensi dan kinerja anggota. Walaupun menjadi pengatur, Subagijo bekerja berlandaskan target dari partai.

Faktor pembentuk sikap dalam menentukan kinerja seorang kader adalah pengaruh kebudayaan. Kebudayaan partai yang mengandung banyak sekali aspek termasuk aturan, nilai dan tujuan organisasi menjadikan kader semangat dalam bekerja mengabdikan diri ke dalam partai. Pastinya dengan syarat bahwa organisasi partai ini adalah bagian dari keresahan atau kecintaan dari kader itu sendiri.

9. Sumber keunggulan kompetitif.

Budaya organisasi pada puncaknya mampu menempatkan organisasi pada kondisi terbaik organisasi dibanding dengan organisasi yang sejenis. Dengan budaya organisasi, elemen-elemen yang tidak dimiliki sebelumnya maka perlahan-lahan akan tercipta. Bahkan elemen yang tidak dimiliki oleh organisasi lain yang sejenis malah sudah dimiliki oleh organisasi dan bisa menjadi kekuatan dari organisasi itu sendiri.

Pada partai politik hal ini seperti militansi kader dan pemerataan jumlah kader pada masing-masing struktural sampai tingkat anak ranting. Pemerataan kader dapat menjadi keunggulan kompetitif partai khususnya untuk mempengaruhi pilihan politik dari masyarakat. Di kabupaten Magelang sendiri hampir seluruh dusun mempunyai anak ranting dan semua desa pasti memiliki ranting. Kondisi tersebut menjadi memudahkan pimpinan partai untuk menyusun target dan merumuskan strategi di lapangan.

Kekuatan partai yang berlandaskan massa, akan sulit dilawan oleh lawan-lawannya. Apalagi PDI Perjuangan di kabupaten Magelang mempunyai keunggulan kompetitif lain, yakni sebagai partai penguasa di wilayah tersebut baik pada kursi bupati maupun di DPRD. Kader yang sudah terdata dengan baik dalam struktural tingkat ranting dan anak ranting memudahkan calon legislatif seperti Sakir dan Budi untuk memenangkan dirinya. Begitu juga bagi Subagijo, kader yang merata memudahkan dirinya untuk memetakan suara pada pemilu 2013 dan 2014.

Faktor yang mempengaruhi atas sumber keunggulan kompetitif organisasi bagi masing-masing kader adalah pengaruh kebudayaan. Kebudayaan yang ada diinternal partai tidak tersusun secara instan, yang akhirnya mampu menjadi nilai plus tersendiri bagi partai. Pada akhirnya kader partai yang mendapat penugasan untuk memenangkan partai dalam pemilu menjadi lebih mudah apalagi pada pemilu bupati, gubernur dan presiden.

B. Budaya Politik dan Proses Transformasi Nilai Partai

1. Budaya Politik dalam Partai

Budaya partai yang akan dijabarkan pada kesempatan kali ini adalah budaya partai yang bersifat secara keseluruhan. Budaya partai ini lebih condong melihat pada kecenderungan partai dalam hal mengambil setiap kebijakan partai. PDI perjuangan yang mengusung nama demokrasi di dalamnya perlu pengupasan secara konkrit bagaimana partai politik ini bergerak yang hingga hari ini gerakan partai ini mengantarkan kadernya duduk di jabatan strategis pemerintahan. Gerakan partai yang terus berangsur-angsur

mampu menciptakan sebuah budaya yang menjadi acuan partai dan kadernya untuk bertindak khususnya dalam tindakan politik.

Peneliti membaca tumbuhnya dua budaya politik dalam menggerakkan roda organisasi partai. Dua budaya yang tumbuh dan terus dipupuk di dalam partai adalah budaya politik patrimonial dan budaya demokrasi partisipatoris. Sebenarnya dua budaya maupun sistem politik tersebut merupakan kajian penggambaran politik yang dilihat dalam kaca mata pengelolaan negara. Namun dalam hal ini akan diterapkan dalam kaca mata partai politik yang kental akan legitimasi politik antar kader di dalamnya. Wewenang dan pengambilan kebijakan di dalam partailah yang membuat dua budaya ini terus tumbuh dalam PDI Perjuangan.

Partimomial sendiri merujuk pada sentralisasi kekuasaan. Dalam hal ini keputusan partai yang mutlak dijalankan adalah dari Ketua Umum pada khususnya dan DPP PDI Perjuangan pada umumnya. Namun disisi lain budaya demokrasi partisipatoris juga masih dirawat dengan baik dengan contoh nyata yakni adanya kegiatan pertemuan rapat tiga pilar pada masing-masing tingkatan. Dua budaya ini sebenarnya bertolak belakang, namun dalam penelitian ini cukup terlihat budaya tersebut saling berdampingan dalam menjaga kesatuan partai sekaligus menggerakkan roda organisasi. Berdampingannya dua budaya tersebut akan disusun dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Klasifikasi budaya politik partai

No	Jenis Kebijakan / Situasi	Sistem Keputusan	Jenis budaya
1.	Penunjukan calon kepala daerah	Mutlak menunggu keputusan dari DPP, walaupun sebelumnya diusulkan beberapa nama oleh DPC/DPD	Patrimonial
2.	Penyelesaian konflik seperti kasus Susilo (kasus pencalonan dari partai lain)	Mutlak diputuskan dari DPP untuk dipecah atau tidak	Patrimonial
3.	Penyerapan dan perumusan aspirasi daerah dan nasional	Berangkat dari usulan tingkat bawah yakni ranting, PAC, kemudian diputuskan untuk disampaikan oleh DPC.	Demokratis Partisipatoris
4.	Penunjukan calon legislatif dan nomor urutnya	Penunjukkan berdasarkan prestasi jabatan di tingkat PAC (biasanya	Demokratis Partisipatoris

		ketua),	
5.	Penomoran caleg	penomoran ditentukan oleh DPD, dan level provinsi ditentukan DPP	Patrimonial
5.	Penentuan koalisi partai politik	Kalkulasi politik pada tingkat daerah diputuskan melalui saran bersama oleh DPC, kemudian dikukuhkan oleh DPP.	Demokratis Partisipatoris
6.	Penunjukkan ketua BAPILU dan jabatan wakil ketua bidang	Mutlak hak prerogatif Ketua Umum pada tingkatan nasional, dan ketua daerah pada tingkatan DPD maupun DPC.	Patrimonial
7.	Perumusan program kerja dan kegiatan partai DPC	Diputuskan Bersama melalui musyawarah pengurus partai pada tingkatan DPC	Demokratis Partisipatoris
8.	Pendanaan kegiatan partai	Diputuskan bersama melalui musyawarah pengurus partai	Demokratis Partisipatoris
9.	Penentuan ketua DPC, PAC, dan seterusnya	Diputuskan secara <i>collective collegial</i> oleh calon ketua	Demokratis Partisipatoris

Berdasarkan data tabel diatas, peneliti melihat adanya keadaan berdampingan antara dua budaya politik yang berbeda. Tidak bisa sertamerta dikatakan partai ini partai yang patrimonial karena simbol partai Megawati yang sangat kuat. Namun di sisi lain, kebijakan strategis seperti penunjukkan calon kepala daerah, penunjukkan rekan kepengurusan dan penunjukkan ketua BAPILU yang didominasi oleh ketua khususnya Ketua Umum, menunjukkan partai ini cukup kental menganut budaya patrimonial. Walau demikian jika mengacu pada tabel diatas, kebijakan atau situasi yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau jalannya roda organisasi politik yang mengacu pada manusianya, maka sistem patrimonial menjadi sangat terlihat. Sedangkan jika mengacu kepada memutuskan kebijakan publik dan keputusan massal, seperti penunjukan caleg dan penyerapan aspirasi malah bersifat demokrasi partisipatoris yang walaupun kedua kebijakan tersebut memiliki jenjang yang cukup panjang untuk diputuskan.

2. Kontruksi Budaya Politik dan Proses Transformasi Nilai Partai

Perjalanan partai yang sangat panjang mampu memunculkan budaya dan nilai-nilai yang mampu dipegang oleh para anggotanya. Pemahaman akan nilai dan budaya kepartaian tidak serta merta diketahui oleh anggota atau kader partai. Semua memiliki proses yang berbeda-beda termasuk pada para informan penelitian ini. Namun proses yang berbeda tersebut tidak membuat kader atau informan peneliti memiliki pandangan yang berbeda akan ideologi yang diperjuangkan oleh partai.

Budaya politik yang secara gamblang dikemukakan oleh para informan yakni mengenai sistem partai yang tegak lurus dan patuh terhadap simbol partai Ketua Umum dengan apapun keputusannya. Budaya tersebut sangat menjadi pegangan para kader untuk bersatu padu membesarkan partai dan mengesampingkan kepentingan politik masing-masing. Pemahaman para kader bahwa sistem tersebut baik untuk menjadi alat persatuan, berlandaskan dengan apa yang mereka lihat di partai lain. Ketika partai lain seperti Golkar tidak ada sosok simbol, maka kestabilan organisasi menjadi terganggu atas kepentingan politik para anggotanya. Berbeda dengan partai ini, yang sampai pada hari ini masih memiliki sosok yang sangat kuat pengaruhnya, yakni Megawati.

Disamping itu sosok Megawati sebagai putri Bung Karno dari PNI menjadi angin segar di PDI yang kala itu mulai bergabung dan menjadi caleg pada tahun 1987. PDI yang berasal dari hasil fusi partai nasionalis termasuk PNI, menjadikan nama Mega cepat melambung. Alhasil pada kongres tahun 1993, Mega terpilih menjadi Ketua Umum. Nama Mega menjadi lebih kuat pada puncaknya ketika kejadian Kudatuli 1996.

Dari semua informan, pada dasarnya bergabung di dalam PDI karena mengagumi sosok Bung Karno. Ideologi Bung Karno dengan Marhaenismenya dirasa akan diteruskan pada PDI yang Nasionalis. Ditambah munculnya sosok Mega sendiri, menjadikan para kader tambah yakin akan ideologi Bung Karno yang tetap terus diperjuangkan. Marhaen sendiri sesuai pemaparan dari Soeroso adalah ideologi atau pemikiran yang dibangun oleh Bung Karno ketika masih kuliah di ITB. Marhaen adalah gabungan dari ketiga nama tokoh sosialis dunia yakni Marxis, Hegel dan Engles. Disisi lain memang ada cerita tentang seorang petani bernama Marhaen yang mampu mengolah sendiri hasil taninya, menjual sendiri dan hasilnya hanya untuk keluarga kecilnya.

Ideologi Marhaen itulah yang kemudian oleh Megawati sendiri pada beberapa kesempatan berpidato mengejawantahkannya dalam bentuk pembelaan terhadap *wong*

cilik. Nilai pembelaan terhadap *wong cilik* terus disampaikan oleh Mega dan elite partai yang lain pada berbagai kesempatan kepartaian seperti Kongres partai, Pendidikan kader, Rakernas dan acara sejenis lainnya secara berulang-ulang bahkan sampai pada pertemuan atau acara tingkat DPC seperti penyelenggaraan Bulan Bung Karno. Transformasi nilai dengan narasi yang lebih mudah yakni sebagai partai *wong cilik*, diamini oleh Budi bahwa partai ini memang berasal dari gesrut dan terus memperjuangkan nasib *wong cilik*. Bagi Budi sampai kapanpun pembelaan terhadap *wong cilik* akan tetap terus relevan karena *wong cilik* tidak akan pernah habis.

Pesan untuk terus membela *wong cilik* lebih mudah tertanam kepada para kader ketika kader sendiri berasal dari gesrut *wong cilik*. Kesamaan keadaan hidup dan ideologi menjadi semangat kader untuk berjuang dan membesarkan partai. Menurut Budi, asal kader yang dari gesrut akar rumput memang cukup menghambat dalam mengelola kepartaian namun tidak akan berbahaya karena tidak mempunyai tendensi lain selain berjuang atas nama partai. Maka dari itu, dalam praktiknya penanaman nilai terhadap pembelaan kepada *wong cilik* lebih mudah tertanam dan menumbuhkan semangat berpartai kepada *wong cilik* itu sendiri.

C. Sikap yang Timbul atas Budaya Organisasi Partai Di Lingkup DPC PDIP

Kabupaten Magelang

Budaya dalam organisasi khususnya pada bahasan ini adalah partai politik sebagai organisasi, mempunyai beragam aspek maupun elemen di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Wirawan (2007: 10), bahwa budaya organisasi sebagai norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi dan lain sebagainya, yang kemudian dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku dari anggota organisasi. Apa yang diungkapkan wirawan tersebut menurut peneliti sangat mendukung dalam penelitian ini bahwa partai sebagai organisasi dapat mempengaruhi sikap dari kader atau anggota partai.

Norma, nilai-nilai, asumsi, dan elemen lainnya yang terdapat dalam organisasi merupakan sebuah bentuk dari budaya organisasi itu sendiri. Maka pada kesempatan ini peneliti akan berusaha memilah unsur-unsur yang menjadi elemen-elemen organisasi yang akhirnya tertuju pada penciptaan budaya organisasi itu sendiri. Kemudian untuk menjawab

rumusan masalah nomor dua, maka peneliti menggabungkan antara elemen budaya organisasi dengan sikap pada kader. Sikap yang terbentuk juga akan dibagi menjadi dua yang berlandaskan jenis informan yakni yang duduk sebagai struktural dan kader diluar struktural.

Elemen yang sudah peneliti klasifikasikan berdasarkan sudut pandang partai politik sebagai organisasi antara lain norma-norma atau aturan, tokoh dan penokohan, nilai dan ideologi, pengelolaan organisasi, peran dan tugas kader, SDM partai, keputusan organisasi, komunikasi antar anggota, pengaderan organisasi, dan terakhir kenyamanan dalam berpartai. Pada elemen yang terakhir, peneliti mendapat jawaban bahwa semua kader yang menjadi informan peneliti nyaman dalam berpartai di PDI Perjuangan. Hanya saja alasan dibalik kenyamanan tersebut berbeda, dan menjadi lebih menarik dalam pembahasan kali ini.

1. Norma-norma atau aturan

Berdasarkan norma-norma tertulis yang ada di dalam partai seperti hak dan kewajiban bagi kader, tugas partai, sanksi-sanksi dan aturan-aturan dalam strukturisasi partai yang termuat di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan aturan-aturan lain yang menjadi kewenangan DPP, membentuk sikap yang hampir sejalan bagi kader. Dari keempat kader yang menjadi informan, sikap atas norma dan aturan yang terbentuk dalam organisasi adalah mendukung dan setuju akan norma itu untuk keteraturan partai. Namun ada catatan lain pada norma yang ada yakni belum menjadikan norma yang ada sebagai rujukan sepenuhnya bagi setiap kader. Alasannya karena karakter SDM kader partai yang berbeda-beda.

Bagi kader yang duduk di struktural seperti Budi dan Sakir, aturan melalui AD/ART memang harus menjadi pedoman dalam berpartai. Norma melalui AD/ART bagi mereka sudahlah lengkap malahan kadang kader sendiri yang tidak menaati norma tersebut. Bagi mereka berdua, kader sendiri yang terkadang kurang memegang teguh aturan yang ada. Masih ada kader yang bergerak diluar garis partai. Walaupun demikian jika terjadi pelanggaran terhadap aturan maka mekanisme partai jugalah yang akan bertindak.

Dari pandangan non struktural, Suroso memandang aturan AD/ART malah membuat bingung karena setiap periode ada perubahan. Namun pandangannya juga senada dengan Subagijo bahwa aturan ini malah terkadang tidak diindahkan oleh kader sendiri.

Maka terjadilah friksi-friksi kepentingan yang mana malah tidak menyangkut tentang partai melainkan kepentingan politik pribadi.

Kedua pandangan dari struktural dan non struktural tentang norma yang diusung sejalan. Perubahan yang ada pada aturan setiap periode seperti yang diungkapkan oleh Suroso yang berakibat malah membuat bingung kader sendiri, terjawab oleh Sakir bahwa partai memang harus berbenah dalam konteks ini adalah pembenahan dari norma tersebut. Aturan diselaraskan dengan keadaan terbaru supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

2. Nilai dan ideologi

Nilai ideologi partai digambarkan oleh kader bahwa partai PDI perjuangan mempunyai keberpihakan kepada wong cilik. Selain itu menurunkan nilai-nilai ajaran dan ideologi Bung Karno khususnya yang terkenal dengan Marhaenisme. Memegang teguh kandungan isi Pancasila 1 Juni 1945 dan trisakti sebagai nilai-nilai yang harus terus diperjuangkan.

Segala bentuk nilai yang terkandung dalam partai menjadi kepercayaan yang kuat bagi kader dalam memilih partai ini. Bagi kader di struktural seperti Budi dan Sakir, nilai yang paling ditonjolkan adalah keberpihakan atas wong cilik. Bagi mereka, itu adalah sebuah keresahan dan panggilan hati untuk berpolitik di partai ini dalam rangka memperjuangkan hak wong cilik. Apalagi keduanya juga duduk di kursi DPRD kabupaten Magelang.

Selain nilai tujuan dan ideologi partai, bagi Budi dan Sakir nilai sejarah partai yang panjang juga menjadi landasan semangat bahwa tidak salah memilih partai dalam berpolitik. Sejarah yang panjang salah satunya dari hasil fusi partai banteng Bung Karno dengan lainnya sampai pada puncak perlawanan dengan tragedi 27 Juli 1996, menjadi gairah tersendiri bagi mereka berdua. Ditambah orang tua keduanya juga kader dari partai PDI.

Sedikit berbeda bagi sisi kader yang tidak menjabat struktural. Bagi Subagijo, yang awalnya bukan kader partai dan hanya simpatisan karena status pekerjaannya, kurang mengetahui nilai sejarah partai ini. Hanya saja pandangannya dengan keberpihakan terhadap wong cilik sejalan dengan partai ini. Maka dari itu, dia menerima pinangan dari Singgih Sanyoto untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam kontestasi politik. Sedangkan bagi Suroso, partai ini adalah satu-satunya partai yang meneruskan ajaran Bung Karno. Dia

menilai partai ini sama dengan partai yang lainnya tapi memiliki nilai positif yang berpegang dengan ajaran Bung Karno. Bung Karno sang nasionalis dan proklamator sangat di idolai oleh Suroso, menjadikan Suroso rela mengorbankan waktu, tenaga dan materi untuk ikut berjuang sampai saat ini.

3. Tokoh dan penokohan

Sebagai partai besar baik secara sejarah maupun secara nilai-nilainya, partai ini pastinya mempunyai tokoh atau sosok sebagai pegangan dan panutan. Untuk saat ini, tokoh yang paling berpengaruh secara keseluruhan adalah Megawati. Sebagian besar kader pasti sepakat dengan ini, dan bahkan menjadikan Megawati sebagai idola dalam berpartai. Termasuk Budi dan Sakir yang menyukai ketokohan dari Megawati.

Ketokohan Megawati yang sangat luar biasa belum mampu di tandingkan dengan siapapun di dalam partai. Bukan semata-mata karena kelihaiannya dalam mengatur strategi politik, tapi juga sebagai alat perekat dan pemersatu para kader partai. Mengingat PDI Perjuangan adalah partai yang sangat besar dan sangat kental dengan nuansa politik maka tidak menafikkan bahwa suatu saat jika tidak ada Megawati, partai ini bisa pecah karena kepentingan kekuasaan dari kadernya.

Sebagai kader di struktural, ketokohan Mega dipandang sangat diperlukan apalagi ketika mengambil keputusan seperti mencalonkan presiden maupun kepala daerah. Bagi mereka apa yang menjadi keputusan Megawati memang harus dipatuhi karena itu bagian dari mekanisme partai. Senada dengan kader di struktural, Subagijo dan Suroso juga memandang demikian. Namun Suroso lebih mengkritisi bahwa ketokohan Megawati jauh dari pencerminan ayahnya. Ketokohnya memang terbentuk sebagai figur perlawanan ketika kontra dengan Suryadi dan kebetulan juga putra dari Soekarno, namun ketegasannya dan beberapa sifat lainnya masih jauh dari Bung Karno. Suroso menekankan bahwa boleh jadi Megawati adalah putra biologis Soekarno tapi sepertinya tidak dengan ideologis.

Sedangkan figur atau tokoh yang dikatakan berpengaruh di kabupaten Magelang, para kader yang berada di struktural menganggap bahwa tidak ada tokoh yang sangat diagungkan di kabupaten Magelang. Roda organisasi dalam lingkup DPC kebawah bagi mereka bisa bergerak dan mencapai target karena dipengaruhi oleh struktural yang duduk pada jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika pada jabatan tersebut proaktif maka roda kegiatan organisasi akan bekerja secara maksimal.

Namun pandangan kader yang berada di luar struktural berbeda. Tokoh yang mempunyai pengaruh di kabupaten Magelang bagi Subagijo dan Suroso adalah Singgih Sanyoto. Bagi mereka berdua, Singgih sangat berpengaruh dalam kebesaran partai di kabupaten Magelang. Selain pernah menjabat sebagai Ketua DPC, Singgih juga menjabat Bupati dua periode. Dengan kedudukan yang maksimal di tingkat Kabupaten, maka relevan jika menjadi tokoh yang ada pada PDI Perjuangan Kabupaten Magelang.

Perbedaan pandangan tentang tokoh di kabupaten Magelang penyebabnya adalah adanya kedekatan antara kader dengan Singgih Sanyoto. Kader yang berada diluar struktural, mempunyai hubungan baik dengan Singgih seperti Subagijo yang diajak sebagai Ketua tim Badan Pemenangan Pemilu dan Suroso yang pernah diajak sebagai Bankorcam. Berbeda dengan kader yang ada di struktural, mereka pernah berselisih paham mengenai ketua DPC yang waktu pergantian jabatan ketua, Singgih menghendaki ketua DPC adalah Bupati terpilih Zaenal Arifin. Sedangkan Budi yang juga sejalan dengan Sakir, tidak menghendaki itu.

4. Pengelolaan organisasi

Dalam pengelolaan organisasi dan kader dalam lingkup DPC kabupaten Magelang, kacamata kader yang duduk di struktural menjadi sudut pandang utama. Pengelolaan kader menurut kader yang sedang duduk di struktural memang sudah sejalan dengan arahan yang ada pada AD/ART. Seperti melaksanakan agenda rutin rapat sampai ranah evaluasi juga dijalankan. Namun pengelolaan dirasa masih kurang apalagi pelaksanaan sekolah politik agar kader lebih memahami tentang partai dirasa masih kurang.

Budi dan Sakir merasa partai harus segera berbenah untuk melakukan pengelolaan SDM dan organisasi dengan lebih baik seperti partai modern. Pengelolaan yang baik maka akan melahirkan kader yang sesuai kebutuhan partai. Bagi Budi pengelolaan di dalam lingkup DPC menjadi kurang maksimal karena kader yang duduk di struktural juga bertabrakan waktu dengan kesibukan di legislatif. Apalagi ketua, bendahara, sekretaris dan beberapa wakil ketua bidang juga duduk di kursi parlemen.

Kondisi kurang maksimalnya pengelolaan organisasi di lingkup kabupaten Magelang juga dirasakan oleh kader non struktural. Jarangnya pertemuan yang diadakan menjadikan tolok ukur jalannya roda organisasi dimata Suroso. Suroso membandingkan anantara zaman kepengurusan pimpinan Saryan dengan Singgih. Bagi Suroso Saryan bukan pengurus yang proaktif seperti Singgih yang sering bersilaturahmi sampai ke ranting yang

tujuannya untuk memantau ranting dan mendapatkan kader baru. Keterbatasan kegiatan yang menunjang pengelolaan organisasi dipandang oleh Subagijo karena alasan keterbatasan anggaran partai. Baginya semua kegiatan partai pasti membutuhkan dana termasuk dalam mengadakan sebuah rapat.

Pengelolaan organisasi dan kader menjadi lebih intens dilakukan ketika mendekati event pemilu. Karena karakter organisasi adalah organisasi politik maka akan wajar ketika pengelolaan menjadi maksimal ketika pemilu. Walaupun demikian pada dasarnya pengelolaan organisasi dari mulai rapat, perekrutan, sampai pendidikan kader yang sesuai pada aturan di AD/ART didukung oleh kader baik di struktural maupun non struktural sebagai mekanisme pengelolaan yang baik. Hanya saja perlu dioptimalkan lagi apalagi dari sisi pimpinan struktural partainya.

5. Pengaderan organisasi

Pada dasarnya alur pengaderan sudah cukup jelas, namun tetap fleksibel dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang lebih rinci sebenarnya diatur oleh DPP namun dalam praktik pengaderan berjalan secara alami dengan didukung sekolah kader. Pengaderan juga tidak mempraktikkan mekanisme kader instan artinya untuk menjadi kader sampai top level harus melalui tingkatan dan pembuktian di partai.

Namun mekanisme pengaderan yang dimiliki PDI Perjuangan menjadikan partai tidak maksimal dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Bagi Sakir dan Budi pengaderan selama ini jarang mendapatkan kader yang berpendidikan dan beridealisme. Seperti yang dilakukan PKS yang melakukan pengaderan kepada anak muda yang berpendidikan. Maka pada akhirnya pengaderan ini mendapatkan kader yang mempunyai loyalitas tinggi tapi kurang dalam masalah SDMnya. Keadaan tersebut berakibat pada terhambatnya pelaksanaan dan pelaporan kegiatan karena ketidakmampuan kader dalam membuat laporan maupun mengejawantahkan sebuah intruksi.

Alur yang tercipta dalam mendapatkan kader adalah dengan mengajak masyarakat untuk ikut bergabung ke dalam partai dan atau dengan kesadaran diri ikut bergabung ke partai. Melalui sebuah ajakanpun tidak serta merta mendapat kedudukan. Kecuali calon anggota atau kader mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memang dibutuhkan partai seperti Subagijo yang diajak Singgih untuk membantu memenangkan partai. Hal itu boleh dan tidak melanggar aturan partai.

Kelemahan dalam merekrut kader, dapat ditutupi dengan sekolah partai maupun pendidikan kader. Hanya saja kegiatan itu jarang dilakukan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kebanyakan adalah pendidikan kader secara alami, mulai berproses dari ranting atau anak ranting yang kemudian jika terlihat mempunyai potensi akan diangkat pada struktural di atasnya. Kemudian barulah ada pendidikan kader tingkat pertama yang ditujukan untuk kader yang berada pada kepengurusan PAC.

Walau pengaderan kurang maksimal dan sangat terbatas, kader yang duduk di struktural maupun bukan, menginginkan hal yang sama yakni memperoleh kader yang berkualitas dan mumpuni. Juga pastinya kader yang berideologi tanpa pamrih dan senantiasa memikirkan kemajuan partai.

6. SDM Partai

SDM partai yang terdapat di dalam lingkup DPC memang beraneka ragam. Dalam sudut pandang kader struktural, kader partai yang ada pada lingkup DPC sudah lebih baik dalam segi kualitas daripada beberapa periode silam. Budi dan Sakir terjun ke partai karena salah satunya membawa keresahan bahwa partai dengan kader di kecamatannya masing-masing memang banyak tapi kualitasnya dirasa kurang mampu mengemban mengelola partai.

Partai yang mempunyai kekuatan dari gesrut memang berdampak pada kualitas kader yang dimiliki. Tidak sedikit kader yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap partai namun hanya lulusan SD, SMP maupun SMA. Tingkat pendidikan ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai karena dinilai diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Hanya sedikit kader yang bisa mengelola pelaporan dalam bentuk digital, maka dari itu ketika ada pertemuan PAC-PAC untuk mapping kekuatan, hanya sedikit yang mampu melaporkan lewat kertas, sisanya hanya lewat penyampaian lisan.

Sakir dan Budi menilai inilah yang menjadi hambatan dalam kemajuan partai untuk bersaing dengan partai-partai dengan pengaderan dan pengelolaan yang modern. Walaupun demikian, DPC selalu mengusahakan bahwa kader yang duduk di PAC minimal ada yang mengerti komputer, dan berpendidikan minimal SMA supaya bisa membuat pelaporan dan bisa dicalonkan partai ke kontestasi pemilihan legislatif. Karena mekanisme partai tidak membolehkan kader dengan Pendidikan dibawah SMA untuk maju dalam pemilihan legislatif. Disini berarti tidak hanya membutuhkan kader yang berideologis dan loyal terhadap partai, tapi juga yang berpendidikan.

Disisi lain, kader partai yang identik dengan simbol orang-orang gesrut, orang-orang kecil memang menggambarkan sebagai partai yang benar-benar menaungi dan memperjuangkan hak wong cilik. Nilai positifnya adalah banyak kader dari gesrut mempunyai pegangan ideologis yang luar biasa hebat dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan atau hasrat pribadi dalam berpartai. Sehingga militansi kader tidak perlu susah payah di pupuk tapi sudah tumbuh dari dalam hati seorang kader itu sendiri.

Kondisi ini dibenarkan dengan keadaan ketika Singgih Sanyoto lebih memilih Subagijo yang notabene hanya simpatisan partai untuk mengelola Badan Pemenangan Pemilu di kabupaten Magelang. Subagijo sendiri juga membenarkan ketika turun di lapangan dalam rangka sosialisasi dan komunikasi terhadap kader, SDM dari kader dirasa memang kurang tapi mempunyai semangat yang tinggi dalam berpartai. Kenyataan di lapangan memang mendukung pernyataan para kader struktural dan Subagijo, bahwa ketika peneliti wawancara dengan Suroso yang pernah menjadi Ketua PAC meskipun hanya lulusan SMP, banyak tidak tersampainya pesan-pesan untuk di jawab oleh Suroso. Alhasil wawancarapun jadi panjang dan banyak waktu yang terbuang ketika menggali informan.

Walaupun kondisi SDM dengan kualitas yang kurang, namun kepercayaan terhadap ideologi dan partai sangatlah tinggi. Misalnya Suroso yang lebih memegang teguh pemikiran-pemikiran Bung Karno daripada kader lainnya yang lebih menyoroti kemajuan partai. Walaupun loyalitas tinggi, tidak menutup kemungkinan kader partai ditingkat bawah juga pragmatis. Namun pragmatismenya kader gesrut dalam berproses di partai berbeda dengan kader yang memiliki kecerdasan dan kemampuan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kader tingkatan ranting-anak ranting untuk mendapatkan materi dari partai. Dengan memanfaatkan momentum pemilihan umum, kader berusaha memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan dari kader yang lain.

Sedangkan pada tataran elite kader di DPC kematangan berfikir tentang kemajuan partai malah terkadang menimbulkan hasrat kekuasaan. Seperti contohnya adanya konflik pencalonan bupati antara Susilo dengan Zaenal Arifin. Atau konflik vertikal antar kader yang terjadi pada Budi dan Gunawan yang kebetulan bersaing dalam kontestasi pileg di dapil yang sama. Kedua konflik tersebut adalah bentuk nafsu politik yang jauh dari kata memperjuangkan nilai-nilai partai itu sendiri.

7. Keputusan organisasi

Kepercayaan kader atas keputusan organisasi menjadi sikap yang dipilih sebagian besar kader PDI Perjuangan. Keputusan-keputusan organisasi seperti pemilihan calon bupati, pemilihan struktural partai, pemilihan calon legislatif sampai ke pemecatan kader dirasa oleh kader struktural sudah bagus dan relevan dengan keadaan sekarang. Walaupun memang partai memiliki dinamikanya sendiri, keputusan partai menjadi mutlak untuk diikuti guna meminimalisir konflik.

Seperti pada kasus penunjukan Zaenal Arifin dan pemecatan Susilo, bagi kader struktural dinamika pencalonan memang wajar terjadi, namun ketidakpuasan akan keputusan partai dalam menentukan calon bisa berdampak perpecahan partai. Maka ketegasan partai disini menjadi penting untuk meredam perpecahan.

Diluar itu keputusan partai dalam penunjukan Ahok menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan memang awalnya menjadi dinamika tersendiri. Tapi bagi para kader yang merasakan dinamikanya dalam menentukan calon pemimpin daerah dari partai, maka akan mengerti dan paham bahwa keputusan partai itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Sistem partai yang tegak lurus dalam mengeluarkan keputusan menjadi landasan kuat kader untuk terus bersatu dalam menghadapi lawan politik yang lainnya. Walaupun demikian partai tetap memberikan ruang untuk berdinamika seperti mendukung atau tidak mendukung kader yang diusulkan akan diangkat sebagai calon kepala daerah. Tapi ketika keputusan sudah keluar, maka kader harus mengindahkannya dengan melaksanakan perintah atau keputusan partai.

8. Peran dan tugas kader

Dalam praktik pemberian peran dan tugas kepada kader, partai sudah mempunyai mekanisme dan kewenangannya. Seperti pemberian tugas kepada kader untuk menjabat dalam struktural partai atau menjadi tangan partai dalam menjabat jabatan publik. Semua itu bukan semata-mata karena unsur nafsu pribadi atau kelompok melainkan partai yang memberikan tugas dan merestunya. Melalui mekanisme yang ada, partai berusaha membuat keputusan penunjukan secara terukur.

Semua kader yang peneliti wawancarai menyetujui dan mendukung tugas yang diberikan partai kepada kadernya. Karena dengan mekanisme yang ada tidak ada kader yang secara cepat, masuk dan menjadi pimpinan partai. Dengan kata lain proses dalam berpartai menjadi rintangan terberat kader dalam mendapat penugasan partai yang

dipandang dari luar adalah jabatan strategis. Apalagi pemberian peran dan tugas tersebut melalui suara musyawarah dari bawah kemudian disampaikan ke hirarki atas dan diberikan keputusan oleh hirarki di atasnya. Maka peran dan tugas yang diberikan kepada kader sudah melalui dinamika organisasi pada tingkatannya yang kemudian barulah diberikan keputusan.

9. Komunikasi antar kader

Komunikasi antar kader yang ditangkap oleh peneliti melalui hasil wawancara dan pengamatan langsung adalah bahwa setiap kader tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Artinya dengan menggunakan teknologi, kader yang akan diajak komunikasi akan jelas. Namun komunikasi antar kader disini mempunyai batasan wilayah dan hierarki secara tidak langsung. Tidak lantas serta merta kader tingkat ranting di wilayah Salaman, berkomunikasi langsung juga dengan kader ranting di wilayah Mungkid. Artinya mereka terbatas atas wilayah dan hierarkinya masing-masing.

Komunikasi antar kader dapat maksimal ketika mendekati tahun politik atau pemilu. Konsolidasi kader yang berkepentingan akan menjalin interaksi satu sama lain. Karena diluar itu, pertemuan yang dapat mempertemukan seluruh kader sangatlah jarang. Kecuali pada waktu pergantian jabatan struktural partai, maka komunikasi menjadi sedikit lebih intensif.

Diluar waktu yang berkaitan dengan pemilu dan kegiatan partai, komunikasi antar kader bersifat sedikit transaksional. Misalnya menagih janji kepada wakil rakyat untuk memberikan sebuah bantuan. Karena kader yang dibawah merasa membantu memenangkan anggota DPRD tersebut.

10. Kenyamanan dalam berpartai

Pada dasarnya semua kader yang menjadi informan penelitian ini, nyaman dalam menjalani proses berpartai di PDI Perjuangan khususnya di kabupaten Magelang. Kenyamanan mereka ditekankan untuk terus berada dipartai dan selalu siap sedia jika nanti partai membutuhkannya. Bagi Budi dan Sakir, menjadi kebanggaan tersendiri bisa berjuang di partai. Apalagi mereka telah menadapatkan hasil manis dari perjuangan di dalam partai, yakni menjadi anggota legislatif. Bagi mereka jika nanti sudah tidak lagi menjabat dalam struktural partai, tetap akan membantu partai jika memang dibutuhkan kedepannya.

Partai yang melambangkan keberpihakan kepada *wong cilik*, menjadi nilai perjuangan sendiri bagi Budi dan Sakir. Bagi mereka yang berlatarbelakang sebagai orang desa, membuat proses dalam berpartai lebih dijiwai. Walaupun sekarang sudah nyaman duduk di kursi legislatif, bagi mereka membela rakyat jelata memang harus dilakukan. Alasan ideologis dan kedekatannya dengan orang kecil yang menjadikan Budi dan Sakir nyaman dalam berpartai.

Kenyamanan juga dirasakan oleh kader non struktural, yakni Subagijo dan Suroso. Bagi Subagijo sebagai anggota partai yang dadakan, dirinya merasa nyaman karena selama bekerja sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk PDI Perjuangan, tidak ada yang mengganggu dan mencibirnya. Malah sebaliknya kader mendukung dan menjalankan strategi yang diramunya. Sedangkan pada Suroso, kecintaanya kepada sosok Bung Karno menjadikannya nyaman dalam partai sampai puluhan tahun lamanya. Namun Suroso mengkritisi, bahwa tindakan kader lain dalam mengelola partai yang membuat rasa ketidaknyamanan muncul. Baginya pimpinan partai dalam mengelola partai tidak seperti pada zaman Singgih yang proaktif menjadikan rasa ketidaknyamanan muncul. Karena baginya bisa berdampak pada kader dan kemajuan partai jika pimpinan partai tidak proaktif untuk merangkul kader yang ada di bawah.

D. Catatan Kritis Peneliti dalam Budaya Politik Partai

Dari uraian-uraian di atas mengenai budaya politik dan budaya organisasi, peneliti lebih menyoroti budaya organisasi yang berada secara nasional. Budaya organisasi yang terbentuk, menelurkan peraturan yang sangat lengkap baik dalam ADART maupun dalam SOP-SOP pengambilan kebijakan lainnya. Namun peneliti merasa peraturan tersebut menjadi tidak ada gunanya karena sistem politik yang cenderung patrimonial pada kebijakan-kebijakan krusial seperti penunjukan calon kepala daerah. Karena jabatan ini menjadi jabatan strategis yang akan menciptakan kebijakan publik.

Peneliti menemukan bahwa kader berprestasi lebih diutamakan daripada orang diluar partai jika berminat menjadi calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua kader berprestasi bisa diakomodir. Keputusan mutlak dari Ketua Umum menunjuk bukan kader atau kader yang masih kalah reputasinya, menjadi antitesa jenjang karir politik yang ada di dalam partai. Seperti contohnya pencalonan Ahok pada 2017 di DKI Jakarta dan pencalonan Ganjar mengesampingkan Rustriningsih pada Pemilihan Gubernur 2013. Ketidakterbukaan ke publik dalam memilih

calon kepala daerah memang menjadi kewajaran dalam politik Indonesia yang bersifat transaksional-tertutup. Namun sikap demokrasi partisipatoris dari struktural setempat yang menolak calon yang akan diusung, malah dikesampingkan seakan-akan menutup mata akan suara dari arus gesrut. Ini menjadi anomali partai yang mengklaim bahwa kekuatan partai berasal dari gesrut, tapi tidak memperhatikan suara gesrut. Dan menurut peneliti akan menjadi ancaman nyata dalam demokrasi kedepannya jika semua partai di Indonesia mempunyai sifat patrimonial.

Di lain sisi, sistem yang dianut mengandalkan simbol partai Megawati dan seluruh kebijakannya, membuat peneliti memandang perlunya sosok kuat yang ada dalam setiap partai untuk bisa solid dalam memperjuangkan dan menanamkan ideologi dan nilai yang diusung. Karena kesolidan kader partai akan membuat mesin partai berjalan secara maksimal dan bersaing secara lebih menarik.

Walau simbol partai seperti Megawati saat ini dirasa peneliti sangat penting, keadaan seperti ini seperti menyimpan bom waktu jika tidak mampu memunculkan kader yang paling tidak mempunyai *bargaining position* yang sama kuat yang digadang sebagai pengganti. Seperti tanggapan para informan bahwa ketakutan mereka adalah ketika nantinya Megawati sudah tidak menjabat atau meninggal dunia maka bisa jadi kemungkinan terburuk seperti kondisi partai lain juga terjadi.

BAB V

KONKLUSI

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Sigmund Neumann

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan bab sebelumnya, penelitian yang berjudul partai Penguasa dalam Reaksi kader (Sikap kader terhadap budaya organisasi yang PDI Perjuangan pada lingkup DPC kabupaten Magelang), peneliti mengambil kesimpulan bahwa budaya organisasi yang muncul dikarenakan adanya set asumsi, nilai dan perspektif yang dibawa oleh pemimpin partai sebagai sebuah simbol organisasi. Selain itu interaksi antar anggota di lingkup DPC pada forum resmi yang sudah disediakan, menjadi sebuah perspektif baru diluar simbol dan aturan resmi partai yang dapat dikategorikan bagian dari budaya yang ada di dalam partai.

Penokohan yang paling dominan adalah dari Ketua Umum partai, yang berawal dari sejarah perlawanan atas intervensi orde baru yang kemudian menjadi sosok terkuat dalam partai. Asumsi yang dibangun oleh Ketua Umum dan para pemimpin yang lainnya berupa keberpihakan kepada *wong cilik*, atau disebut sebagai kaum Marhaen. Asumsi ini membawa nilai ideologi yang menunjukkan bahwa partai ini mempunyai tipologi partai massa. Kemudian nilai yang terus disampaikan akhirnya menjadi semangat para kader untuk berpartai adalah isi pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Dominasi pimpinan partai terbentuk karena proses demokrasi yang dianggap oleh kader bagian dari demokrasi yang dipimpin. Aturan-aturan yang terbentuk membuat komunikasi kepartaian dominan memiliki alur dari atas ke bawah. Perspektif yang timbul diantara kader adalah membenaran akan mekanisme komunikasi dalam pengambilan keputusan tersebut yang menganggap bahwa partai memang mempunyai aturan kepatuhan yang tegak lurus dari atas ke bawah. Di sisi lain memang suara yang muncul dari bawah juga bisa diakomodir jika melalui forum-forum yang sudah di sediakan. Mulai dari forum terbawah yakni rapat atau musyawarah di tingkat anak ranting sampai ke tingkat kongres nasional.

Dalam lingkup DPC, interaksi antar anggota untuk memecahkan masalah terkhusus pada ruang forum yang sudah disediakan oleh partai, mampu menjadi nilai budaya tersendiri bagi kader. Seperti penetapan program kerja partai dan penetapan rekomendasi calon untuk persaingan kepala daerah maupun calon untuk legislatif tingkat daerah. Di luar itu interaksi tanpa adanya kesepakatan bersama menjadi tidak bisa memunculkan nilai-nilai budaya baru dalam partai.

Sikap kader partai secara umum dalam konteks budaya organisasi secara keseluruhan di dalam partai adalah mendukung setiap nilai-nilai budaya yang terbentuk. Sikap tersebut dilandasi demi kemajuan partai dan harmonisasi di dalam partai. Kecintaan terhadap partai dan tokoh-tokohnya membuat kader rela berkorban untuk berjuang di dalam partai. Sikap kader yang selalu mendukung juga diimbangi dengan sikap kritis khususnya untuk perbaikan partai sendiri. Seperti memberi catatan mengenai perekrutan kader dan pengelolaan kader yang masih kurang daripada partai-partai modern lain.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang sikap kader terhadap budaya organisasi partai pada lingkup DPC kabupaten Magelang, peneliti menyadari keterbatasan dalam penelitian ini yakni:

1. Terbatasnya data yang diperoleh terutama terkait dinamika internal partai
2. Kurang mendalamnya dalam mewawancarai informan kepada inti bahasan terkait unsur budaya organisasi yang menyebabkan data penelitian banyak yang keluar dari konteks
3. Dalam penelitian ini tidak terdapatnya periodisasi yang jelas.

C. Saran

1. Saran bagi pengelolaan kader dilingkup DPC

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Megalang untuk:

- a. Memaksimalkan dalam mengelola SDM kader dengan adanya pendidikan yang ada di dalam internal secara rutin dan terukur khususnya kepada kader ditingkat PAC, ranting dan anak ranting
- b. Melakukan kegiatan yang banyak bersinggungan dengan masyarakat agar kader dan pengurus lebih dekat dengan masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan *trust* dimata masyarakat.

- c. Meningkatkan program-program kegiatan untuk lebih dekat antar kader supaya meminimalisir sifat pragmatis yang dimiliki kader kalangan gesrut.
- d. Meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan kader dalam menjaring aspirasi di masyarakat supaya tidak terjadi *gap* antara struktural dan konstituen.

2. Saran bagi penelitian selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya meneliti hasil kebijakan partai terhadap konstituennya dalam memilih jalur partai.
- b. Jika melakukan penelitian yang sejenis, sebaiknya peneliti melakukan observasi dan menentukan periode kepengurusan dalam DPC dan struktur di bawahnya.

DAFTAR PUSATAKA

Buku :

- Azwar, Saifuddin. 2013. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Brown, Andrew. 1998. *Organizational Culture*. Second Edition. England: Pearson Education.
- DPP PDI Perjuangan. 2015. *AD/ART Partai PDI Perjuangan hasil kongres 2015*. Jakarta: DPP PDI Perjuangan
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. 2013. *Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Magelang Pilihan Bupati tahun 2013*. Magelang: Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. 2013. *Rekapitulasi Suara Kabupaten Magelang Pemilihan Gubernur tahun 2013*. Magelang: Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. 2014. *Rekapitulasi Suara Kabupaten Magelang Pemilu Legislatif tahun 2014*. Magelang: Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. 2014. *Rekapitulasi Suara Kabupaten Magelang Pemilihan Presiden tahun 2014*. Magelang: Komisi Pemilihan Umum
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Teecep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for democracy and welfarism
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.

- Riani, Asri Laksmi. 2011. *Budaya Organisasi*. Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Sthepen P. 2007. *Perilaku Organisasi*, Buku 2, Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba.
- Sarwono, Sarlito. 2000. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Sobirin, Akhmad. 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*. Yogyakarta: Units Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Thoha, Miftah. 1998. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, cetakan 9*. Jakarta: CV. Rajawali
- Wirawan. 2007. *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*. PT.Salemba Empat : Jakarta.
- West, Richard dan Lynn H.Turner, 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3*. Jakarta : Salemba Humanika.

Jurnal:

- Luthfia, Amia, Agus Wasita, dan Rosidah Syaukat. “Kajian Budaya Organisasi Bina Nusantara University dalam Upaya Menuju A World Class University”. E-Journal Universitas Bina Nusantara, <http://marcomm.binus.ac.id/academic-journals/kajian-budaya-organisasi-bina-nusantara-university-dalam-upaya-menuju-a-world-class-university/>, (2013).
- Yudha, Arcaya, Herbasuki Nurcahyo dan Nina Widowati. “Penerapan Budaya Organisasi (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Dago Bandung)”, *Journal of Public Policy and Management Review*, Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 3 (2013).
- Triyono. “Budaya Organisasi (Studi Eksplorasi pada Universitas Muhammadiyah Semarang)”. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9, Nomor 1, (2012)

Skripsi:

- Panantang, Gylang Virgo. 2014. “Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Nayati, Cica. 2012. "Peran budaya Organisasi Terhadap Strategi Pemasaran dalam Upaya Mencapai Keberhasilan Perusahaan (Studi di Margaria Group Yogyakarta)". Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rosiyana, Angga. 2013. "Rekrutmen Anggota Partai Politik PDIP dan PKS di Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2012". Skripsi Sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sabita, Febriani Adelia. 2014. "Budaya Organisasi Holcim Indonesia Tuban project (Studi Budaya Organisasi melalui communication performances)". Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Internet :

Alasan Megawati Ajukan Jokowi Jadi Calon Presiden.
<http://politik.news.viva.co.id/news/read/491509-alasan-megawati-ajukan-jokowi-jadi-calon-presiden>, Diakses 14 Juni 2016

Demokrat: Kami Bukan Partai Terkorup.
<http://www.jpnn.com/read/2014/03/11/221283/Demokrat:-Kami-Bukan-Partai-Terkorup>, Diakses 14 Juni 2016

Disahkan KPU, Ini Perolehan Pemilu Legislatif 2014.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>, Diakses 13 Juni 2016

Ini Surat Lengkap Mandat Capres Dari Megawati Untuk Jokowi.
<https://news.detik.com/berita/2526704/ini-isi-surat-lengkap-mandat-capres-dari-megawati-untuk-jokowi>, Diakses 17 juli 2016

Jabatan Gubernur Jadi Batu Loncatan.
<https://metropolitan.inilah.com/read/detail/2142161/jabatan-gubernur-jadi-batu-loncatan-jokowi>, Diakses 14 Juli 2016

Megawati: Jika Tak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!.
<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150411145447-32-45908/megawati-jika-tak-mau-disebut-petugas-partai-keluar/>, Diakses 14 Juni 2016

Pengertian Budaya Organisasi Definisi Menurut Para Ahli Fungsi Dan Karakteristik.
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-budaya-organisasi-definisi.html>, Diakses 18 April 2018

Sikap Politik PDI Perjuangan,
https://pdiperjuangan.id/article/category/detail/110/Media_Center/Sikap-Politik-,
diakses 18 April 2018.

Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan.
https://pdiperjuangan.id/article/pengurus/child/01/Partai/Pengurus_Partai, Diakses
18 April 2018

Waspada 183 Caleg PDIP Nonmuslim. <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/07/29775/waspada-183-caleg-pdip-non-muslim-banyak-dari-jil-dan-syiah/#sthash.EcxugtMs.dpbs>, Diakses 14 Juli 2016

Sejarah Partai PDI Perjuangan. <http://www.pdi-perjuangan.or.id/info/sejarah-partai-pdi-perjuangan/>, Diakses 18 April 2018

LAMPIRAN

PARTAI PENGUASA DALAM REAKSI KADER

(Sikap Kader terhadap Budaya Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di
Lingkup Kabupaten Magelang)

Draft Pertanyaan wawancara penelitian

1. Representasi tentang partai

1. Sejak kapan tertarik dengan partai politik?
2. Apa alasan Anda untuk memilih menjadi kader PDIP?
3. Apakah latarbelakang pendidikan dan agama memengaruhi untuk memilih menjadi kader partai?
4. Sejak kapan Anda aktif menjadi kader partai PDIP magelang?
5. Siapa yang mengajak Anda ?
6. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk bergabung dengan partai ini?
7. Sampai saat ini apakah Anda sudah merasa nyaman menjadi kader?
8. Siapa saja informan yang memberi tahu anda tentang partai ini, dan apakah anda percaya 100%?
9. Apakah ada partai lain yang diperkenalkan kepada anda?
10. Menurut anda PDIP itu partai yang seperti apa?
11. Yang menjadi nilai plus dan minus dari partai ini apa ?
12. Sejarah berdirinya partai dan sejarah partai di kabupaten magelang
13. Apa pembeda partai ini dengan partai lain?

2. Ideologi

1. Nilai dan ideology apa yang anda sukai dari partai ini?
2. Apakah pandangan politik anda sudah sejalan dengan arah politik partai ini?
3. Apakah norma dan nilai yang diusung oleh partai ini sudah menjadi pegangan yang relevan oleh setiap kadernya?
4. Apakah anda percaya dengan komitmen setiap kader terhadap partai sesuai adart?
5. Apakah ada kader yang pragmatis mencari kesempatan atau keuntungan?
6. Budaya politik seperti apa yang telah tercipta di dalam pdip sendiri?
7. Apakah ada budaya politik transaksional dalam tubuh partai ini?
8. Menurut anda, apakah ada yang salah dalam sistem partai ini atau malah sebaliknya?

3. Recruitmen / pengaderan

1. Bagaimana alur partai ini (khususnya ditingkat dpc) melakukan perekrutan kader?
2. Kader partai itu apa?
3. Dalam pengaderan, harapannya memperoleh kader yang seperti apa?
4. Dalam melakukan rekrutmen kader, apakah menurut anda mekanismenya sudah baik dan optimal?

4. Manajerial

1. Bagaimana anda berkomunikasi dengan kader lain?
2. Apa ada kesulitan dalam berkomunikasi antar kader?
3. Pengelolaan kader dilingkup dpc seperti apa?
4. Apakah ada sebuah budaya untuk menunjang pengelolaan kader dan target partai diluar aturan tertulis partai?

5. Struktur organisasi yang ada dalam partai ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan partai dan masyarakat? Dari tingkat dpp sampai anak ranting?
6. Apakah anda sering mendengar pandangan dan pendapat negative tentang pdip?
7. Bagaimana komunikasi yang terbangun di partai ini? Apakah dari atas ke bawah saja atau dari bawah ke atas juga? Dan bagaimana alurnya dari tingkat pusat sampai tingkat anak ranting?
8. Di lingkup DPC kabupaten magelang, seberapa sering konflik kepentingan atas nama pribadi terjadi?
9. Dalam pengelolaan SDM kader pertain secara keseluruhan, apa tanggapan dan sikap anda?
10. Apakah semua kader melakukan interaksi dan mudah (saling kenal)? Atau hanya kader tertentu saja?
11. Apakah ada sistem evaluasi guna meningkatkan kinerja atau mencapai target tertentu?

5. Kepemimpinan

1. Apakah ada sosok kader yang begitu anda panut atau anda sukai?
2. Apakah ada orang yang di dalam DPC ini yang berpengaruh dalam keberlangsungan organisasi partai? Dan perannya sebagai apa?
3. Apa pandangan anda mengenai pimpinan partai seperti Ketua umum megawati?
4. Bagaimana sika panda dengan keputusan beliau?
5. Mengenai kaader yang keluar seperti rustriningsih dan bibit waloyo, bagaimana pendapat Anda?
6. Dalam segi kepemimpinan, bagaimana tanggapan dan sikap anda mengenai kepemimpinan dari Ketua umum DPP, DPW dan DPC Magelang?

6. Distribusi peran / tugas

1. Apa peran anda dan tugas dalam partai ini?
2. Bagaimana cara anda menjalankan tugas partai ? misalnya menggerakkan massa dsb
3. Biasanya peran dan tugas apa saja yang dapat diberikan oleh partai kepada para kadernya? Dan bagaimana sikap anda dalam hal peran dan tugas ini?
4. Bagaimana cara anda membangun hubungan baik dengan kontituen?

7. Reward dan punishment

1. apakah ada reward bai kader yang berprestasi ? dan sebaliknya apakah ada punishment kepada kader yang menyalahi aturan?

8. Saluran ide/gagasan

1. Bagaimana cara anda mengkomunikasikan gagasan atau ide kepada pemangku kebijakan di DPC?
2. Dalam kesempatan apa saja anda dan juga kader lain dapat berkomunikasi maksimal tentang partai?
3. Apakah status anda sebagai kader pdip menjadikan pandangan masyarakat bahwa anda adalah penghubung suara masyarakat dengan partai?
4. Dalam merumuskan sebuah aspirasi, bagaimana DPC menjalankan proses perumusan tersebut?
5. Bagaimana cara anda menyampaikan gagasan politik agar diterima partai ? dan dalam kesempatan apa saja anda dapat mengemukakan gagasan tersebut?

9. Mekanisme keputusan

1. Apakah anda mengetahui sikap-sikap politik partai ini? Dan apakah selalu mendukungnya?
2. Bagaimana sikap anda mengenai kebijakan partai dalam menentukan calon legislative dan executive di daerah maupun nasional?
- 3.

10. Partisipasi

1. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengenal partai PDIP?
2. Apa pengalaman hidup Anda yang bersangkutan dengan partai ini? Misalnya menjadi simpatisan yang ikut kampanye sampai ke proses menjadi kader atau anggota partai
3. Proses politik apa saja yang sudah anda jalani?
4. Realitas atau tragedy politik seperti apa yang menurut Anda menarik selama menjadi kader ataupun simpatisan di dalam partai ini?
5. Sejauh mana partisipasi politik anda dalam perjalanan dan perkembangan partai ini?
6. Apa yang membuat anda betah dan bertahan lama dengan partai ini ?

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA

BUDI SUPRIYANTO, S.S.

Alamat : Perumpung, Muntilan, Kabupaten Magelang.
Pendidikan Terakhir : S1 Sastra Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 Agustus 1963.
Amanat di PDIP : Pengurus DPC Magelang sebagai Wakabid Pariwisata dan ekonomi kreatif dan Anggota DPRD Magelang Fraksi PDIP
Wawancara dilakukan pada : 25 September 2016, Durasi 3 Jam. Di kediaman Bapak Budi S di Kecamatan Borobudur

-Apakah DPC merekam proses struktural sampai anak ranting?

Ya, iya. Jadi alurnya begini, kepengurusan yang DPC, setelah proses selesai musyawarah cabang (muscab), kita mengajukan usulan calon ketua. Karena sekarang tidak menggunakan model yang dulu, artinya pemilihan ketua DPC itu menggunakan system rekomendasi dari DPD. Kita sistemnya mengajukan usulan calon beberapa orang, bisa empat bisa lima orang. Dari lima orang itu diturunkan semacam rekomendasi dari DPD untuk menyebut nama-nama lagi. Dari nama-nama tersebut tidak voting sistemnya tapi musyawarah. Misal yang direkomendasi itu tiga orang, si A, si B, si C. Kemudian orang bertiga ini berembuk musyawarah, siapa yang mau jadi ketua. Misalnya si A mau dan sepakat, maka si A menjadi ketua. Ada pengecualian, kalau misalnya si A, si B, si C, dalam musyawarah tidak tercapai mufakat seperti masing-masing ngotot menjadi ketua, hal ini bukan hak kembali kepada anggota untuk musyawarah, namun akan dikembalikan ke DPD, dan DPD yang akan menentukan. Jadi sekarang kita tidak menggunakan system voting oleh anggota tapi ditunjuk. Setelah menjadi ketua melalui surat rekomendasi menjadi ketua, akhirnya membentuk kepengurusan. Untuk kepengurusan itu DPD yang memberikan SK. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang-wakil ketua bidang semua itu DPD yang memberikan pengesahannya namun SK nya yang mengeluarkan DPP atau langsung ketua umum.

Sementara untuk pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang), atau pengurus tingkat kecamatan prosesnya kan hampir sama, cuman calon ketua PAC diusulkan oleh ranting-ranting. Misalnya di Salam, ada 12 ranting, maka diusulkan oleh 12 ranting. Bisa tiga bisa empat orang tergantung masing-masing tempat. Kebetulan di Salam 3 orang. Dalam proses pengusulan juga melalui proses mekanisme semacam test calon ketua PAC seperti feet and proper test dengan system tulis seperti ideologi dan sebagainya. Dari calon-calon tersebut DPD juga yang akan menilai artinya yang mengoreksi soalnya, kemudian nanti dari lima orang itu siapa yang lulus. Bisa lulus semua, ada yang tiga orang, ada yang dua orang tergantung. Seperti kecamatan Salam, tiga orang dinyatakan lulus. Tiga nama ini diusulkan ke DPD lagi untuk siap-siap menjadi calon ketua PAC, setelah itu dikembalikan lagi ke PAC setelah DPD menyetujui usulan. Dari ketiga calon itu akhirnya bermusyawarah untuk menentukan ketua.

Untuk tingkat ranting, pengurus diusulkan oleh anak ranting tapi tidak diusulkan ke DPD. Karena yang menentukan kalau ranting ya anak ranting itu sendiri. Jadi anak ranting mencalonkan dari dusun-dusun siapa yang akan diangkat menjadi ketua rantingnya. Prosesnya hamper sama, cuma kewenangannya bukan di DPD tapi di DPC. Ranting dan anak ranting itu DPC. Tapi kalau PAC masih di DPD.

Jadi semua prosesnya sama, kalau seperti dulu kan seperti ketua PAC, ranting mengusulkan nama, dan siapa yang paling banyak suaranya atau yang memvoting. Demikian juga dengan DPC, PAC mengusulkan nama, siapa yang paling banyak diusulkan oleh PAC.

- pasti setiap anak ranting itu ada kadernya pak?

setiap anak ranting pasti ada kadernya. Kadang ada satu atau dua dusun yang bukan basis PDIP. Artinya disitu kader atau pemilih PDIP itu kecil. Misalnya dalam satu anak ranting atau satu dusun kebetulan disitu hanya punya dua orang. Yang lain mungkin mayoritas ada PAN, PKB, selain partai PDIP, maka tempat tersebut tidak bisa membentuk sendiri kepengurusan anak ranting, maka bisa digabungkan dengan dusun yang lain. Misal ada dusun sebelah gemuk atau minim, ketika dusun yang gemuk bisa saja mengampu di salah satu dusun yang kebetulan kecil. Ibarat selang yang penting airnya sampai ke bawah. Kalau ditingkat ranting rata-rata PDIP punya kadernya, kalau diluar magelang jarang ada ranting di gabung, karena desa itu pasti ada kadernya karena desa itu lingkungnya besar. Kita kendalanya di anak ranting. Jadi misalnya begini, Salam itu terdiri dari 12 Desa. Satu Desa terdiri dari 20 Dusun berarti ada 20 anak ranting. Tapi ternyata dari 20 dusun ada beberapa dusun bukan basis PDIP, sehingga kita hanya bisa membentuk 17 kepengurusan. Itu sah, karena kita boleh membentuk (ranting) ketika anak ranting (dusun) disitu ada 20, kita boleh membentuk rantingnya ketika 2/3 jumlah dusun yang ada terbentuk anak ranting. Karena itu sudah mewakili untuk mencalonkan pengurus ranting. Jadi ketika nanti dusun-dusun atau anak ranting-anak ranting itu memilih ranting, ketika tidak kuorum misal ada 20 dusun kok hanya ada empat dusun yang memilih kan jadi tidak bisa membentuk ranting. Tapi ketika 20 itu, 12 saja (yang terbentuk dan memilih), sudah bisa membentuk ranting tadi. Hal ini tidak dicantumkan dalam AD/ART, tapi biasanya di teknis pemilihan. Jadi petunjuk dari DPD biasanya ada petunjuk pemilihan musyawarah anak ranting atau muscab biasanya ada. jadi ketika dusun-dusun tidak masuk satu anak ranting, maka boleh 2/3 dari anak ranting untuk memilih atau mengusulkan pengurus ranting. Petunjuk teknis seperti itu semua yang mengatur dari DPP, jadi itu berlaku untuk seluruh Indonesia jadi tidak hanya Magelang. Jadi DPP memberikan petunjuk teknis ke semua DPD kemudian di breakdown ke seluruh DPC yang ada di Indonesia, jadi prosesnya sama.

- Apakah ada pertemuan rutin, kegiatan atau jadwal-jadwal yang lain di DPC ?

dalam suatu kasus yang sifatnya isidental, sekretaris DPC setelah koordinasi dengan ketua bisa menentukan rapat dadakan. Tapi kita punya program kegiatan yang terangkum dalam kegiatan DPC. Misalnya bulan Juni, Juli, Agustus biasanya sudah ada kegiatan. Bulan juni bulan Bung Karno itu kegiatannya apa, bulan Agustusan kegiatannya apa. Kemudian ada kegiatan yang wajib diikuti semua DPC atas intruksi DPD partai, misalnya tujuh belas agustus. Kadang ada surat diwajibkan seluruh dpc untuk melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh PAC. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu ada yang dikirim lewat fax dari DPD, kemudian DPD menyebarkan ke seluruh DPC. Sementara kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, kita rapat paling lambat tiga bulan sekali mengadakan rapat. Ketika vakum tidak ada kegiatan maka kita menginisiasi untuk tiga bulan sekali kita kumpul kita rapat untuk membahas kegiatan tiga bulan mendatang. Pas hari kemerdekaan kemarin ada wayangan, kita masukkan kegiatan wayangan disana melibatkan seluruh ketua PAC dan ketua ranting. Kemarin juga ada pelatihan kader pratama yang diikuti oleh ketua-ketua PAC baru yang mengadakan oleh DPD. Seminggu yang lalu di Soropadan, dibuka pendidikan latihan untuk PAC yang menyelenggarakan pilkada serentak. Untuk mempersiapkan pilkada, bagaimana teknis kerjanya.

Kalau pas pilkada pasti ada kegiatan lain. Misal Magelang Pilkada, itu kan yang pertama kita kerjanya memaksimalkan struktur-struktural, dari DPC, ranting sampai anak ranting. Biasanya DPC membentuk satu tim, tim pemenangan. Kemudian menjadwalkan sosialisasi ke tingkat PAC. Nanti PAC mempunyai tanggungjawab sosialisasi ditingkat ranting dan anak ranting. Kemudian beberapa kali DPC melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan seluruh komponen partai baik dari tingkat ranting bahkan anak ranting, itu biasanya kalau mendekati pilihan. jadi kita punya tempat centernya, kalau kemarin city square, glabak. Sistemnya ketika kita mengerahkan seluruh struktural yang ada, itu nanti sosialisasi tingkat PAC itu kan ke ranting-ranting. Biasanya ranting-ranting menghadirkan anak ranting, kemudian dari masing-masing ranting dan anak ranting mempunyai tanggungjawab untuk mensosialisasikan calon itu kepada masyarakat, tidak harus mengundang masyarakat. Jadi mereka bisa di sawah sambal ngobrol, mungkin mendatangi keluarga, mendatangi temannya, utamanya seperti itu. Jadi komponen yang paling berpengaruh kan strukturnya, struktur organisasi yang ada di kabupaten Magelang.

- Apa hambatan dalam mengorganisir PDIP di Kabupaten Magelang?

pasti ada hambatan, jadi hambatannya kan namanya manusia, kalau mungkin dari struktur organisasinya dari PAC, ranting, anak ranting, mereka bisa solid. Tapi ketika mereka harus ke masyarakat, dan ditengah masyarakat kan pasti akan terjadi perbedaan pilihan. tidak semua masyarakat mendukung calon dari PDIP, mereka sudah punya pilihan sendiri. Dan ketika kita mensosialisasikan, mengajak orang untuk memilih calon dari PDI Perjuangan, pasti orang akan tanya kalau aku milih calonmu dikasih apa?, ditengah masyarakat kan sekarang seperti itu. jadi kan kita memang tidak menggunakan system money politik. Money politik yang diberikan langsung kepada pemilih kan tidak. Hanya memang kita harus memakai uang untuk operasional kegiatan yang harus dibiayai oleh DPC, dan juga oleh calon. Bahkan ketika kekurangan mungkin DPD dan DPP juga memberikan subsidi, tapi kan lebih banyak ke calon yang bersangkutan. Sehingga ketika calon yang lain atau rival itu tidak berangkat dari partai, mungkin dari independen bahkan mungkin partai tapi menggunakan system money politik, maka itu menjadi suatu hambatan ketika kita akan mengajak pada orang lain. Kemudian juga elektabilitas dari calon itu sendiri, ketika calon itu dimunculkan, orang belum mengenal, itu juga menjadi hambatan. Kita mau menjual dagangan kita tapi dagangan itu belum dikenal masyarakat, kan kita juga susah, harus pintar juga. Kalo hambatan pasti ada di mana-mana.

Kalau SDM PAC, kalau terbatas hanya pada sosialisasi ke ranting dan anak ranting sudah jalan sejauh ini. Artinya, mereka sudah bisa dibatasi (ditarget). Karena kan juga program kegiatan sudah kita (DPC) bekali, jadi biasanya di rapat yang menyelenggarakan DPC dengan mengundang PAC sebagai petugas yang mensosialisasi sudah kita bekali, bekali visi-misi, program dari calon.

- Bagaimana system evaluasinya?

System evaluasi ada, masing-masing kita menggunakan mapping semacam kirka. Artinya kita kumpul rutin, misalnya setelah sosialisasi jalan, PAC membuat tugas untuk laporan ke DPC. Bagaimana sosialisasi sudah selesai atau belum. Dari ranting maupun anak ranting nanti akan muncul kendala atau hambatan apa itu perlu disampaikan. Misalnya di salah satu ranting di suatu PAC, itu ketika sosialisasi masyarakat sudah menuntut seperti meminta kaos dan sebagainya itu kan meminta sarana untuk pemasangan gambar dan sebagainya. Atau bahkan ketika alat-alat kampanye kita bagikan (kaos, gambar dll), ada yang dengan sukarela, tapi ada juga yang meminta biaya pemasangan. Kemudian nanti evaluasinya begini, ketika sudah semua di sosialisasikan, PAC mempunyai tanggung jawab untuk mapping di masing-masing ranting. Dusun satu misalnya, ketua rantingnya jalan,

kemudian berapa persen yang bisa masuk, itu wajib untuk di laporkan. Sehingga nanti itu berjalan, rapat PAC yang menghadirkan ketua ranting-ketua ranting akan melaporkan. Jadi misalnya desa satu, pendukungnya yang bisa kami harap bisa memperoleh 50%. Nanti dusun dua juga melaporkan sudah jalan, kami targetkan 80%. Terus sampai semua dusun, sehingga di rata-rata dari semua laporan, kira-kira jumlah ada berapa persen dari jumlah desa yang ada. Ternyata di Salam itu dari laporan ranting-ranting yang ada di kecamatan salam itu sudah mencapai 60%. Pemetaannya kan begitu. Sehingga nanti waktu di DPC, di laporkan dan dievaluasi, ternyata di sana sudah mencapai 60%, ada yang baru 30%, ada yang 50%, ada yang sudah 80% karena memang disitu sudah basisnya mutlak. Biasanya waktu awal-awal kan laporan masih rendah, karena kan kerja temen-temen kan belum maksimal. Sehingga ketika sudah mendekati akhir, biasanya menjelang tiga minggu, satu bulan maksimal, itu yang masih rendah itu bagaimana bisa prosentasinya dinaikan. Apakah harus mendatangkan dari tim, artinya tim kampanye yang datang, ataukah tim siluman dalam arti pasukan gorong-gorong, karena kita juga ada pasukan gorong-gorong. Ataukah disitu ditambahi alat untuk memperkenalkan calon. Jadi ujung tombaknya di anak ranting dan ranting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik semua pemilihan Pilkada, pilgub dan pilpres itu ujung tombaknya di anak ranting dan ranting.

Berarti PAC dan DPC hanya megurusi administrasi ?

- Bukan begitu, karena di setiap PAC kan punya posko. Temen-temen PAC disitu kan selalu ngumpul, sehingga mereka juga turun ke ranting membantu. Karena PAC itu kan juga representasi dari ranting-ranting. Jadi pengurus PAC yang jumlahnya 11 orang, bisa jadi perwakilan dari dusun-dusun yang ada. misal saya tinggal di dusun A, saya pengurus PAC. Di situ ketua rantingnya juga tinggal di dusun A. kan sama-sama satu dusun dengan saya. Jadi saya bisa membantu pekerjaan dari mereka. Jadi kita tidak hanya secara administrasi saja, tapi tetap sama-sama. Kadang ada ketua ranting itu tidak kerja, PAC nya kan tahu, itu nggak kerja kok bisa ngelaporin dari situ, darimana laporannya. Biasanya setelah itu mendekati pelaksanaan, kemudian kita mengevaluasi kegiatan di masing-masing PAC, PAC mendasari dari laporan ranting dan anak ranting. Kemudian laporan akhir itu bagaimana perolehan suaranya, karena dinamis sifatnya. Kadang di awal pendukungnya banyak. Tapi tiba-tiba pendukungnya lari ke calon yang lain. Bisa karena dipengaruhi oleh calon yang ini, kemarin ada kumpulan di sana bagi-bagi kaos, bagi amplop dan sebagainya. Itu kan satu kasus yang pasti ada di setiap daerah. Setelah itu kita evaluasi untuk menemukan caranya bagaimana. Bisa kita sosialisasikan kembali, kumpulkan lagi masyarakat. Mungkin di akhir-akhir perjalanan karena kita tidak menggunakan moneypolitik, orang bisa kita dekati secara kekeluargaan. Kembali kepada visi-misi calon dari kami PDIP, kita sadarkan mereka. Ya namanya partai, kita kalau menjual suatu dagangan kita mesti mengatakan calon saya yang terbaik. Walau kadang ya nuwun sewu, pas jadi tidak sesuai yang diharapkan oleh teman-teman. Itu secara nyata seperti itu.

- Dalam system evaluasi tadi, apakah pernah diusulkan untuk di sanksi misalnya diganti?

- Dalam system evaluasi ada tindakan kepada pengurus yang tidak kerja untuk sosialisasi dan sebagainya, tapi tidak kita ganti. Karena di dalam kepengurusan, kita tidak bisa serta-merta mengganti orang per-orang ketika orang itu tidak loyal kepada partai, tidak bisa langsung kamu saya pecat, kamu saya ganti, tidak bisa. Harus menggunakan mekanisme. Maka ketika seorang ketua ranting, dia tidak bekerja setelah dievaluasi dan kenapa dia tidak bekerja. Akhirnya kita dekati, apakah dia membantu calon lain, atau karena kesibukan dia sehingga dia tidak punya waktu untuk memperkenalkan calon itu di desa itu. Dari alasannya kita jadi tahu, biasanya ya karena kesibukan, dia pulangnye sore, sehingga dia tidak sempat keliling-keliling. Tapi kalau ketua ranting yang cerdas, pasti bisa berbagi

tugas dengan teman-temannya. Karena pengurus ranting tidak hanya dia. Jadi ketika ketuanya tidak aktif karena banyak urusan dengan hidupnya sehari-hari, dia bisa menggerakkan si sekretaris, bendahara atau wakil ketua yang lain untuk meakili dia. Dan ketika minggu dia libur, dia bisa all out bekerja dalam satu hari itu, sesuai dengan laporan sekretaris dan bendaharanya. Jadi yang biasa kita temukan seperti itu, dan biasanya clear (selesai). Jadi tidak ada yang ditengah perjalanan diberhentikan.

Ada (diberhentikan) sih tapi kasusnya kasus lain, saya contohkan seperti ini: ketika pilihan bupati, itu yang direkomendasi kan Zaenal Arifin juga wakilnya Zaenal Arifin. Ada calon bupati yang namanya pak Susilo, waktu itu sebagai sekretaris DPC juga maju masih dari PDIP. Ketika rekomendasi turun yang direkomendasi adalah Zaenal Arifin dan Susilo tidak ikut direkomendasi. Akhirnya Susilo maju diusung oleh partai lain, dari PPP dan dari beberapa partai juga. Otomatis Susilo masih punya pengikut juga temen-temen PDIP. Akhirnya PDIP pecah, PDI Susilo dan PDI Zaenal Arifin. PDI Zaenal Arifin saya katakana PDI yang pro dengan rekomendasi. Sementara PDI yang mendukung Susilo saya katakana yang tidak pro dengan rekomendasi. Ini otomatis di lapangan menjadi pecah, menjadi ramai. Ketika saya ajak sama-sama PDI ternyata dia ikut Susilo kan jadi pecah, karena kemarin juga kasusnya seperti itu. tapi ketika Susilo mendapatkan surat pemecatan langsung dari DPP, dia diberhentikan dengan tidak hormat karena di ampu dari partai lain, di PDI hukumnya seperti itu. Maka, surat pemecatan Susilo itu kita jadikan alat bukti kampanye untuk menjatuhkan Susilo sebagai kader PDI yang tidak direkomendasi dan itu di dalam sosialisasi kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga Susilo akan mengklaim bahwa dirinya PDI walaupun dia diangkat dari partai lain. Maka di sosialisasi baik ditingkat ranting maupun anak ranting, bahwa calon PDI Perjuangan yang direkomendasi oleh DPP partai adalah Zaenal Arifin, bukan Susilo. Kemudian kita sampaikan juga, ini surat bukti fotocopy biar mereka membaca, biar mereka juga bisa menyampaikan ke masyarakat, ketinggian pengurus anak ranting yang tidak yakin. Itupun tetep ada pendukungnya Susilo, walaupun itu hanya arus bawah yang hanya ikut-ikutan setelah kita kasih tau, kita sampaikan informasi itu tentang surat-surat DPP yang memang bukti Susilo sudah bukan kader partai, akhirnya kembali. Tapi memang yang sudah terlanjur Susilo maind ya susah. Disini DPP hanya memunculkan surat pemberhentian kepada Susilo, bukan kepada Susilo dan teman-temannya. Jadi yang Susilo minded itu tidak diberhentikan. Tapi DPC tahu siapa sih yang mendukung Susilo selama ini. Memang kita tidak langsung memecat dengan menggunakan surat dari DPC, tapi sangsinya mereka tidak kita masukan di struktural. Dan itu dilakukan di periode yang berikutnya, dan kebetulan mendekati akhir-akhir periode. Jadi ketika Susilo bukan pengurus lagi karena sudah dipecat, maka kepengurusan yang berikutnya juga mengganti si struktural dari si kader Susilo.

- Kerja dan evaluasi untuk pemilihan legislatif bagaimana?

Legislatif itu lebih berat dibandingkan dengan pilgub atau bupati atau pilpres. Ketika saya berbicara dengan struktural, pilihan bupati itu kan siapa yang akan kita usung kompak bareng. Tapi ketika kita sudah berbicara dengan legislatif di satu daerah kan kita dibagi dapil, nah ketika saya maju lewat dapil enam dan di dapil tersebut bukan saya sendiri yang maju, kadang di kecamatan saya juga tidak hanya saya sendiri, bahkan bisa di satu PAC itu yang muncul dua nama, otomatis semua kan tidak bisa mendukung salah satu saja. Otomatis ada yang mendukung si A ada yang mendukung si B, ini kan beda kasusnya. Dan justru, ketika kita pilihan legislatif kita tidak bisa mengandalkan 100% pada struktural. Karena struktural kan jumlahnya terbatas. PAC misalnya, kan kita punya 11 pengurus atau orang. Kemudian ranting, hanya sembilan orang. Sembilan kali tempat saya 12 berarti 108 orang. Kemudian anak ranting itu hanya ada lima pengurus, dikalikan saja kalau ada tujuh anak ranting yakni 35. Satu kecamatan itu ya mungkin naik turun sekitar 500 struktural

kepengurusan. Padahal, untuk pilihan legislatif kalau kita hanya mengandalkan struktural yang hanya 500 kan tidak mungkin. Maka kita harus banyak mencari suara dari luar yang bukan struktural. Kita asumsikan begini, sama dengan pilihan bupati, kalau kita mengandalkan struktural, ketika kita punya dikecamatan itu 500 struktural dari tingkat PAC sampai anak ranting, kalau dengan istri yang misalnya sudah berkeluarga kan jadi 1000. Atau katakanlah, kalau masing-masing 500 itu bisa membawa 10, maka kita punya 5000 pemilih di satu kecamatan. Kalau 5000 itu kali 21 kecamatan, berarti kita punya 100000an. Yang lainnya mungkin melibatkan keluarga, melibatkan yang lain-lain. Nah, kasus pilihan legislatif, saya tidak bisa terlalu mengandalkan seluruh teman struktural karena disini teman struktural mau mendukung saya juga sah, mau mendukung teman saya juga sah. Jadi tidak bisa memaksakan teman-teman harus mendukung saya. Maka disitu terjadi benturan antar struktural ketika mereka berbeda dukungan.

Berarti ada peluang konflik internal ?

-justru peluang konfliknya disini lebih besar. Misalnya ketika saya dengan pak Gunawan, kan sama-sama di dapil 6, juga di struktural saya ada yang mendukung pak Gunawan, di PAC Salam. Dan ini tidak salah karena sama-sama siapapun yang di dukung itu kader PDI perjuangan, kan susah disitu. Maka justru kita mengandalkan perolehan suara itu dari luar, dari non-struktural. Ada kok yang satu struktural itu begini, di satu desa (ranting), di satu TPS yang saya nilai itu banyak pengurusnya, saya hanya mendapat tujuh orang atau tujuh suara. Kan aneh, saya hanya dapat tujuh suara padahal di TPS itu strukturalnya ada beberapa orang. Kan kalau saya hitung, kan ada itu ketua ranting, sama istrinya, sama orang tuanya, dan kalau disitu ada lima berate ada 20, itu gambaran saya. Tapi ternyata yang muncul tujuh suara, kan aneh juga. Tapi juga tidak aneh ketika dukungan yang lain itu tidak mendukung ke saya tapi mendukung ke calon yang lain seperti pak Gunawan. Dalam pengkondisian itu konflik terjadi ketika saya mengajak teman-teman struktural saya untuk memilih saya, kan saya juga punya hak untuk sosialisasi. Dan pak Gunawan juga punya hak untuk bersosialisasi. Maka disitu berbenturan, jadi berbenturan. Jadi ketika pileg konflik kepentingan akan lebih besar, karena head to head. Kalau diluar pileg paling dengan pendukung kader yang lain, ya biasalah. Artinya walaupun tidak harus menjelek-jelekkan yang lain tapi rata-rata pendukung yang fanatic dengan saya rata-rata tidak mau pindah dengan pendukung yang lain. Tapi ingat di dalam pilihan legislatif, masyarakat tidak semata-mata memilih calon, tapi juga mengharapkan sesuatu. Kalau ada istilah pilihan legislatif itu tidak ada money politik, itu nonsent. Justru masyarakat itu memilih ketika ada uang. Beda dengan pilkada, masyarakat tidak mungkin mendapatkan apa-apa, paling kaos, stiker atau alat-alat untuk kampanye saja. Saya dengan pak Gun kan beda (pileg). Kader saya mengatakan, pak, di wilayah saya ada 100 suara siap mendukung bapak, tapi mereka minta Rp.50000. Terus saya bilang oke 100 suara, a lima puluh ribu, berarti saya mengeluarkan lima juta. Kemudian pak Gunawan masuk di wilayah tersebut, (kader saya bilang) maaf pak disini sudah pak Budi, "Bayar piro pak Budi?." lima puluh ribu pak (jawab kader). "Tujuh lima ikut saya" (Pak Gunawan). Nah, ketika masyarakat atau kader itu tidak bertanggungjawab, maka dia akan menerima yang 75 ribu itu, dan melupakan 50 ribu pemberian saya. Jadi saling tikam ditubuh sendiri. Dan masyarakat tidak bisa dipastikan maksudnya ketika saya bayar 50ribu sejumlah seratus orang atau lima juta, kemudian saya bilang baik besok pas pemilihan harus ada 100 orang, nggak bisa seperti itu. Ada uang, besok dipilih. Jadi ketika ada orang yang bayar lebih tinggi, uang tidak dikembalikan. Itu kan aneh, dan suara nggak masuk. Maka ketika target mereka 100, justru hanya ada yang keluar 20, 25.

Ada juga calon legislative yang menggunakan system yang tidak fair, tidak gentle, bahkan cenderung menggunakan system premanisasi. Artinya ketika masyarakat sudah komit

dengan saya, saya mengatakan saya tidak membeli suara bapak ibu, kalau bapak ibu memilih saya, saya hanya bisa memberikan sekedar transportasi dari rumah bapak ibu ke TPS. Saya mengatakan ini hanya transpot bukan membeli suara njenengan, saya hanya mampu memberikan 30 ribu. Kalau bapak ibu sanggup, nanti lewat kader dicatat. Dan kader saya mencatat siapa yang memilih pak Budi. Kader saya akhirnya mencatat dan tercatat ada 150 misalnya, maka saya harus mengeluarkan 150 kali 30 ribu untuk transpot. Tapi ada calon lain yang mendengar model saya seperti itu, dia punya kader yang lain. Dan kader tersebut datang yang kebetulan kader tersebut agak ditakuti karena agak preman. Dia masuk ke rumah-rumah tidak sosialisasi namun dia minta amplop dari saya dan memberi 40 ribu. Amplop saya ditarik tapi amplop itu tidak kembali kepada saya. Jadi calon itu hanya mengeluarkan uang 10 ribu. Dan itu ya sama-sama PDIP. Kalau diluar partai ya ramai urusannya. Tapi ketika itu dengan teman partai sendiri kan jadi repot. Sehingga saya waktu itu mengeluarkan 11000 amplop, ada yang 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu bahkan ada yang 60 ribu tergantung di masing-masing tempat. Dihitung rata-rata 40 ribu kali 11ribu sudah 450juta yang saya bagi di masyarakat. Tapi berapa yang saya dapat? Saya hanya mendapat 5000 lebih, tidak sampai 5500 suara. Separuhnya nggak ada. Jadi intinya pileg itu lebih berat dibanding dengan pilkada. Saya tidak mengecilkan arti pilkada, tapi ketika pilkada di Kabupaten Magelang, untuk seorang bupati terpilih, rata-rata karena tahu kondisi politik di kabupaten Magelang. Magelang itu mayoritas kan orang hijau dan merah, dari PDI Perjuangan dan dari PKB. Ketika PDIP berkoalisi dengan PKB, harapannya mudah untuk menang. Maka beberapa kali, ketika Pak Singgih (bupati 2003-2013) dua kali maju kemudian Pak Zaenal Arifin kemarin maju juga menggandeng dari yang hijau. Tapi coba ketika nanti PDI Perjuangan maju sendiri atau bahkan meninggalkan yang hijau, menggandeng misal dengan PAN, nggak mungkin menang, karena basis massa di Kabupaten Magelang itu PKB dan PDI Perjuangan.

Secara umum yang memperoleh suara terbanyak di legislative PDIP dengan 10 kursi, dan yang kedua PKB dengan 9 kursi. Namun di PDIP tidak ada yang mendapat penuh suara satu kursi. Maksudnya seperti ini, kalau di dapil saya, dapil 6 itu kuota satu kursi 14500 suara. Kita tertinggi di sana sekitar 7000an, dan saya 5000 lebih sedikit saya suara terbanyak dua. Total suara PDIP di dapil 6 itu 30000 suara, yang diakumulasi dari jumlah suara partai dan jumlah suara caleg (memilih by name). Kemudian otomatis kan kita mendapat dua buah kursi, dan yang duduk adalah suara terbanyak satu dan suara terbanyak dua. Sebenarnya kalau kita hitung, saya bisa mendapat kursi disitu bukan semata-mata karena diri saya, tapi juga teman-teman saya yang membantu untuk mendapatkan kursi itu (menggambil suara teman-teman yang lebih sedikit dari saya). Jadi tidak bisa dapat satu kursi penuh 14500, tidak ada yang bisa.

- Bagaimana hubungan kepartaian bapak dengan Pak Gunawan, apalagi satu forum DPRD dan DPC?

konflik dengan pak Gunawan waktu pileg kemarin, ketika pileg berlangsung, saya tidak berani menegur secara langsung dan tidak bisa juga melaporkan keatasan. Jadi saya mengambil sikap dengan merubah strategi. Karena ketika saya sosialisasi di luar di daerah dukun kenapa pak Gun tahu?. Berarti kan ada orang yang membocorkan. Setelah jadi paling saya sedikit saya singgung dengan sindiran, tapi dalam bentuk bercanda, cuma begitu saja. Dan akhirnya setelah jadi pun begitu saja melupakan. Jadi dalam suasana menjelang pileg sampai ke pilegnya memang kuat, justru ita gontok-gontokannya sama teman sendiri. Kalau dengan partai yang lain kan kita bisa fight ya, mereka menggunakan cara seperti apa ya kita kejar. Dan ini ketika sudah bicara sama-sama dengan teman kan repot, dan ini sulit dihindarkan. Jika seandainya ini jadi konflik secara verbal, ranahnya sementara untuk menyelesaikan konflik yakni di DPC itu dahulu. Paling dengan teguran.

Yang namanya money politik itu suatu kemasan yang sifatnya rahasia, tapi itu ada dalam pilihan legislatif. Tapi orang selalu mengatakan bahwa saya tidak money politik. Maka ketika kepentingan dari masing-masing calon sudah muncul, akhirnya berbagai macam cara di lapangan dilakukan. Karena sasarannya kan sama. Ketika saya meminta struktural sosialisasi untuk memilih saya, Pak Gunawan juga punya hak sosialisasi ke struktural untuk memilih dirinya. Sehingga tidak hanya konflik kepentingan antar calon, konflik kepentingan pendukung juga muncul. Tapi setelah selesai pileg, semua sudah clear.

- Apakah ada dinamika politik lain selain konflik bapak dengan Pak Gunawan di Pileg?

Sebenarnya ada dinamika politik lain di kabupaten Magelang. PDI Perjuangan di kabupaten Magelang terpecah. Bukan hanya ketika kasusnya Susilo, namun juga ketika kita mengadakan agenda konsolidasi partai berupa pemilihan struktural DPC baru. Waktu itu ketua DPC masih Pak Singgih, mantan Bupati dan dia sudah menjabat di DPC beberapa periode. Pak Singgih menghendaki yang menjadi ketua DPC itu Bupati sekarang, Pak Zaenal Arifin. Kemudian kita berusaha untuk menjadikan proses pemilihan itu mengalir. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada titipan dan betul-betul aspirasi dari teman-teman. Akhirnya terjadi semacam perpecahan, pak Singgih menghendaki seperti itu, kami dari yang muda tidak menghendaki seperti itu. Kemudian kita membuat strategi baru, bagaimana membuat DPC yang akan datang bukan titipan dan paksaan seperti pola-pola pak Singgih. Sehingga kami dengan Pak Singgih menjadi berbenturan. Namun seiring berjalannya waktu, kami dan teman-teman bisa mengkondisikan beberapa PAC, dan yang pro Pak Singgih juga mengkondisikan sendiri. Setelah itu, dari DPD dan DPP memberi rekomendasi dari calon-calon yang kami usulkan. Sehingga ketika surat rekomendasi tentang kepengurusan DPC yang baru sudah turun, otomatis di kubu Pak Singgih sudah tidak punya kesempatan. Sehingga mereka tidak kita tempatkan di struktural. Jadi namanya dinamika politik di partai memang demikian. Di Fraksi juga begitu, kita mempunyai 10 kursi. 10 kursi tersebut kita punya 6 orang dari DPC baru, sementara pendukung pak Singgih 4 orang. Ini tidak bisa akur sampai sekarang. Ketika ada kegiatan-kegiatan partai yang mewajibkan pengurus fraksi atau anggota fraksi itu bisa datang kegiatan DPC partai, karena ada masalah itu jadi 4 orang ini tidak pernah bisa aktif. Itu menjadi pelanggaran sebenarnya karena pada dasarnya fraksi di DPRD itu kepanjangan tangan dari partai. Tapi kita juga ada dilema, ketika ini di ganti, orang yang dibawahnya yang akan menggantikan ini juga orang-orang sana. Dan akhirnya kita biarkan saja. Yang penting DPC Kabupaten Magelang sudah sah.

- rata-rata kalau di PDI Perjuangan, yang duduk di legislative itu adalah petugas partai artinya struktural partai. Ketua DPRD nya ketua DPC, ketua fraksinya sekretaris DPC, wakil ketua fraksinya bendahara DPC. Kemudian teman-teman yang lain seperti saya juga DPC. Empat orang yang lain dulunya PAC, dan DPC. Maka legislative yang sekarang itu orang-orang partai dan struktural, baik pengurus DPC dan PAC. Minimal PAC. System pencalonannya yang kemarin, dari DPD mengatur untuk yang maju caleg itu kan dari PAC dan DPC. Kemarin itu ketua PAC mendapat tiket ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, tergantung kondisi wilayah di masing-masing daerah. DPC yang mengusulkan tapi DPC yang menentukan penomoran.

- jadi selama ini ketika terjadi konflik lebih baik didiamkan. Konflik yang sifatnya seperti waktu caleg yakni konflik kepentingan lebih baik didiamkan. Tapi setelah itu semua selesai, kita menyadari dan kita kembali lagi. Kecuali kalau konflik tentang keputusan partai, maksudnya kami kan mengatakan garis partai itu tegak lurus tidak bisa bengkok. Maka ketika partai yakni DPP, mengatakan A maka DPD DPC sampai ranting harus bunyi

A tidak ada yang lain. Maka jika berusaha membengkokkan akan ada sangsi seperti pak Susilo.

- perbedaan pendapat di lingkungan partai itu memang harus ada. Kalau kita di partai kok sama pendapatnya maka tidak ada dinamika. Program-program kegiatan lewat musyawarah partai kadang juga sama teman berbeda pendapat. Tapi pada akhirnya kita mencari yang terbaik. Semua orang kan boleh mengeluarkan suara untuk berpendapat, sehingga ketika perbedaan pendapat itu wajar. Maka partai akan menentukan yang terbaik. Biasa di partai berbeda pendapat.

- kalau saya pribadi, setiap kegiatan yang ada di partai selalu mengusulkan kegiatan partai itu kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat. Artinya bukan hanya sekedar seremonial, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Kalau saya lebih cenderung kegiatan tersebut yang nyantol di masyarakat. Dan masyarakat tahu bahwa itu kegiatan yang mengadakan adalah PDI Perjuangan. Sehingga buntutnya adalah masyarakat akan selalu ingat. Contohnya pengobatan gratis, pasar murah, dll. Sehingga masyarakat tahu dan merasa dampaknya dan akan mengingatkannya bahwa itu yang menyelenggarakan PDI Perjuangan.

-kesempatan untuk menyampaikan gagasan biasanya di forum-forum rapat, jadi misalnya menjelang bulan bung karno, kita kumpul dan membahas apa yang akan kita lakukan. Nah dalam kesempatan itu bisa menyampaikan gagasan kita.

-sikap-sikap politik di dalam dalam PDIP. Mekanisme tersebut sudah kita lalui dan sepakati melalui musyawarah dan tentunya kita harus mendukung. Termasuk keputusan penunjukan seperti Ahok untuk menjadi calon Gubernur DKI. Jadi kita telah sepakati bahwa garis partai itu tegak lurus dan harus kita ikuti. Simbol partai itu kan Ibu Mega, jika ibu Mega menghendaki Ahok-Djarot setuju dan tidak setuju, senang atau tidak senang kita harus patuh. Bahkan beberapa kesempatan, dinamika partai itu bertentangan dengan hati nurani. Namun kita harus tetap mengikuti. Maka sebab itu Boy Sadikin memilih mundur, karena dia tidak sepaham. Memang di partai ketika tidak sepaham maka dia hanya bisa berbuat diam saja atau keluar. Jadi pilihannya setuju, diam atau keluar. Ketika saya tidak setuju saya bisa keluar, ketika setuju saya harus beraksi dan ketika diantara dua pilihan tidak setuju tapi tidak ingin keluar ya saya diam dan tidak akan berkomentar. Saya sendiri ya harus mendukung, apapun yang menjadi keputusan DPP, dalam hal ini ketua umum, kita siap mendukung. Termasuk Pilkada, apapun yang terjadi kita ya harus mendukung. Ketika itu tidak sesuai dengan hati nurani saya, ya saya tetap mendukung. Karena kalau kita tidak mendukung berarti kita sudah mengingkari amanat dari partai.

-padangan terhadap ibu mega. Ya beliau adalah pendiri, dan PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari ibu Megawati. Artinya ibu Megawati adalah seseorang yang berpengaruh, termasuk berpengaruh dalam kehidupan berpolitik saya. Saya banyak berguru dari beliau. Walaupun saya jarang bertemu langsung, tapi kan gagasannya dalam spirit partai sudah dia usulkan. Disampaikan dalam pendidikan partai lewat DPC, DPD, trainer-trainer yang dari DPC atau DPD. Dan dalam mengambil keputusan walaupun bertentangan dan kadang kontroversi tapi beberapa kali bisa kita buktikan bahwa keputusan ibu Megawati adalah keputusan yang tepat. Orang banyak yang menentang, tapi ketika keputusan yang beliau lakukan itu ternyata pas dengan perhitungan yang matang, dan akhirnya orang akan menyadari. Saya sering memandang Ibu mega adalah sosok yang betul-betul matang di dunia perpolitikan walaupun dia seorang perempuan dan dia punya karisma. Tapi saya tidak tahu ketika ibu Mega turun tidka menjadi ketua Umum lagi, atau bahkan karena usia dia pasti akan meninggal, saya tidak tahu apakah kebesaran PDI Perjuangan akankah seperti sekarang ini. Orang kan memandang selama ini, PDI Perjuangan hanya yang dipandang

Ibu Megawati, belum ke mbak Puannya. Bisa saja setelah ibu Mega lengser tidak menjadi ketua umum, pasti orang akan berebut jabatan ketua umum. Kalau saya menilai ibu Megawati itu putri Bung Karno, penerus generasi Bung Karno, dan ideologi Bung Karno ada pada ibu Megawati, sehingga kami masih menjunjung tinggi kehormatan ibu Mega. Tapi ketika PDI Perjuangan dipegang oleh orang lain selain keturunan Bung Karno, tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi keputusan apapun, sebagai kader partai yang baik adalah mendukung keputusan ketua umum. Terlepas dari keputusan itu baik buruk, benar salah. Tapi saya boleh komentar dong, kok keputusan ibu seperti itu, dan kita bisa menganalisa juga kenapa keputusan seperti itu.

-menurut saya sosok kader atau pemimpin di partai ini hanya bu Mega, tidak ada sosok lain. Pak Jokowi pun bisa menjadi presiden juga karena bu Mega. Ketika bu Mega memberikan rekomendasi kepada Jokowi untuk maju Pilpres, artinya dia ditugaskan oleh partai. Termasuk Ahok juga ditugaskan oleh partai. Jadi kewenangan sepenuhnya ada di tangan ketua umum. Jadi orang menjadi besar, menjadi pemimpin di negara ini berkat campur tangan dari ketua umum.

-di DPC, kalau saya dan teman-teman tidak pernah mengkultuskan orang yang ada di DPC untuk menjadi sosok. Artinya kita sejajar sebagai kader dan petugas partai. Di DPC itu adalah kolektif kolegial. Jadi keputusan yang kita ambil, bukan keputusan orang perorang namun keputusan bersama. Sehingga kita tidak punya sosok yang kita kultuskan. Ketika tokoh-tokoh PDI muncul di kabupaten Magelang, yang berjuang di Kabupaten Magelang kita boleh menyebutkan itu tokoh. Tapi kita tidak menganggap dia besar dengan sendirinya, dia juga besar karena partai.

-inisiatornya kalo di DPC untuk menggerakkan roda organisasi partai di DPC ya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Mereka pengurus harian, selalu berembuk untuk menentukan program-program kegiatan. Sementara untuk yang lain wakil ketua bidang, hanya mengikuti.

-penilaian kader seperti ibu rustriningsih dan pak bibit yang keluar. Ibu rustriningsih itu kader partai yang baik. Pak Bibit menurut sejarahnya dulu setelah purna dari ABRI, dia meminta sendiri kepada ibu Megawati untuk masuk menjadi kader. Bahkan waktu itu yang menyematkan langsung untuk menjadi kader adalah ibu ketua umum. Tapi sekarang lihat, ketika Pak Bibit waloyo menjadi Gubernur Jawa tengah, selama perjalanannya menjadi gubernur, dia lupa bahwa dia menjadi gubernur itu atas peran serta ketua umum. Sementara bu Rustriningsih sendiri itu adalah kader partai yang bagus dan kader partai yang baik. Tapi selama dia menjabat menjadi wakil Gubernur, dia juga tidak dapat berbuat banyak untuk partai. Pak Bibit dan Bu Rustri ini dua kader partai yang ditempatkan menjadi orang nomor satu dan nomor dua di Jawa tengah. Tapi kontribusinya kepada partai kurang. Apalagi bu rustri sakit hati ketika dia tidak direkomendasi menjadi gubernur. Kita boleh saja mengatakan bahwa kita adalah kader yang baik. Tapi yang menilai kan DPD dan DPP partai PDIP. Jika DPD di Jawa Tengah menilai Pak Ganjar yang dipandang oleh umum ini baik tapi tidak ada kontribusinya untuk partai, kemudian periode berikutnya tidak direkomendasi menjadi gubernur, maka tidak perlu sakit hati. Begitu juga dengan Bu Rustri, ketika bu rustri sadar bahwa penilaian DPD bahwa dia belum maksimal kerjanya terhadap partai, dan dia tidak direkomendasi lagi, maka dia harusnya sadar dan tidak perlu keluar. Harusnya itu menjadi bahan interopeksi untuk dirinya.

-penilaian terhadap ketegasan kepemimpinan di lingkup DPP DPD dan DPC. Menurut saya sangat tegas. Saya mengemukakan bahwa garis partai itu tegak lurus. Ketegasan DPD tidak bisa bermain sendiri apalagi hanya setingkat DPC. Jadi semua intruksi itu datang dari DPP. Ketika intruksi itu datang dari DPP, maka DPP turun ke DPD, maka DPD melaksanakan

tugas. DPD mengintruksikan kepada DPC, maka DPC melaksanakan tugas. Jadi intruksinya jelas, semua intruksi sumbernya dari DPP. Jadi DPC tidak bisa membuat agenda partai yang diluar agenda DPP.

-peran dan tugas saya. Saya sekarang menjadi wakil ketua bidang, bidang Ekonomi Kreatif dan UMKM.

-cara menjalankan tugas saya. Bahwa saya duduk di legislative dari fraksi itu karena menjadi kepanjangan dari partai. Saya duduk di bidang UMKM, ekonomi kreatif dan juga pariwisata kan sesuai dengan tugas saya di komisi DPRD, jadi di komisi 2 sesuai dengan tugasnya. Nah kemudian apa yang saya laksanakan di kantor atau di tempat tugas itu saya usahakan bisa match dengan tugas saya di kepartaian atau DPC. Baik itu yang sifatnya aspirasi dari masyarakat, itu harus saya sampaikan dalam DPRD. Sehingga saya tidak bisa membuat suatu kegiatan sendiri diluar program yang telah kita rencanakan di DPC.

-ya, saya harus bersinergi dengan masyarakat. Dan sebaliknya masyarakat juga harus bersinergi dengan orang yang ditunjuk mewakilinya di lembaga. Artinya, ketika program-program kegiatan ataupun kegiatan masyarakat yang disampaikan kepada saya berupa aspirasi bisa saya bawa, ya berarti bisa saya teruskan. Tapi ketika aspirasi masyarakat itu tidak bisa saya bawa ke lembaga yang terkendala oleh beberapa aturan, seperti misal bantuan yang mana kelompok masyarakat harus berbadan hukum itu kan menjadi suatu kendala. Maka itu juga saya sampaikan kepada masyarakat, tapi ketika masyarakat bisa mengambil bantuan lewat saya, ya saya akan sampaikan. Intinya ada perubahan pandangan masyarakat terhadap saya dan peran aktif masyarakat memberikan aspirasi juga ada. walaupun kita tidak bisa selamanya memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi ketika setelah disumpah dari awal bahwa kami harus memperjuangkan aspirasi masyarakat baik itu di komisi maupun di fraksi.

-bagaimana cara dalam merumuskan aspirasi?

Ada yang aspirasi masyarakat itu dikoordinasikan oleh DPC. Contohnya tahun 2016 dan 2017 setiap anggota dewan mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang dialokasikan lewat APBD, dengan masing-masing dewan sebanyak 40 rumah. Itu kita rembuk di DPC, kita plotkan di DPC kegiatan itu. Karena kalau saya hanya masuk di Salam, maka Dukun tidak kebagian, Srumbung tidak kebagian, Muntilan tidak kebagian. Kemudian sebisa mungkin kita bagi rata sesuai dapil tersebut. Maka plot itu diserahkan kepada DPC.

-bagaimana bapak menjalin hubungan baik dengan konstituen setelah terpilih.

Kalau saya terbalik. Jadi saya berkomitmen dengan masyarakat ketika saya akan nyaleg. Jadi bukan sekedar janji saya. Tapi saya berusaha membangun masyarakat pemilih yaitu ketika saya nyaleg. Maka ketika saya dengan masyarakat membuat suatu komitmen, atau ya bisa dikatakan membuat suatu kontrak politik, saya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya siap menyalurkan aspirasi bapak/ibu setelah saya terpilih. Sehingga bukti tersebut adalah sebuah komitmen yang bersinergi dengan masyarakat bahwa saya akan mengembalikan setiap kegiatan yang ada di lembaga, setiap ada bantuan atau apapun yang kepada masyarakat, maka akan saya sampaikan. Tidak hanya di jaringan struktural tapi juga di jaringan teman-teman pemilih saya akan mencoba menyampaikan aspirasi tersebut. Namun sekarang ini yang menuntut aspirasi ini adalah orang-orang yang kader dan memang dulu ketika memilih saya, berdasarkan dari komitmen yang telah kita buat. Tapi kalau orang-orang yang menerima saya secara langsung tidak pernah mempermasalahakan. Malah kader-kader yang dulu mencari suara dan memperjuangkan

saya ditengah masyarakat kadang sms, menanyakan bantuan, menanyakan pengajuan proposal, biasalah bertanya seperti itu.

- Bagaimana ana berkomunikasi dengan kader lain?

Kecuali dengan anggota fraksi jelas setiap hari kami bertemu. Dalam rapat-rapat fraksi kita selalu berkomunikasi baik dalam membuat pandangan umum, atau rapat fraksi ada acara sendiri itu selalu kita bina. Kalau dengan kader yang lain di tingkat DPC kita ada rapat rutin DPC. Sedangkan dengan kader yang ada dibawah DPC, seperti pengurus PAC, ketika mereka rapat rutin kadang mengundang saya. Jadi ada undangan khusus. Karena saya berangkat dari Salam, dan saya masih membina mereka, maka komunikasi kami masih terjalin. Kadang diundang rapat, diundang di acara dan sebagainya.

-kesulitan berkomunikasi antarkader.

Nggak ada kesulitan. Jadi kalau secara intruksi dari DPC ke PAC, itu DPC sudah memiliki semua contact person semua ketua PAC. Misalnya ada intruksi yang mendadak, bisa menggunakan telepon atau sms. Namun ketika ada hal yang sangat penting dan perlu dipertanggungjawabkan dengan bukti undangan, itu biasanya dibuatkan surat dan ada kurir yang keliling ke PAC-PAC se kabupaten. Dan seterusnya ketika PAC menghubungi ranting, semua PAC sudah punya nomor ketua ranting, sehingga intruksi itu sampai dengan cepat.

-kapan komunikasi bapak optimal dengan kader?

kalau komunikasi maksimal itu tentu ketika kita akan melaksanakan program-program kegiatan yang ada di partai. Kalau hari-hari biasa komunikasi kita ya hanya sebatas komunikasi yang tidak menyangkut kepartaian. Dalam rapat-rapat tertentu, rapat-rapat rutin paling kita hanya mendengarkan laporan, mendengarkan program kegiatan. Tapi ketika kita sudah masuk kepada program kegiatan, itu komunikasinya baru akan terjadi maksimal. Artinya kita bisa saling sharing, bahkan bisa saling berdebat, dan akhirnya memutuskan sesuatu.

-ini berlaku untuk semua kader?

Saya pikir semua kader. Jadi rapat PAC, itu juga punya jadwal rutin. Ketika rapat rutin, mereka komunikasinya juga biasa, mungkin membahas program kerja yang sudah lewat atau evaluasi, atau mempersiapkan program kedepan. Tapi ketika ada suatu program yang diwajibkan untuk setiap PAC, maka komunikasi terjalin secara maksimal.

-peran dan tugas apa saja yang diterima kader terhadap partai?.

Sesuai dengan tugas pokok tupoksinya masing-masing. Artinya dalam struktur organisasi kita kan sudah mendapatkan tugas, penugasan itu berdasarkan dari SK yang kita terima. Ada ketua, sekretaris, ada bendahara, termasuk juga wakil ketua bidang. Kalau menjelang pilkada seperti ini yang paling banyak mendapatkan tugas adalah BAPILU, Bagian Pemenangan Pemilu, biasanya mendapatkan banyak tugas dibandingkan teman-teman yang lain. Kemudian bisa juga ketika Kabupaten Magelang ketempatan rapat koordinasi nasional bidang UMKM, maka wakil ketua bidang UMKM mendapatkan porsi kerja lebih banyak dari pada teman-teman yang lain. Jadi tugas itu didasari dari surat keputusan yang kita terima mendasari dari bidangnya masing-masing.

-Reward dan Punishmen apa saja yang dilakukan partai terhadap kadernya?.

Kalau reward ada, artinya begini, tugas itu tidak hanya di jajaran DPC ya tapi sampai ketingkat anak ranting. Ketika dalam melaksanakan tugas berdasarkan kemampuan SDM yang ada baik di PAC, Ranting, Anak ranting, itu biasanya reward yang diterima berupa

kenaikan tingkat di jenjang kepartaian. Artinya pengurus PAC bisa diangkat menjadi pengurus DPC ketika dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Kalau reward secara materi tidak ada, seperti hadiah mendapatkan uang itu tidak ada. Kita selalu menekankan teman-teman kalau ada di partai untuk tidak berfikir seperti apa yang dapat kita peroleh dari partai tapi harus dibalik yakni apa yang dapat kita lakukan untuk partai. Kalau Punishmen, asal tidak serius melanggar AD/ART partai, ya paling hanya teguran, kemudian dievaluasi mengapa bisa begitu. Sama resufle kepengurusan, artinya ketika kader tidak berprestasi maka bisa diganti oleh orang yang lebih berpotensi, bukan berarti menyingkirkan tapi ini untuk kemajuan partai. Walaupun hanya jabatan, itu menjadi suatu reward yang menjadi kebanggaan dari teman-teman.

- ketika di tingkat ranting, orang mampu mengemban tanggungjawab besar dengan berhasil memenangkan even pemilihan di wilayah rantingnya maka bisa dicalonkan di PAC. Tolok ukur partai itu ketika pemilu dan kemenangannya. Dan ketika sudah menjadi ketua PAC maka otomatis mendapat tiket untuk maju di pemilihan legislatif. Ini kan karena partai PDIP tidak menggunakan sistem instan alias menggunakan sistem kader dengan tidak asal mengangkat orang untuk maju di pileg. Kita rekrutmennya melalui kaderisasi. Boleh, ketika orang bukan kader ingin maju dari PDIP di legislatif dan lainnya tapi ada syaratnya. Syaratnya ada di petunjuk teknis pemilihan, dia harus bisa seperti independen. Harus mengumpulkan dukungan sekian banyak ktp sebagai bukti dukungan untuk menjadi kader.

-Bagaimana untuk kasus ahok yang dicalonkan?.

Kalau kasus Ahok kan berbeda, jadi ketika ahok maju lewat independen dia sudah mengumpulkan dukungan masyarakat Jakarta. Tapi ketika sekarang direkomendasi oleh ketua umum PDIP, pasti sudah ada pembicaraan sebelumnya entah oleh DPP atau Ibu Ketua Umum sendiri. Artinya ada kesepakatan dengan Ahok, kesepakatan elit-elit politik yang kita tidak tahu. Ini tidak juga menyalahi aturan penjarangan di dalam partai. Jadi dalam partai ada kata-kata “kecuali jika partai memutuskan lain”. Maka dari itu ada keputusan lain yang hanya diketahui oleh elit-elit politik tersebut. Selain Ahok ada juga Bu Risma, yang dulu sebelum menjadi walikota Surabaya bukan kader dari PDI Perjuangan. Jokowi juga bukan dari Pengurus. Jadi harus dibedakan, ada yang namanya kader, ada yang namanya struktural. Kader itu tidak harus duduk di struktural. Pak Ganjar Pranowo itu adalah kader PDI Perjuangan, tapi dia bukan struktural. Ketika pak Ahok mengatakan saya siap menjadi kader PDI Perjuangan, maka dia menjadi seorang kader yang akan ditempatkan menjadi seorang Gubernur di DKI, sama kasusnya dengan pak Ganjar.

-Siapa yang disebut kader disini?

Kader adalah orang yang mempunyai respek terhadap partai PDI Perjuangan. Dia sanggup, dia respek dan pada akhirnya langkah kerjanya bukan semata-mata karena dirinya tapi karena dia ditunjuk dan ditugaskan oleh partai untuk menempati jabatan tertentu. Dalam arti suatu ketika dia harus menduduki jabatan itu, maka dia harus care juga terhadap partai. Dalam bentuk apa? Lihat saja partai itu jalannya juga karena adanya anggaran. Itu berlaku juga ketika misalnya pilihan bupati yang akan datang, menganggap bahwa PDI Perjuangan itu untuk 2018 nanti tidak ada calon yang sekiranya mampu menduduki jabatan Bupati di Kabupaten Magelang. Partai bisa menentukan lain, bisa mengangkat orang luar kader dengan satu syarat, dia harus bersedia menjadi kader dulu.

-kalau misal suara PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri bagaimana langkahnya?

Ya harus koalisi. Dan memang harus.

-Apakah menjaring sendiri atau mengajak koalisi partai kecil atau bagaimana ?

itu pakai hitung-hitungan yang tidak bisa semua orang lakukan. Misalnya seperti ini, Magelang itu 2018 nanti si A berpotensi menjadi Bupati itu ada, dari SDM dia mampu, dan mungkin dari sumber keuangannya dia juga mampu. Tapi kalau PDI sendiri tidak akan mungkin bisa (aspek SDM dan keuangan). PDI harus berkoalisi dengan partai lain. Atau jika partai menentukan lain, artinya partai memandang di Magelang ini ada sosok yang mempunyai dukungan di masyarakat banyak atau sangat berpengaruh di masyarakat. Sehingga ketika partai ini menilai orang ini mampu, pasti diajak bicara atau di lobby dahulu. Ya intinya untuk menjadi kader dulu yang tujuannya ditugaskan partai untuk menjadi wakil partai. Tapi kalau koalisi kan bisa juga. Hitungan-hitungan kursi, PDI P punya 10 kursi dengan dukungan suara sekitar 140 Ribu dukungan masyarakat, PKB memperoleh 9 kursi, dengan dukungan masyarakat sekitar 120 Ribu. Kalau kedua komponen ini digabung, maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Sementara koalisi antara PDI dengan PKB ini menentukan siapa yang menjadi calon wakil dan bupati, harus punya kesepemahaman dulu. Kalau udah sepakat, akhirnya diserahkan ke DPP. DPP cocok atau tidak dalam mengkaji kedua calon ini. Ketika bisa dipasangkan maka bisa diturunkan rekomendasi. Tapi ketika partai kok memandang lain, ternyata di Magelang ada seorang tokoh yang luar biasa, dan ketika partai mendekati dan seorang tokoh itu mau menjadi kader, ya sudah tidak masalah. Jika terjadi calon hasil koalisi namanya koalisi antar partai dan tidak membuat si calon menjadi kader.

-bagaimana dengan posisi ahok sekarang?

Sebagai kader atau sebagai hasil koalisi antar partai? Ahok kan tidak didukung oleh partai pengusungnya dulu, Gerindra. Otomatis Ahok sudah keluar dari Gerindra dan sekarang non-partai. Dan dia bukan kader dari Gerindra lagi. Dan mungkin justru Ahok memandangnya bisa lebih eksis di PDI Perjuangan dan mempunyai peluang lebih besar. Akhirnya meninggalkan Gerindra dan dia siap menjadi kader PDI Perjuangan, sekarang posisi Ahok itu kader yang ditempatkan oleh partai. Si Ahok sudah tidak bisa lagi ketika jadi malah kontribusinya ke Gerindra karena sudah meninggalkan Gerindra.

-Kalau di DPC sendiri, apakah ada alur masuknya kader?

Kalau di DPC hanya sebagian, karena kita wilayahnya kecil, hanya lingkup kabupaten, biasanya kader-kader yang berpotensi dan punya dedikasi yang baik terhadap partai biasanya sudah kita masukkan ke struktural. Jadi kader tapi dia juga sebagai pengurus partai. Artinya dia sudah menjadi kader yang di struktural bukan kader yang diluar struktural. Tapi ketika ada orang yang tidak duduk di kepartaian dan dia masih menjadi seorang kader, bisa saja suatu ketika dia direkrut untuk ditugasi oleh partai. Jadi ada perbedaan bahwa satu kader yang duduk distruktural, dan kader non-struktural. Kalau kita pada sistem pencalegan beda dengan sistem pilkada. Jadi kalau pencalegan biasanya rata-rata dari PDI Perjuangan adalah kader yang dari struktural. Entah itu DPC, itu PAC itu orang-orang yang duduk di struktural dan termasuk kuota perempuannya sekalian itu juga dipilih dari orang-orang yang duduk dari struktural baik dari PAC maupun DPC. Tapi ketika pilkada baik itu Gubernur maupun bupati Walikota, itu bisa menunjuk seorang kader yang diluar struktural.

-dalam pengaderan sendiri, harapan bapak memperoleh seperti apa?

Kita pasti mempunyai harapan memperoleh seorang kader yang memahami ideologi PDI Perjuangan itu sendiri, bukan pragmatis. Ketika dia menjadi kader itu pasti dia tahu apasiah Marhaenisme itu, dia harus paham itu. Dan ideologi dari PDI Perjuangan, ideologi Bung Karno yang selama ini kita anut, seperti apasiah dia akan memahami itu. jadi bukan menamakan dirinya kader tapi tidak tahu sejarah Marhaenisme itu sendiri. Jadi kami berharap kader yang ada itu paham dengan ideologi, apalagi dengan Pancasila. Tadi sudah

saya sampaikan bahwa kita di PAC pun ada feet and proper test. Diantaranya adalah tentang ideologi. Tentang Pancasila, tentang lambang partai Banteng dan sebagainya dia paham. Jadi tidak hanya sekedar orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian hanya berpengaruh diangkat menjadi ketua PAC, tanpa mengenal ideologi dari Bung Karno sendiri. Jadi kita berharap, kader-kader yang kita miliki baik yang berada di struktural maupun non struktural ini paham, terhadap Marhaenisme itu.

-selama ini dalam melakukan perekrutan kader itu, menurut bapak ada yang salah atau sebaliknya?

Kalau salah tidak, kalau tidak optimal bisa jadi. Kenapa? Kita tahu kalau PDI Perjuangan itu adalah orang-orang yang berasal dari akar-rumput, dari gesrut. Artinya kadang SDMnya ya seperti itu. Masak sih orang PDI Perjuangan terpelacar, seperti kader-kader yang ditempatkan oleh PKS sekarang. Kan mereka merekrut orang-orang yang berpendidikan. Tapi kalau PDI Perjuangan itu kan betul-betul dari gesrut, dari akar-rumput, dari orang yang kaum Marhaen itu sendiri di dalamnya. Ada yang mengatakan seperti kader PDI perjuangan itu preman semua, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi PDI Perjuangan itu besar kan karena rakyat, rakyat kecil. Kita tahu bahwa rakyat kecil yang simpatisan bahkan tidak hanya simpatisan yang betul-betul loyalitas terhadap Banteng dari jaman PNI, sampai sekarang menjadi PDI, itu kan seperti seolah turun-temurun. Dan mereka faham tentang ideologi, walaupun mereka tidak sekolah. Tapi rata-rata karena gesrut jadi tingkat pendidikannya tidak bagus. Kebanyakan tamatan SD, SMP. Sehingga kita kadang merekrut kader untuk kita dudukkan di struktural itu juga susah. Untuk tingkat ketua PAC yang kita anggap mampu kita bingung. Ketua rantingnya hanya seorang petani. Dia Pintar tapi tidak berpendidikan. Dan banyak itu. Ada yang hanya SD, yang hanya pinter ngomong tapi kalah ideologinya. Kadang kita susah, dalam perekrutan kader ini. Kalau salah tidak, tapi kalau tidak optimal memang iya, saya akui. Kalau ada transformasi nilai dan keputusan terganjal karena sdm itu, apalagi kalau sudah berurusan dengan administrasi. Kalau ada urusan administrasi berupa laporan, mapping, prosentase, PAC banyak yang tidak mampu menyampaikan secara hitam diatas putih. Tapi mereka bisa menyampaikan ngomong. Biasanya mau tidak mau kita menempatkan di dalamnya khususnya di skretariat kita menghimbau kepada PAC minimal SMA lah. Yang mengurus administrasi sehingga mereka paham, tau juga dengan komputer. Karena kita ingin mengubah pandangan bahwa PDI Perjuangan itu tidak seperti PDI di jaman dulu, ditempati oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Akhirnya sekarang ya sudah lumayan. Di DPC, pendidikan rata-rata minimal ya SMA, sarjana juga banyak. Di PAC juga diusahakan demikian. Karena ketika seorang ketua PAC tidak berpendidikan minimal SMA, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan reward atau tiket mencalonkan diri ke legislatif. Mau tidak mau ya sudah dia hanya bekerja di PAC tapi dia tidak punya tujuan ke depan untuk menjadi legislatif. Tapi itu justru bagus, karena dia tidak punya tendensi apa-apa. Dia mengabdikan di partai itu tidak karena ingin jabatan di legislatif, tapi betul-betul karena mengabdikan.

-tapi bukannya malah bisa diperalat pak?

Tidak juga sebenarnya, karena dia justru sadar, artinya begini, saya di partai itu tidak punya kepentingan apa-apa. Siapa yang mau maju silakan, saya dukung saya bantu, yang penting saya ingin partai ini besar. Mereka akan selalu mengatakan begitu. Dan banyak itu di PAC, apalagi ranting banyak yang SMP.

Di Salam, dari 10 pengurus PAC yang saya bentuk, ketua PAC nya itu Cuma SMP, Sekretaris PAC SMP, bendaharannya S1, wakil ketua yang lain ada SD, SMP, rata-rata SMA. Rata-rata di tempat-tempat yang lain SMP-SMA yang duduk di PAC. Belum ketua

rantingnya, ada yang tidak berijazah, ada yang hanya SD, hanya petani. Tapi ya bagaimana, kita lebih memilih orang yang berideologi daripada orang yang pintar. Maka partai PDI Perjuangan itu kan selalu terjaga ideologinya. Kalau orang-orang pintar itu pada akhirnya dia duduk di dalam struktural itu dia Cuma punya pamrih. Artinya dia berjuang itu tidak tulus, tapi punya tendensi. Dia akan menghitung, apa yang akan dia dapatkan di partai dia sudah menghitung.

-dari masalah pendidikan itu, apa ada sebuah budaya untuk menunjang pengelolaan kader ?

Paling yang kita lakukan cuma pelatihan saja, baik secara administrasi, penyusunan laporan, kita membimbing teman-teman di PAC. Karena tidak mungkin kita harus mensyaratkan pendidikan PAC minimal SLTA kan tidak mungkin. Jadi kita hanya memberikan pembinaan secara terus-menerus kepada teman-teman di PAC, misalnya kita akan mengadakan musyawarah ranting, sistemnya bagaimana, pola-polanya bagaimana. Sekarang kan pelaporan kegiatan yang ada di PAC, itu untuk mendasari ketika kita akan melakukan untuk menurunkan bantuan politik (banpol).

-untuk targetnya sendiri kepada para kader bagaimana?

Ya, kader mesti tertib administrasi, tertib laporan. Karena kita mendasari untuk banpol tadi dari laporan kegiatan. Jadi konsolidasi yang ada di tingkat bawah, baik PAC maupun ranting, itu kita biasakan dengan tertib administrasi. Jadi tiap rapat kita ada daftar hadir dan harus ada notulen. Itu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman, jadi rapat itu bunyinya apa, buktinya mana. Kalau kadang di PAC itu kan punya anggaran, baik bantuan dari DPC, baik bantuan dari anggota legislatif dari fraksi kabupaten, provinsi, maupun pusat, kadang mendapat secara tiba-tiba, merek mengelola keuangan juga. Sehingga pelaporan seperti apa selalu kita arahkan. Sementara untuk ideologi sendiri, dilakukan pendidikan kader pratama untuk ketua PAC, kemudian dilanjutkan pendidikan kader pratama untuk seluruh jajaran PAC. Pendidikan kader pratama itu untuk pemula tentang ideologi partai. Kemudian tingkat berikutnya kader madya. Kemudian tingkat berikutnya yang paling tinggi tingkat utama. Itu salah satunya meningkatkan kualitas kader.

-dalam melakukan pengelolaan kader PDI secara keseluruhan, tanggapan bapak bagaimana?

Pengelolaan sumberdayanya kalau secara keseluruhan memang sulit kita lakukan. Tapi kalau pembinaan terus menerus memang kita lakukan. Contoh yang lain, keterlibatan PAC dalam kegiatan-kegiatan DPC. Ini juga salah satu cara untuk meningkatkan SDM. Kita minta pada DPD untuk Kartu Indonesia Pintar kita tarik ke DPC. Siapa yang akan membagi? Kalau semua pengurus DPC nggak mungkin, apalagi fraksi. Maka melibatkan teman-teman PAC. Beberapa teman-teman PAC kita undang, kita beri pelatihan. Caranya bagaimana? Itu kita atur caranya. Kan tidak mudah membagi sekian puluh ribu, dan tertarget sampai akhir bulan ini selesai. Kadang kartu Indonesia Pintar itu sudah diusulkan 3 tahun yang lalu, ketika masuk pada yang bersangkutan ternyata orangnya sudah lulus bahkan sudah drop out tidak sekolah lagi. Otomatis kan hilang, dicoret. Harus di return, harus dikembalikan. Bagaimana supaya pengembalian itu tadi tidak sia-sia, atau tidak hangus. Maka harus diganti diusulkan orang yang lain dengan bukti KK, KTP dan sebagainya. Itu semua kan butuh pelatihan. Pelibatan teman-teman itu salah satu tujuannya peningkatan SDM. Sehingga PAC itu tidak hanya dipandang temen-temen kemampuan kurang. Sehingga kita di DPC kabupaten Magelang, itu punya teman-teman PAC yang tergabung di dalam relawan. Mereka rata-rata pengurus PAC, ada yang ketua, ada yang sekretaris, dan itu merata di beberapa PAC, walaupun tidak semua ikut. Yang itu juga oleh DPD dilatih yang disitu disebut pandu juang. Pandu Juang itu orang-orang yang dipilih untuk memelopori keberhasilan dalam satu pilkada di suatu daerah. Jadi teman-teman

pandu juang yang ada di kabupaten magelang, itu bisa dikirim ke suatu daerah ketika ada pilkada. Dari mulai berkomunikasi dengan masyarakat, itu dilatih, bahkan yang menyelenggarakan itu DPD, untuk meningkatkan kemampuan SDM dari PAC.

-untuk struktur organisasinya, apakah sudah sesuai kebutuhan dari partai dan masyarakat?

Kalau menurut saya itu sudah sesuai ya. Artinya di dalam pembidangan itu sudah mencakup beberapa aspek yang ada di masyarakat. Bahkan oleh DPP itu sudah disebutkan disana, bahwa setiap kepengurusan DPC yang jumlah penduduknya termasuk besar, itu harus sekian kepengurusan, terus wakil ketua bidangnya harus sekian. Tapi apabila tidak mungkin karena jumlah penduduknya kecil atau kepengurusannya kecil, maka harus ada wakil ketua bidang sekian, maka itu sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan partai. Jadi kan ada maksimal ada minimal. Pengurus DPC itu minimal sekian, 17 orang, maksimal 22 atau berapa itu saya lupa itu ad ketentuannya. Sehingga diambil anatara rentang itu. kalau di kabupaten Magelang 19 dirasa cukup ya sudah 19 kepengurusan diisi ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua bidang. Itu sudah mendasari dari kebutuhan masyarakat.

-bapak sendiri tertarik masuk partai politik itu karena apa dan sejak kapan?

Kalau saya, awalnya simpatisan. Artinya saya suka dengan PDI Perjuangan, waktu itu belum pakai perjuangan. Bahkan sejak saya kecil, saya dikenalkan oleh orang tua itu dengan lambang banteng miring waktu itu masih PNI. Jadi seolah seperti turun temurun. Jadi saya bangga karena bapak saya dahulu adalah seorang tokoh PNI, Simbah saya juga begitu. Jadi waktu saya seusia cucu saya (sekitar 5 tahun) sudah tahu lambang banteng, dll. Jadi waktu kecil sudah diperkenalkan tentang itu. Saya dulu seorang guru, saya tidak mungkin terjun secara langsung di politik, saya sebagai simpatisan. Ya tahun 80-an. 80, 90 waktu rame-ramenya PDI, yang akan berubah menjadi PDI Perjuangan, saya sebatas simpatisan. Jadi ada perbedaan yang nyata antara PDI yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu, sebelum kita bisa menempatkan orang-orang kita, kader-kader kita di pemerintahan, baik di legislative maupun di eksekutif, kita banyak mengeluarkan biaya sendiri. Artinya ketika kampanye, kan tidak ada pembagian kaos, kita buat sendiri, sablon sendiri. Kampanye menegeluarkan mobil, sewa sendiri. Dan saya dulu mensupport temen-temen seperti itu. Tahun 90an sebelum kudatuli, masih era orde baru. Kemudian waktu itu kita mendapat tekanan yang luarbiasa dari pemerintah, ketika orang harus Golkar, dan orang-orang banteng yang berlawanan dengan golkar kan banyak yang disingkirkan dan tidak diberikan tempat di masyarakat. Dan saya juga tahu resiko itu, ketika saya harus berbenturan dengan kepala dusun bahkan kepala desa saya itu resiko saya, saya nggak masalah, saya siap berani. Seiring dengan berjalannya waktu saya sudah tidak menjadi guru, saya mengundurkan diri tahun 96. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kemudian saya mencoba masuk di struktural. Saya menjadi ketua ranting, di Gulon sana, Gulon Salam. Saya kan entertainer, saya pemusik. Saya mengundurkan diri jadi guru karena terlalu banyak menerima job musik. Sehingga saya banyak berbenturan dengan tugas mengajar. Sehingga dengan berbagai pertimbangan saya mundur, saya lebih memilih di dunia musik. Saya ada kebebasan disitu, saya bisa masuk di struktural. Dari ranting kemudian ke PAC. Saya bukan ketua PAC, karena waktu itu setelah jadi ketua ranting, saya break tidak masuk di struktural, saya hanya melihat. Tapi saya prihatin dengan kondisi di Salam. Di Salam itu banyak orang pintar, tapi pengurusnya SDM nya seperti itu, untuk mengelola partai saja kayaknya tidak mampu dengan partai sebesar itu. Saya mencoba lagi, saya masuk lagi ke PAC setelah break itu tadi. Satu periode saya di PAC sebagai bendahara, kemudian saya di DPC. Setelah DPC satu periode habis, saya masih di DPC sampai sekarang ini dua periode. Saya aktif dan total menjadi kader ketika di PAC, dan ketika di PAC saya memberikan banyak perubahan kepada temen-temen, DPC melihat bahwa mungkin saya termasuk

kader yang berpotensi, akhirnya saya masuk di jajaran pengurus DPC. Pileg 2009 saya ikut tapi belum berhasil dan waktu itu saya masih di PAC.

-latar belakang pendidikan dan agama mempengaruhi untuk memilih partai ini tidak pak?

Ya jelas, jadi yang pertama masyarakat itu terutama di kabupaten Magelang, agama itu menjadi isu yang sensitif. Misal partai ini hanya mengakomodir khusus bukan muslim maka saya mungkin tidak masuk karena itu tadi agama menjadi isu yang sensitif. Tapi kan tidak, PDI Perjuangan itu kan partai nasionalis. Disini tidak membedakan lu agamanya apa, lu sukunya apa. Dari pendidikan kan kita tahu bahwa kader PDIP di kabupaten magelang ini kan rata-rata SLTA, kan jadi saya juga terpanggil yang latar belakang saya sarjana untuk memperbaiki dan merubah pandangan masyarakat bahwa kader PDIP itu juga tidak hanya SLTA, dan syukurnya saya juga dipilih untuk dicalonkan di legislative.

- yang mengajak bapak untuk ikut partai ini siapa pak?

saya inisiatif sendiri, artinya ketika saya sudah mengenal partai itu, inisiatif saya ketika melihat bahwa pengurus yang ada di Salam seperti itu, bagaimana mereka menjalankan roda organisasi partai dengan kapasitas seperti itu. Saya terpanggil untuk duduk di struktural, karena bagaimanapun juga struktural sangat berpengaruh. Besarnya partai di masyarakat itu kan tergantung juga dari strukturalnya. Ketika seorang ketua ranting, ketua ranting itu kan sama saja dengan kepala desa, ketika ketua ranting salah satu desa itu tidak populer, dan dia justru bertentangan dengan masyarakat, kan tidak akan laku PDI Perjuangan di masyarakat. Jadi artinya ketika saya harus terjun kembali saya inisiatif sendiri. Dan informasinya dari teman yang memberikan undangan musyawarah anak cabang. Walaupun tidak menjadi ketua tapi paling tidak memberikan warna baru.

- Selama ini ada yang mengajak bapak ke partai lain?

Ya banyak, pasti. Bahkan ada yang ingin mengajak (nyaleg) pun ada. dalam keluarga saya sendiri, memang basis keluarga itu PNI. Tapi ada ponakan saya yang di temanggung itu masuk di Gerindra, dan sekarang jadi anggota legislative di Temanggung, sudah dua periode ini. Dulu dia juga PDI. Kenapa dia lari? Karena ada salah satu kelemahan di PDI Perjuangan, ketika ada orang yang menonjol, punya kemampuan, punya SDM yang lebih, itu orang yang di atasnya itu takut. Orang di atasnya seperti ini misalnya, ketua PAC (memegang jari tengah) dia SMA, satunya sekretaris (memegang jari telunjuk) dia sarjana. Dia (memegang jari telunjuk) lebih pintar dari ini (memegang jari tengah). Padahal yang mendapat tiket ke legislatif kan ketuanya. Kecuali kalau ketua mundur, maka sekretaris yang berhak. Ini kan menjadi ancaman (menunjuk jari telunjuk), ketika diluar, dimasyarakat lebih bisa diterima oleh ini (memegang jari telunjuk), kan yang ini terancam (memegang jari tengah). Daripada ini (memegang jari telunjuk) mengalahkan ketua, daripada ini (memegang jari tengah) mati, dia (jari telunjuk) dimatiin. Ini sampai sekarang juga masih ada yang berlaku. Sehingga benturan kepentingan-kepentingan tadi ketika orang tidak bisa ngempet tadi orang akan mundur atau terus menggencet lawannya tadi sampai mati. Misalnya saya dengan Pak Gun, ya saya menerima, tapi ketika saya tidak terima kan akan terjadi perang dengan dia. Saya yang mati atau dia yang mati, mati dalam karir politik. Maka sepupu saya tadi dibunuh, dia tidak dilibatkan apa-apa lagi baik dikegiatan, atau di apapun dia di non-aktifkan seolah-olah. Tiba-tiba dia di non-aktifkan hanya karena mengancam ini saja. Akhirnya keponakan saya keluar, mengundurkan diri dan akhirnya dia direkrut oleh Gerindra. Tidak hanya di kabupaten Magelang saya kira di semua daerah kader Gerindra itu mantan-mantan kader PDIP yang kecewa. Dipolitik itu kan hanya membunuh dan dibunuh.

-berarti istilah politik santun itu nggak berlaku ya pak?

Sebenarnya tergantung orangnya, artinya saya bertentangan. Begini mas, kehidupan saya di music lama, bahkan saya hidup dari musik. Jadi bertentangan ketika saya ngomong seni, saya banyak menggunakan rasa daripada saya menggunakan akal pikiran saya. Maka sekarang ketika saya masuk di dewan, ketika ada yang bertentangan dengan hati nurani, mau tidak mau saya mengikuti sistem, karena itu sistem. Ketika itu masih masuk ke dalam sesuatu yang halal atau saya anggap masih Sah, oke saya nggak masalah. Tapi ketika itu masuk ke ranah-ranah yang tidak halal, saya mending tidak ikut.

-Bapak tidak melawan balik Pak Gun tadi, apakah karena bapak juga menghitung kalau berhadapan dengan pak Gun bisa dibunuh juga?

iya, iya. Jadi sekarang perlawanan itu juga dengan teman-teman partai yang lain. Jadi siapa kawan siapa lawan dalam PDI perjuangan itu rumusnya lawan itu adalah orang yang tidak seideologi dengan kita. Tapi ketika saya berbicara itu adalah teman, dan itu adalah orang PDI Perjuangan yang seideologi, walaupun dia bermusuhan dengan saya ya tetep teman. Itu kan tetep berlaku. Nah maka sekarang ketika kami rapat menentukan keputusan, dan keputusan tersebut itu demi masyarakat kabupaten magelang, kita harus mendukung teman kita yang menjadi eksekutif menjadi seorang bupati, kita kan harus berjuang dan melawan temen-temen partai yang lain.

-pengalaman hidup bapak dengan partai ini apa?

Itu juga yang tadi termasuk pengalaman juga, tapi yang jelas kalau dulu ketika partai ini belum punya apa-apa seperti sekarang ini, saya banyak terlibat. Artinya ketika saya punya uang sedikit, ada kegiatan partai dan kadang saya harus menjual apapun yang saya miliki untuk melakukan kegiatan partai, yang penting bisa berhasil. Kampanye menggunakan truk nyarter, saya rela mengeluarkan ongkos tanpa ada yang mengganti. Bahkan Ketika saya punya mobil open, saya pakai mobilnya sampai rusak sampai mobil saya turun mesin, saya ragat pakai biaya saya sendiri. Dari perjuangan itu buah manisnya ketika saya oleh partai ditempatkan menjadi calon legislatif, dan akhirnya saya dipilih menjadi anggota dewan sekarang ini, saya bisa merasakan bahwa perjuangan yang saya lakukan sekarang ini tidak sia-sia. Artinya saya memperoleh buah yang manis juga dari gaji anggota dewan. Tanpa saya masuk di dalam partai ini, saya tidak mungkin mendapatai itu. saya itu hanya apa sih, siapa sih. Ketika saya hanya menjadi seorang guru, saya mengundurkan diri. Nah sekarang ketika dari sekian banyak calon dan saya bisa duduk di salah satu kursi dari 50 kursi anggota dewan, itu satu anugrah juga. Tanpa saya melakukan perjuangan di partai rasanya tidak mungkin saya tiba-tiba duduk disitu. Ini satu buah yang saya rasakan walaupun gajinya buat bayar hutang perjuangan kemarin.

-proses politik apa saja yang sudah bapak jalani ?

Proses politik yang saya ingat yang jelas ketika tragedi Palu, jadi ada PDI Suryadi ada PDI Megawati. Di magelang saja sudah heboh. Di Magelang juga ada PDI Suryadi, PDI Megawati kan sama di seluruh Indonesia juga. Karena Suryadi kan oleh pemerintah untuk melawan, untuk mematahkan Megawati. Sehingga ketika proses semacam itu berlangsung, pilihan kan harus tepat. Maka dari dulu kan saya loyal, artinya saya tidak mengikuti Suryadi. Siapa sih Suryadi? Mengapa dia bisa di PDI. Bahkan tidak hanya Suryadi, ketika orang-orang yang mengatakan dia bisa besar lewat partai yang berlambang banteng coba dilihat nggak ada yang jadi sekarang. Seperti laksamana Sukardi, Roy BB Janis dengan banteng kaya tulang itu, PKPI atau apa itu, nggak bisa berdiri. Proses politik seperti itu setiap ada pergolakan, eksistensi saya tetap setia kepada ibu Megawati.

-kalau partisipasi politik bapak di dalam partai ini?

Partisipasi politik ya mungkin kalau keterlibatan di dalam kepengurusan itu jelas kita terlibat secara langsung. Kemudian yang lainnya saya pikir ya karena program kerja kita jelas. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepartaian disitu kita bisa melakukan suatu partisipasi artinya bisa ambil bagian. Tapi ketika kita diluar jalur yang mungkin kegiatan-kegiatan partai politik di luar daerah bisa jadi itu termasuk partisipasi juga. Artinya ketika diluar daerah ada Pilkada kemudian kita bisa membantu mensosialisasikan teman kita yang maju, ini merupakan suatu partisipasi. Jadi keterlibatan, kepedulian sesama kader diluar daerah itu juga menjadi partisipasi bagi kader yang lain. Bahkan tidak hanya tenaga, jadi mungkin suatu ketika kita mendapat potongan dari fraksi sekian untuk membantu kegiatan politik yang ada di daerah lain. Walaupun partisipasi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh temen-temen yang ada di dalam fraksi. Ketika menjadi pengurus anak ranting, ranting, PAC, partisipasi mereka terbatas hanya dengan apa yang bisa mereka lakukan di dalam kegiatan konsolidasi. Tapi yang difraksi lebih banyak partisipasi politik ini, tidak hanya sekedar kita hadir kita aktif disitu, tapi bahkan partisipasi yang berbentuk materi pun sampai sekarang masih kita lakukan. Misalnya kegiatan seperti wayangan, biayanya darimana untuk menghadirkan dalang sekian puluh juta, untuk konsumsi teman-teman PAC, Ranting yang kita undang sejumlah 700 orang, ini kan juga butuh biaya. Partisipasi biaya tersebut diantaranya ya dari temen-temen fraksi. Setelah dihitung habisnya sekian, ya kita tarikan tiga juta per orang kali 10 ya jadi 30 juta. Ketika ada pembengkakan dana ya kita tarik lagi, kita potong gaji lagi.

-menurut bapak partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu seperti apa sih pak?

Saya memahaminya bahwa partai ini, satu merupakan partai yang tertua. Partai pelopor di republik ini. Mulai jamannya PNI, PDI dan PDI Perjuangan. Saya kenal sudah lama gambarnya banteng itu mulai PNI, PDI dan PDI Perjuangan. Selain partai yang besar, partai PDI Perjuangan ini adalah partai yang solid. Kenapa solid? Menggerakkan massa PDI Perjuangan itu tidak sulit. Konsolidasi dilakukan itu gampang. Dan yang ketiga, partai PDI Perjuangan itu dalah suatu partai yang mempunyai alur yang jelas, artinya tingkat struktural dari pusat sampai yang paling bawah dari gesrutnya itu jelas. Di partai yang lain mungkin tidak ada yang seperti itu. DPP, DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting, itu jelas semua ada dan terbukti dalam satu bukti SK. DPD, SK nya dikeluarkan oleh DPP. DPC dikeluarkan oleh DPP. PAC dikeluarkan oleh DPD. Ranting dan anak ranting dikeluarkan oleh DPC. Jadi jelas, alur keputusannya ada, bukti kegiatannya juga ada. itu yang saya tahu bahwa PDI Perjuangan itu bukan sekedar partai dadakan, partai yang betul-betul saya pahami ini partai yang besar, partai yang mempunyai kematangan berideologi.

-sejarah berdirinya partai ini di kabupaten magelang in bagaimana pak?

Jadi sama, artinya merangkak dari ketika masih jaman PDI dulu, kita susah meyakinkan kepada masyarakat bahwa PDI itu sebenarnya mampu mengampu pemerintahan, bahkan tidak hanya di kabupaten, sampai di pusat pun kita mengalami yang namanya hal sama. Artinya ketika penguasa dari jaman orde baru ini masuk ke reformasi, tidak pernah memberi kesempatan kepada PDI Perjuangan untuk bisa duduk di dapuk kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Bahkan kita dua periode, 10 tahun kita menjadi partai oposisi. Kita hanya bisa mengontrol pemerintahan tanpa pernah bisa menikmati kepemimpinan. Hanya sekali itu pun karena anugerah, itu Gusdur dan Bu Mega di sana. Dan setelah itu kita menang, kita tidak pernah diberi kesempatan. 2004 PDI menang, tapi bu Mega tidak diberi kesempatan, mungkin karena sosok wanita yang di tabukan untuk menjadi presiden, untuk menjadi pemimpin. Sehingga ketika hal yang sama di kabupaten Magelang, kita juga susah mendudukan kader di pemerintahan. Baru ketika bergulirnya waktu ketika orang-orang tidak percaya dengan partai yang lain karena terombang-ambing, akhirnya kita bisa

mendudukan orang di pemerintahan, walaupun masih di legislatif waktu itu. dan sejarahpun mengukir ketika kader dari PDI Perjuangan yang namanya Singgih Sanyoto, bisa duduk menjadi seorang bupati, yang dulunya seorang DPRD kabupaten Magelang. Itu mulai berubah, artinya PDI Perjuangan di kabupaten Magelang berubah. Dulu yang menang kan PKB, karena partai yang menguasai di kabupaten Magelang itu partai hijau PKB, PPP, PDI belum banyak digemari. Nah sehingga seiring proses berjalannya waktu ketua DPRD bisa menjadi seorang bupati di kabupaten Magelang, bahkan dua periode dan sampai sekarang masih dipegang PDI Perjuangan. Jadi prosesnya memang lama, jadi kita sabar menunggu. Hampir sama dengan proses ketika sekarang ibu Megawati tidak mungkin maju sendiri karena bertambahnya usia dan yang kedua dia selalu dibenturkan oleh gender, sehingga memilih kader yang dianggap kader yang terbaik menurut beliau. Walaupun pada awalnya Pak Jokowi adalah kader yang dipandang sebelah mata. Dan proses mengangkat walikota Solo, yang Jokowi banyak melakukan perubahan dan kemudian menjadi gubernur DKI, belum selesai sudah diangkat menjadi presiden. Banyak orang memandang sebelah mata, meragukan akan kemampuannya, ternyata banyak program-program yang sekian lama tertunda ditangan Jokowi bisa segera selesai. Prosesnya hampir sama seperti proses di pusat. Karena memang kita selalu ada korelasi dari DPP, DPD, dan DPC. Ketika disana sudah mulai banyak yang menduduki jabatan, itu menjadi mudah lagi kebawah-bawahnya. Dan ini sekarang bisa lebih mudah lagi, karena apa? Pak Jokowi ini dipandang masyarakat baik, mudah-mudahan tidak ada cacat, tidak ada celah sampai nanti selsai, bahkan diperiode yang akan datang akan dicalonkan lagi, akan memudahkan bagi kami kader-kader yang ditempatkan di daerah untuk fight. Karena hanya kemampuan pak Jokowi saja sudah mendongkrak kami.

-menurut bapak yang menjadi nilai plus dan menjadi nilai minus dari partai ini apa Pak?

Nilai plusnya kalau sekarang jelas, partai ini menjadi partai penguasa. Kita tidak lagi malu mengakui sebagai seorang kader PDI Perjuangan. Karena sekarang kader PDI Perjuangan sedikit diperhitungkan baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Rata-rata di pemerintahan, orang-orang PDIP perjuangan itu kritis. Tapi sisi minusnya karena partai ini adalah partai politik, sehingga tidak semua orang-orang yang duduk disitu adalah orang-orang yang bersih. Jadi ada orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Sehingga ada juga keterlibatan temen-temen di pusat yang melawan hukum, yang menyalahgunakan kekuasaan, mungkin korupsi, itu juga salah satu kelemahannya. Kemudian di daerah di satu sisi kita mengalami suatu kemajuan, sudah ada reformasi di internal, tapi kita masih menyadari juga bahwa PDI Perjuangan masih ditempati oleh orang-orang kelas bawah. bukan orang-orang yang elit. Kan ada partai yang seolah-olah mengrekrut orang-orang yang elite. Karena kita basisnya dari akar rumput, dari gesrut sehingga mungkin kelemahannya di sana sini masih ada kendala di kemampuan SDM.

-berarti pandangan politik bapak sudah sejalan dengan arah politik partai ini pak?

Yaa jelas. Jelas

-norma dan nilai dari partai ini sudah menjadi hal yang relevan belum bagi setiap kadeernya?

Kalau kader menyadari tentang ideologi yang ditanamkan oleh pendiri artinya ketika bung Karno mengajarkan Marhaenisme kepada orang-orang yang duduk di partai ini, saya pikir sangat relevan dan saya kira tidak akan hilang ditelan masa. Karena partai ini adalah partainya wong cilik, dan kita harus pro dengan rakyat kecil, dan itu akan selamanya relevan menurut saya. Karena ketika negara ini pun maju, tidak mungkin akan hilang orang-orang kecil seperti itu, pasti ada walaupun Indonesia sudah maju seperti apapun.

Walaupun perlahan-lahan akan berkurang tingkat kemiskinannya, yang namanya wong cilik tidak akan pernah habis.

-apakah bapak percaya komitmen setiap kader sesuai amanat AD/ART pak?

Selama ini yang kita jalani sesuai dengan AD/ART. Karena yang menjadi pedoman kita anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu sudah diatur semuanya, dan kita pedomannya adalah itu.

-bagaimana pandangan bapak dengan kader yang pragmatis ? apalagi sekarang PDIP menjadi partai besar.

Kalau kader yang pragmatis saya pikir sudah tidak layak lagi dia duduk menjadi kader. Artinya dia belum memahami tentang ideologi partai ini. Kalau masih bisa kita kembalikan pada ruhnya, pada marhaenisme, pada ideologi PDI Perjuangan itu sendiri ya kita kembalikan. Namun ketika orang itu sudah tidak bisa lagi kembali pada ruh perjuangan dari partai ini ya harus kita buang, harus kita gantikan kepada orang yang berideologi. Karena dia hanya akan mencari sesuatu di partai ini. Dia tidak akan bisa memberikan kontribusi apa-apa. Contoh ada. saya punya ketua ranting yang seperti itu. Jadi dia di partai itu ketika rapat hanya menanyakan uang saku, kalau musim kampanye hanya mencari kaos, tapi dia menerima dari semua partai yang ada. Bahkan dia mencari uang dari semua partai yang ada. Jadi tidak hanya dari PDI Perjuangan. Akhirnya di periode ini tidak kita pakai. Sampai sekarang satu dua orang masih seperti itu ya ada.

-budaya politik yang terbangun di partai ini bagaimana pak?

Budaya politiknya bagus, artinya di jajaran sampai ke tingkat bawah pun budaya politik bagus. Karena kita selalu mendasari dari agenda partai bahwa kita mempunyai konsolidasi yang jelas, sehingga terarah artinya tidak ada masalah. Kita selalu menyampaikan kepada temen-temen untuk berpolitik yang baik dan bersih, seperti tadi saya sampaikan hilangkan budaya-budaya pragmatis. Dan jangan hanya tergiur iming-iming dengan kedudukan, dengan uang dan sebagainya, sehingga kita menanamkan budaya berpolitik dengan temen-temen selalu melalui konsolidasi yang jelas. Dan kita tidak mentorerir kepada temen-temen yang berkumpul untuk berbicara diluar alur politik yang jelas artinya harus terkontrol. Mereka boleh menyelenggarakan suatu kegiatan misalnya arisan sesama ketua ranting, tapi terbatas hanya itu tidak membicarakan masalah politik. Jadi politik itu harus dikendalikan oleh DPC. Jadi tidak bisa berinisiasi untuk membuat suatu isu politik baru misalnya dari PAC mendesak DPC untuk siapa yang akan dicalonkan, mereka tidak mempunyai hak seperti itu.

-apakah di PDIP ada budaya politik transaksional?

Nggak ada, jadi kalau setor secara pribadi tidak ada. Ketika seorang terjaring menjadi caleg, kan kalau suara terbanyak, nomor tidak masalah ya. Tidak ada yang artinya saya milih nomor satu, tapi saya bayar seratus juta, tidak ada kalo di PDI Perjuangan. Saya dengar di partai lain ada yang seperti itu. Rata-rata juga tingkat ekonomi temen-temen di struktural pengurus tidak mapan semapan caleg lain. Jadi mereka hanya rakyat biasa yang dibekali pendidikan cukup, hanya SMA, yang loyal terhadap partai, dan berusaha membesarkan partai tanpa pamrih apa-apa. Mereka hanya bekerja seadanya. Kalau pakai duit jelas tidak mungkin bisa masuk. Paling mereka hanya wiraswasta. Dan tidak ada di kabupaten Magelang ini yang punya harta yang berlimpah ketika masuk di struktural. Artinya tidak ada yang kaya raya, hanya biasa-biasa saja. Ketika ada transaksional, mau bagaimana bayar uang itu, mending mundur. Kecuali begini, ketika sudah terjaring di nomor, kemudian kita punya tanggungan kewajiban untuk membayar setor, tapi itu bukan transaksional. Jadi kita setor karena ada kebutuhan untuk saksi ketika ada pemilihan

legislatif, itu yang membayar adalah calon yang bersangkutan. Maka kita urunan (patungan), kebutuhan untuk jasa honor pada saksi itu. Ya kita hitung TPS di kabupaten Magelang ada berapa, dikali tiga ribu setiap orang dikasih seratus ribu rupiah. Otomatis kita membutuhkan dana tigaratus juta. Dana 300 juta itu darimana? Yasudah kita bagi dari yang mencalonkan diri. Yang serius nyaleg berapa orang? Dari tiap dapil kita taruh yang serius fight enam orang. Yasudah 300 juta kita bagi 10 dapil, kita bagi lagi setiap caleg yang serius, masing-masing 6 juta. Berarti ada caleg yang tidak bayar.

-berarti ada caleg yang diajukan tapi tidak minat?

Ada, artinya begini, satu kuota perempuan. Kuota perempuan itu kan tiga orang, dari 10 calon, 3 orang perempuan. Kuita perempuan itu kadang hanya memenuhi syarat saja. Maka dia maju bukan karena dia betul betul niat maju. Ketika kuota perempuan itu hanya sekedar ditempatkan, di nomor-nomor yang ada, itu tiak punya kewajiban untuk fight. Boleh fight tapi dia punya kewajiban untuk ikut membayar saksi, tapi rata-rata jaranglah. Jadi calon dari PDIP yang nggak fight itu banyak. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka seperti kemarin, ya bagaimana dia mau fight kalau amunisinya nggak punya. Bahkan di dapil saya, yang nomor satu perolehan suaranya tidak lebih dari 1000. Itu memang tidak fight, karena dia tidak punya uang. Ditempatkan di nomor satu karena aturan dari DPD mengisyaratkan seperti itu. Sebenarnya dia memang mempunyai elektabilitas yang tinggi, tapi karena suaranya terbanyak bukan nomor, jadi dia tidak punya kemampuan untuk berjuang. Dia boleh saja berjuang, boleh saja sosialisasi, tapi ketika orang bertanya wani piro? Dia mundur otomatis, karena ditinggal pemilihnya. Kecuali kalau dengan sistem nomor urut proposional tertutup, maka dia tidak perlu memperoleh target suara sekian, otomatis dia terangkat sendiri. Maka ini menjadi perlu dievaluasi. Saya pernah usul dalam rapat di DPC, ketika nomor satu syaratnya dari PAC, kenapa harus PAC? Bukankah DPC ini juga berasal dari PAC? Kenapa nomor satu harus PAC syaratnya? Akan lebih fear lagi ketika itu menggunakan bobot nilai, seperti pendidikan, lamanya di partai dll. Nah dijumlah maka yang mendapat jumlah terbanyak maka akan menempati nomor tertinggi.

-berarti untuk kader biasa tidak ada iuran-iuran begitu pak?

Nggak ada. Justru malah sekarang karena kita sudah menempatkan orang-orang di legislatif, di eksekutif, justru sekarang pengurus PAC ketika rapat mendapat uang saku, uang transport minimal 50 ribu setiap rapat. Dari dulu juga nggak ada iuran. Kalo dulu bukan iuran tapi misalnya kampanye ada yang sukarela membuat nasi bungkus dll.

-dalam kampanye itu perlu akuntable nggak pak?

Kalau dulu sebelum kita menempatkan kader kita di pemerintahan, ya tidak bisa akuntable. Tapi sekarang ya harus akuntable. Karena di dalam pemilu itu merupakan suatu pendidikan politik. Semua pendidikan politik memperoleh bantuan politik dari pemerintah, makannya harus akuntable. Kalau nggak salah jumlahnya untuk PDIP 140 Juta setiap tahun, dari kabupaten. Makannya dari banpol juga menuntut akuntabilitas kami, jadi bisa dipertanggungjawabkan 140 juta untuk apa. Termasuk penganggaran kampanye. Jadi berapa kali sosialisasi. Berapa jumlah yang diundang, bukti tanda tangannya ada, bukti transpotnya juga ada. Perencanaan sekarang lebih matang dan dihitung dulu. Termasuk ketika kita melakukan kegiatan musyawarah ranting, itu sudah kita rencanakan, berapa ranting yang ada, setiap ranting membutuhkan dana berapa. Kemarin kita habis hamper setengah Miliar. Padahal uang bantuan politik hanya ada 140 juta. Darimana kekurangannya? Itu kita partisipasi, kita gotong royong dari teman-teman juga. DPP nggak ada memberikan uang, DPD juga.

-menurut bapak ada yang salah apa tidak dalam sistem partai ini?

Dalam sistem ini saya pikir tidak ada yang kurang, artinya oleh para pemikir dan pendiri partai sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga memang semua sudah terakomodir disini. Baik bagaimana cara perekrutan, bagaimana pergantian seorang anggota, semua pasal-pasal yang dibutuhkan sudah termuat dalam AD/art. Bahkan kadang kita merasa mengurus partai itu tidak enteng, artinya banyak sekali tuntutan menjadi kader partai. Ya mungkin tidak kurang tapi belum dilaksanakan oleh kader.

-bapak sering dengar isu negatif tentang partai PDI?

Kalau isu negatifnya paling kita dianggap partai ini partai urakan, partai preman, partainya orang yang tidak berpendidikan, partainya orang-orang kafir, itu aja yang kita dengar. Artinya mungkin karena memang sejarahnya seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi, justru di kabupaten Magelang yang mewarnai itu orang-orang PDI. Yang banyak berjuang, yang banyak berpendapat, yang banyak mengeluarkan ide-ide cemerlang itu malah justru dari temen-temen PDI. Sehingga sudah tidak berlaku lagi walaupun itu hanya isu.

-bahkan isu sekarang yang lagi marak bahwa PKI ditubuh PDI itu bagaimana?

Saya pikir itu hanya isu, jadi tidak ada infiltrasi orang-orang PKI ditubuh PDI Perjuangan itu memang tidak ada. itu hanya isu saja. Hanya akan mengerdilkan atau hanya membuat pandangan buruk terhadap partai ini. Orang akan mengungkit kembali ketika Bung Karno membiarkan PKI di Indonesia ini. Kalau kita baca kembali sejarah itu, ya saya harus ngomong lama tentang PKI. Tapi itu hanya isu menurut saya. Di kabupaten Magelang belum pernah saya menjumpai PKI yang duduk di struktural. Kalau simpatisan mungkin orang-orang PKI menganggap ideologi kita punya persamaan mungkin. Kalau PKI masih ada atau tidak, saya hampir tidak percaya kalau PKI ideologinya masih ada di Indonesia. Kalau orang-orangnya sekarang juga hampir habis, udah tua-tua juga.

-sikap bapak tentang isu-isu negative itu bagaimana?

Ya saya pikir tidak perlu kita tanggapi, jadi kita jalan saja. Kita buktikan saja, kita sampaikan kepada masyarakat, kalau tuduhan itu benar silakan buktikan. Misalnya di kabupaten Magelang, jika ada isu tersebut silakan tunjukan. Saya kira kita bisa lihat di jajaran kepengurusan DPC, DPD, ya nggak ada. itu hanya salah satu isu yang kan menjatuhkan saja.

-yang membuat bapak betah dan bertahan lama di partai ini apa pak?

Yang jelas saya sudah nyaman di partai ini. Saya ingin apa yang telah saya perjuangkan ini, yang saya lakukan ini, juga sesuai dengan ideologi yang saya anut. Artinya ketika saya harus berpihak pada wong cilik, saya harus berusaha kepada orang kecil, pada rakyat jelata. Sehingga saya juga berusaha karena orang kecil itu bagian dari konstituen saya, dari pemilih saya, saya harus memperjuangkan aspirasi mereka.

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SAKIR, S.SOS

Alamat : Probolinggo, Rt 02/02 Gulon, Salam. Kabupaten Magelang
Pendidikan terakhir : S1 STBA Bina Dinamika
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 1 April 1961
Amanat tugas di PDIP : Sebagai bendahara DPC PDIP kabupaten Magelang dan Anggota DPRD Magelang Fraksi PDIP.

Wawancara dilakukan pada : 2 November 2016, di kantor DPRD Kabupaten Magelang

- kapan Bapak tertarik dengan politik?

Ketertarikan saya semenjak masih SLTA. Kebetulan orangtua saya juga sebagai seorang kader partai. Orang tua saya juga pernah menjadi legislatif tingkat kabupaten. Dari PDIP juga. Sehingga ketertarikan itu muncul dari situ. Diluar ketertarikan saya disitu ada tujuan untuk meneruskan perjuangan orang tua kemudian saya punya niat untuk melanjutkan itu. Itu yang menjadi alasan karena saya sudah tertarik dari dulu disamping itu ketertarikan Saya ingin melanjutkan perjuangan orang tua yang belum selesai juga sekaligus melanjutkan Pengabdian orang tua terhadap negara melalui jalur politik walaupun levelnya di tingkat daerah. Karena salah satunya pilar demokrasi adalah partai politik, sehingga kita akan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah, salah satunya adalah dengan lembaga politik. Dan lembaga politik ini juga nantinya mencetak pemimpin-pemimpin baik itu pemimpin legislatif, maupun di eksekutif.

- nyalon legislatif ke berapa kali?

Saya dua kali sama ini.

- alasan Bapak memilih kader PDIP itu apa?

Kalau kita melihat sejarah berdirinya untuk merebut kemerdekaan ini kan didahului dengan perjuangan para pahlawan yang dulu. Salah satunya adalah pahlawan proklamator, yaitu Bung Karno. Kenapa saya memilih PDI?, karena Salah satu partai yang melanjutkan ideologi Bung Karno. Yaitu wawasan kebangsaan dengan pancasila 1 Juni 45, ini kan digali oleh Bung Karno. Makanya saya memilih PDI Perjuangan, partai PDIP Perjuangan adalah salah satu partai mengajarkan ajaran ajaran Bung Karno dan partai ini PDIP Perjuangan, jalan Soekarno dari partai PDI Perjuangan adalah partai belum ada sejarah yang mengkhianati negara. Dan selalu menjunjung asas kebhinekaan Pancasila selalu menjadi dasar hukum dan PDIP Perjuangan selalu mengamalkan dari Pancasila itu yang telah diwariskan dari bapak proklamator yaitu Bung Karno.

- aktif Sejak kapan?

Saya aktif itu sejak mulai saya jadi Pengurus ranting kalau dulu namanya belum ranting tapi kordes, koordinasi desa. Di Desa Selomerah, kecamatan Ngablak. Tokoh sebelum Reformasi masih PDI belum PDI Perjuangan. Kemudian masuk ke PDIP Perjuangan melewati proses kudatuli. Di Magelang kan ada perebutan legitimasi antara Pro Suryadi dan pro Bu Mega. Kurang lebih tahun 95.

- latar belakang pendidikan dan agama mempengaruhi memilih PDIP?

Ya kalau pendidikan dan agama Saya kira tidak. Karena saya tidak mau mencampur urusan antara keagamaan dengan politik. Karena PDI perjuangan itu partai nasionalis. Sehingga ketika berbicara PDI perjuangan itu pluralisme yang kita kedepankan. Ketika masalah

pendidikan, sebetulnya pendidikan saya tidak ada sangkutannya dengan politik. Kuliahnya sosial tapi kan saya masuk di partai ini sejak SMA. Dan SMA saya latar belakangnya adalah pertanian. Sehingga saya tidak ada menyangkut pautkan masalah pendidikan ke partai PDIP Perjuangan. Latar belakang jangan Saya tidak mempengaruhi karena pendidikan di kuliah dengan lembaga politik itu beda, tidak selalu seiring. Sehingga yang melatarbelakangi saya adalah karena ideologi bukan pendidikan.

- pertama kali mengajak ikut partai siapa?

Sebenarnya tidak ada yang mengajak, tapi karena ketertarikan orang tua saya berjuang di partai yang sama, tentunya dengan secara alamiah saya mengikuti saja.

- waktu yang dibutuhkan untuk mengolah informasi akhirnya menjadi kader partai itu berapa lama?

Sebetulnya tidak terlalu lama, justru informasi itu saya dapat dari orang tua saya yang kebetulan sudah terjun lebih dulu ikut partai PDI.

- informasi yang memberitahu tentang partai ini?

Banyak informasi dari orangtua Saya, baik itu secara langsung yang diberikan kepada saya. Walaupun secara tidak langsung saya mendengarkan ketika orang tua saya berbicara tentang politik dengan teman-temannya, menambah informasi terkait masalah kepartaian terutama PDI Perjuangan.

- apakah Anda percaya 100% dengan informasi-informasi yang diberikan kepada anda?

Ya kita harus percaya menurut saya hal-hal yang di disampaikan itu, selain sesuai fakta yang kita jalani maupun kita membaca sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan.

- apakah ada partai lain diperkenalkan kepada anda sejauh ini?

Pernah, ada beberapa yang sengaja mengajak. Dulu dari partai PKB juga pernah dan terutama partai-partai baru. Ditawari untuk menjadi anggota Partai, belum menjanjikan sebagai pengurus. Mungkin barangkali kalau saya bergabung mungkin dijadikan masuk kepengurusan.

- apakah bapak sampai saat ini sudah merasa nyaman dengan partai ini?

Sudah, alasannya PDIP Perjuangan adalah partainya orang kecil. Sehingga roh dari PDIP Perjuangan adalah berjuang bersama rakyat terutama rakyat yang masih nasibnya belum beruntung. Nyaman di PDI karena dulu saya latar belakangnya orang dari desa. Orang dari Desa yang bisa dikatakan orang yang sudah mapan kan tidak. Menjiwai saya bahwa saya adalah orang yang kecil. Karena sesuai dengan ajaran Bung Karno, marhaenisme salah satunya adalah kaum petani.

Sampai kapanpun Insya Allah Ketika saya sudah tidak menjadi pengurus Partai, tidak menjadi anggota legislatif dari PDIP Perjuangan, saya tidak akan beralih ke partai lain apapun yang terjadi. Ketika nanti saya sudah tidak mungkin, ketika nanti kalau partai sudah tidak menugaskan, apapun posisi saya dan keberadaan saya masih di struktural atau tidak kalau ideologi tidak akan bisa dialihkan kepada ideologi yang lain.

- Termasuk nantinya ketua umumnya bukan ibu mega?

Ya kan partai itu kan kebetulan hanya Bu Mega saja. Bu Mega kebetulan Putra proklamator Bung Karno, tapi saya berharap manakala nanti bu Mega sudah tidak lagi menjadi ketua umum, salah satu penerusnya ada garis keturunan dari Bung Karno. Karena bukan karena itu mengkultuskan, tidak. Tapi ini bukti menjadi perekat dari semua kader yang masuk PDI Perjuangan. Mengapa hasil Kongres itu masih mengamanatkan Bu Mega menjadi ketua umum? Karena menurut kami bu Mega itu ketua umum yang berangkat tidak hanya setelah reformasi. Tapi sebelum Reformasi sejak Ibu Mega, masih jaya-jayanya waktu itu dominasi kekuasaan di Orde Baru bu Mega di situ sudah berani menyuarakan berbeda dengan pemerintah. Dan ketika sampai sekarang pun Bu Mega itu sikap dan konsistensinya sangat kuat. Contoh misalkan setelah reformasi pak SBY penguasa, karena Bu Mega PDI Perjuangan tidak tergiur iming-iming masuk ke dalam pemerintahan. Padahal waktu itu sudah ditawarkan, tapi dengan sikap konsisten bu Mega kita di oposisi.

- menurut anda PDIP Perjuangan seperti seperti apa?

PDIP Perjuangan adalah partai nasionalis, partai yang identik dengan partainya wong kecil. PDI Perjuangan adalah partai yang meneruskan acaranya Bung Karno. PDI Perjuangan adalah partai yang selalu menjunjung kebhinekaan, partai yang kekuatannya ada di Gotong Royong. Belum tentu di partai lain ada sikap gotong royong yang sangat kuat. Itulah PDI Perjuangan karakter. Ketika kita di oposisi selalu memperlihatkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk pemerintah. Ketika pemerintah itu benar kita apresiasi, ketika pemerintah itu juga ada yang kurang pas kita berani untuk memberikan jalan solusi tidak hanya sekedar mengkritik tapi memberikan pandangan atau solusi.

- yang menjadi pembeda partai ini dengan partai lain itu apa?

Ideologi. Disamping ideologi mungkin arah perjuangannya partai mungkin beda. Tidak hanya semata-mata kekuasaan tapi juga menjalankan amanah orang konstitusi untuk menyelamatkan negara kesatuan ini.

- sejarah perjuangan partai di kabupaten Magelang itu bagaimana ?

Perjuangan partai ini di Kabupaten Magelang saya sendiri belum terlibat secara langsung. Tapi saya waktu itu sudah tahu, PDI Perjuangan di Kabupaten Magelang itu penuh berdinamika. Waktu itu ada PDI pro Suryadi ada PDI Pro Mega. Dan waktu itu tidak semudah itu membangun partai di Kabupaten Magelang. Karena PDI Perjuangan itu, di Magelang ini kulturnya adalah kultur hijau. Hijau dalam arti nahdiyyin. Dulu Pemilu pertama tahun 55 itu kan melihat sejarah pemilu kita pertama itu di Kabupaten Magelang itu didominasi dari dan NU. Kemudian setelah orde baru, baru Golkar. Tapi setelah reformasi PDI Perjuangan belum jadi pemenang yang pemenang adalah PKB. Sehingga tidak mudah kita akan membangun partai dengan mayoritas kultur sosialnya adalah dari nahdiyyin. Walaupun di Kabupaten Magelang nasionalismenya juga masih kuat. Tapi nasionalisme di Kabupaten Magelang kita tidak hanya didominasi dari PDIP tapi masih ada Golkar, Nasdem, ada partai-partai yang garis partainya nasionalis.

Untuk membangun partai PDI Perjuangan itu juga tidak mudah. PDIP Perjuangan Setelah reformasi itu bisa menempatkan kadernya menjadi bupati, walaupun partainya tidak menjadi pemenang. Kalau di Kabupaten Magelang sudah dua periode ini pemenang. Kalau dulu setelah reformasi itu PKB kemudian PKB lagi, baru PDI setelah reformasi. Dinamika yang berkembang ketika PDIP eksis bisa besar bisa menang di Kabupaten Magelang. Dengan perjuangan para senior senior yang dulu menjadi Bupati terutama singgih Sanyoto

yang juga sekaligus menjabat ketua DPC ini sudah meletakkan dasar yang kuat PDI Perjuangan di Kabupaten Magelang ini. Dengan merangkul semua elemen dan merangkul kaum minoritas dan lain sebagainya, akhirnya PDI Perjuangan bisa eksis dan akan tiga kali ini PDI Perjuangan berkuasa di Kabupaten Magelang.

- menurut Bapak Nilai plus nilai minus dari partai ini apa?

Ya nilai plusnya banyak. Nilai plusnya kartu yang saya anggap selalu menjaga keutuhan NKRI. Itu banyak sekali kalau positifnya lah mungkin banyak kader-kader partai yang berhasil. Selalu kita mengedepankan asas demokrasi dan gotong royong. Kalau kader partai memang di situ layak, dan di situ memang secara kualitas, kapasitas, dan kapabilitas mampu walaupun dia tidak punya materi, di PDI perjuang disitu akan bisa berkarir dan bisa mengabdikan dirinya untuk menjadi pemimpin baik itu di level daerah maupun di level Pusat. Ini plusnya banyak sekali, bahwa partai yang selalu menjunjung tinggi asas demokrasi gotong royong kemudian parte yang mengakomodir anggotanya tidak hanya dari satu golongan tetapi semua golongan bisa masuk PDI Perjuangan.

Minusnya mungkin partai ini belum secara maksimal dikelola dengan cara partai modern. Karena masih berpatok dari ketokohan Ibu Mega mungkin barangkali itu. Dan sumber daya manusia nya masih perlu peningkatan. Dan mungkin masih sepenuhnya belum dikelola secara modern. Kita masih bisa dikatakan ketika perebutan kekuasaan elit-elitnya mungkin bisa dikerjakan masih belum mengedepankan kepentingan yang lebih besar tapi kadang kader-kadernya lebih mementingkan mencari Golongan atau personal. Mungkin itu kekurangan-kekurangan kami di PDI perjuangan. Kekurangan itu wajarlah, di partai mana pun saya kira. Di satu sisi PDI ternyata masih banyak kekurangan, tapi juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

- nilai dan ideologi apa yang Bapak sukai dari partai ini?

PDIP Perjuangan itu nilai kebersamaan, nilai senasib seperjuangan. Itu yang mungkin nilai-nilai yang ada di PDI Perjuangan. Nilai gotong royong itu kan belum tentu dimiliki oleh partai-partai lain. Itulah yang mungkin barang kali menurut kami nilai-nilai yang diajarkan PDIP Perjuangan. Mungkin karena nilai-nilai kebersamaan, nilai gotong royong, kemudian nilai prularisme itu tadi, menjadi PDI itu wadah kaum nasionalis dari latar belakang yang berbeda-beda.

- Pandangan politik Bapak sudah sejalan dengan arah politik partai ini?

Apa yang menjadi arah kebijakan partai Kami perusahaan untuk melaksanakan itu. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Karena mungkin ada beberapa keterbatasan ada beberapa kewenangan yang kita miliki. Misalkan saya sebagai anggota Partai, kalau mau melaksanakan orang partai tentunya tidak hanya kita jalankan di struktural tapi di legislatif, di eksekutif, tentunya harus seiring dengan arah tujuan partai itu. Partai kita adalah sesuai dengan ajaran Bung Karno kapan bisa berdaulat dalam politik, kita harus berdikari dalam ekonomi, kita harus berkepribadian dengan budaya Indonesia. Ini yang harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Tapi itu tadi tidak mudah untuk melaksanakan itu. Kecuali PDI Perjuangan menjadi mayoritas tentu itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Tapi karena ada beberapa partai tentunya kita akan terjemahkan dalam kebijakan itu pun tidak semudah itu. Tapi kita akan berusaha ke arah itu.

- berarti Bapak sepakat dengan arah dan keputusan partai apapun itu?

Kita sepakat karena partai PDI Perjuangan adalah partai terpimpin, bukan partai liberal. Sehingga apapun keputusan partai kita harus tunduk dan patuh terhadap keputusan partai. Karena kita partai terpimpin bukan partai liberal. Karena partai disini ibaratnya kalau di pemerintahan punya trias politika. Partai yang membuat aturan, partai yang ngawasi, ketika melanggar yang mengadili juga partai. Sehingga aturan trias politika sudah ada di partai. Sehingga apapun melawan partai, sekuat apapun kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hati nurani. Tapi kan ada forum-forum tersendiri, ketika kita tidak sependapat dengan apa yang menjadi keputusan partai, kan ada forum-forum ketika menyampaikan. Tapi PDI Perjuangan beda dengan partai lain, PDI Perjuangan selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat. Inilah demokrasi ala ketimuran yang begitu. Ya mungkin PDIP Perjuangan di dalam konsolidasi partai, reorganisasi pun menggunakan proses musyawarah mufakat tidak menggunakan voting dengan suara terbanyak. Itu termasuk plusnya PDIP Perjuangan juga.

- norma-norma nilai yang diusung partai ini sudah relevan untuk setiap kadernya?

Belum semuanya, masih ada kader-kader partai yang bergerak dan berjalan diluar hal-hal yang menjadi garis partai. Itupun di mekanisme organisasi kan ada aturan mainnya. Kalau relevan semuanya nggak mungkin lah pasti masih ada kurangnya. Makanya untuk partai kita selalu berbenah. Karena partai itu yang dibutuhkan adalah trust, kepercayaan. Sebaik apapun organisasinya tapi kalau itu tidak mendapat kepercayaan masyarakat partai itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena tujuan untuk berpartai politik itu disamping untuk membangun demokrasi itu kan ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Kalau sudah berkuasa tentunya akan berfikir tentang kepentingan masyarakat.

- apakah ada budaya politik mungkin antar kader yang berbau pragmatis?

Itu melihat situasi mas, kami katakan jujur ada lah. Transaksional itu ada, tapi PDI Perjuangan mengajarkan membangun partai itu tidak harus dengan cara-cara transaksional. Kita harus membangun demokrasi itu tidak dengan cara-cara ya transaksional. Dengan cara cara transaksional ini tidak membangun demokrasi yang baik. Ya mungkin ada kader-kader yang hanya untuk mementingkan kepentingan ambisi pribadinya maupun golongannya dengan melakukan cara-cara yang pragmatis dan transaksional pasti ada. Tapi itu bukan ajaran dari partai, itu mungkin dilakukan oleh oknum. Tapi kita jujur pada yang melakukan hal-hal semacam itu.

- berarti ada juga kadral yang masuk partai karena pragmatis? misal ingin jadi caleg

Ya ada, tapi PDI Perjuangan punya aturan mekanismenya tersendiri. Ada, misalkan kader partai mungkin baru masuk di partai dengan tujuan untuk jadi anggota legislatif, untuk menjangkau menjadi kepala daerah, kan ada. Walaupun itu tidak pure dan murni kader. Tapi kan ada juga. Kalau di PDIP Perjuangan semuanya ada aturan baik itu pencalegan maupun tata cara Penjaringan calon kepala daerah. Ada yang dari kader ada yang dari luar. Tapi sebelum menjadi calon dari yang diusung PDI Perjuangan, hitung akan dilakukan fit and proper test dan sekolah partai. Apakah nanti pemikiran-pemikiran jadi kepala daerah sudah sesuai dengan apa yang menjadi garis partai atau belum. Itu ada tesnya.

- apakah Bapak percaya dengan komitmen setiap kader terhadap partai sendiri dan terhadap aturan-aturan partai?

Kita harus percaya sama kader harus percaya. Tapi tidak dipungkiri bahwa kader itu tidak semuanya baik. Kita harusnya percaya apa yang menjadi komitmen terhadap teman-teman

di partai. Masa kita tidak akan percaya pada teman-teman. Tapi toh faktanya kadang ada yang tidak bisa menjalankan komitmen itu. Kita sadari bahwa partai politik ini soalnya. Partai politik itu kan kental dengan kepentingan. Walaupun tadi awal sudah saya sampaikan kita masuk di PDI karena kesamaan ideologi, tapi prakteknya tidak seperti itu. Kadang ada yang mengambil jalan yang mungkin kurang pas atau kurang beretika. Karena kita politik itu hanya yang ada itu kalau sudah kepentingan bersama, kepentingannya sama baru kita menjadi kawan. Karena di politik ada idiom bahwa tidak ada teman yang sejati dan tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi, itu yang melekat. Dunia politik seperti itu.

- tapi apakah ada kader di Kabupaten Magelang yang komitmennya berbelok?

Ya ada, setiap kali ada momen baik itu pemilihan Umum, baik itu Pilkada pasti ada yang tidak sesuai dengan keputusan partai. Sehingga mungkin melakukan hal-hal yang mungkin berbeda. Itu ada tapi prosentasenya kecil.

- PDI Perjuangan di Kabupaten Magelang sendiri budaya politik yang terbangun itu seperti apa?

Budaya politiknya kita menjunjung tinggi fatsun politik, etika politik. Ya kita menghormati yang senior, politik yang kita bangun di tengah tengah masyarakat politik yang santun. Politik yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu yang kita bangun dengan etika etika politik.

- menurut Bapak apakah ada yang salah dengan partai ini seperti sistem manajerial atau apa?

Saya kira nggak ada. Ya semuanya kita mengacu dari sk DPP. Jalannya organisasi itu kita mengacu pada organisasi Pusat. Tapi nek masih ada yang kurang Iya. Tapi kalo salah nggak. Kurangnya organisasi partai politik itu dari sisi pendidikan politik, itu masih kurang karena keterbatasan anggaran. Makanya pemerintah sekarang ini melalui Menteri Dalam Negeri akan membuat itu, keuangan partai itu yang cukup. Sehingga nanti sekolah sekolah politik pendidikan politik bisa dijalankan. Karena partai politik itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Tapi kalau pengkaderan nya tidak jalan, sekolah-sekolah tidak jalan itu tidak akan bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin yang bisa ditampilkan kepada masyarakat. Untuk

- bagaimana alur pengkaderan DPC kabupaten Magelang?

Itu kan harus berjenjang kalau perekrutan. Dimulai dari perekrutan partai jadi anggota kemudian jadi pengurus di tingkat ranting kemudian di tingkat PAC, kemudian di tingkat DPC. Kecuali ada memang walaupun tidak melalui jenjang itu memang secara ketokohan, secara kapasitas kapabilitas juga bisa membunuh walaupun tidak melalui proses itu tapi itu adalah tokoh. Mungkin tokoh dari sebuah lembaga dan secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan itu mungkin bisa terakomodir disitu.

- dalam perekrutan kader apakah mekanismenya sudah benar atau belum menurut bapak?

Sudah, di Magelang saya kira sudah. Pengurus ditingkat DPC pun juga melalui Penjaringan dan penyaringan. Pengurus di tingkat PAC pun juga melakukan hal yang demikian. Sebetulnya setiap kepengurusan partai itu di tingkat ranting pun dilakukan fit and proper test. Disitu siapa saja bisa muncul kemudian nanti dilakukan fit and proper test

kalau ranting yang mengurus di tingkat DPC, kalau PAC di tingkat DPD. Kemudian setelah terseleksi dengan beberapa materi tentang ideologi partai, tentang wawasan kebangsaan, tentang ajaran Bung Karno, tentang kondisi kewilayahannya. Dengan pemahaman itu melalui fit and proper test akan menunjukkan calon-calon pengurus. Sehingga nanti sudah muncul kalau rekomendasi pemimpin partai setelah 3 nanti musyawarah mufakat. Pertama musyawarah mufakat dengan ketiga kandidat itu siapa yang mau menjadi ketua. Kalau itu tidak ada mufakat kemudian di forum musancab atau di forum konfercab, kemudian anggota utusannya ya kan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat di tingkat forum nanti tidak ada kesepakatan, kita kembalikan ke atas. Kalau di DPC ya dikembalikan ke tingkat DPD, kemudian DPP akan mengambil keputusan partai.

- apakah sudah optimal dalam melakukan rekrutmen kader?

Ya kalau rekrutmen di PDI perjuangan juga belum lah mas, belum maksimal. Karena masih butuh kita untuk menggaet anggota-anggota baru, anggota-anggota yang pemilih pemula. Karena pemilih pemula itu kan potensinya sangat luar biasa. Dan sekarang ini kan cenderung anak-anak muda ini kan tidak tertarik pada politik. Ini mungkin karena cara sudut pandangnya terhadap partai itu sudah tidak menyenangkan, sudah punya stigma yang tidak baik sehingga anak-anak muda itu cenderung tidak tertarik pada politik. Memang butuh kemas sayap-sayap partai yang akan kita gunakan mungkin dengan PMP-nya, taruna merah putih nya, untuk merangkul pemilih pemilih pemula.

- dalam pengaderan harapan bapak memperoleh kader seperti apa?

Ya kader-kader yang punya potensi sumber daya manusianya. Ketika nanti yang tua-tua itu purna bisa menggantikan. Kader-kader pemula yang punya potensi yang baik, sumber daya yang baik. kemudian punya ideologi yang baik juga.

- - Menurut bapak, arti kader itu apa?

Setiap orang yang masuk dalam struktural partai, setiap anggota Partai yang bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai anggota Partai. Dan menjalankan setiap perintah oleh partai, dan sudah tergabung menjadi anggota Partai.

- apakah ada jangka waktu untuk menjadi anggota partai?

Levelnya kan anggota kemudian kader. Intinya ada jenjang waktunya menjadi kader. Dari anggota Partai menjadi kader. Rata-rata kader itu yang di PDI sudah masuk pengurus struktural, kemudian menjadi anggota sayap-sayap partai, itu adalah kader.

- bagaimana cara bapak berkomunikasi dengan kader lain?

Komunikasi dengan kader lain, di PDI Perjuangan kan ada tiga pilar partai. Tiga pilar partai itu kan harus bersinergi. Tiga pilar partai itu kan ada struktural, ada legislatif, dan ada eksekutif. PDI perjuangan itu kan harus menjalankan tiga pilar partai itu. Yang di legislatif kita komunikasi dengan struktural, yang di eksekutif pun juga harus komunikasi dengan struktural. Struktural juga komunikasi dengan eksekutif, legislatif. Setiap perjuangan partai itu kan istilahnya kalau di PDIP Perjuangan kan ada musyawarah pembangunan melalui partai. Kemudian partai disampaikan kepada fraksi, atau kepada bupati, selanjutnya akan diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan. Itu komunikasi yang kita bangun, PDI Perjuangan punya tiga pilar partai itu. Sehingga komunikasinya juga melalui itu baik itu di legislatif eksekutif maupun struktural.

- apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi antar kader?

Saya kira tidak ada.

- pengelolaan kader di lingkup DPC itu seperti apa?

Dalam pengelolaan kita rujukannya atau sebagai dasar untuk mengelola ini kan aturan dari partai. Disamping itu juga pengelolaan mengacu dari kondisi sosial masyarakat yang ada di Kabupaten. Istilahnya Local Wisdom nya juga kita perhatikan. Walaupun disitu ada aturan mainnya dari partai, namun di luar itu tentunya kita juga memperhatikan local Wisdom nya di kabupaten Magelang. Organisasi di DPC kita kelola dengan organisasi partai modern. Kita selalu mengadakan rapat rapat dan lain sebagainya, itu yang kita tempuh. Beda dengan partai-partai yang mungkin notabnya berbasis Islam, tentunya melalui pengajian-pengajian dia sudah bisa. Tapi kalau PDIP tentunya harus melalui rapat-rapat yang kita agendakan.

- Bapak di DPC menjabat apa?

Saya di DPC dua kali periode menjabat bendahara. Dulu dari ketua ranting kemudian ketua PAC, kemudian bendahara.

- apa ada sebuah budaya untuk menunjang pengelolaan kader partai?

Ya kita sebetulnya di partai itu disamping kekuatan dari gotong royong untuk melakukan gerakan-gerakan partai, kita juga dapat dana dari pemerintah melalui bantuan partai politik. Saya kira bantuan partai politik itu hanya stimulus kecil. Ketika kita akan melakukan konsolidasi partai, melakukan pendidikan politik pada kader itu masih dirasa sangat kurang. Tapi kah kita tetap menjalankan itu walaupun dengan segala keterbatasannya.

- Apakah ada budaya lain di dalam partai selain aturan tertulis?

Ada. Masing-masing PAC kita ada kegiatan yang Kita sesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

- apakah struktur organisasi partai ini sudah sesuai dengan kebutuhan partai di masyarakat?

Sebetulnya struktur dan organ itu sudah mencukupi. Cuma mungkin dalam implementasinya saja yang kurang maksimal. Karena ya itu tadi banyak kendala, dari SDM, sumber daya anggaran yang ada. Walaupun Setiap kegiatan itu kita tidak harus terkendala oleh sebuah anggaran yang ada. Tapi itupun untuk sebuah gerakan pasti akan dibutuhkan.

- komunikasi yang terbangun di partai ini bagaimana?

Dua arah Mas. Jadi gini Mas, satu yang arahnya terpimpin itu pasti dari atas ke bawah. Setiap ada keputusan, ada instruksi dari atas ke bawah. Tapi atas pun membuat kebijakan tentunya mendasari dari aspirasi dari bawah. Jadi bisa dijalankan dua arah.

- alurnya dari tingkat pusat sampai tingkat ranting itu bagaimana?

Alurnya yang berjenjang, ketika Pusat melalui DPD, dPD melalui DPC, di DPC kemudian ke PAC, PAC ke ranting, pengertian ranting anak ranting. Begitu juga sebaliknya, ketika

ada aspirasi dari bawah mungkin musyawarah partai, kemudian musyawarah anak ranting, musyawarah ranting, musyawarah anak cabang, musyawarah DPC, kemudian DPD sampai ke DPP.

- dilingkup DPC Kabupaten Magelang apakah sering terjadi konflik kepentingan?

ada mas, kita akui ada lah. Tapi semuanya bisa diselesaikan ketika keputusan partai itu sudah keluar. Ketika partai sudah memutuskan A ya semua harus tunduk pada kita. Dan rata-rata kader PDI Perjuangan loyal kepada putusan itu. Kalau tidak loyal ya kita pecat. Ada aturan mainnya.

- apakah Bapak sering mendengar pandangan dan pendapat negatif dari partai ini ?

Ya ada. pandangan negatif terhadap PDIP Perjuangan juga banyak. Seperti PDI dianggap partai yang tidak modern, karena masih tergantung pada ketua umum. Kemudian banyak kadernya melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga imbasnya terhadap partai. Kemudian PDIP Perjuangan mungkin juga dianggap partai yang bisa dikatakan sdm-nya dianggap masih banyak yang kurang bagus dan lain sebagainya.

- dalam pengelolaan SDM kader secara keseluruhan ini tanggapan dan sikap apa bagaimana?

Ya sikap kita harus justru kita harus berbenah. Berbenah dengan melalui cara-cara melakukan kaderisasi yang baik. Melakukan sekolah-sekolah politik yang baik. Makan di PDIP Perjuangan kan adalah sekolah partai sekolah tingkat Pratama, kemudian Madya dan utama. Yang dilakukan PDIP Perjuangan untuk meningkatkan sumber daya manusia tentang pemahaman politik, pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah dengan wawasan kebangsaannya.

- apakah semua kader melakukan komunikasi dengan mudah atau saling kenal ?

ya mestinya kader PDI Perjuangan itu saling kenal. Karena PDI Perjuangan gotong royong yang kuat. Kita contohlah antar wilayah, ketika kita Pilkada di daerah lain pun kita juga memberikan bantuan dengan cara gotong royong sukarela. Kemarin ke daerah Sragen, ke daerah yang lain sehingga antar kader PDIP Perjuangan itu banyak yang saling kenal.

- apakah ada reward and punishment pada kader yang berprestasi maupun menyeleweng?

Kalau reward dan punishment ada mas. Kalau reward ya tentunya dipromosikan kepada posisi-posisi yang lebih bagus. Kalau panismen ya tentunya terkena sanksi organisasi kalau dia menyeleweng. Tapi kan sanksi ada tahapannya, diukur dari kesalahan dari kader itu. Sehingga panismen dan reward itu pasti kita jalankan.

- apakah ada sistem evaluasi guna meningkatkan kinerja dan target partai?

Ada. Evaluasi tentu kita lakukan. Bagi kader yang kebetulan duduk di legislatif, tentunya kita evaluasi kinerjanya. Kalau di struktural tentunya kita evaluasi juga, tiap tahun kita evaluasi kinerjanya. Sejauh mana apa yang sudah dilakukan, dan target-target apa yang dulu kita telah sepakati apakah sudah dijalankan atau tidak. Evaluasi di tingkat jenjang itu pasti ada. Tapi evaluasi itu justru nanti di partai itu evaluasinya nanti ketika reorganisasi. Karena pertanggungjawabannya adalah di 5 tahunan. Pasti itu kan harus mempertanggungjawabkan dia sebagai pengurus Partai apa saja yang diraih dalam pemilu

baik itu Pilkada, baik itu legislatif, kemudian Pilpres, ini tentunya menjadi bahan evaluasi. Jika ada target-target yang tidak terpenuhi atau tidak berhasil, mekanisme forum itu yang akan menilai apakah ini layak menjadi pengurus lagi atau tidak. Evaluasi akhir adalah evaluasi terkait masalah pertanggungjawaban selama dia satu periode menjabat. Tapi tiap tahun pasti ada evaluasi. Mungkin evaluasinya ditingkat rating tidak seperti di tinggal di DPC.

- Apa peran dan tugas bapak dalam partai ini?

Untuk saat ini gas saya di partai menjalankan organisasi partai. Apa yang menjadi perintah-perintah dari partai harus kita jalankan. Sebagai bendahara itu juga penugasan dari partai. Untungnya kami sebagai bendahara di partai karena tidak di PDI perjuangan itu kan anggaran hanya terpusat di tingkat DPC, tidak sampai ke tingkat ranting untuk mengelola anggaran itu. Kecuali di PAC itu bendahara untuk mengelola tapi keputusannya ada di DPC. Sehingga program kegiatannya ditentukan oleh DPC baru uang itu dikasih. Sehingga terfokus uang itu hanya di tingkat DPC. Sehingga tidak ada PAC itu yang pegang uang dan mencari uang sendiri itu tidak boleh. DPC yang melakukan penghimpunan uang baik iuran partai, dari banpol, dari bantuan-bantuan teman-teman yang sudah masuk jajaran legislatif, itu namanya iuran. Kalau ada kegiatan di tingkat PAC, ranting, baru DPC mengeluarkan anggaran.

Di PAC tidak ada mengelola uang, dan tidak boleh menerima sumbangan. Nyumbang nya di tingkat DPC. Sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Takutnya kalau di tingkat PAC bisa mengelola uang, nanti atas nama partai dia malak i atau mencari sumbangan ke mana-mana atas nama partai, partai yang dirugikan.

- tugas di legislatif juga merupakan tugas dari partai juga?

Ya Iya. Ketika kita akan mencalonkan menjadi anggota legislatif itu kan prosesnya melalui tata cara Penjaringan dan penyaringan mekanisme yang ditentukan oleh partai. Dan mulai Penjaringan penyaringan fit dan proper test kemudian muncul rekomendasi untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif.

- bagaimana cara menjalankan tugas partai ini ?

Saya selaku bendahara tentunya dan sebagai pengurus ditingkat DPC tentunya bertanggung jawab pada tupoksi saya selaku bendahara tentunya mengelola keuangan yang ada untuk kepentingan kepentingan politik terutama anggaran yang ada di tingkat DPC untuk pendidikan politik. Pendidikan politik itu kan sangat luas itu yang kita pikirkan.

Kalau tugas menggerakkan massa itu biasanya dilakukan pada momen-momen ketika kita punya hajat besar. Ataupun menerima tamu yang butuh sambutan. Misalnya ketua umum membutuhkan massa dan sebagainya. Tentu kita melalui kepengurusan di tingkat paling bawah kemudian sampai dengan ranting dan DPC berkoordinasi menggerakkan massa itu.

- peran dan tugas apa saja yang diberikan oleh partai kepada para kadernya?

Tugas yang diberikan kepada kader partai tentunya untuk membangun persepsi positif terhadap PDI Perjuangan. Itu yang paling penting yang akan timbul trust pada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan percaya kepada PDI Perjuangan. Tapi itu dilakukan dengan langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh kadernya.

- Sikap bapak terhadap peran kader ini bagaimana?

Ya sikap saya itu ya harus kita lakukan. Membangun persepsi positif terhadap partai itu kan kunci kesuksesan partai. Saya terhadap kader pun juga melakukan itu mas. Walaupun saya sebagai anggota legislatif pun harus melakukan itu dengan dari sisi kewenangan dan kemampuan saya. Persepsi politik dibangun dengan berbagai macam cara. Dari sisi kebijakan, dari sisi tingkah laku kita, dari sisi banyak hal yang banyak bisa dilakukan untuk membangun citra positif terhadap partai.

- kalau bapak Membangun hubungan baik dengan konstituen bapak bagaimana?

Saya membangun komunikasi dengan konstituen, satu karena DPR punya satu kegiatan yang namanya reses. Kita manfaatkan untuk penjualan komunikasi dengan masyarakat tentang apa yang sudah kami lakukan di lembaga DPR ini. Apa yang telah kamu perbuat dari sisi politik anggaran, dari sisi pengawasan dan sebagainya. Dan itu harus diketahui oleh masyarakat, karena saya sebagai anggota DPR dan selaku kader partai yang ditugaskan menjadi anggota legislatif. Itu salah satu ketika saya memanfaatkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Tapi ketika saya melakukan komunikasi politik dengan masyarakat saya selaku partai tentunya kerja-

kerja partai yang kita sampaikan kepada masyarakat. Itu yang disampaikan melalui musyawarah partai di tingkat anak ranting kemudian ranting dan PAC, menurut saya tentunya punya tanggung jawab berkomunikasi dengan konstituen, dengan masyarakat, baik itu saya sebagai struktural partai maupun anggota legislatif yang notabnya anggota legislatif itu juga sebagai representasi dari partai.

- kalau secara organisasi di DPC Bagaimana menjaga hubungan baik dengan konstituen?

Ya tentunya kita melakukan dan menjalankan roda organisasi seperti yang saya jelaskan tadi rapat dan sebagainya. Tentunya juga turun ke bawah ketika ada acara-acara partai Kita semua harus turun ke bawah dan sebagainya.

- di dalam DPC Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan gagasan kepada pemangku kebijakan di DPC?

Di DPC itu selalu mengadakan rapat, ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan, di forum rapat DPC ya kita sampaikan mas. Disitu apa yang akan kita sampaikan, kita sampaikan, dan di situ tidak hanya diputuskan oleh ketua, tapi itu adalah forum rapat DPC. Ya disitulah ketika kita menyampaikan segala sesuatunya di forum rapat DPC.

- selain dalam rapat internal DPC, adakah kesempatan lain agar berkomunikasi dengan kader secara maksimal mengenai partai ?

Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ketika berkomunikasi dengan kader. Kita turun ke bawah itu pun salah satunya untuk menjalin komunikasi. Kemudian mengadakan agenda-agenda kegiatan. itu salah satu untuk menjalin komunikasi dengan kader maupun dengan struktural partai. Ketika ada acara apa di tingkat ranting ya kita harus turun, ini salah satu cara membangun komunikasi dengan kader maupun konstituen di tingkat bawah. Banyak hal yang bisa dilakukan Mas. Yang jelas jaringan komunikasi PDIP Perjuangan di tingkat DPC sampai anak ranting pun berjalan dengan baik. Dengan konstituen pun juga kita selalu berkomunikasi melalui tangan kader kader yang ada di masing-masing dusun maupun desa.

- bagaimana cara anda membuat Gagasan Politik Anda diterima di dalam partai maupun di dalam legislatif?

Ya tentunya gagasan itu perlu kita sampaikan. Tapi gagasan itu tidak hanya sekedar gagasan, tapi gagasan itu nantinya bisa diimplementasikan, kita bisa menyakinkan itu. Sehingga teman-teman mungkin ketika gagasan baik dan barangkali itu bisa dilakukan tentunya kita dan teman-teman bisa menerima itu. Namun kalau hanya sekedar Gagasan dan itu sulit untuk diimplementasikan, karena kita juga melihat ketika sulit diimplementasikan atau menterjemahkan dari gagasan-gagasan itu tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi juga. Kita punya gagasan banyak, wacana banyak tapi mungkin sulit dilakukan, tentunya kita harus memperhatikan itu juga. Artinya kita harus melihat situasi dan kondisi ketika kita nanti menyampaikan gagasan ataupun masukan atau ide kita supaya bisa diterima tentunya memberikan gagasan-gagasan yang mungkin bisa aplikatif.

- status Anda menjadi kader PDIP itu membuat masyarakat berpandangan bahwa anda itu penghubung masyarakat dengan partai atau tidak?

Ya, bisa dikatakan Iya Mas. Karena saya menjalin komunikasi dengan masyarakat banyak hal. Saya mengaplikasikan banyak hal, memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat inilah menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat. Dan masyarakat mungkin merasa sebagian aspirasi masyarakat sudah kita perjuangkan dalam sebuah kebijakan. Baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kita membantu advokasi petani yang ada di Kabupaten Magelang, mencarikan bantuan-bantuan seperti alsintan kemudian sarana-sarana untuk petani. Walaupun tidak semuanya bisa diharapkan untuk seluruh masyarakat tapi minimal saya sebagai penghubung antara masyarakat, masyarakat juga akan menilai saya itu siapa dari partai apa.

- dalam merumuskan aspirasi dari masyarakat, Bagaimana DPC menjalankan proses perumusan tersebut?

Contohnya melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), itu di partai kan ada. Setiap perumusan kebijakan kan harus masuk di perencanaan. Alurnya musyawarah di tingkat PAC kemudian dibawa ke tingkat DPC kemudian DPC diberikan kepada fraksi atau kepada Bupati kalau itu kadernya. Sehingga musyawarah-musyawarah itu yang menjadi aspirasi masyarakat mengkajinya melalui itu. Tapi juga ada yang namanya program atau kebijakan itu tidak semuanya menyerap aspirasi dari bawah. Karena pembangunan itu kan ada beberapa pendekatan. Pendekatannya ada bottom up, top Down, ada birokrat ada teknokrat ada politis. Salah satu pendekatan pembangunan oleh partai politik ya pendekatan politis.

- Di dalam partai ini apakah ada sosok yang bapak sangat sukai atau yang bapak panuti?

Kita punya Bu Mega. Selain itu kita punya tokoh-tokoh yang bagus. Ada Pak Cahyo Kumolo, ada Pak hasto selaku Sekjen, ada mbak Puan, ada mas Prananda. Itu sebagai tokoh-tokoh yang menurut saya menjadi inspirasi buat saya ketika saya menjalankan berpolitik di tingkat daerah.

- apakah ada orang di dalam DPC ini yang sangat berpengaruh dalam berlangsungnya organisasi?

Kalau berpengaruh tentunya semuanya punya peran masing-masing mas. Karena di DPC tentunya setiap kebijakan tentunya harus ada dibarengi dengan musyawarah mufakat.

Tidak hanya ketuanya, tapi semuanya punya peran bagi masing-masing pengurus. Itu menurut kami. Sehingga kita menempatkan pengurus setiap kader partai itu tidak ada yang istilahnya si ini mempunyai kelebihan dan itu yang tidak. Tapi semua berbuat sama dan pengaruh itu mungkin menurut kami dari hasil keputusannya. Jadi tidak ada yang paling berpengaruh secara personal, kita di PDIP Perjuangan itu sama setiap kader. Yang membedakan itu ketika sudah mendapat perintah dari partai itu saja. Kalau belum mendapat perintah partai, itu hanya dari sisi kewajibannya saja yang beda di lakukan. Tapi dia sebagai kader adalah sama.

- dalam segi kepemimpinan, bagaimana bapak menanggapi dan menyikapi kepemimpinan baik dari ketua umum, DPD DPC ?

Kalau PDIP Perjuangan setiap masing-masing kepengurusan baik ditingkat pusat, tadi kan sudah kami sampaikan. dan itu berjenjang. Saya kira nggak ada Mas ketika sudah menjadi keputusan DPP, dan disampaikan ke DPD, DPD melakukan ke DPC, DPC ke PAC, PDI Perjuangan saya kira sudah sesuai dengan rel yang ada. Ketika ada urusan organisasi baik itu sifatnya perintah maupun yang sifatnya sanksi ataupun sebagainya saya kira sudah tidak usah diragukan lagi. Karena semuanya kepengurusan partai PDIP Perjuangan itu sudah melalui proses. Jadi tidak serta-merta Siapa yang dijadikan ketua itu sudah ada aturan mainnya. dia sudah dipertanggungjawabkan dari sisi ideologi. dari sisi ketegasan, kepemimpinan. Apalagi pengurus DPC, DPD itu kan melalui psikotes. Pengurus DPC itu harus melalui Psikotes, DPR juga melalui Psikotes. Sehingga dia sudah diketahui dari sisi kemampuan kepemimpinannya bagaimana dan lain sebagainya. Apalagi menjadi kepala daerah dan sebagainya, itu harus melalui psikotest juga.

- mengenai Ibu Megawati, apa pandangan Bapak mengenai pimpinan partai Ibu Megawati ini?

Menurut kami Bu Mega adalah sosok pemimpin partai yang menurut kami paling baik saat ini. Karena bisa membawa partai yang dulu pernah pemenang kemudian jatuh kemudian sekarang menjadi pemenang lagi. Mungkin orang lain menganggap bahwa bu Mega itu orang yang kaku, orangnya tidak negarawan dan lain sebagainya. Tapi menurut kami, Bu Mega adalah sosok negarawan sejati. Dan dia selalu komit menjaga keutuhan Republik Indonesia ini. Ini yang kami kagum dengan Bu Mega dengan sikap politiknya, baik itu di internal maupun di eksternal. Walaupun mungkin segala kekurangan dan kelebihannya ada, tapi menurut kami Bu Mega adalah sosok pemersatu. Dia adalah sosok istilahnya menjadi inspirasi konsistensi bersikap. Orang lain akan berpandangan apa kalau sikapnya Bu Mega itu tidak akan mudah untuk berubah. Walaupun sikap itu kadang menimbulkan polemik atau debatable di kalangan masyarakat umum. Tapi sikap-sikap itu yang patut kita hargai. Terutama dalam pengelolaan partai bu Mega sangat luar biasa. Walaupun bu Mega itu seorang perempuan, tapi pandangan-pandangannya tentang kebangsaan tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu keluar maupun kedalam saya kira sudah tidak bisa diragukan lagi.

- nantinya kalau bu Mega sudah lengser, apakah ada orang yang bisa menyampaikan kepemimpinan beliau?

Ya kalau menyamai kan butuh proses Mas. Mungkin bisa lebih tapi kan butuh proses. Kalau kita compare sekarang kan tidak bisa. Bentuk ada mas harus ada yang, bagaimanapun sudah alamiah harus ada yang mengganti. Nggak mungkin Bu Mega itu tidak akan ada yang mengganti. Tapi untuk penggantinya itu akan lebih baik atau tidak kan

butuh proses. Tapi ada lah, PDIP Perjuangan kan banyak kader, banyak kader yang bisa menggantikan Bu Mega. Baik sisi kapasitas dan kemampuannya mungkin ada. Tapi kalau kita mengkompare kemampuannya bu Mega kan butuh proses. Apakah nanti lebih jelek atau lebih meningkatkan kita pasti melihat setelah proses itu berjalan.

- bagaimana sikap Bapak dengan keputusan-keputusan Bu Mega khususnya dalam bidang politik maupun kepartaian?

Tentunya keputusan-keputusan Bu Mega itu tidak hanya keputusan secara pribadi. Keputusan yang dibuat Bu Mega tentunya sudah melalui proses di partai. Walaupun partai mengamanatkan Bu Mega bisa mengambil keputusan sendiri sebagai ketua umum. Itu hasil dari Kongres. Tapi setiap keputusan-keputusan yang lain tentunya itu juga sudah dimusyawarahkan dengan partai. Walaupun Bu Mega punya hak prerogatif untuk memberikan keputusan tersendiri. Menurut kami apa yang diputuskan oleh Bu Mega saya kira menurut kami sudah baik. Karena keputusan Bu Mega itu tidak hanya sekedar keputusan hanya untuk kepentingan PDI, tapi mungkin juga luas untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

- walaupun keputusan untuk menunjuk pak Ahok sebagai calon gubernur walaupun DPD menolaknya?

DPD tidak menolak mas. DPD mungkin sebelum ada keputusan Bu Mega itu ada dinamika. Tapi DPD tidak menolak, secara institusi DPD tidak menolak apa yang menjadi keputusan Bu Mega. Karena itu sudah tertuang dalam Kongres partai. Sebelum Bu Mega menyerahkan keputusan boleh saja teman-teman berwacana. Pengurus pengurus DPD DPC berwacana kan boleh. Tapi ketika bu Mega sudah memutuskan, semua harus tunduk pada keputusan. Keputusan Bu Mega adalah keputusan partai. Kenapa Bu Mega mencalonkan Pak Ahok, tentunya Bu Mega mempunyai pertimbangan tersendiri. Mungkin melihat dari hasil kinerja Ahok, mungkin yang lebih besar lagi ini karena kebhinekaan. Dia akan memperlihatkan bahwa negara Indonesia itu negara yang berbhineka, akan menunjukkan bahwa PDI itu memang menjunjung kebhinekaan itu. Sehingga Ahok yang dianggap minoritas, Ahok yang dianggap mungkin non muslim, tapi PDI selalu menampilkan kebhinekaan. Inilah kesan yang dibawa oleh Bu Mega menunjukkan pesan pluralismenya itu kan ada di situ. Tidak hanya sekedar Ahok itu jadi gubernur atau tidak tapi disitu ada pesan yang disampaikan bahwa Bu Mega bangun sebuah negara ini kebhinekaannya harus dijunjung tinggi. Tidak hanya sekedar Ahok itu banyak pro dan kontra, tapi pesan dan kesan yang dibawak oleh Bu Mega itu sebenarnya. Sehingga Menurut kami tidak ada salahnya. Dan kader partai harus siap tunduk. Kalau PDIP Perjuangan ya ada lah yang mungkin tidak puas dengan Ahok secara pribadi. Tapi secara keputusan partai tentunya kalau dia masih menjadi anggota partai PDIP tentunya harus menjalankan keputusan itu. Jadi ibu ketua umum itu mutlak, karena kita partai terpimpin itu tadi.

- mengenai kader yang keluar seperti Ibu Rustriningsih dan Bapak Bibit Waluyo, bagaimana pendapat bapak?

Menurut pendapat kami akhirnya bisa menilai. Setiap kader itu akan bisa dinilai dari sisi kepentingannya. Kalau dia sebagai kader itu karena ideologi, karena ingin mengabdikan diri melalui PDI Perjuangan, yang dianggap PDIP Perjuangan punya ideologi Pancasila. Tapi kalau dia itu akhirnya kemauannya sendiri tidak terakomodir lantas dia istilahnya mbalelo, menurut kami Akhirnya bisa dilihat sejauh mana militansi sebagai seorang kader. Kalau saya hanya itu. Nantikan masyarakat yang menilai. Toh akhirnya bagi kader-kader

partai yang mbalelo ke PDI Perjuangan walaupun mungkin dulu di PDIP Perjuangan bisa dikatakan secara ketokohnya cukup baik, cukup berpengaruh, tapi ketika dia keluar dari PDIP Perjuangan tidak punya pengaruh apa-apa sekarang. Banyak dilihat sekarang tokoh-tokoh PDI yang masih bersama-sama dengan PDI dia lupa yang membesarkan sebenarnya PDI, tapi kadang dia rumongso dia yang membesarkan partai, padahal dia besar karena PDIP. Ketika dia tidak jadi anggota Partai PDIP Perjuangan nyatanya nggak ada kan yang terlihat. Yang buat partai sendiri juga nggak laku. Kemudian Bu Rustri juga sekarang dia juga tidak bisa menunjukkan karir politiknya, walaupun pencetakan melalui partai lain, nyatanya juga tidak bisa. sehingga di PDI Perjuangan itu saya kira sekuat apapun tokohnya ketika sudah melawan partai Saya kira juga tidak akan bisa mencuat. karena saya hanya menilai berarti masuk partai hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk semata-mata karena ingin melanjutkan ideologi mereka, tidak. Kalau dia orang kader yang mempunyai ideologi kuat tentunya apapun yang menjadi keputusan partai tentunya harus siap. Bu Rustri kan salah satunya karena tidak mendapat rekomendasi sebagai gubernur. Pak Bibit Waloyo tidak mengakui dulu diangkat dari PDI setelah jadi gubernur dia merasa tidak jadi gubernur dari PDI dan lain sebagainya. semacam itulah yang kadang partai harus bersikap tegas. Karena nggak mau PDIP Perjuangan sebagai kendaraan mencari kekuasaan saja.

- kembali ke Ahok, apakah PDIP tidak takut Ahok itu hanya pragmatis saja dengan PDIP? Ahok kan memang belum kader PDIP. Pesan tadi sudah saya sampaikan, yang penting sama dengan apa yang menjadi garis partai PDI Perjuangan. Sikap itu kan boleh saja tapi pemimpin daerah yang dibutuhkan adalah kerjanya. Tapi kalau kerjanya Ahok itu memang betul-betul membangun Jakarta yang lebih baik, membangun masyarakat Jakarta untuk yang lebih sejahtera, saya kira tidak ada masalah. Itu di luar pesan yang disampaikan Bu Mega bahwa PDI Perjuangan menjunjung kebhinekaan itu. Saya kira masyarakat juga bisa menilai, kenapa Bu Mega memberikan rekomendasi kepada Pak Ahok tentunya di internal partai pun juga melakukan survei, melakukan kajian. Pak Ahok dipersepsikan jelek kan karena lawan-lawan politiknya saja. Tapi masyarakat walaupun sekarang mungkin bisa dilihat hasil surveinya bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Pak Ahok masih cukup tinggi. Karena Bu Mega tidak mau memberikan tanggung jawab untuk mengelola Jakarta ini kepada yang tidak bisa dipercaya. Dipercaya dalam arti ini Jakarta ini kan wajah dari Indonesia, pusat pemerintahan Indonesia kan ada di Jakarta. Sehingga butuh pemimpin-pemimpin yang punya ketegasan yang baik. karena di Jakarta inikan persoalannya selain macet, banjir, dan lain-lain. Macet karena rata-rata masyarakatnya tidak patuh pada aturan. Banjir juga sama. Ini kan butuh pemimpin yang tegas. Kalau tidak dipimpin oleh manusia yang tegas pasti tidak ada kemajuan. Tapi itu mungkin pandangan diluar pasangan tadi. Bu Mega atau PDI Perjuangan nya pertimbangan lain. Kenapa harus Pak Ahok, mungkin ini bagian dari strategi politik yang tidak perlu saya sampaikan dengan mas. Di situ kan ada, karena PDIP Perjuangan punya target juga untuk menjadi partai pemenang itu diawali kita harus berkuasa di berbagai daerah. Tentunya pertimbangan-pertimbangan itu ada, kenapa Pak Ahok, kenapa sekarang Pak Jokowi masih kita dukung. Tentunya itu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin saya tidak harus menyampaikan.

- apakah Bapak selalu mengetahui sikap-sikap politik partai ini, dan Bapak selalu mendukungnya?

Sikap partai politik tentunya sudah ada aturan utamanya Mas. Sikap-sikapnya, baik itu sikap politik yang mungkin diambil ketua umum, tentunya kita menyerahkan kepada yang di pusat. Sikap-sikap partai politik baik itu mendukung pemerintah atau menjadi oposisi dan lain sebagainya ya tentunya apapun yang diputuskan oleh DPP kita siap mas.

- pernah Bapak merasa nggak sejalan dengan sikap partai?

ya kalau itu juga pernah mas. Tapi kita berpartai ada aturan main. Kita tidak boleh mengedepankan dari sisi kepentingan pribadi. kalo kita pernah srek dan dan tidak srek ya juga pernah mas, manusiawi itu. Tapi kalau kita sudah terikat dengan suatu organisasi dan Sisi itu ada aturan mainnya ya kita ikuti aturan mainnya.

- bagaimana sikap Bapak dengan kebijakan partai yang menentukan Calon Legislatif dan Eksekutifnya?

Sikap saya, saya mendukung apapun yang diputuskan oleh DPP, karena melalui mekanisme-mekanisme dan melalui tahapan-tahapan yang dilalui. Saya kira tidak ada persoalan kalau penentuan calon. Karena PDI Perjuangan selalu mengedepankan dari menghargai dari orang yang berjuang pada partai. Jadi tidak semata-mata kita butuh menang saja, tidak. tapi menang pun itu nanti tidak bisa menterjemakan apa yang menjadi garis partai, yang menjadi ideologi partai, kan susah juga.

Sehingga yang dikedepankan PDI Perjuangan adalah ideologi. Kalau di Legislatif itu saya kira ada mekanismenya tersendiri, PDI Perjuangan kalau tidak kader tidak mungkin bisa nyaleg dari PDIP Perjuangan. Sehingga tidak mungkin PDI Perjuangan itu akan menugaskan kepada kader legislatif yang tidak berjuang di partai, karena mekanismenya jelas mas. Dan rata-rata sekarang pun PDI Perjuangan yang masuk di legislatif rata-rata adalah kader partai baik itu di PAC maupun di DPC. Nggak ada menugaskan orang yang belum berjuang di partai. Karena perjuangan di partai itu menjadi ukuran, menjadi pertimbangan, ketika orang akan di tugaskan di eksekutif maupun legislatif.

- pengalaman hidup apa yang bersangkutan dengan partai ini apa saja?

Kalau pengalaman banyak sekali mas, mulai dari anggota Partai sampai di anggota legislatif. Banyak sekali pengalaman baik suka maupun duka banyak. Tapi kita jalani dengan penuh rasa tanggung jawab karena komitmen itu yang mendasari saya harus bertanggung jawab. Bahkan kalau sudah menjadi anggota Partai, urusan partai walaupun ada keluarga menjadi nomor sekian. Sing penting partainya beres, selesai, tugas-tugas kita selesai. Pengalaman bagi saya terhadap masuk partai banyak hal. Pengalaman saya akhirnya menjadi anggota legislatif. tentunya banyak pengalaman yang saya jalani. Baik itu penalaman yang mungkin kurang enak, atau pengalaman yang mungkin mengenakan bagi saya, suka duka pasti ada.

- apa pengalaman berharga yang mulai dari SMA sampai benar-benar menjadi kader?

Pengalaman yang itu, akhirnya saya yang dulunya tidak tahu tentang demokrasi akhirnya tahu tentang demokrasi. Itu pengalaman bagi saya. Dan ketika bicara politik akhirnya mengasyikkan. Walaupun kadang di masyarakat respon terhadap partai politik juga tidak baik juga. Tapi karena mungkin ini sudah menjiwai saya akhirnya ya apapun kita jelaskan. Pengalaman banyak sekali Mas, untungnya saya menjadi anggota Partai, menjadi kader sekarang menjadi pengurus Partai, struktural partai, itu banyak sekali. Akhirnya punya banyak kawan, akhirnya ke sana ke sana tahu, ini kan yang tak mungkin bisa saya dapatkan jika tidak masuk partai. Yang dulunya mungkin saya tidak mengenal organisasi, akhirnya pengalaman menjadi pengurus Partai tentunya harus tahu tentang organisasi apa yang menjadi kewajiban dan tugas sebagai anggota Partai, organisasi partai. Ini menjadi pengalaman-pengalaman yang tentunya kalau saya urai mungkin banyak sekali mas. Mungkin yang mengenakan dan tidak mengenakan pun banyak lah kalau di partai. Di

internal pun, ketika pencalegan pun tentu ada hal-hal yang tidak mengenakan. Karena ya biasa kan politik itu negatif campaign, black campaign itu kan biasa. Itu yang kadang kurang mengenakan hal-hal semacam itu. Ketika ada reorganisasi di partai politik juga kadang biasalah untuk ada yang melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang terpuji itu kan biasa. Itu merupakan pengalaman-pengalaman.

- proses politik apa saja yang sudah bapak jalani?

Sebetulnya proses-proses politik yang saya jalani Saya kira kita melakukan proses politik itu yang menurut partai masih normal dan bisa dilakukan dan memang harus dilakukan. Kita harus mempengaruhi meyakinkan kepada pengurus, kita harus menunjukkan kinerja yang baik, dan lain sebagainya. Ini adalah proses-proses politik untuk meraih sebuah kepercayaan terhadap kepengurusan di bawahnya maupun kepada pengurus sebelumnya. Saya kira proses-proses politik yang melakukan lobi-lobi yang mungkin harus bagaimana. Mungkin lobi politik itu perlu, tapi tidak lantas lobi politik yang di luar kewajaran norma-norma politik akan norma-norma demokrasi.

- realitas dan tragedi politik apa yang menurut Anda menarik selama menjadi kader?

Kudatuli teringat, kemudian ya zaman-zaman orde baru. Bagaimana PDIP Perjuangan akan mengimbangkan proses demokrasi saja selalu di intervensi, diteror dengan berbagai macam upaya. Ini adalah tragedi yang bagi saya bagian dari sejarah proses demokrasi. Tapi sebetulnya menurut kami itu kejadian diluar dugaan, tidak dikehendaki. Tapi karena keadaan yang harus seperti itu tentunya itu menjadi sebuah bahan evaluasi ketika pengelolaan partai, ketika kita menjadi partai penguasa tentunya hal semacam itu tentunya jangan sampai melakukan hal-hal semacam itu. Kudatuli itu kan karena arogansi kekuasaan saja. Makanya ini sebagai bahan renungan evaluasi Ketika nanti PDIP Perjuangan itu berkuasa tentunya ketika kita akan merebut juga kekuasaan itu tidak harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Untuk melakukan lawan politiknya kan tidak harus melakukan hal-hal seperti itu. Itu kan kader-kader diadu oleh para penguasa.

- sejauh mana partisipasi politik bapak dalam perjalanan partai ini?

Partisipasi Saya dalam perjalanan politik tentunya kami ikut berjuang ketika PDIP Perjuangan dalam kondisi seperti mungkin itu kita juga melakukan gotong royong, membangun posko dan lain sebagainya. kemudian sukarela iuran dan lain sebagainya. Kita turun ke jalan untuk menyuarakan demokrasi, itu kan bentuk-bentuk partisipasi politik terhadap partai. Ketika dulu orde baru masih berkuasa pun kita juga kadang royong membangun posko. Itu kan juga bentuk-bentuk politik terhadap partai. Menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun bahwa PDIP Perjuangan eksis. Zaman orde baru itu kan kenapa PDI Perjuangan seperti itu kan hanya akan menunjukkan eksistensinya partai. Supaya demokrasi yang kita bangun itu demokrasi seutuhnya bukan demokrasi semu.

- apa yang membuat bapak itu betah dan bertahan lama di partai ini?

satu tadi di awal, ideologi. Ideologi PDIP Perjuangan itu adalah ideologi yang meneruskan ideologinya Bung Karno. Dan ajaran-ajaran ideologi Bung Karno itu sampai sekarang masih relevan. Saya masih betah di PDIP Perjuangan karena ideologi ini, bukan karena PDI besar, bukan karena saya kebetulan menjadi anggota legislatif, tidak. Ketika besok pun perjuangan berada di rel yang benar, melanjutkan apa yang menjadi Trisaktinya Bung Karno. Karena Trisakti Bung Karno itu kita harus berdaulat dalam politik, kita berdikari dalam ekonomi, kita berkepribadian dalam kebudayaan. itu alasan yang menjadikan saya

betah di PDI perjuangan, sampai kapanpun insyaallah masih PDI Perjuangan, selagi PDI Perjuangan masih ada dan selagi ideologi bung Karno masih di ajarkan.

- Bapak kan sebagai bendahara, apa ada iuran anggota keseluruhan?

Belum, kalau iuran itu ada tapi kalau rutin tidak. Yang rutin adalah fraksi, per bulan. Tapi kalau pengurus struktural belum mengarah ke situ. Tapi sebenarnya memang idealnya harus begitu. jadi partai itu didanai dari anggota. Itu memang idealnya, tapi di Indonesia tidak jalan mas, tidak seperti di Amerika. Karena orang masuk ke politik saja rata-rata orientasinya bagaimana caranya aku bisa untung di partai, kan gitu. Saya kira kalau iuran secara rutin belum tapi isidentil ketika pada momen-momen politik, ada kerja politik, sampai tingkat anggota pun iya. Tetapi kan tidak semua biaya dari partai yang mencukupi, pastinya da partisipasi dari calon. Tapi kan saya sepakat apa yang disampaikan pemerintah melalui Pak Menteri dalam Negeri, bahwa banpol bantuan partai politik akan di naikkan itu saya sepakat. Karena itu tadi kalau kita tidak ada anggaran bagaimana melakukan pendidikan politik, kan gak bisa. Sebetulnya partai itukan wadah untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Sementara iuran hanya fraksi yang rutin. Baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat saya kira sama. Tapi kalau iuran kepada anggota tidak ada tapi kalau iuran isidentil, iya.

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BANDUNG SUROSO

Alamat : Kelurahan Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang.

Pendidikan terakhir : PGAP (SLTP)

Pekerjaan : Serabutan

Tempat Tanggal lahir : Magelang, 12 Desember 1955

Amanat tugas di PDIP: Mantan Ketua PAC Mertoyudan

Wawancara dilakukan pada: 9 November 2016 durasi 4 Jam. Di kediaman bapak Suroso

Farid : Dulu pertama kali masuk di PDIP tu tahun berapa pak?

Suroso : Yo saya mulai milih itu tahun 77. Waktu itu kan ada tiga partai PPP, Golkar dan PDI.

Farid : Owh geh geh, tahun 77 sudah jadi apa di PDI?

Suroso : Geh, terus tahun 82 niku jadi pengurus tingkat desa, istilahnya itu ranting. Tahun 87 itu masuk Bankorcam, bantuan koordinator tingkat kecamatan. Kemudian tahun 92 itu jadil wakil ketua pengurus anak cabang.

Farid : Wakil ketua bidang apa?

Suroso : Owh ya, bidang bidang kaderisasi dan ideologi. Yang pokok ideologi. Terus tahun 96 itu kan ada huru hara (kuda tuli) iya, pertama kan Bu Tin sedo, Pak Harto kan agak gimana gitu. Setelah itu pengurus pusat yang namanya pak Suryadi diperkirakan atau siapa itu pak Harto itu agar tetep ketuanya Pak Suryadi bisa nyambung, perpanjangan tangan gitu. Kemudian dari mbak Mega kan gak setuju, terus ada peristiwa ada kongres medan yang dipelopori oleh suryadi. Kemudian mbak mega nggak terima kemudian mengadakan munas di Surabaya jadi musyawarah nasional, jadi secara de facto itu udah menang. Secara yuridis belum. Kemudian pada pro mega, kita gak liat PDI nya tapi pro mega. Lanjut berlanjut terus kejadian 96 itu kan kantor DPP PDIP kan diduduki oleh kelompoknya Suryadi, kemudian diterobos oleh kelompoknya bu Mega. (waktu orasi itu ya) iya waktu orasi bebas itu. Pemerintah juga kan gak setuju kalo ada orasi bebas. Ya pada waktu itu sudah melakukan longmarch, longmarch itu kan lewat ini itu

Farid : Bapak ikut waktu itu?

Suroso : Nggak, tahun 7 juli saya 3 hari di rumahnya bu Mega.

Farid : Dikumpulin di situ?

Suroso : Nggak, itu patriotis, panggilan jiwa, biar nanti tu jadi presiden paling gak kan ketua partai, seperti itu. Akhirnya dalam beberapa minggu orasi-orasi terus kan di geruduk sama suryadi yang pake baju merah, kaos merah tapi kok potongannya cepak-cepak kemungkinan tu dari militer.

Farid : Ada militer?

Suroso : Kemudian terjadi pembantaian

Farid : Pak suroso tertarik dengan partai politik itu sejak kapan pak?

Suroso : Ya mulai tahun 74 75 itu sudah mulai tertarik lah, (itu umurnya) ya masih jauh masih belasan tahun.

Farid : Terus bapak memilih jadi kader PDI itu kenapa pak?

Suroso : Ya kan negara kita kan dibangun dari bapak pemimpin bangsa, bangsa itu dibangun dari berbagai perbedaan perbedaan wilayah, dari suku-suku, agama maupun adat istiadat ya pokoknya berangkat dari perbedaan, pokoknya itu yang mengokohkan negara kita, negara kita kan udah jadi negara nasional bukan negara islam, tapi islam mendapat tempat yang terbaik, karena sekarang ini jumlahnya islam itu kan memang banyak, tapi islam itu kan enggak di *copy* dari arab ke sini kan enggak, tapi di Indonesiakan. Seperti soekarno sendiri kan islam, karena soekarno dididik oleh haji Umar Said, Cokroaminoto dari Surabaya itu kan jadi ketua partai serikat islam. Dia dipimpin dia dididik mondok istilahnya di sana. Selama 6 tahun di sana kan dia nyelesaikan SMP dan SMA, tapi malemnya dia ngaji digembleng oleh itu, haji Umar Said dan Cokroaminoto. Maka setelah beliau mau menjelang proklamasi itu harus diingat bahwa Indonesia itu harus memilih proklamsinya itu hari jumat, karna hari jumat itu Saiyidul Ayyam, maka yang dipilih itu jam 10, 10 menit itu bersama-sama simpatisan waktu itu gak cuman islam tok, dipersiapkan bodyguard-bodyguard macam karate ada silat ada apa itu kan dibuat di sudut-sudut jalan. Nah pangdam-pangdam itu kan dipersiapkan. Nah alasannya itu kan sebelum jumat, jadi kita mendahulukan nasionalisme dulu, daripada ya kita islam tapi islam yang yang nasional. Mangkanya hari jumat itu diambil hari yang terbagus. Andaikata itu setelah jumat maknanya sudah berbeda, wah negara Indonesia itu jadi negara islam, nah ini orang Kristen orang katolik, bali kan tidak setuju, itu kan masih ada nilai-nilai gaib, maksudnya itu merangkum dari segala suku dari segala agama.

Farid : Tadi itu alesannya karna PDI itu dari bung karno ya?

Suroso : Iya

Farid : Dan ideologinya?

Suroso : Karna bung karno dari dia muda sampai dewasa dan tua itu selalu memperjuangkan Indonesia. Karena selama 350 tahun ini mana yang bisa mengobati obat mana yang bisa mengobati Indonesia kita itu selalu ada penyakit dari belanda ya istilahnya penjajah itu. Sudah banyak para pejuang-pejuang itu seperti sultan hassanudin makasar, seperti dari aceh itu, tengku umara, cut nyak dien, itu masih mencakup kelompok-kelompok belum mencakup satu bangsa, masih berjuang kelompok-kelompok sendiri sendiri belum kompak. Bagaimana agar bisa kompak, yaitu melalui pendidikan. Dididik. Ada tamansiswa, ada apa, ada apa. Kemudian kita pemikiran jadi cerdas.

Farid : Kalau bapak aktif jadi kader PDIP Magelang itu sejak kapan pak? Kan 78 baru tertarik pada politik jadi simpatisan. Kalau sudah jadi kader tahun berapa pak?

Suroso : Mulai 96.

Farid : Berarti sehabis kuda tuli itu ya?

Suroso : Iya

Farid : Itu menjabat sebagai?

Suroso : Waktu itu bantuan Koordinator Kecamatan.

Farid : Siapa yang mengajak Anda pak?

Suroso : Ya sebenarnya panggilan hati, tapi kan di situ ada sosok pak Singgih, yang dulu jadi bupati dua kali. Ya dulu sering ke sini kalau ada apa-apa. Ya rapat kecil kecilan di sini. Saya juga ada komunikasi sering sering ke sana. Dulu itu waktu 96-97 hampir seringkali seminggu dua kali tiga kali paling minim satu kali ke tempaynya pak singgih. Kita ada informasi apa, langkahnya bagaimana, ya kita mendiskusikan sama sama dengan pak Singgih.

Farid : Kalau sekarang?

Suroso : Kalau sekarang ya karena sudah dimakan umur ya monggo lah generasi generasi muda aja,

Farid : Terakhir menjabat itu tahun berapa pak?

Suroso : Terakhir mnjabat itu tahun 2015 awal

Farid : Jadi PAC?

Suroso : Iya,

Farid : Sebelum 2010? Kalau 2010 kan jadi PAC, kalau sebelum itu?

Suroso : Dulu itu kan waktu pro mega, wakil ketua PAC, karena waktu itu ketuanya kan tidak proaktif, maksudnya itu masih goyang, maksudnya itu masih ngambang mau ke sana mau ke sini. Kalau saya kan terang-terangan bela Mega gitu. Walaupun toh sekarang kapasitasnya bu mega seperti itu ya silahkan, itu kan anak bung karno, ada kata kata secara biologis memang putra bung karno tapi secara ideologis bukan tidak tapi ya sudah berkurang dari bung karno, karna waktu itu bung karno menghadapi penjajah, menghadapi 10 November, tantangan berat. Kalau mbak mega kan negara sudah jadi. Ya kita mengatur negara kita dengan lingkungan kita.

Farid : Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk bergabung dengan partai ini pak?

Suroso: Ya ini sebelum jadi bulat kan dari 77 itu (sampai 96 itu ya pak?) 96 itu kan udah diosak-asik sampai 97 itu kan bendera PDI yang segi lima itu kan di magelang digerilya, diturunkan, kalau siang di situ ada yang jaga ya malemnya kita gerilya kita turunkan kita copot. Malem digerilya, saya itu sampe windusari sampai kali Angkrik, Bandungan, kalau malem itu saya sama temen saya itu mesti, kalau ada bendera sikat, (bendera segi lima itu) supaya apa? Supaya di sana Suryadi tidak punya kekuatan, biar nanti yang PDI ke PPP ke mana yang penting pdi dikosongkan. 97 kan hasilnya sedikit kan, kosong kan, berarti kan Suryadi gak punya kuasa, akhirnya 99 kan pemilu dah banjir, kebanjiran. Karena PDI teraniaya, karena ya karena teraniaya itu jadi kasihan.

Farid : Dulu itu informannya yang memberitahu partai ini kepada bapak itu siapa pak?

Suroso : Tentang masuk partai itu? Ya kan saya sering baca-baca buku, waktu itu tahun 94 eh kok 94, 74, 76 itu kan saya ada di Jakarta nah itu kan ikut mayor polisi nah di situ kan ada buku buku, ada buku di bawah bendera revolusi, ya buku-buku perjuangan, saya baca itu kalau malam

Farid : Kalau informan itu, pak Singgih itu ya?

Suroso : Iya, pak singgih. Pak susilo, kemudian pak Suryo Bandungan, dia itu bapaknya mbak peni, ya pokoknya pak suryo Bandungan itu kalau dicari ada. Ada pak kuswanto.

Farid : Pak Susilo itu yang kemarin nyalon itu pak?

Suroso : Nyalon bupati to? Iya.

Farid : Tapi bukan yang dari pdi itu y?

Suroso : Iya, ya namanya politik itu tidak sama kaya ideologi, mantap dan jiwanya ke depan, tapi kalau partai atau politik itu kan dipolitisi, yang benar menjadi salah yang salah menjadi benar. Tapi kalau ideologis ya sekali ini ya ini. Seumpama sekalipun saya gepeng tapi kalau disuruh milih partai lain ya saya gak mau. Ya mau tidak mau ya tetep PDI kan gitu. Ya walaupun itu nanti saya pilihnya pusat atau provinsi. Kalau missal di magelang saya tidak begitu cocok dengan dapil saya di Mertoyudan itu saya gak milih itu, milih PDI

nya masih tapi gak milih orangnya itu. Karenakan pdi itu namanya partai ada komunikasi ada informasi itu harus silaturahmi, kalau kita tanpa itu gak bisa, yang satu. Yang kedua itu sebagai kader partai itu harus peduli. Orang sepinter apapun kalau tidak peduli ya kurang bagus. Seumpama kita punya lahan sawah, itu kan tidak peduli kita tandur kita diamkan kan hasilnya kurang baik, tapi kalau dikelilingi, dirapuk, ada rumput kita cabut itu, paling gak kan nanti hasilnya sedikit banyak harapannya bagus.

Farid : Berarti waktu 2013 itu bapak dukung pak Susilo atau pak Zainal Arifin?

Suroso : Bupati? Pak zainal (sesuai perintah partai) ya itu kan kelihatan to gambarnya itu di artos ada 6 calon, dari 6 calon itu calon kita yang berjas, satu. Yang kedua tangannya itu berdiri paling tinggi kemudian pak Rokhadi yang sebenarnya paling tinggi tangannya gini. Nah batin saya ini pak Arifin jadi karena tangannya lebih tinggi mungkin perolehannya banyak. Gitu. Yang lainnya itu ada namanya pak Anan dan pak Haiban begini, owh ini gak jadi, gambarannya seperti itu. Bahasa tubuhnya itu kelihatan.

Farid : Walaupun pak susilo kawan bapak sendiri?

Suroso : Iya kawan saya, tapi kan kelihatannya perolehannya sedikit jadi saya mesti milih yang menang. Karena ibaratnya nanti kalau milih yang menang ibaratnya kursi kalau ada senderannya itu nanti gak kejengkok to, nanti kalau ada apa apa kita bisa minta bantuan. Sebenarnya pak Susilo itu bagus, tapi kan waktu itu koalisinya denga Pan dan PPP. PAN dan PPP itu kan militannya ke tingkat agama tapi kan untuk nasionalisme masih berkurang. Mungkin kalau Nasdem, Hanura itu kan masih partai partai nasional. PPP, PKB kan kental kental dengan agama. padahal kan di Magelang ini kan kuncinya di Watucongol sama Tegalrejo, kalau di situ sudah bisa diluruskan atau dijadikan kemenangan itu kan kadang-kadang pengaruh pak Kiai itu kan luar biasa. Jadi harusnya Magelang itu harus dipimpin oleh orang yang nasional dan orang yang religious. Jadi kalau PDI ya sama PKB, PPP atau apa. Kalau PDI dengan pemerintah itu tidak begitu bagus, harusnya dengan kiai-kiai. Nah sekarang itu kan pak Zainal Arifin dari Nasional terus pak Arifinnya kan mewakili agama, entah itu PKB, PPP atau PKNU. Karna saya dengan Pak Zainal kedua masuknya suara itu yang nasional masuknya yang satu kan gitu.

Farid : Sampai saat ini, apakah bapak merasa nyaman menjadi kader PDIP?

Suroso : Saya itu jadi kader gimana ya, sekarang itu kan modelnya instan, bukan seperti dulu kalau dulu itu diberi pengetahuan diberi penjelasan atau kasarannya diberikan santapan ideologi atau penyegaran itu masih bisa diterima. Kalau sekarang itu sudah ada HP, merasa kader-kader sekarang merasa pintar. Tidak seperti dulu 90 kebawah kan belum ada HP, sekarang itu kan beda.

Farid : Tapi tetap merasa nyaman kan pak?

Suroso : Ya sebenarnya saya tetep. Tapi karena Magelang dan provinsi itu dipegang merah PDI, dipegang sama Pak Ganjar atau Pak Zaenal itu kan diusung PDIP. Tapi kan untuk kepartaian ya sekarang ya seperti itu tingkatnya itu hanya bajunya atau kulitnya kedalamnya ruhnya itu atau istilahnya jiwanya atau jeroannya itu kan belum tertanam. Jadi menurut saya lebih baik kita tidak perlu proaktif karena harus didukung itu sekarang kan umpamanya Pak Roso kesana-kemari sebetulnya ya sebenarnya ingin membesarkan partai tapi kan kendaraan Saya cuma Vega paling tidak ya nggak harus Avanza. Orang itu dilihat karena karena mobilnya karena catnya, tidak dilihat dari mesinnya kan gitu. Jadi itu yang dilihat itu darahnya jadi tidak dipandang panggilan jiwanya, Patriotisnya atau sumbangsuhnya atau kontribusinya kan kadang-kadang nggak dipandang.

Farid : Jadi Bapak merasa kurang nyaman dengan kondisi sekarang ya pak?

Suroso : Ya kalau kondisi sekarang ya kurang nyaman. Tapi apabila dari atasan ada penggodokan atau ada pengkaderan dari atasan itu ke bawah itu mungkin saya bisa. Tapi kan selama ini dari atasan tidak ada konsolidasi atau pertemuan atau silaturahmi atau kasarannya tidak rabuk kan repot. Kalau dulu masih sering pendidikan kader pratama atau madya, seperti itu yang jarang waktu itu kan memberikan ceramah gitu kan dari pusat sebenarnya kan cuman dari provinsi Tapi waktu itu kan luar biasa, dari Provinsi tapi ada Pak Singgih itu kan dari pusat Pak Ginting dari dari penasehat Keraton itu pak pak Damar Jati kemudian ada lagi pak Drs ke Suwarno dari Solo. Dan itu proker kerjanya pusat, yang ada di Magelang sama Kota selama tiga hari.

Farid : Latar belakang pendidikan bapak yang dari SLTP dan agama itu mempengaruhi Anda dalam memilih partai tidak?

Suroso : Ya sebenarnya ada tapi kan dari karakter orang itu kan. Tapi sebenarnya aslinya saya itu ya berasal dari Bendera Biru tapi kan Mbah-mbah saya kan bukan keturunan ustad bukan keturunan Kiai. Mbah-mbah saya kan dari orang nasional. Makanya saya kembali walaupun saya sekolah di agama tapi setelah dewasa kembali ke nasional. Sebelumnya kan saya udah dekat sama Mega itu kan seharusnya di kampung-kampung itu ngajarin Alif Ba Ta tapi saya gak ngurusin karena waktu itu kalau ngajarin Alif bak tak itu ya hafalan itu kan boleh dikatakan banyak tapi kalau menanamkan ideologi, menanamkan nasionalisme, mengapa Indonesia waktu itu mengambil hari Jum'at, Kenapa waktu itu Bung Karno memakai pakaian putih tidak hitam tidak hijau tidak merah tidak kuning kalau kuning itu ya pasti Golkar kalau hijau itu ya PPP waktu itu kan bisa memandang agar rakyat itu tidak cemburu. Mungkin waktu itu kalau Bung Karno proklamasi pakai jas merah ya bisa diaku sama PNI, sama PDI. Iya kan waktu itu pakai pakaian putih jadi dia bisa menetralkan rakyat. Antara pandangan dan pembicaraan itu bisa menjadi magnet pada seorang pemimpin yang betul-betul dicintai oleh rakyat kira-kira begitu.

Farid : Sampai saat ini ada partai lain nggak Pak yang diperkenalkan kepada Bapak?

Suroso : Belum kayaknya belum kayaknya kalau saya itu sudah umpamanya kalau kayu itu Ketuanya itu sudah tidak nyampe gitu. Mungkin Pak Roso itu kalo diajakin partai itu cuman yah yah yah yah tapi kan pelaksanaannya nggak. Karena saya sudah tertanam sangat kuat.

Farid : Berarti belum pernah ada yang ngajak?

Suroso : Belum. ya ada sebenarnya. kan waktu itu kan saya ke sana (DPRD kab Magelang) sebelum ketemu jenengan itu, itu kan ketemu Pak Harno Gerindra itu kan duluan mantan camat camat sini Mertoyudan. Saya waktu kesana ke DPRD, pak Harno bilang Pak Roso, Pak Singgih ra ono neng kene. Saya jawab ya nggoleki sampean iku Pak Harno. Ini Pak Roso *ngrewangi* aku *ga gelem, malah di apususi pak singgih manut*. Gimana ya Pak Yo jenengan dulu orang Golkar Kok bisa sekarang di Gerindra kan Ya itu karena bukan karena politis itu ya karena ada kesempatan ya mungkin karena itu mohon maaf bukan ideologis mungkin karena kebutuhan kebutuhan ini kebutuhan ini kan gitu kan Pak. Terus ketawa Dia. Dia kan butuh kedudukan butuh makan, butuh kendaraan, jadinya kan ke Gerindra. Kalau di Golkar kan udah nggak laku.

Farid : Berarti bapak sudah terkenal banget sebagai teman dekat Pak Singgih?

Suroso : Maksudnya teman dekat yang suka membantu terus teman-teman yang tidak condong kepada Pak Singgih kan saya tahu di Kabupaten Magelang. Termasuk Pak Harno kan juga tidak condong kepada Pak Singgih.

Farid : Menurut bapak itu PDIP itu partai yang seperti apa?

Suroso : PDIP itu kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kan sebenarnya partai itu harus mengindonesiakan jangan sampai kita Partai Golkar itu kan nggak jelas. Golkar itu Golkar mana kan gitu. Kalau PDI itu kan jelas Indonesia lagi dengan perjuangan maksud tujuan awal. Tapi kalau sekarang itu kadang-kadang yang sudah diperjuangkan yang sudah menjadi dewan kadang-kadang tidak nengok kawan. Kalau saya menginginkan partai itu harus mengindonesiakan. Seumpama PPP, Partai Persatuan Pembangunan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan bangun mana kan gitu harusnya kan gitu karena membentuk Indonesia itu luar biasa dari segala suku dari segala macam kepercayaan jangan sampai nama Indonesia atau dasarnya yang sudah final negara yang sudah final nasional itu kita rubah karena Indonesia ini kan menurut saya berdiri di atas puing-puing nya Kerajaan Sriwijaya maupun kita berdiri di atas kerajaan Majapahit jadi ini Majapahit yang kedua. Jadi ini bukan makanya Indonesia Raya bukan Indonesia kecil Kalau kita bandingkan dengan Singapura itu ekonomi yang bagus itu kan tidak tergiur itu kan negara kecil dan di sana itu kan ada PM, PM itu kan kepanjangan dari Inggris Perdana Menteri. Kalau Indonesia kan sudah presiden. India itu juga kayak gitu Perdana Menteri. Indonesia kan nggak cuman kan Indonesia yang sekarang itu kan kemandiriannya kan kurang kemandirian Kurang itu contohnya dulu kan mandiri berdikari. Tapi Indonesia kan sekarang ini belum bisa mandiri, berdikari. Suatu contoh saja dulu Bung Karno sudah membangun Pabrik besi dan baja itu di Cilegon ternyata sekarang juga tidak berlanjut. Waktu itu kan rencananya kan untuk senjata Angkatan Perang paling tidak untuk mencukupi kita tidak impor. Seumpamanya paku dari dalam negeri jangan paku saja impor kan gitu. Termasuk sekarang kedelai impor, beras juga import. Karena kekeliruan waktu kita kecil itu dengan pak guru diajari kalau namanya sir-sir pong dele kopong, sekarang kedelainya kopong jadi kedelai import. Jadi bukan untuk membentuk kader untuk karakter bukan tapi itu hanya hafal-hafalan kadang-kadang nyanyian itu bisa terjadi kenyataan. Seumpama Nike Ardila Aku ingin pulang kebablasan pulangnya. Makanya simbol maupun apa itu sebetulnya itu dipegang dengan baik.

Farid : Berarti Menurut bapak itu PDIP itu partai nasionalis?

Suroso : ya, partai nasionalis yang walaupun bukan PDI yang penting partai-partai nasional. Partai Nasional harus merasa bahwa guru-guru Partai Nasional itu adalah Bung Karno. Baik itu Nasdem maupun Hanura maupun apa itu ketemunya itu kan para pemimpin bangsa. Tapi kalau PKB maupun PPP karena kadang arahnya itu pimpinannya bapaknya itu hari ini itu siapa Hasyim Ashari itu kan kalau Muhammadiyah ya Ahmad Dahlan yaitu jadi panutan. Kalau PDI ya Bung Karno. Bung Karno itu kan setara dengan Mao Tse Tung waktu itu setara dengan John F Kennedy, Amerika waktu itu maupun presiden Kuba namanya Castro, maupun Abdul Nashir dari Mesir maupun Joseph kosteto setara dengan itu.

Farid : ini kan Partai Demokrasi perjuangan, apakah sudah melambangkan demokrasi?

Suroso : Sekarang ini kalau demokrasi nya sudah tapi kan tinggal apa ya yaitu kalau kemarin ada demo-demo itu ya sudah itu namanya demokrasi ada demo itu ya wajar. Tapi kan nanti kan kita diwaspadai nanti itu ada arah-arah lain dibelokkan kemana kan gitu. Kalau sekarang itu baik, Kalau dulu kan jamannya Pak Harto ada demo kan pasti di bentengi dengan tank dan dengan meriam, tapi kan kalau sekarang bebas sekarang sampai masuk ke Istana Merdeka pun boleh. Jadi waktu itu kan ditanggapi sama Pak Jusuf Kalla, maunya mahasiswa maunya ormas Islam harus ketemu langsung sama bapak Jokowi. Apa gunanya ada kepanjangan tangan ada menteri ada apa kan gitu. biar kalau ada apa-apa ada di tangkis dulu masak ditanggapi sendiri jadi tidak memanusikan kan gitu Kenapa Pak Jokowi gitu gitu gitu Ini kan urusan urusan negara kan urusan negara sama di kamar kan

beda harus dibedakan kamu kan mau ketemu pak Jokowi mau minta bibit apa burung atau bibit hewan apa atau bibit tanaman apa bisa tapi kan kelihatan orangnya banyak ribuan kok mau masuk semua nanti kalau acak-acakan gimana itu. kan gak ada etika ya kita bebas tapi ada batas-batasnya.

Farid : Kalau di tingkat Partai, Demokrasi nya sudah dianut dengan baik belum?

Suroso : Ya belum masalahnya kadang-kadang ada Ad/ART kadang-kadang ditabrak sendiri, ada aturannya partai kadang-kadang dirusak sendiri sama pengurus-pengurus itu. Jadi tidak dihayati kadang-kadang yang di kader kan jadi ketua DPC nanti jadi Bupati nanti jadikan ada alur ya tapikan kadang-kadang tidak diperhatikan alurnya.

Farid : Jadi kesimpulannya PDI itu partai yang seperti apa Pak?

Suroso : PDI itu ya Menurut saya ya partai untuk saat-saat sekarang ini ya karena kita kan sudah terbukti kan terbukti dah kemenangan sekarang itu menjadi Garda depan untuk bangsa Indonesia. Artinya kerja nyata itu memang ada sedikit kekurangan biasa. Tapi kan tokoh-tokoh yang ada di atas itu kan sudah Tjahjo Kumolo Mendagri selain dari partai sudah ada Mbak Susi itu kan suatu ketegasan-ketegasan. Dulu waktu lautan dan Perikanan itu tidak setegas mbak susi jadi ada keberanian karena orang cerdas sama orang pintar itu kan harus dibarengi dengan keberanian. Waktu proklamasi kalau Bung Karno bukan orang pemberani ya tidak berani. Pada waktu itu 45 itu sampai disitu saling cemooh kamu kan gak berani berarti tidak jantan sekarang kapan kamu akan berani di tantang sama pemuda-pemuda waktu itu kan Pemuda istilahnya itu pemuda angkringan atau Pemuda Kedai Kopi. Pemuda kedai kopi kan pemuda pemuda yang apabila lapar atau haus kan minum atau makan tapi kan Setelah itu nggak bekerja, lain dengan pemuda yang dulu. yang ideologis kata-kata itu sangat penting beri aku 10 pemuda tapi bukan pemuda yang mlenyo mlenyo tapi yang revolusioner Saya sanggup gemparkan dunia itu juga dibuktikan tahun 55 ada konferensi asia-afrika ternyata masih ada Irian Barat yang masih perlu kita kembalikan kalau tidak dengan Konferensi asia-afrika mengundang tokoh-tokoh negarawan dan waktu itu kita tidak berdekatan dengan Uni Soviet Amerika tidak mau melepaskan separuh Irian itu dan itu timingnya sangat tepat 63 ketika Bung Karno, jadi sisa umur saya akan saya abdikan untuk negara. coba setelah 65 mengejar Irian tidak dapat orang sekarang Timor Timur tidak didapat itu kan sudah menjadi ranah dunia internasional Irian itu bukan hanya diperjuangkan oleh Indonesia doang termasuk alat-alat perang dari Cina Rusia masuk Indonesia Amerika mikir ulang waktu itu kan ditarungkan antara Amerika dan Rusia waktu itu kan untuk kekuatan Kalau waktu itu tidak menggunakan kesempatan kesempatan ya waktu itu tidak didapat

Farid : Bapak bisa cerita sejarah partai PDIP dan di Kabupaten Magelang ini pak?

Suroso : Kalau di Kabupaten Magelang itu Ya tahunya tahun 96 itu ketika ketuanya Pak Singgih itu kalau yang sebelumnya itu ya tahu namanya yang ketuanya itu Pak sunawar Sukowati waktu itu kan gak jelas jadi orang nya cuman kumpul-kumpul kalau sudah kumpul di lapangan caranya mudah kita akan memulai apa memulai badan banteng kita akan nyoblos lalu ya kehujanan tidak padahal kehujanan Itu kan bahasa bohong-bohong bahasanya TK kamu akan nyoblos apa subuh tanggal berapa Tapi kalau di ruangan diberi gembungan itu kan kesannya ya orang awam biasa kumpul kumpul di situ partai itu kan dingin kata-kata

Farid : kemudian setelah itu 96 ada sejarah sejarah atau peristiwa apa? bapak di Kabupaten Magelang dan bapak sendiri jadi apa jadi apa?

Suroso : ya 96 itu kan saya jadi bantuan koordinator Kecamatan Apa itu kan ada kumpulan rapat besar di Kabupaten Magelang di candimulyo itu dari kelompoknya Suryadi saya

kesana itu janjikan sama yang namanya Pak Bahri waktu itu yang candimulyo tidak ada yang berani dari Mertoyudan tak trobos mana sih orang ya terus saya berangkat ke sana sampai 4.30 di sana ketemu sama Pak Bahri saya diboncengi sama Suryadi nanti saya ketemu kan di rumahnya pak Bahri yang orang PDI itu kan bilang bahwasanya itu tetap akan mengadakan rapat Maksudnya saya hentikan gak usah ini kan sekarang itu sudah kemajuan zaman PDI itu sekarang itu mbak Mega bukan Suryadi sebentar lagi Waktu demi waktu pasti habis Pak Suryadi dan Bu Mega itu sama-sama cari suara nanti produk hanya akan besar lah kamu itu tidak maksud, waktu itu jadi perdebatan intinya sana tetap ada kumpul tingkat kabupaten Nah akhirnya saya informasikan Pak Susilo dan Pak Singgih waktu itu kan ketemuan di Dampit prajenan ke barat Timur Pak saya dari candimulyo ketemu pak Bari tetep mau ada pertemuan sekabupaten dari kelompok Suryadi ah nanti malam dan besok harus ada gerilya kumpulkan kelompok kita atau kita bentengi atau kalau bisa kita bubarkan udah sana kan hari Senin di tempur dibubarkan dibubarkan sama kelompoknya Mega waktu itu yang cewek cewek pakai kaos PDI dilucuti pakai BH doang lari-lari kita bersorak bersorak namanya partai kan berhubungan waktu itu di sini kan yang lain-lain tidaklah kaya saya ibadah ini itu namanya Sholatkan di masjid itu. Tapi kalau saya kadang-kadang daripada melakukan yang sunat-sunat lebih baik saya membantu bekerja, semoga saya bermanfaat seperti itu. Jadi saya berkecimpung tidak hanya di PDI, jadi di kampung saya jadi takmir masjid tahun 90-an itu saya jadi bendahara. Ya alhamdulillah bisa jadi pada waktu itu tokoh masyarakat rebut Saya sambung dengan karang taruna ibu-ibu orang tua yasinan itu saya selalu sambung jadinya ketemu Apa permasalahannya pada waktu itu tokoh-tokoh agama ngotot-ngototan. Nah itu makanya saya milih yang bermanfaat. Kemudian yang sosial lagi ini rumah Ini kan gak layak tapi yang depan sudah saya bangun waktu itu dibantu 4 juta bukan lewat partai tapi lewat badan keswadayaan masyarakat alias P2KP saya kan juga terpilih tahun 2005 sebagai koordinator tingkat desa. Termasuk rumah Ini kan sudah dibangun kemudian di sana ada rumah yang sudah total rusaknya ditotal ada 5,5 Juta. Kemudian mancing masyarakat supaya punya kepedulian jadi kasihan kalau rumah tidak punya dana bisa dicarikan bukan malah dijelek-jelekkan, tidak.

Farid : suatu saat ada kader PDIP yang minta tolong kepada bapak, apakah bapak masih mau?

Suroso : Ya saya lihat-lihat nanti untuk Kabupaten provinsi atau presiden kalau tingkat kabupaten menurut dapil sini nanti lihat-lihat siapa walaupun partai bagus tapi kan harus diimbangi dengan orangnya pertama yang tulus yang kedua itu orangnya bisa jadi panutan.

Farid : Jadi Bapak Di PDI di PAC berapa periode?

Suroso : dua periode. Terakhir tahun 2015 apa 2013. Pokoknya 2001 saya terpilih sebagai ketua kemudian pilihan lagi 2007. Dari 2007 terpilih ketuanya tapi ketuanya terus berhalangan sakit saya wakilnya. Saya menjalankan lagi sampai 2012 kayaknya. Setelah itu saya masih di harapkan sama Pak Singgih. "Pak Roso mau tidak mau harga mati harus sekretaris." Setelah itu paska dua periode masih jadi sekretaris mendampingi Mbak Tri, itukan magelang ada dua kelompok ada yang dari Pak Singgih tapi ada dari Mas Sarian. Sekarang kan yang jalan dari pak Sarian ketua DPRD sekarang kan mbak Tri juga sudah tidak dipakai, jadi lihat nanti generasi ke depan yang muda-muda seperti apa.

Farid : Yang menjadi nilai lebih atau atau nilai minusnya dari partai ini itu apa Pak?

Suroso : Ya dari kelebihanannya kita kan punya temen temen yang proaktif ideologis yang cinta kepada tanah air dan ada kesempatan peluang memimpin Desa desa maupun Kecamatan maupun kabupaten. Namun yang menjadi kerugian namanya kita sebagai partai kita itu memberi tenaga pikiran ataupun ide itu diberikan untuk kebesaran partai pertama

yang kedua kita proaktif kepada lingkungan masyarakat itu yang menjadi panggilan jiwa. Kata-kata lain menjadi patriotis jadi bukan karena diperintah oleh Allah seperti nabi kalau kita kan orang biasa.

Farid : Pak kalau negatif nya ada nggak pak?

Suroso : namanya kepartaian itu kan banyak ruginya karena kita waktu sebenarnya untuk keluarga kita malam ke sana dan itu beresiko resiko, satu. Yang kedua kita juga capek ya capek bensin ya ya capek duitnya.

Farid : kalau nilai negatif partai ini secara keseluruhan?

Suroso : ya sekarang itu negatifnya saya nggak bisa bilang, itu keuntungannya itu dulu kan sebenarnya gini yang namanya Ibu Tin sudah meninggal Pak Harto nanti turun Pak suryadi turun. Nah itu kan ada peraturan baru negara itu reformasi Kalau Pak Harto tidak distop itu kan terus-terusan kayak gitu terus tidak ada kemajuan ternyata sekarang ada BPJS ternyata dari pemerintah itu kalau ada yang miskin dibantu sekolahan juga sekarang gratis itu kan dari reformasi sudah terwujud. Coba kalau dulu kan kayaknya saya belum dengar kalau ada orang sakit dibantu kemudian ada raskin sekarang. Kan udah ada ya manfaatnya bukan untuk saya manfaat ya untuk keseluruhan termasuk hukum sekarang itukan jangan ada pungli jangan memainkan hokum. Hukum kan ibaratnya tangan Tuhan jadi jangan di bengkok-bengkok kan Jangan sampai di suap, seharusnya lurus dan tajam sebagai pelajar mahasiswa ya harusnya taat hukum menjadi contoh begini ya begini bener yang bener jangan disuap menjadi tidak bener itu kan secara bahasa selingkuh.

Farid : jadi nilai logis yaitu nilai lebihnya itu bisa menciptakan patriotis?

Suroso : Di samping itu kan sekarang kan pimpinan-pimpinan sekarang tidak seperti dulu pimpinan sekarang sudah bisa saya acungi jempol seperti Pak Ganjar sama Mas sigit, Pak Zainal. Kita kan dari partai kecil partai yang teraniaya sekarang menjadi partai berkuasa kan luar biasa itu kan karena adanya seperti saya. Walaupun saya ini sebagai yang kecil-kecilkan dimulai dari itu kita ikut menanam ikut membentuk syukur-syukur ikut mewarnai.

Farid : Berarti nilai negatif nya gak ada?

Suroso : nilai negatifnya kalau saya mengeluh pasti ya ada, saya itu selama dipartai saya kerja Armada dari partai kan untuk saya kan manfaatnya besar jadi umpama ada bantuan sosial 3 juta empat juta itu kan rekan rekan saya 10 kelompok terus Menjadi 30 milik saya yang lainnya minta di sana tidak Kalau yang lainnya kadang 345 juta, partai itu bukan saya miliki partai itu yang membangun bersama supaya memberdayakan masyarakat umpama nggak punya kambing misalnya sekolahnya kurang ada kambing kan bisa untuk satu bulan dua bulan empat bulan Daripada guru atau pegawai negeri orang yang ekonomi mapan ekonomi mapan itu kan sudah Sejahtera saya sudah cukup yang lain-lainnya itu ya nomor 90 entah adiknya entah apa Saya pelajari itu yang sudah mapan itu kalau disambati sama adiknya itu tidak mau adik adik saya itu yang nomor 3 itu namanya Tri Haryani bagaimana saya berdayakan jadi suami orang yang tidak punya. Kalau punya itu jadi pegawai negeri dia itu di mantu oleh orang mapan adik saya juga ada yang kerja di armada ada informasi dari Pak Singgih, namanya kadus-kadus di luar daerah Oh ya pak Akhirnya saya kumpulkan masyarakat karena tidak ada kepala dusun Bagaimana atau dengan pilihan atau dengan Tunjukkan akhirnya kan orang-orang sudah adiknya saja sampai sekarang padahal adik saya SMP saja tidak tamat Gimana caranya bisa berpolitik ya ibaratnya aturannya duduk saja tidak bisa, karena dulu tidak memenuhi syarat karena waktu itu tidak dipersoalkan jadi kita kalau berideologi kita itu jadi bermanfaat bagi keluarga bagi lingkungan masyarakat dan negara kalau orang orangnya tau aku ya alhamdulillah Karena Bung Karno sudah mengatakan saya bagaikan sebatang kayu yang saya berikan kepada api

unggun yang sedang berkobar-kobar itu kemudian saya pun dimakan oleh api itu mungkin kira-kira begini saya waktu itu membesarkan gini-gini nyatanya Nasution hubungin aku ucapan akhirnya akan dimakan oleh api unggun akhirnya dilengsernya karena ulah Soeharto. makanya sebagai orang partai itu partai ibarat lilin makin lama makin habis, tidak makin berkobar. berjuang itu rela berkorban, kalau tidak dipenjara seperti itu tantangannya berat. Seperti Indra gantry Perdana Menteri mempertahankan negaranya tembak 7 Kali seperti anaknya juga, jadi orang yang beritikad bagus dan beretika jahat itu mau pakai kerudung partai masih banyak yang jahat ibaratnya dari 100 yang 5 itu bagus yang 90 tidak jelas. Seperti Jamal Abdul Nasir itu meninggalnya ditembak seperti Anwar Sadat seperti bapaknya Abu Nasir Buto, Zulfikar Ali Buto juga digantung. Resikonya tinggi kan kita mengulur dari nasional seperti apa dari international Seperti apa tapi ya sudah kembali kepada watak, kita perbaiki diri memperbaiki bangsa dan negara memang banyak kendalanya banyak tantangannya. mau menegakkan kebenaran itu di kanan kiri banyak gangguan.

Farid : Sekarang tantangan di dalam partai itu seperti apa Pak?

Suroso : Kalau sekarang itu kalau kita cuma ideologi orang-orang itu tidak memperhatikan sekarang itu pake duit. Orang sekarang ini ibarat mancing itu harus dikasih makan jaring kalau tidak diberi makan tidak dipancing tidak mendekat ibarat buaya kalau tidak dikasih makan ayam atau marmot bakal tenggelam lagi. itu yang dimaksud itu ya harus kontinyu. Jadi kader partai ya harus siap setiap saat siap membantu.

Farid : Itu termasuk nilai minus jadi partai ini?

Suroso : Kalau sekarang itu hal ini kita lanjut-lanjutkan (tidak mau bekerja kalau tidak ada uang), mungkin di tahun 2045 atau 2050 kita bisa tersalip PKS atau tersalip PAN. Karena disana itu dikawal dengan jihad tapi kalau kita patriotis. Kadang partai PDIP kayak gitu kadang-kadang berdekatan dengan minum dengan ini kan repot. Kalau namanya PKS itu musholah-mushola ditanam kemudian berkembang-berkembang. Sekarang saja demonya kaya gitu. Harusnya harusnya tetap islam yang nasionalis. Karena terjadi di dunia itu negara-negara islam yang kuat itu hampir tidak ada. Seperti Timur Tengah tercabik-cabik kesana kemari nggak begitu tentram. Di Indonesia walaupun bermacam-macam tapi termasuk tentram. Artinya disyukuri sekarang ini. Jangan terus dijiplak dari Arab ke sini. Ya kalau kita ya Sholat itu sudah aturan agama. Nanti seumpama ada negara dan dunia makin tua, kejadian-kejadian itu kan pernah ada pengalaman. Seperti mohon maaf ada DI/TII itu juga menyerang pemerintahan. Kan memang itu menjadi persaingan gak masalah, memang orang itu ada yang pro ada yang kontra. Tapi kalau bisa kembali kepada nasionalis.

Farid : Pernah dengar nggak Pak kadernya itu preman?

Suroso : kemarin-kemarin, sekarang udah jarang. Namanya untuk memenangkan kan gak harus orang yang bagus-bagus. Preman juga satu suara, jendral satu suara, pak lurah juga satu suara. yang penting satu deretan lokomotif itu kan bergerbong gerbongnya ada copetnya, ya ada ini ada ini ada pedagang, ya ada petani, yang penting untuk memenangkan. Kalau kita pilih yang santri yang ini itu ya tidak ketemu tidak jadi menang. Yang penting untuk memenangkan dulu. Di awal itu jangan di kotak-kotak, semua dirangkum dulu nanti ditata yang penting untuk memenangkan.

Farid : Pembeda partai ini dengan partai yang lain itu apa?

Suroso : Partai itu ya di Indonesia itu partai itu partai ketika negara-negara lain mendirikan partai Indonesia juga sebenarnya orang yang berpartai itu tidak banyak cuman sedikit yang lain itu cuma ikut-ikutan yang betul betul dalam jiwa itu sulit tercapai biasanya nggak

membaca ini dan itu Kita kan harus punya sopan dan santun saya dengan Pak Singgih juga berbicara dengan sopan santun.

Farid : Jadi apa pembedanya pak?

Suroso : Ya sebetulnya sama-sama kita kan di negara demokrasi. Siapa memihak tinggal dalam membesarkan partai dalam perhitungan itu terlihat Siapa yang menang

Farid : Jadi nggak ada bedanya partai PDIP dengan yang lain?

Suroso : Mungkin karena nasionalisme itu pembedanya

farid : Ideologis ya?

Suroso : Harusnya nasional kenal dengan ideologi seharusnya tapi kadang-kadang orang itu kan orang ber macam-macam ada yang di bilangin kemarin sekarang berubah jadi orangnya itu ada yang cerdas ada yang biasa tapi silahkan lah yang penting menang

Farid : Jadi menurut bapak partai sekarang sama saja sebagai kendaraan politisi?

Suroso : Ya untuk kendaraan demokrasi. Yang kedua untuk mencapai orang-orang tersebut yang Legislatif itu mencari kerja. Tapi banyak pak singgih nganggur sekarang mbak tri juga nganggur Akhirnya bisa bekerja dan bayaran isinya Ya itu kan namanya partai itu kan merebut kekuasaan kalau sekarang jadi kader kan masih ada di bawah Karena untuk mencapai ke sana kan butuh biaya bisa saya sendiri kalau menagih ini ini saya gak bisa

Farid : Mungkin pembedanya itu secara ideologis siapa ya pak secara kepartaian berarti gak ada bedanya ya?

Suroso : Enggak kan tujuannya sama, ada Gerindra ada Nasdem di istana itu kan rapat di sana berbarengan rapat disana , mungkin kalau bukan ketua DPRD gajinya sama yang penting untuk mengantarkan menjadi bupati tidak mudah menjadi gubernur itu kan tidak mudah Kalau dulu kan dari Pak Harto dari tentara-tentara itu kan dari kepala desa dari kaum itu kan tentara Kalau sekarang kan orang-orang biasa ber kesempatan farid dulu itu pengalaman Bapak terkait dengan partai itu apa Pak misal misal dari simpatisan menjadi kader partai dan sebagainya itu seperti apa suroso ya parte itu kan kadang-kadang delodok atau agak nakal Umpama usaha di armada karena awalnya dari kader kadang kan bentak-bentak kan dengan Jawa Timuran orang Jawa Timur itu kan bengkel di armada itu kertasnya itu gertak (bahasa Jawa Timur) Umpama di kampung yang cerdas itu banyak tapi yang berani itu kan sedikit.

Farid : Berarti partai membuat Anda berani ya?

Suroso : Ya berani menegakkan yang benar pro kebenaran.

Farid : Kalau pengalaman hidup pak misal tadi ranting itu kesulitan atau apa atau ada tradisi apa sampai cabang sampai jadi anggota Partai

Suroso : Istilahnya kan kita banyak menyelam habis Isya itu kan saya sering silaturahmi ke ranting-ranting saya cari tokohnya siapa sekarang kan Hampir habis ketika PAC nya saya tanya siapa siapa yang bakal menggantikan kemudian tanggapannya Seperti apa Kan saya bisa menyaring sebetulnya nanti to lawan saya itu siapa Kan gitu kalau saya terus tanya semua dari 13 itu 13 kali 3 lho paling tidak 39 orang ketua sekretaris bendahara kita harus paham paham benar, misal Sumberejo Banjarnegara ini ni ni nanti dihubungkan kumpulkan Umpama 20 saya sudah menang atau perwakilan 1 Desa itu 1 ketua kan 13 kan 13 saya 7 saja sudah menang tidak usah dihabiskan saya selami ternyata Emang iya terbukti, sekarang kan beda Kalau sekarang kan dibilangin gini-gini kini nilainya beda

Farid : Pengalaman bapak itu tadi terkait orang menjadi ketua ya PAC itu terpilih waktu tahun berapa

Suroso : 2001 terus 2007 juga saya terima ya udah gak papa biar gantian ternyata 1 tahun nggak kuat kalau jadi orang partai itu harus kuat misal dibilangin kaki 4 Kalau roda empat nggak masalah kalau kaki empat keluar ya harus sabar itu biasanya tapi kadang orang yang nunjuk nunjuk itu nggak becus, membentuk kita agar tahan banting agar sabar agar semua itu ditingkatkan ketaqwaan ya

Farid : Bukanya kalau di partai itu ada aturan kalau Ketua PAC itu ada tiket untuk mencalonkan

Suroso : Ada Saya pernah tahun 99

Farid : 99 udah ada pemilihan legislatif

Suroso : Yah udah ada kemudian 2004 saya sudah mulai dan luhur mengurus ngurus tapi akhirnya daripada saya hadiah mesin lemes dari izin mending saya jadi orang yang biasa saja tidak usah sampai ke sana yang kesana kan bukan wilayah saya

Farid : Berubah jadi seperti itu ya 2009?

Suroso : Itu 2009 itu sebetulnya ada tapi tidak untung-untung, dalam satu dapil itukan yang jalan itu itu itu partai ga harus ngotot tapi kan lihat di lapangan. Kalau sana persyaratannya itu komplit amunisinya serepnya banyak saya kalau saya cuman asal maju saja tidak hitung-hitung malah malu.

Farid : Proses politik apa saja yang sudah bapak alami?

Suroso : Ya tadi tau saya kan karena berpolitik yang kedua kepala desa 2014 saya itu meramal selisih paling 14. Kalau kamu tidak membutuhkan bantuan dari saya kamu kalah. Kok bisa? RT ku itu pasti ke Pak Heru kalau ini tidak dipenuhi kamu kalah satu aja kalah daripada menyesal sini gimana caranya diberi umpan akhirnya menang 14, suara sudah saya tampung ternyata RT 1 nunggu komando saya.

Farid : Kalau proses politik di dalam internal partai itu apa Pak?

Suroso : Ya aspirasi-aspirasi itu Seumpama aspirasi daerah mana paling tidak kalau diberi bebek kambing atau apa kan besok yang saya bantu paling tidak kalau diberi arahan kan manut masak saya biarkan malah nanti memilih partai lain paling tidak masih milih PDI syukur-syukur milih pilihan diri sendiri masa milih Mungkid milih ya Mertoyudan Kenari 3 juta dan kalau lari kan kebangetan kalau sekarang kayaknya dipangkas pangkas aturan dipersulit. Jaman Jokowi mendagrinya Pak Kumolo itu agak sulit. Kemarin itu kan abal-abal kelompok ini kelompok ini kalo udah turun yang dapat ya ketuanya sekretaris bendahara dan anggota tidak tahu itu kan gak PDIP PKB kan sama saja atau Golkar hampir sama ternyata yang dapat semua orang satu kalau ditanyain ini nih nggak tahu. Uangnya buat belanja banyak seperti itu ada yang perbengkelan apa itu buat tambal ban itu kadang-kadang dipinjamkan ke tambal ban nanti dikembalikan lagi orang itu macam-macam alasannya. Ini punya pemerintah tapi kalau di masjid itu atau untuk teratak itu tidak ada kalau saya untuk masjid kayak Mertoyudan atau mana tetap 4 juta paling dipotong apa gitu tapi di kasih kepada takmir. Tapi kalo kaya untuk drainase segala macam itu kalau misal butuh 51 Sap backlink yang digunakan 30-40 jadi harus diawasi. Tapi harusnya tertanam dalam diri kalau kita itu diawasi kalau saya dari reformasi itu sudah berpikir bahwa kita harus, karena apapun pekerjaan baik kita tidur atau apapun itu kan diawasi seperti saya dan kamu itu kan diperhatikan

Farid : Ada realitas politik apa yang menurut bapak itu menarik saat menjadi kader atau simpatisan?

Suroso : Kalau di Mertoyudan itu sudah memilih yang namanya Sumarji setelah saya tapi karena unggah-ungguh nya kan orang Ngawi jadi jadi kepelinter-pelintir. Gimana caranya sudah mulai menyebar uang jadi ketua PAC. Akhirnya saya tahu sekarang kamu jalan ke Sono Rojo ada amplop disitu dia tidak tahu kalau saya ada waktu itu. 40 atau berapa gitu itu yang saya persiapkan ingin jadi ketua PAC ternyata sana-sini nyebar duit. Ini bisa ketangkap basah itu saya tangkap akhirnya yang memberi uang itu depending ini belum kondusif nanti dalam tempo 3 bulan 4 bulan pengarahannya untuk kader Mertoyudan untuk mengulur-ulur supaya dia tidak jadi orang nomor satu. Kan dilihat di lingkungannya seperti apa kalau misal di lingkungannya mencontohkan minum kan disana diteliti.

Farid : Berarti PAC sendiri banyak money politik ya pak?

Suroso : Ya ada, itu buat jabatan kepengurusan lo bukan buat DPR.

Farid : Jaman dulu masih voting ya pak bukan kolektif kolegal

Suroso : Nggak, Kan masih voting-voting gitu. Akhirnya saya laporkan Pak Singgih dengan alasan ini itu dan meminta Mertoyudan yang terakhir saja pemilihannya. Akhirnya dia tidak menjadi kepengurusan. Akhirnya saya sebagai wakil terus itu Pak Abbas sebagai ketua. nah ketua karena banyak serangan, banyak konflik ada tamu yang marahin ada tamu kan macam-macam akhirnya gak kuat terus sakit, sampai sekarang nggak ada (meninggal). Karena dia kan jadi anggota partai dari mantan supir. Supir itu kan tahunya ayo naikkan, bongkar muat nanti jalan nanti di warung minum makan nanti berarti lagi tapi kan kalau partai kan kadang kita berhadapan dengan kepala desa seperti ini kita dengan masyarakat begini. Jadikan kemaren Ini masalahnya belum terselesaikan, ya sambil tidur sambil jalan Siapa tau besok bisa ditemukan jalan tidak harus sekarang kalau bisa disambi tidur ya sambil tidur kalau tidak ya harus segera. Ya gimana caranya jawaban itu tidak harus sekarang tapi yang penting ada kepastian itu ibaratnya kalau saya di armada kan sudah ketua kelompok saya membawahi 17 orang jadi kalau bikin lantai begini press nya begini potongnya begini Mobilnya di bilang sana Ini saya Gambarkan begini begini begini Itu kan. Pak abas belum pernah tahu ya kan bongkar muat batu pasir istilahnya sopir belum sopir trailer baru supir colt T menghadapi Medan menghadapi masalah itu kan belum lincih. Ibarat saya kan ibarat supir kan sudah lulus supir tronton atau trailer bukan supir colt t lagi. Membutuhkan proses yang panjang sebetulnya.

Farid : Jalan aja udah pakai money politik ya berarti tahun 2001 apa ya money politik?

Suroso : Hampir 2007.

Farid : Kalau yang meninggal ini?

Suroso : Itukan yang terpilih tahun 2007 itu Tapi kan dia jadi ketua selain yang memberi uang, yang Abbas jadi ketua nggak pake apa-apa?

Farid : Jadi bukan bapak yang mencalonkan ya?

Suroso : Ya saya dicalonkan tapi kan waktu itu saya dengan pak Abbas itu. Pak Supardi yang gini gini (bagi-bagi uang) itu sudah keluar dari Arena. Berarti tinggal dua calon saya dengan Abbas. Pak Abbas sudah nggak kuat satu tahun.

Farid : Dulu Berapa orang Pak kepengurusan tahun 2007?

Suroso : 11 atau berapa yang lantik itu kan dari DPD dari Semarang.

Farid : Dilantiknya dimana?

Suroso : Di Prumpung Muntilan DPC, DPD kan waktu itu masih pak Wardio, Setelah itu Pak Murdoko dia sudah melantik tahun 2007 tapi dia ada kasus sekarang masuk penjara.

Farid : Sejauhmana partisipasi politik bapak dengan perkembangan partai ini khususnya di Magelang?

Suroso : Ya waktu itu kan tahun 2012 atau 2011 waktu itu kan intensitas perpolitikan tinggi Mertoyudan kan yang dianggap suhu politiknya paling tinggi daripada Windusari daripada Kajoran ini kan karna perkotaan. Saya mengusulkan nama Pak Zaenal kepada Pak Singgih yang waktu itu masih Bupati tapi mau lpeparu, alasannya karena orangnya tulus orangnya polos setia kepada partai dan setia kepada Pak Singgih. Jadi kalau Pak Susilo karena orang pintar belum tentu.

Farid : Berarti Pak Zainal itu baru PAC ya?

Suroso : Iya PAC tapi sudah jadi dewan. Dia kan kalau keagamaan dekat dengan Tegalrejo cukup kental kesetiaan juga ada. Dengan teman-teman yang lain ramah dan dekat. Dia juga tidak angkuh. Akhirnya juga dicalonkan.

Farid : Padahal Bapak dekatnya dengan pak Susilo bukan dengan Pak Zainal?

Suroso : Ya karena kalau Pak Susilo kan dia sekretaris tapi kalau pak zainal kan dia di PAC

Farid : Padahal Bapa dekatnya dengan Pak Susilo tapi merekomendasikan pak Zainal Karena hati ya pak?

Suroso : Iya karena hati kalau pas Susilo itu kan emosinya agak gede contohnya Ahok kalau sekarang, atau istri saya tiap bulan itu banyak nuntut itu pertama ibarat Gatotkaca itu kan dia orangnya kalau pendek gendut-gendut itu kan kayak Buto. Ibarat wayang syukur-syukur tidak membabi buta orangnya nanti tidak setia. Saya senang dengan Pak Susilo kinerjanya juga bagus pengkaderan juga bagus tapi kan karakter orangnya kan saya bisa membaca, Pak Susilo itu nantinya main dibelakang (duit). Setelah surat pencalonan Pak Susilo pindah haluan. Akhirnya kan jadi mundur dia. Jadi untuk menjadi Bupati di Magelang kita itu nanam-nanam juga bisa tapi karena ada Pak Singgih yang jual itu Pak Singgih misal rokok Gudang Garam atau bibit Sengon. itu lho kalau yang jual pak singgih itu kan harganya mahal. Karena pak singgih sudah jadi Bupati dua kali jadi peta lapangan kan tahu karakter-karakter yang ada di Magelang kan dia tahu. Andaikata kita gulat atau tinju lepas artinya tangan kosong itu ibarat Pak Susilo dipukul Pak Zainal itu nggak keras. Dibelakangnya ada yang memberi inovasi itu nggak usah banyak langkah cuman pukulan satu kali dua kali sudah bisa jatuh. Ibarat tunjukan apabila sasarannya dipukul bisa jatuh yaitu sasarannya jangan yang ditendang yang keras.

Farid : Apa yang membuat bapak betah dan bertahan lama di partai ini?

Suroso : Sebenarnya saya itu cintanya kepada partai ya karena Bung Karno itu. Kalau partai tidak membawa simbol Bung Karno mungkin saya tidak menjatuhkan pilihan ke PDI. Karena bagaimanapun beliau itu Bung Karno yang meletakkan dasar negara itu juga ikut serta menggali Pancasila dan dalam undang-undang Dasar 45 dia ikut menyusun juga. Itu tidak bisa melupakan atau bagaimana membalas kepada masyarakat itu seperti apa dan bagaimana.

Farid : Nilai atau ideologi apa yang Bapak sukai di partai ini?

Suroso : Karena PDI itu kan dekat sekali atau kental dengan pancasila tapi kadang-kadang orang bisa mengucapkan tapi untuk menghayati kan tidak mudah. Kita harusnya utuh

maksudnya itu kita bisa melihat itu bukan hak saya kita bisa melihat tapi mata hati juga bisa melihat itu bukan hak saya, itu harusnya bisa rukun.

Farid : Kalau ideologi Marhaenisme nya Bung Karno Bapak juga suka?

Suroso : Marhaen itu kan istilahnya penemuan Bung Karno waktu beliau masih mahasiswa ketika di Bandung. Itu kan waktu itu jalan-jalan bersepeda kemudian menemui seseorang yang bernama marhaen. Kebetulan petani kecil yang bisa mengolah sendiri, menjual sendiri dan hasilnya untuk keluarga kecilnya. Itu penemuan pertama, sebetulnya Bung Karno sendiri yang namanya Marhaen itu kan gabungan mar nya adalah marxisme, he itu Hegel dan en nya Engles. Jadi ketiga tokoh dunia itu sosialis-sosialis itu. Tapi kan tahunya Marhaen itu Pak Marhaen sebenarnya di Dibawah Bendera Revolusi itukan marhaen itu ada Marx itu kan tokoh dan disana itu namanya Jerman itu Hitler itu belum seberapa dengan yang namanya Jengis Khan dia menguasai separuh dari benua Asia. Hitler hanya seberapa cuma dibesar-besarkan.

Farid : Jadi yang Bapak sukai dari partai ini itu nilai dan ideologi apa?

Suroso : Waktu itu kan saya curahkan di situ tapi kalau sekarang-sekarang itu ibaratnya matahari sudah sampai jam 03.00 atau lebih jadi saya harus istirahat dan mencari bekal, karena matahari sudah mulai tenggelam. Jadi kalau dulu itu tidak ada yang menyuruh tidak ada apa, jadi memang panggilan hati.

Farid : Apakah jalan pandangan politik Bapak sama dengan pandangan politik partai?

Suroso : Ya belum lah. Karena partai besar itu mengembalikan pada ideologi Soekarno selain orang-orangnya juga ada dimana ada disana tapi di bawah juga diterapkan digalakan kembali apa itu Pancasila harus berlanjut. Jangan sampai kita kesusul dengan yang partai lain.

Farid : Atau bisa dikatakan pragmatis sekarang ini?

Suroso : iya bisa dikatakan jalan di tempat. Karena sekarang itu udah ada HP udah canggih. Mengapa partai itu tidak dikemas harus dibentuk harus dibangun bagaimana bersaing di dunia sekarang ini. Contoh lainnya sekarang ini cicakrawa ini makin lama makin punah harusnya barang yang tidak ada, harus selamatkan dikembangkan begitu juga partai kalau itu lagi itu ideologi atau kader, itukan suatu bentuk bangunan rumah. Kalau dasarnya kuat, akan jadi dasar yang kuat tapi kalau dasarnya udah gonjang ganjing ya bisa roboh.

Farid : Berarti masih belum sejalan dengan arah politik Bapak dengan partai ini?

Suroso : Ya agak meleset sekarang ini. Ya sekarang ini kalau sekarang saya berbicara dengan Bung Karno kenapa sekarang kan generasi sekarang itu bisa dikatakan tidak bisa bertemu. Kalau tahun 55, saya ke tidar paling tidak jangan Soekarno itu masih ingat karena terjun payung di tidur di lapangan tidur itu kan ku lihat ke saya lihat. Bagaimana kharismanya Bung Karno itu luar biasa. Tapi kalau kelahiran sekarang tahun 70 itu jelas tidak mengenal Soekarno. Apalagi sekarang itu ustadz-ustadz, dakwah-dakwah yang dibawa itu mohon maaf tidak menyinggung tentang Bung Karno. Misal kayak Ila hadroti Syekh Abdul Qodir Al jaelani diganti dengan sultan hamengkubowon itu tidak ada yang berani, Karena kita itu lahir di sini hidup di sini, bekerja di sini, mati juga di sini. Masak matinya dibawa ke Arab kan gitu.

Farid : Apakah norma yang di pegang oleh partai ini sudah relevan pak oleh seluruh kader?

Suroso : Ya tidak sepenuhnya. Kemarin itu kan PDI tidak punya kader untuk presiden. Akhirnya mengadakan Jokowi yang blusukan kesana-kemari. itu kan bukan dari partai. Pak Yusuf Kalla dari Golkar. Karena apa, kalau mbak Mega dicalonkan itu gak tetap nggak laku. Misal Pak Jokowi sama mbak Mega yang ketua umum, malah berkurang suaranya. Karena masyarakat bisa membaca Mbak Mega itu bagaimana. Tidak menutup kalau perempuan itu jadi pemimpin itu tidak tanda alam. Itu Nilainya masih bagus tapi sudah tidak relevan belum bisa menyentuh nurani masyarakat.

Farid : Apakah bapak mempercayai komitmen setiap kader terhadap partai sesuai ADART?

Suroso : Ada AD/ART tidak pernah dibaca, karena adanya adart berubah-ubah gak bisa buat pegangan.

Farid : Berarti komitmen setiap kader itu berubah-ubah ya pak?

Suroso : Itu kan adart alasannya untuk menggiring menjadi pengurus, pengurus juga nanti siap pakai siap dinilai. Jadi bukan untuk pengkaderan. Jadi arahnya adrt untuk memenangkan pemilu bukan pengaderan

Farid : Berarti AD/ART nya kurang maksimal?

Suroso : Iya, menurut saya ya karena berganti-ganti. kadang-kadang gak ketemu, sulit.

Farid : Bapak percaya dengan komitmen setiap kader itu sendiri?

Suroso : Saya rasa nggak. Karena ADART itu kan dibolak-balik saja. Kebanyakan kader-kader ranting bahkan sampai dewan pun mungkin tidak begitu paham. Kadang-kadang aturan begini-begitu ternyata ditabrak sendiri. Harusnya dari kader maupun dari pimpinan maupun dari legislatif itu kan harusnya *nyumbang* syukur-syukur *nyumbang*, *nyambung* terhadap kader-kader lama. Harusnya ada komunikasi silaturahmi. Sekarang kalau sudah jadi, putus komunikasinya. Kalau sudah jadi malah ibarat kacang lupa kulitnya. Tapi itu kembali kepada kepribadian orang tersebut. Tapi ya ada, masih nyambung terus ya ada. Kalau dulu yang jadi dewan itu ada namanya Pak Tondo bagus, sampai berkali-kali kesini waktu sudah jadi dewan. Kalau sekarang jadi dewan sudah dua tahun kesini saja satu kali. Padahal kan perekatnya itu ideologi, perekatnya itu silaturahmi, tanpa itu ya cuma kumpulan orang jualan. Kumpulan partai itu kan membangun ideologi.

Farid : Apakah ada kader yang pragmatis mencari keuntungan atau kesempatan?

Suroso : ya ada, banyak lah sekarang.

Farid : Contoh pragmatisnya seperti apa?

Suroso : Yaaaa, kemarin-kemarin nggak kelihatan tapi kalau sudah ada dewan yang menjadi silaturahmi, datang-datang, kasarannya memuji-memuji, supaya dapat apa gitu. Padahal sebelumnya ya nggak milih. Biasanya orang itu mengaku-aku kalau sudah jadi.

Farid : banyak pak terkait itu?

Suroso : Ya sana-sini banyak. Ya jadi penumpang gelap atau bukan aslinya ya banyak.

Farid : budaya politik seperti apa yang ada di dalam partai ini?

Suroso : Harusnya idealnya santun. Tapi kan santun itu bahasanya partai lain. PDI itu susah kalau santun, kita kan nasionalis. Jadi ada kata-kata biar kere tapi sombong. Jadi kalau orang itu jadi kader partai ya harus sombong. Kalau tidak sombong nanti di giles-giles, dihina-hina. Saya itu kemarin dasarnya dari basis agama awalnya santun. Tapi lama-lama cuma dikatain semaunya. Dulu ada yang menghina kalau saya tidak cocok jadi

ketua PAC. Nggak papa kalau kamu menghina saya tapi kalau kamu menghina PAC berarti kamu yang lebih jelek. Sama saja kamu mencoreng mukamu sendiri. Sama saja kamu merobek bajumu sendiri.

Farid : Jadi budaya seperti apa pak yang sekarang bapak lihat dari dulu sampai sekarang?

Suroso : Saya tidak bisa panjang lebar ya, maksudnya dari dulu PDI kayak gitu. Budayanya itu sampai akar yang paling bawah kan sulit. Paling-paling ya yang atas atas itu yang dewan-dewan mungkin ada kepentingan apa. Kalau bawahan itu ibaratnya ayo kumpul-kumpul, terus dikasih arahan. Kalau ibarat minum sirup itu yang merah-merah yang merasakan orang atas-atas. Kalau bawah cuman merasakan crit-crit doang. Ibarat gule cuman dikasih kuahnya jadi diuntungkan orang yang atas-atas.

Farid : Bapak melihat politik transaksional gak pak?

Suroso : Ya kalau gitu ya ada. Tapi kadang-kadang ada yang memenuhi janji, kadang ada yang lupa atau melupakan.

Farid : Mayoritas budaya politiknya seperti apa?

Suroso : Kebanyakan masih karena ideologi. Tapi akhir-akhir ini banyak yang tadi (pragmatis). Karena sekarang ini kan 96 kebawah kan yang punya kendaraan satu dua orang. Kalau sekarang kan hampir semua orang kan punya. Jadi orang itu merasa saya itu merasa sama dengan Pak Roso, sama dengan yang lain. Tapi kan beda perjuangannya dan ideologinya. Tapi kan merasa sama kalau dilihat dari lahiriyahnya. Mungkin saya bisa nyalip Pak Roso, jadi dia itu melihatnya cuma dari penampilan bukan dari jasanya. Orang itu menghargai jasa itu kan sulit karena jasa nggak kelihatan.

Farid : Jadi ada budaya politik transaksional dipartai ini?

Suroso : Ya ada. itu dari atasan sampai bupati mesti ada. Seumpama sekarang itu Sanusi, atau Ahok atau Jokowi tentang reklamasi pasti ada kaitannya kan. Kasarannya untuk silaturahmi sana-sini masak tidak bawa apa-apa. Kalau di kabupaten Magelang ini pasti ada kaitannya dengan New Armada, pemborong yang melakukan pembangunan-pembangunan termasuk pembangunan jalan. Ya karna New Armada mendukung calon dari kita pasti ada kesepakatannya. Walaupun itu (pembangunan) dari Pemda tapi kan yang pertama kan yang nalangin dulu kan uang dari sana (new armada) nanti tinggal hitung-hitungan. Kalau lainnya yang tidak punya uang ya tidak berani. Walaupun demikian ternyata itu juga bermanfaat untuk masyarakat

Farid : Apakah ada yang salah dengan sistem partai ini? atau sebaliknya Pak?

Suroso : kadang-kadang yang salah itu pimpinan itu tidak legowo, pimpinan itu tidak tulus pimpinan terutama pimpinan magelang. Di Magelang itu pimpinannya dipecah menjadi dua, ada kelompok Iyan, ada kelompok Zaenal. Saryan ketua DPRD, terus yang Zaenal Arifin kan Bupati. Dia dicalonkan sebagai ketua tapi karena sibuk nya dia itu pasif tapi yang satu itu (Saryan) kan pernah proaktif. Sedangkan pak Singgih itu kan orangnya proaktif tapi kan kalo Pak Zaenal kalau tidak diberitahu, gerakannya itu tidak sepatriotis Pak Singgih. Kalau Iyan itu bapaknya itu orang PDI dan jiwanya itu benar-benar militan.

Farid : Jadi kadang ada intrik-intrik gitu ya pak?

Suroso : Sebetulnya kan itu harus legowo salah satu. Jangan sampai kedepan itu ada matahari kembar. Kalau ada matahari kembar dari PDI semua, nanti malah partai lain yang mendapat keuntungan. Sebenarnya kalau ngomong seperti ini itu tidak sopan tapi kenyataannya seperti itu.

Farid : Bagaimana alur partai ini terutama di lingkup DPC terkait pengkaderan rekrutmen kader?

Suroso : Dengan mengadakan kaderisasi itu kan ada konsolidasi, ada pertemuan-pertemuan. Ya pertemuan itu kalau sekarang itu kayaknya tersendat sedikit. Ya mungkin kembali kepada pimpinannya, dulu waktu pak singgih terus berjalan. Kalau sekarang itu kadang-kadang berhenti, kadang-kadang jalan. Tidak seperti Pak Singgih itu kalau partai itu harus marathon terus. Ini kan Mas Iyan tidak, dia dilahirkan, dibesarkan lebih dari kecukupan. Itu kan pedagang tembakau jadi orang yang berada. Kalau Pak Singgih itu kan ditempa Bapak Ibunya sudah nggak ada. jadi sering jalan-jalan belajar kesana-kesini sebelum jadi bupati. Kalau mas Iyan ini harusnya setiap satu bulan atau dua bulan harus ada pertemuan DPC. Tapi kan sekarang ini kurang tahu. Karena partai itu ya menghadirkan orang banyak akan memerlukan biaya. Jadi yang membiayai kan bukan pemerintah tapi yang mempunyai kepentingan itu. Sekarang kan ketua DPRD kan paling tidak ya keluar biaya. Jadi lewat perkumpulan-perkumpulan itu melakukan perekrutan. Itu kan dari tingkat PAC, kabupaten Magelang kan 21 kecamatan, paling tidak masing-masing PAC mengirimkan tiga orang untuk perkumpulandi DPC. Nanti er PACmembuat perkumpulan di PAC. Nanti akar yang kecil lagi, satu desa mengumulkan anak-anak ranting. Nantinya cara merekrut begitu, memperkenalkan jika ada orang yang baru.

Farid : kalau ada orang baru itu dimasukkan Di Ranting atau bagaimana?

Suroso : Ya nantikan tetap anggota, tapi akan dipilih sebagai pengurus di masukkan pengurus kalau orangnya itu ada bibit bebet bobot, akhirnya dimasukkan. Di situ, di lingkungan berpengaruh. Punya pengaruh misal saya mau milih a lingkungan bisa ngomong a. Terus bisa jadi panutan. Kalau kita cari kader bibit itu cuman asal orang itu ya tidak bisa berkembang. Karena bibit unggul bibit padi itupun harus bibit unggul, kalau tidak nanti kalau ditanam juga kurang baik. Bibit itu paling penting, kalau ditanamkan, dikawinkan, dikembangkan nanti hasilnya juga bagus. pembibitan itu memang perlu. Lain dengan yang namanya partai-partai agama itu biasanya pengajian-pengajian nanti ngundang Pak Kiai, diarahkan. Kalau partai ini seperti ada kelompok jatilan, di datengin, terus dibantu. Nanti ada kelompok apa lagi kalau menjelang pilihan didatengin. Tapi kalau pendidikan kader ya orang-orang tertentu. Kadang-kadang dididik pengaderan, kadang nyambung, kadang tidak, hanya pasif. Tapi kalau memang jiwanya ada, dasarnya ada, pasti oleh-oleh yang dibawa dari pendidikan kader pasti disampaikan kepada teman-teman. Paling tidak untuk kita sendiri ibaratnya kalau sudah *discharge* harusnya tambah kuat.

Farid : Menurut Bapak kader partai itu apa?

Suroso : Kader partai itu kan ibaratnya bentuk jadi yang namanya kader itu kan suatu bentuk. seumpama lukisan, kalau tidak ada bingkainya tidak berupa lukisan. Jadi ada kerangkanya. Andaikata kita itu ibaratnya orang atau hewan, hewan banteng atau kerbau itu kan ada tengkoraknya ada tulang-tulangnyanya. Tulangnya itu bentuknya, jadi ada kerangkanya. Kita bikin bis tidak hanya kulitnya tapi ada kerangka-kerangkanya. Jadi kadar itu harus yang kuat dan mencari contoh dan harus bisa menanamkan ideologi seperti multilevel marketing.

Farid : Berarti kader partai itu kerangka dari partai, berarti kuat tidaknya partai bergantung pada kader?

Suroso : Iya pada kader. Jadi rumah itu kuat dan tidaknya tergantung pada bangunan pokoknya, tergantung kepada pokok-pokoknya, tiang-tiangnya. Misal Saya punya wayang Werkudoro tapi tidak punya gapetnya kan cuman kayak gitu doang, kalau ada gapetnya bisa digerakkan. Jadi kader bukan hanya pelengkap.

Farid : Bapak mengharapkan mendapat kader yang seperti apa?

Suroso : Harusnya memperoleh kader itu yang jujur, akhlaqul karimah, di lingkungan bisa menempatkan diri maksudnya jangan menjadi contoh yang tidak baik. Soal pintar dan tidak itu nomor sekian, yang penting orangnya ada kemauan. Kita memberikan kader kepada orang yang mau. Orang yang mau itu kan orangnya paling tidak ada persyaratan yang dipandang orang ini bisa memenangkan, bisa berpengaruh. Jadi kader itu tidak setiap orang. Seperti misalnya sekarang gabung ke PDI disebut ader, bukan.

Farid : Dalam melakukan rekrutmen kader sampai sekarang ini mekanismenya sendiri sudah baik atau belum?

Suroso : Semua itu tergantung dari pak ketua di kabupaten Magelang. Kalau ketuanya itu proaktif, ketuanya itu banyak turun ke bawah, saya kira tidak perlu dikomando sudah adanya cinta kan karena kebiasaan yang menanamkan itu. Tapi kan kalau tidak pernah terbiasa akan gitu. Apalagi sudah menjadi ketua DPC atau DPRD itu kan jelas sudah sebagai pengurus jadi sudah komplit, powernya kekuatannya itu ada.

Farid : berarti mekanismenya sudah baik?

Suroso : Iya sudah baik, tapi kurang optimal tergantung ketanya itu tadi.

Farid : Cara Bapak berkomunikasi dengan kader lain itu bagaimana?

Suroso : Kalau selama ini silaturahmi saja. Seperti kemarin ke DPRD ketemu Pak Saryan. Kalau kita gak ketemu kan ya gimana. Ya kalau nanti ada kumpulan ini itu ya perlu biaya. Karena bagaimanapun juga duit tidak bisa ditinggalkan. Kalau jadi dewan pasti punya uang, uangnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mengembangkan yang lainnya. Kita kasian kalau tidak jadi dewan sudah mengeluarkan biaya banyak terus malah mengurus partai kan ya harusnya mereka lebih tahu bisa sampai duduk disana paling tidak melibatkan orang-orang yang militan. Paling tidak saya juga ikut menanam.

Farid : Apakah ada kesulitan untuk komunikasi antar kader?

Suroso : kalau sudah sepaham ya tidak.

Farid : Kalau yang dengan beda pandangan mudah komunikasi tidak pak?

Suroso : Ya agak sulit tapi ya bisa. Kadang-kadang orang itu kan ada yang dadanya lebar ususnya panjang ada yang sabar dan tidak. Kalau orang yang pendek berfikirnya pasti ya begitu.

Farid : Pengelolaan kader di lingkup DPC itu seperti apa?

Suroso : Saya kurang begitu paham. Karena itukan urutan-urutannya DPC urutannya ke PAC terus ranting.

Farid : Setau Bapak pengelolaan DPC itu seperti apa atau terstruktur sekali atau mati hidup atau seperti apa?

Suroso : Ya bikin kompak itu memang sulit. Mungkin sekarang itu ya tergantung kadernya. Saya tidak bisa bicara soalnya saya itu tingkat DPC waktu itu sama Pak Singgih saja tidak sebagai DPC. Saya hanya sebagai PAC dan membantu DPC. Jadi waktu itu memang kegiatan banyak, kalau sekarang kan kayaknya agak kurang. Pengelolaannya dan keakraban antar anggota itu kadang ketemu cuman 3 orang 4 orang. Kadang-kadang kita berdiskusi, berdialog, kadang-kadang ya nggak nyambung. Paling-paling cuman orang-orang itu saja. Jadi anggota itu hanya sebagai pelengkap kadang-kadang.

Farid : jadi pengelolaan kader jadi nomor sekian ya daripada kepentingan partai?

Suroso : Iya ternyata gitu. Kan beda sekarang kan ke rumah sudah punya, ledeng sudah ada listrik juga sudah. Kalau dulu itu waktu 96 kan kantor saja kecil. Kemudian waktu itu yang namanya kader itu tombok-tombok pake duit sendiri. Dan dulu itu PDI hanya 4 orang atau 3 orang di kabupaten Magelang (DPRD). Untuk sekarang menjadi banyak udah kemajuan. Tapi waktu itu walaupun sedikit kan waktu itu Pak Harto masih itu jadi untuk ke sana itu dihambat terus. Kalau sekarang sudah bebas. Tapi kebebasan itu kadang-kadang tidak dibarengi orang-orang yang berideologi yang seneng silaturahmi.

Farid : Selama ini Bapak menjalani ada sebuah budaya gak untuk menunjang sebuah pengelolaan kader?

Suroso : kadang kalau dulu dari pusat memang ada. Kayak Pak Jati nanggap wayangan kadang-kadang di Tempyuran, kadang kemarin itu di dpc atau dimana.

Farid : budaya yang lain?

Suroso : ya mungkin jathilan, kesenian-kesenian lain. Itu kan untuk mengumpulkan orang. Supaya kelihatan rame mendatangkan seperti itu. Kalau mendatangkan orang tidak ada embel-embel seperti organ tunggal atau apa kan nggak angkat.

Farid : Setiap kapan kegiatan itu ada?

Suroso : Kalau dulu itu waktu hari-hari mungkin 15 Januari, itu kan harinya PDI. Terus Juni bulan Bung Karno, 1 Juni. Karna lahir dan wafatnya Bung Karno itu bulan Juni. Setiap tahun selalu ada.

Farid : Dalam perkumpulan itu biasanya mengadakan apa saja?

Suroso : Ya perkumpulan itu biasanya menceritakan tentang situasi negeri ini atau kader-kader itu harus lebih militan lagi daripada kemarin-kemarin, harus ditambah di tancap gas lagi. Sekarang itukan karena yaitu karena budaya-budaya instan, apa-apa itu jadi tidak mengetahui dan tidak menghayati jerih payah besarnya partai itu dari mana, situasinya darimana. Kan tidak sampai disitu generas-generasi muda. Tahunya kan sudah besar, ada Bupati ada ini ada itu dari partai ini.

Farid : Struktur organisasi dalam partai ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan partai di masyarakat?

Suroso : Ya ada memang dibentuk dibuat itu ada kesesuaiannya. Tapi kadang-kadang bentukan itu hanya papan nama tapi gerakannya nggak ada. Partai itu kan yang penting gerakannya, gerilyanya itu yang penting. Kalau kita atas nama ketua tapi kerjanya gak ada ya nggak ada gunanya. Ya saya mengatakan pengurus-pengurus jangan sampai hanya papan nama. Kebutuhan struktur sudah sesuai kebutuhan tapi belum maksimal. Daripada partai yang lainnya PDIP itu dari ranting sudah tertata. Walaupun hanya sekejap setelah pelantikan, setelah itu ya tinggal.

Farid : Apakah Bapak sering mendengar pandangan atau negatif tentang partai ini?

Suroso : Ya pandangan negatif itu kalau kemarin-kemarin ada tapi kalau sekarang tidak. Seperti kalau pdi itu orang lapangan, dekat dengan jalanan, tukang minum, tukang langganan lokasi-lokasi.

Farid : Pernah ada yang menyebut partai non islam?

Suroso : Ada tapi kan bukan. Itu pandangan orang yang kurang karena PDI itu kan atau PNI itu kan lahir dari antara NU dan religious, nasional religious. Makanya yang namanya NU Baik Bung Karno masih dimanusiakan seperti masih dimintai pendapatnya bagaimana. Bagaimanapun juga partai itu kalau partai doang ideologi doang tapi tanpa didasari dengan

keyakinan dan agama itu ya kurang bagus kurang komplit. Jadi dasarnya tetap keyakinan kalau kita tidak yakin dengan yang kuasa kita itu kasarannya ya itulah sebagai organisasi kesana kemari kan tidak ada jelas jadinya.

Farid : Bagaimana komunikasi yang terbangun di partai ini?

Suroso : Kalau dulu kan dari atas ke bawah, tegak lurus. Tapi pernah dibalik dari bawah ke atas. Jadi dari bawah itu dibangun, bangun, bangun ke atas. Tapi kalau dulu kan dari atas dari DPP DPD terus sampai bawah. Sekarang aspirasi itu kan bukan keinginan tapi kebutuhan. Aspirasi itu seumpama saya minta kambing, karena saya butuh bukan karena keinginan. kalau keinginan itu kan berbeda-beda.

Farid : Jadi dari bawah ke atas kalau ada aspirasi, kalau perintah dari atas ke bawah?

Suroso : Iya

Farid : Sering gak menyerap aspirasi ke pusat?

Suroso : Ya ada, kadang kan orang-orang keterbatasan pusat itu jadi kadang orang-orang lama seperti saya kan tidak diberi tahu kalau lewat apa lewat apa tahu-tahu di di PAC kadang-kadang kadang-kadang kan terlalu itu tidak tahu soalnya tidak ditarget dulu kan saya ikut mensukseskan waktu markas di beji dimana tapi sekarang itu tidak pernah nyambung yang disambung malah orang-orang yang mbentengi padahal ya tidak.

Farid : Dilingkup DPC Kabupaten Magelang itu apakah sering terjadi konflik kepentingan atas nama pribadi?

Suroso : Ya tidak begitu kelihatan. Ya itu wajar-wajar saja namanya konflik. Itu di kepolisian ada ya wajar. Konflik itu sampai sekarang ada, tapi kan nggak kelihatan. Tapi ya biarin lah karena itu pribadi masing-masing, jadi orang itu bisa sama kan nggak bisa. Untuk saling melengkapi itu kan kita harus mengutamakan perbedaan. Yang penting salah pilih atau beda pendapat kan dianggap musuh ya jangan. Yang namanya berpartai memang harus dewasa.

Farid : Dalam mengelola SDM atau kader partai itu secara keseluruhan, apa tanggapan dan sikap bapak?

Suroso : Ya gimana ya, ketuanya saja Bu Mega. Sebetulnya yang punya kepentingan-kepentingan yang disekeliling Bu mega itu. Tapi kan karena Bu Mega Putra presiden masih apapun kekurangannya apapun ke kurang tegas atau gimana, itu masih di maklumi. karena untuk menyedot suara itu masih ada. Tapi kita kan namanya kader partai di pusat itu kan sudah bisa menempatkan diri atau ditempatkan seperti Pramono Anung atau Pak Mendagri pak Cahyo, ya itu kan luar biasa. Dulu waktu jaman jaman Pak Harto yang diambil dari tentara atau kedekatan. Harusnya seperti kader yang sulit dicari seperti Pak Cahyo, dulukan Golkar tapi masuk pdi menjadi pengurus DPP, menjadi Sekjen. Sekarang jadi Pak Hastu. Jadi partai ini semakin terdongkrak kan karena kader-kadernya. Yang namanya partai itu kan selalu orangnya kan diganti-ganti, kadang-kadang orangnya dimanfaatkan, kadang-kadang memanfaatkan. Jadi partai itu kan penuh dengan kepentingan, dan semua itu kan ingin merebut kekuasaan, istilahnya kita itu kalau makan kue terus bagi-bagi kan.

Farid : sikap Bapak berarti mendukung atau tidak mendukung?

Suroso : Ya tetap mendukung, karena saya sendiri paling tidak ya ikut memikirkan. Pengelolaannya bagus daripada yang lain (partai lain).

Farid : Apakah itu semua kader itu melakukan interaksi dengan mudah?

Suroso : Ya kader-kader tertentu saja. Karena kita ini kan tidak banyak berkumpul. Mungkin kalau ibarat pengajian itu selapanan. Kalau ada selapanan, ada apa, mungkin bisa lebih bagus. Tapi ya itu perlu biaya, tapi kan biaya tidak harus makan tidak harus itu. Dulu waktu 96 Asal kumpul aja dulu. Saya di sini dengan Pak Singgih itu tidak tidak harus makan, tidak harus bawa apa-apa, yang penting ada kedekatan. Kalau sekarang kan orang-orang kumpul kok gak ada ini nggak ada itu jadi bahan omongan. Kader itu harusnya memberikan, tenaga atau apa. Bukan kader infus.

Farid : Apa ada sistem evaluasi untuk meningkatkan kinerja atau target partai?

Suroso : Itu rahasia partai itu.

Farid : Evaluasi di PAC?

Suroso : Seharusnya seperti itu. Seumpama ada kekurangan apa, baiknya bagaimana, kemarin itu kegagalannya ini. Itu kadang-kadang orang sudah merasa pintar. Orang yang baru-baru kan belum memberi apa-apa, belum mengorbankan tenaga atau fikiran, orang pada merasa pintar.

Farid : Berarti tidak ada sistem evaluasi di lingkup Magelang?

Suroso : Ya mungkin ada evaluasi, tapi kasarannya tidak ditemukan orang banyak. Mungkin hanya beberapa orang saja.

Farid : Tidak ada evaluasi per tahun kalau di PAC?

Suroso : Zaman saya dulu ada. zaman saya seperti aspirasi yang harus diserap berapa, ketuanya harus begini, harus lebih turun lagi ke bawah, ada zaman saya. Sekarang, tidak.

Farid : Apakah ada sosok kader yang begitu Anda panut atau anda sukai?

Suroso : Ya ada, seperti pak Idham Samaawi, Pak Cahyo Kumolo.

Farid : Kalau Bu Mega?

Suroso : Kalau Bu Mega itu, Bu Mega itu mohon maaf karena anaknya Bung Karno secara biologis. Secara ideologis ya kadang-kadang bagaimana begitu. Kan orang wanita itu kan harus didampingi laki-laki.

Farid : berarti tidak begitu berkesan dengan Bu Mega?

Suroso : Ya akhir-akhir ini begitu. Bu Mega masih orang PDI, Tapi kan yang jadi harapan saya itu tidak itu itu saja. Maksudnya kalau bicara ya sudah, serahkan kepada kadernya, daripada saya salah-salah. Seumpama contoh di Bali, hey kamu kader partai, kepanjangan partai. Kan nggak begitu bicaranya sama presiden. Harusnya porsinya itu, kamu sudah jadi presiden, bagaimana seharusnya seperti ini.

Farid : Kalau di kab Magelang Pak Singgih?

suroso : Iya, Pak Singgih.

Farid : Kalau di lingkup Kabupaten Magelang siapa yang berpengaruh dalam organisasi partai?

Suroso : Sekarang ini ya mas Saryan itu. Ya mungkin karena kesibukannya atau apa jadi kurang maksimal. Harusnya dia sebagai kader sebagai kader maupun di tempa dari bapaknya memang sudah pas. Tapi tetap karena terbentur umur, umurnya masih terlalu muda dan pengalamannya itu dalam lapangan masih kurang. Mungkin kalau di ingatkan atau di gimana emosinya masih tinggi. Lain dengan dengan Bapak Singgih ibarat sumur itu dalam ibarat lautan itu luas. Ini kan masih perlu pembenahan. Ya bagus tapi masih perlu

pembelajaran. Ketua itu kan istilahnya nahkodanya. Jadi kapal dibawa kemana tergantung ketuanya. Dan sekretaris sebagai kondektornya.

Farid : Apa pandangan bapak terkait pimpinan partai seperti Ibu Mega?

Suroso : Ya kalau Bu Mega itu karena itu Putra bung karno. Selain itu kan ada peristiwa-peristiwa ada 27 juli. Meledaknya itu yang pertama itu karena ada sosok-sosok Suryadi. Sebenarnya Mbak Mega itu kan juga merebut, merebut dari Suryadi. Karena pengaruhnya karena bapaknya. Yang kedua itu ya emang politis tapi ya ideologis. Tapi kan eranya pada waktu itu dengan sekarang kan berbeda, maksudnya sekarang itu tidak harus ada di depan, pemimpin itu bagaimana caranya mengayomi. Kalau dulu jaman diponegoro harus depan, sekarang ini Bu Mega ada ditengah-tengah juga boleh, dibelakang juga boleh, karena partainya itu besar. Kader-kader yang berpotensi itu harus di depan.

Farid : Berarti sikap bapak atau Padangan bapak itu krurang sesuai dengan cara kerja Bu Mega?

Suroso : Iya.

Farid : Bagaimana sikap Bapak dengan keputusan Bu Mega? Seperti menunjuk Ahok?

Suroso : Ya karena PDI sendiri kan nggak punya kader. Kemarin itu kan ada bu risma tapi di Surabaya, kalo dia ninggalin Surabaya kan repot. Seumpama kader yang ada di DPP, karena sudah terpasang semua, Pak Cahyo terpasang, Pak Hasto baru menjabat sekjen. Kan memerlukan proses, waktu dulu. Bukan kadernya tidak ada, seperti Pak Jokowi kan bukan dari partai, akhirnya diusung. Sekarang Ahok itu juga dari partai, itu kan dulu dari gerindra.

Farid : Berarti selalu setuju dengan keputusan Bu Mega?

Suroso : Ya karena melihat nanti dijual laku atau tidak, perhitungannya begitu. kalau Pak Ahok mungkin masih bisa menang, walaupun berkurang karena demo-demo itu. Mau hantam Ahok kok caranya seperti itu. Kalau tidak secara nasional, nggak bisa terpukul kan Ahok itu. Yang penting keputusannya Bu Mega menguntungkan rakyat, menguntungkan partai. Paling tidak Ahok itu bukan orang partai, tapi dari sisi lain Djarot kan orang partai.

Farid : Jadi intinya selalu mendukung?

Suroso : Ya tergantung keputusan.

Farid : Terkait kader partai yang sudah keluar seperti Ibu Rustriningsih dan bibit Waluyo bagaimana pendapat bapak?

Suroso : Itu kan sebenarnya kurang benar. Sebenarnya kalau tajam pikir, sebetulnya Mbak Rustri yang dijadikan gubernur, Pak Bibit sebagai wakil. Karena Bu Rustri itu dari awal membesarkan partai, membela Bu Mega itu mati-matian. Kalau Pak Bibit kan datangnya dari ABRI. Kemudian dia gabung itu kan ibaratnya belum bisa memasak belum bisa apapun, tapi sudah nyicipi. Tapi kalau Bu Rustri harusnya didahulukan.

Farid : Tapi setelah Bu Rustriningsih dan Bibit keluar pandangan Bapak seperti apa?

Suroso : Seharusnya Bu Rustriningsih yang sudah menanam di dalam partai, harusnya diam saja melihat keputusan pencalonan gubernur waktu itu. Tidak perlu keluar. Dan dia ada kedekatan dengan Pak Surya Paloh, terus dianggap bergabung dengan Nasdem. Padahal itu dia ketemu dalam kesempatan apa terus di photo. Harusnya untuk membesarkan partai itu harusnya partai memanusiasiakan seperti Bu Rustri itu yang ikut terlibat dalam banyak hal.

Farid : Kalau pk bibit seperti apa?

Suroso : Kalau pak bibit memang harus dihilangkan dari Jawa Tengah. Karena Pak Bibit dari ABRI, ABRI itu dulu dama PDI saja memusuhi. Dia kan cuma numpang, numpang nama PDI. Harusnya yang diutamakan kadernya kita dulu bukan yang lain. Ternyata setelah Pak bibit yang jadi, banyak kecewa kan PDI. Sekarang Pak Ganjar beda, bisa di rangkul semuanya.

Farid : Dari segi kepemimpinan Bagaimana tanggapan bapak mengenai pimpinan dari ketua umum ketua DPD sama ketua DPC?

Suroso : Itu kan jadi ketua-ketua kan garisnya kalau dari atas ada perintah kan tinggal mengalir. Andaikata agak menyimpang itu ya bukan dari partai. Jadi istilahnya satu perbuatan jadi mau bener atau nggak harus ngikut.

Farid : Cara mengelola partainya di DPC sama DPD dan lainnya sudah bagus atau belum?

Suroso : Mereka kan berhubungan, kan merknya sama cara berlarinya yang kadang berbeda, mau cepat atau mau lambat.

Farid : Apa peran dan tugas bapak dalam partai ini untuk sekarang dan dulu?

Suroso : Kemarin saya ikut membela, saya itu seperti terlibat kepengurusan dengan didasari dengan budi pekerti. Karena bagaimanapun juga Indonesia awalnya ada pembentukan Budi Utomo. Yang kedua kan rela. Istilahnya membesarkan partai bagaimanapun juga untuk kampung saya, misal ini dari Bupati dari PDIP saya ambilkan tratak. Setidaknya saya bermanfaat di masyarakat.

Farid : Perannya melalui?

Suroso : Perannya melalui relawan BKN, penanggulangan bencana. Paling tidak saya bisa menolong menyalurkan.

Farid : sama menjalankan partai dengan tugas yang kemarin-kemarin?

Suroso : Walaupun sekarang kalau ada, tapi mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Jadi partai itu kalau tanpa sosial itu ibaratnya masakan tanpa garam.

Farid : cara Bapak menjalankan tugas dari partai itu seperti apa seperti kemarin menggerakkan masa-masa untuk nyoblos?

Suroso : Ya satu orang dua orang didatangi. Tolong ya. Disana kan satu orang bisa jadi satu keluarga. Paling tidak sekarang itu ada uangnya juga, kalau dulu kan nggak terlalu. Sekarang itu payah.

Farid : Tugas apa saja yang diberikan partai kepada kadernya?

Suroso : Dulu ada yang namanya mapping. Peta partai di sana agak kurang, disini yang menumpuk, banyak yang menggerombol, ada juga yang kosong. Yang kosong itu kan nanti bisa kita memberi arahan agar bisa berkembang (suaranya) dari dusun ke dusun dari desa ke desa. Iya, misalnya di Mertoyudan ada petanya. Kalau Mertoyudan perolehannya berapa, dimana saja, apa saja kasusnya. Misalnya kelurahan Pasuruan bukan termasuk basis, Pasuruan itu merata. Tapi kalau Banjarnegara atau Sumberejo itu bisa numpuk, perolehannya bisa 500 lebih. Karena disini disambangi oleh Ustadz Kyai di sini kan begitu kental oleh agama, kalau PDI terkenalnya orang abangan.

Farid : Untuk tugas dan peran yang ditugaskan oleh partai kepada kadernya, bagaimana sikap dan pendapat bapak?

Suroso : Ya kita kalau diperintahkan dijalankan saja. Saya sedapat mungkin, karena itu tugas partai. Harus dijalankan. Kalau kita menjadi pengurus ya harus sanggup. Apapun kemampuannya kita berikan, kita sosialisasikan.

Farid : Bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi dengan konstituen?

Suroso : Kalau kemarin tidak seperti 2009, itu kan saya diajak memilih termasuk saya dituakan. Saya sudah mengajak yang lain. Tai kadang-kadang yang mau jadi dewan, awalnya deket baik-baik, tapi sekarang itu sedikit banyak jadi kecewa. Tidak pernah di sambangi, tidak pernah dimanusiakan. Kadang-kadang juga jengkel, tapi mau menuntut bagaimana, tidak bisa dituntut.

Farid : Cara Bapak membangun hubungan baik dengan konstituen itu seperti apa?

Suroso : ya paling ke depan kalau ada kader-kader yang bagus kita tawarkan, kalau nggak ya terserahlah. Jadi sesuai hati nurani, tidak harus memaksa.

Farid : Bagaimana berapa mengkomunikasikan gagasan kepada pemegang kepentingan di DPC?

Suroso : Paling tidak kalau bisa memberi masukan-masukan ke personal. Tapi kalau langsung ke DPC saya nggak berani karena mereka kan punya kebijakan tersendiri. Apalagi saya bukan pengurus paling cuman ngomong pribadi di rumah. Tapi kalau di forum kan nggak berani.

Farid : Kalau mengkomunikasikan PAC seperti apa?

Suroso : Paling kalau partai itu kan yang penting kan bisa bicara. Istilah bisa merekrut dengan cara omongan bukan dengan yang manis tapi ada faktanya. Mengajaknya kan begitu.

Farid : kesempatan apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk berkomunikasi dengan kader partai?

Suroso : Mungkin di nikahan kan bisa ketemu atau ada acara-acara paling tidak ada sangkut pautnya dengan itu (partai). Kan kalau ada manten kan kader-kader pada diundang sekaligus kita ngomong-ngomong.

Farid : Status bapak sebagai kader sebagai kader PDIP menjadikan Bapak dipandang masyarakat?

Suroso : Ya selama ini walaupun remang-remang ya ada yang mengakui. tapi ada yang pengetahuannya kurang ya mungkin kurang kadang ya nggak memperdulikan.

Farid : Tapi ada yang mendekati bapak terus ngusulin di partai?

Suroso : Misal sekarang ada guru yang minta tolong ke saya nanti saya hubungkan dengan Pak Bupati. Kemudian di pindah dari Pakis Mertoyudan. Tapi kenyataan itu kadang-kadang kalau sudah sampai disana dibilang kalau itu bukan urusan bupati, itu urusan diknas. Padahal diknas itu bisa ada memo dari bupati. Padahal guru itu alur politisnya tidak tajam.

Farid : sepengetahuan bapak dalam merumuskan sebuah aspirasi di lingkup DPC atau DPRD seperti apa?

Suroso : aspirasi untuk apa pun misal ada kaki lima yang belum berdaya supaya berdaya. Ibaratnya diberikan kail nanti dipinjami syukur diberi tapi kan kail itu harus dilengkapi dengan umpannya termasuk dengan kalau pancing sudah dapet hasilnya nanti pancingnya dikembalikan.

Farid : Cara dpc merumuskan proses-proses seperti apa seperti tadi misal DPD sepakat memberdayakan PKL?

Suroso : ya kadang itu rapatnya agak tertutup. Itu kan mungkin ada komunikasi mungkin ada segi manfaat dan tidak bermanfaat untuk kebijakan.

Farid : Apa aspirasi di tingkat PAC itu didengar?

Suroso : Ya didengar nanti terus dicatat tapi kan di situ selesai tapi tinggal nanti realisasinya seperti apa.

Farid : cara menyampaikan gagasan politik seperti tadi mengusulkan calon Bupati agar diterima partai bagaimana?

Suroso : Waktu itu kan saya ditanya sama Pak Singgih ya ke depan itu supaya kabupaten Magelang itu kan punya candi Borobudur. Jadi supaya sejahtera itu dikelola sendiri, bukan dikelola luar. Nanti kalau Pak Ganjar bisa mengelola kan jadi Kabupaten Magelang lebih sejahtera. Itu kan warisan sejarah warisan nenek moyang masa kita kita gak bisa menikmati. Itu kan ibarat mengelola Bonbin memberi makan itu berapa. Ya intinya gagasan politik itu mengandung asas kemanfaatan.

Farid : Dalam kesempatan apa saja Bapak akan mengungkapkan gagasan Politik tersebut?

Suroso : ya yang memungkinkan dalam pertemuan saya kan gak bisa ngomong ke DPR macam macam-macam. Tapi saya bisa memberi masukan dengan pengurusnya. Saya memberi masukan diterima monggo tidak ya monggo. Kalau saya garis partai seperti ketua DPC, itu harus bersuara di forum. Tai kan saya hanya sebagai kader saja bukan pengurus.

Farid : Bapak selalu mendukung semua sikap-sikap politik ini termasuk berkoalisi dengan abcd?

Suroso : Seperti mendukung Ahok itu itu kan dari partai yang gede-gede kursinya banyak-banyakan dijadikan satu kan itu. Setuju daripada mengandalkan Pak Ahok nanti malah mendukung PKS, Gerindra. Itu kan didukung dari PDIP Golkar Hanura. Ya Itu kan mungkin sudah dipikirkan berulang-ulang. Jadi ya cocok.

Farid : Bagaimana sikap terhadap partai dalam menentukan calon Legislatif dan Eksekutif di daerah maupun nasional?

Suroso : kalau legislatif di daerah asal di Kabupaten Magelang itu ya tinggal orangnya, orangnya itu kemarin-kemarin sesudah seperti apa sudah memberi sumbangan bagaimana. Kalau belum ya nanti dulu. Tapi kalau dari Bupati itu kan ada nilai tersendiri, Bupati itu kan ruang lingkup kabupaten dan itu ada patokannya kalau Bupati tidak menyambung dengan dua Pesantren itu sulit untuk menang.

Farid : Apa ada reward untuk kader yang berprestasi atau ada hukuman untuk kader yang menyalahi aturan?

Suroso : Seharusnya ada tapi kan kalau di tingkat kabupaten Magelang itu kayaknya masih belum begitu laku. Seharusnya diberi penghargaan ini karena begini-begini terus dipanggil DPC. Kayaknya kerja di partai di Magelang itu hanya dibuat tunggangan ibaratnya jadi untuk beranjak dari batu loncatan.

Farid : Banyak kader yang menyalahi aturan di kabupaten Magelang?

Suroso : ada, ya ada.

Farid : Tapi tidak pernah dari hokum?

Suroso : Iya tidak dihukum paling tidak dijadikan pengurus. contoh Kecamatan Kajoran mungkin kalau Koramil atau Polsek mungkin bisa dipindah. Kalau kader mau dipindah kemana kan domisilinya di Kajoran, ya nggak bisa. Ya sudah biarkan, mungkin dicoret dari kepengurusan saja.

Drs. Subagijo, M.Pd

Alamat : Bayanan Wetan / 01, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang.

Pendidikan Terakhir : S2 Unnes, Magister Pendidikan Olahraga

Pekerjaan : Pensiunan PNS kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Magelang

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 Agustus 1950.

Amanat di PDIP : Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pilkada Magelang untuk PDIP 2013 (Bupati dan Gubernur) serta Pileg 2014.

Wawancara dilakukan pada : 8 November 2016, Durasi 2,5 Jam. Di kediaman Bapak Subagijo

- Sejak kapan bapak mengenal dengan partai pdip?
Kalau kenal saya sudah lama tapi saya berkecimpung berkaitan dengan partai itu sejak 2013. Karena dulu saya kan PNS jadi nggak boleh berpolitik praktis. Pensiun 2013, menjelang pilihan bupati magelang saya diminta oleh ketua DPC PDIP kabupaten magelang untuk bergabung sebagai ketua tim sukses calon Bupati Magelang tahun 2013 dengan sebutan Zam-Zam, Zainal Arifin Maju Zainal Arifin Menang karena sama namanya sejak itu saya bergabung.
- Bagaimana ceritanya bapak bisa diajak oleh Pak Singgih, padahal bapak bukan kader?
Saya juga nggak tahu pandangan pak singgih ya, karena mungkin pak singgih selaku calon ketua DPC untuk mencari tim karena zam zam itu kan dicalonkan dari PDI sehingga untuk mencapai kemenangan itu, ketua DPC kan mencari seseorang yang bisa mengendalikan tim supaya calonnya bisa menang. Nah pertimbangannya saya nggak tahu tapi suatu saat pak singgih mengajak saya untuk bergabung dan karena memang saya kenal baik dengan pak singgih saya terima tawaran itu untuk menjadi ketua tim sukses calon ZAM ZAM yang notabnya dari PDI. Berjalanlah saya bergabung itu dan saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman pengurus pdi maupun di cabang maupun anak cabang dan simpatisan untuk berupaya memenangkan calon itu
- Nggak ada yang iri pak?
Dan kelihatan, nggak bisa juga karena saya kemana mana juga banyak kader kader PDI yang menerima karena kalau nggak menerima kan mesti ada protes nah kalau ada protes saya mundur tapi karena nggak ya saya tetep berjuang. Karena tegak lurus itu di PDI tegak lurus itu artinya semua taat pada ketua partai. Pak Singgih waktu itu juga jadi Bupati tapi juga ketua DPC sehingga itu kan sering pak singgih sebagai pribadi juga pak singgih sebagai ketua partai sehingga mungkin kebijakan itu diterima oleh semua kader PDI dari cabang sampai dengan anak cabang sampai dengan simpatisan.
- Nggak ada yang mengkritisi bapak waktu itu?
Saya nggak tahu tapi ternyata nggak ada. Jalan. Saya jalan mulai dari persiapan, kampanye, penghitungan suara sampai dengan selesai, sampai dengan keputusan yang digugat oleh lawan dan saya mengurus ke mahkamah konstitusi dan sampai selesai sampai dilantik. Itu artinya saya sudah melaksanakan tugas dan sudah dipercaya pak singgih

selaku ketua partai dan bisa diterima oleh teman teman nyatanya sampai selesai. Artinya proses calon itu proses pemilihan Bupati itu mulai dari saat kampanye, persiapan-persiapan saat pencoblosan saat perhitungan suara sampai dengan pengumuman sampai dengan menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi sampai dengan pelantikan, semuanya itu kemenangan itu semua bisa dirasakan oleh seluruh kader PDI. Nah itu artinya tidak ada yang protes itu kalo ada yang protes pasti ditengah jalan perjalanan enggak berjalan. Dan mengapa pak singgih menunjuk saya mungkin ya nggak tahu saya hanya feeling saja ya karena saya teman baik pak Singgih saya pernah jadi apa aja mungkin beliau tau karakter saya kualitas saya maka beliau menunjuk saya dan ternyata juga gak ada yang protes dan selama berjalan banyak pengurus pengurus pac dan pengurus cabang apa lagi menang. Saya di mahkamah konstitusi juga cukup lama itu sudah hampir 3 minggu mengawal itu proses sidang sampai selesai

- Dari pihak pasangannya siapa Pak?
Pasangannya Rohardi dengan dari pkb dan golkar,
- apa selisihnya sedikit pak?
Sedikit antara 33 dan 31 kan peserta 5, kalo pesertanya tidak mencapai 30 persen diulang tapi karena lebih dari 30 persen, 33 di kita dan 31 di sana. Dan setelah itu setelah Pilbup selesai terus ada Pileg pilihan legislatif 2014, Saya diminta oleh pak Singgih untuk menjadi ketua BP pemilu PDI. Setelah Zam Zam menang, pak Singgih menunjuk saya selaku ketua BP Pemilu. Saya juga gak tau pak singgih menunjuk saya dan ternyata partai anggota partai dan pengurus partai juga tidak ada yang protes. Setuju saja saya jadi ketua BP Pemilu. Sehingga saya banyak mengadakan koordinasi dengan para caleg para pengurus, pengurus ranting cabang sampai dengan anak cabang saya lakukan. Nah, pada akhirnya pada saat pileg kita sebenarnya targetnya 12 kursi tapi kita hanya mencapai 10 kursi itu pun juga kerja keras yang luar biasa kita tetap partai pemenang walaupun Cuma 10 tetap partai pemenang sehingga ketuanya kan dari PDI. Kemudian setelah pileg selesai dilanjut dengan pilpres, pilpres karena pak Jokowi pun calonnya dari PDIP maka semua pengurus cabang PDIP di Indonesia bahkan di Jawa Tengah dimintai untuk mensukseskan. Pak singgih selaku ketua partai berkoalisi dengan PKB, Hanura dan Nasdem. Pak Singgih minta jadi ketua, wakilnya dari PKB dan Nasdem dan saya diminta untuk jadi sekretarisnya, sekretaris untuk kemenangan Jokowi. Saya juga banyak belajar dari kader-kader, pengurus-pengurus partai mulai dari kabupaten sampai ditingkat kecamatan. Bahkan kita buat jadwal, jadwal pengadaan sarana-prasarana dan Alhamdulillah sampai saat perhitungan suara di kabupaten magelang ini menang tipis tidak mutlak kalo nggak salah 54%. Karena memang sudah di sinyalir bahwa kita itu daerah rawan kan disini kan daerah tentara dan ternyata pilihan legislatif gerindra disini banyak juga, gitu ceritanya saya.
- Bapak berani mengklaim bahwa diri bapak kader atau tidak?
Ndak biar orang lain aja, biar orang lain aja yang menilai. Mosok saya bilang bilang gitu lo.

- Padahal bu mega dulu pernah bilang bahwa petugas partai itu termasuk kader pak, nah bapak kan?
Iya, tapi kan nggak terus saya ini lho kader. Saya simpatisan karena sudah bantu pak singgih ya sudah pasti saya simpatisan kalo saya bukan simpatisan dan tidak sejalur pasti saya nggak mau ditugasi itu. Orang sini sudah melihat bahkan pada waktu pilleg ditempat saya pasang bendera PDI, biar orang yang menilai saja lah saya berani mengibarkan bendera di depan rumah ini untuk kemenangan PDI. Jadi semata mata saya berjuang bukan karena ingin diakui sebagai kader nggak, biar masyarakat yang menilai. Biar PDI yang menilai.
- Jadi benar benar partisipasi 2013 ya pak, sebelumnya pernah kampanye atau membantu pak Singgih juga?
Nggak, ya membantu pak singgih dalam pemerintahan saja karena saya bekas Kepala Dinas Pendidikan.
- Pensiun tahun berapa apk?
2006, sudah cukup lama to? Nah saya juga nggak tahu kalo saya dicari pak singgih saya nggak tahu juga. Dari 2006 sampai 2013 kemudian baru diajak pak singgih.
- Sebelum tahun 2013 itu intens komunikasi dengan pak singgih nggak pak?
Oh iya tapi intensnya ya sebagai biasasaja tidak ada kaitannya dengan partai.
- Tidak mengobrolkan partai?
Tidak. Setelah saya jadi Tim Sukses itu saya banyak (ngobrol) sampai sekarang masih membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan partai, kedepan PDI di magelang itu mau diapakan. Pasti kita berharapan besok partai ini dapat jadi pemenang, dan kalau bisa juga Bupati nya juga dari PDI, sebagai simpatisan ya mesti harus begitu, apapun yang terjadi ya harus punya keinginan kalo tidak yak (.....).
- Sekarang umurnya berapa pak?
66 menginjak 67. Saya 66 agustus yang lalu. Masuk 67. Dan kalau kaitannya dengan pemilu dipartai ini ya kerjanya siang malam dan nggak dibayar, tapi ada kepuasan tersendiri. Bisa mengantarkan calon PDI jadi Bupati bisa mengantarkan PDI menjadi 10 kursi. Itu saja kepuasan itu, tapi kalo material enggak saya pikirkan, dengan itu sudah cukup puas. Hanya sekarang ini kan ketua partainya sudah baru yang itu yang sampe sekarang ya sudah konsolidasi ke dalam partai tapi kan saya tidak banyak mengurus ke dalam, saya hanya bekerja diluar saja kalo kaitannya dengan internal saya nggak mau masuk kedalam. Karena kalo diinternal itu macam-macam ya ada maksimal friksi-friksi itu hal yang biasa, karena pada hakekatnya politik itu kekuasaan. Kalo saling (berpolitik) ya itu hal yang biasa itu tidak terjadi di desa di ranting, di anak rantik, di cabang, di DPD, maupun di pusat, menjelang pergantian pengurus itu pasti ada. Dan semuanya kan orang pada ingin, raono seng ora. Tapi sepanjang itu sih kita tetap dukung soalnya mereka mempunyai jiwa untuk membesarkan partai selama tidak mengkhianati partainya. Kekuasaan kan kadang kadang giliran, ya jalan hidup lah.

- Bapak merasa agak terlambat nggak pak untuk membesarkan partai saat ini?
Ya kalo dikatakan terlambat juga bisa nggak juga bisa kalo terlambat kan karena partai sudah lama tapi kan kalo waktu itu saya jadi pns, kemudian kalo setelah pensiun bergabung itu kan juga partai sudah lama nanti dikira, dikira orang baru. Ya karena saya mau bergabung karena diajak pak Singgih dan sekarang pak Singgih juga minta pada saya untuk tetap membantunya ya saya siap aja. Karena pak Singgih itu tokohnya persatuan PDI di kabupaten Magelang, jadi beliau banyak disegani. Sekarang beliau sudah nggak aktif tapi tatep mensupport tentang perjuangan PDI. Beliau menginginkan di kabupaten ini dari PDI andaikan tidak juga nggak papa yang nasionalis saja.
- Bapak sejak kapan tertarik dengan partai politik, partai politik bukan hanya PDI?
Kalo saya tidak tertarik, PNS kok, kalo waktu itu iya memang kan kalo partai politik ya kalo di PDI kan orang mengatakan kalo PDI partainya wong cilik sejak orde baru, perjuangannya berhasil pada saat ini aja sebelumnya kan belum. Jadi kalo dikatakan terlambat ya boleh tidak ya gapapa. Karena yang mendorong itu tadi karena saya diajak pak Singgih kalo nggak diajak ya nanti ndak diarani apa. Kan sekarang banyak kan temen temen yang setelah pensiun ikut partai.
- Apa nggak ada keinginan nyalon atau apa?
Udah cukup. lama, karena saya juga setelah pensiun saya juga jadi dosen di UKIP, di UT. Kemudian saya juga ketua (organisasi) ... sehingga kesibukan saya sudah banyak. Sehingga kalo saya masuk waktunya tidak sepenuhnya malah tidak baik. Dan kan yang muda muda banyak.
- Alasan bapak memilih menjadi kader PDI bukan karena kaitannya dengan pak Singgih? Kenapa tidak partai lain?
Ya karena ideologinya saja. Kan dengan baca sejarah pendirinya Bung Karno dengan ideologi Marhaen dan ideologi Pancasila itu saja. Dan PDI juga partai yang nasionalis juga tidak memandang tidak berafiliasi kepada salah satu mahdzab tapi akan memperjuangkan ideologi Pancasila, dan tetap melestarikan ajarannya Bung Karno.
- Sudah lama ya pak suka dengan pdi?
Secara real nggak. Ya kalo secara jiwa ya makanya saya diajak pak Singgih siap. Kalo nggak siap secara jiwa diajak pak singgih pasti ra gelem.
- Berarti sebelum diajak Pak Singgih berarti Pak Singgih sudah tau kalo bapak PDI?
Nggak tahu saya sendiri mungkin beliau, ya kan yang menilai kan beliau. Beliau mengutus orang kesini, saya diarahkan untuk gabung. Karena waktu itu juga pak singgih bingung siapa ini yang bisa mengendalikan tim dan juga bisa dipercaya oleh Pak Singgih. Pak singgih juga butuh orang yang bisa dipercaya untuk mengendalikan tim kemenangan itu, kan kalo nggak bisa meleset itu ya kan. Pak singgih nggak bisa terjun langsung secara fisik langsung kebawah.
- Pernah ngobrol dengan pak singgih tentang partai sebelum tahun 2013?

Nggak pernah, karena saya memandang beliau kan sudah jadi Bupati, Bupatinya semua orang. Karena beliau mau mengakhiri masa jabatan ingin juga bahwa pimpinan disini masih diisi oleh internal partai. Supaya bisa melanjutkan apa yang sudah beliau laksanakan, ya biasa kan gitu karena beliau tidak bisa lagi karena beliau sudah dua kali. Mungkin termasuk unik saya ini, orang lain pun mikir nggak mungkin ini. Dan menurut saya setelah berhasil pak Singgih nggak salah nih. Karena saya dalam suatu saat yang bersamaan saya udah 3 lo, mulai dari pilgub, pilleg dan pilpres. Dan saya kan juga sering komunikasi ke provinsi di provinsi juga nggak ada yang tanya saya. Kalo mempertanyakan kan pasti komplain dan pasti orang disana juga tau juga sehingga saya merasa memang tidak ada gangguan sehingga saya bekerja menjadi tim sukses segai bp pemilu. Dan saya juga pernah dilatih juga di Solo oleh bu yang menko sekarang mbak Puan.

- Latar belakang pendidikan dan agama bapak mempengaruhi untuk menjadi kader partai ini nggak pak?
Nggak, saya dulu latar belakangnya olahraga saya dulu sekolah di sekolah menengah olahraga, sekolah tinggi olahraga STO kemudian jadi ikip saya S1 nya olahraga, S2 nya juga olahraga saya dulu pernah jadi guru, jadi dosen kemudian jadi pegawai di dinas pendidikan dan terakhir saya dijadikan kepala dinas pendidikan.
- Sejak tahun berapa?
Saya sejak tahun 1998 jadi kepala dinas dan pengalaman saya ini kan pertarungan, pertandingan. Dan saya banyak pengalaman saya membawa tim-tim olahraga untuk bertanding. Saya pernah membawa tim mahasiswa ke POM Asean, saya pernah membawa tim pelajar ke kejuaraan ASEAN pelajar. Saya pernah membawa tim Indonesia ke sea games. Jadi memang saya kalo kaitannya dengan pertandingan itu bukan hal yang baru lagi hanya bedanya waktu itu saya pertandingan dalam olahraga kali ini pertandingan dalam partai.
- Selain berkomunikasi pak singgih ada orang lain yang memberi tahu tentang partai nggak pak?
Ya banyak temen temen anggota pengurus cabang sekretariat pdi saya juga ngantor di sekretariat PDI waktu pilleg saya disana saya juga nyaman nyaman aja disana.
- Sebelumnya sebelum pilleg dan pilgub bapak pernah berkomunikasi dengan kader lain nggak pak?
Nggak, dengan siapapun nggak. Karena saya nggak berpolitik praktis saat itu, tapi kenal karena saya kan di jajaran pemerintah kan anggota dewan ada yang dari PKB juga kenal, dari PPP kenal, dari PDI juga kenal. Di anggota dewan kan dari banyak partai dan pada waktu itu banyak yang nawari pak mau ikut partai, nggak saya mau pensiun saja. Kalo saya mengajar kan ringan nggak berat kalo yang banyak kan temen-temen kalo ke partai yang banyak diincer kan jadi ketua partai. Kan itu butuh perhatian butuh waktu butuh harus ada waktu khusus saya pilih yang nggak berat. Saya membantu pak Singgih nggak berat itu sehingga kalo orang lain mengatakan berat ya gapapa kalo saya nggak. kan tugas saya membantu pak Singgih menggerakkan temen temen.

- Besok kalo diajak lagi tapi bukan yang ngajak pak singgih bagaimana pak?
Selama itu untuk kepentingan partai ya lihat kedepannya besok gimana kan tidak tahu.
- Kesimpulan saya bapak ini yang sangat berpengaruh, sampai saat ini bapak merasa nyaman nggak pak jadi kader?
Nyaman, nggak ada gangguan. Nggak ada misalnya dari tokoh partai yang lain mencibir juga nggak ada. Bahkan tokoh-tokoh lain salut gitu kepada saya.
- Pernah nggak dimintain pendapat dengan kader PDIP selain pak singgih?
Dari pdi iya, utamanya waktu menjelang pileg Karena kan punya kepentingan. Dan semua yang ngurus saya itu mulai dari pendaftaran, mulai dari laporan keuangan mereka, kemudian upaya-upaya apa supaya mereka menang, lalu sudah kita petakan kira-kira di daerah mana kita menang. Disamping mereka juga berjuang sendiri, karena pileg sekarang disamping lawannya dari partai lain juga lawannya dari partai sendiri. Sehingga saya harus bisa membedakan orang itu harus sama karena peluang dia sama. Kalau saya nggak sama nggak bagus. Kalau saya sampaikan pada mereka ini pertandingannya itu kompetisinya disamping dengan partai lain juga dengan kawan sendiri. Tapi saya juga sampaikan ujung ujungnya siapapun yang menang harus PDI, sehingga kalo teman anda yang menang juga harus bangga bahwa itu juga dari kader PDI. Kan nggak bisa, satu dapil dapat jatah dua atau tiga. karena dihitung jumlah suaranya kalo jumlah suaranya nggak memenuhi syarat karena itu yang dihitung per daerah pemilihan. Dan kesalahannya berbeda-beda, dan faktor keberuntungan disini juga sangat menentukan juga. Pernah saya di Glabak waktu itu jumlahnya lima ribu sekian, karena dia nomer tiga nggak dapet. Tapi ada di suatu tempat yang hanya dua ribu tapi karena pembagiannya kumpulan dari temen-temennya dia jadi satu. Pokonya batas minimalnya dia hanya dapat satu. Kalo dapet satu yang dilihat yang tertinggi nomer satu itu. Nah disini kita pernah di dapil berapa kita jumlahnya lima belas ribu atau berapa itu kalo dibagi hanya dapet dua dan sisanya itu ada empat ribu dengan yang dapet satu yang dia dua ribu kalah, akhirnya beruntung kan. Yang lain dapet lima ribu nggak kepilih di partai lain dapet dua ribu atau tiga ribu dapet terpilih karena sumbangan dari temen temennya. Nah itu kadang kadang sering nggak disadari oleh temen-temen yang jadi, sebenarnya yang jadi itu patungannya (suara) temen-temennya. Saya sampaikan pada temen-temen sendiri yang nyalon itu, berjuang bersama-sama untuk kemenangan PDI, tapi kalo di dapil itu nggak terpilih jangan merasa putus asa kecewa.
- Berarti pas penyuluhan caleg itu bapak yang menyuluh yang memberikan pandangan ke caleg-caleg itu?
Iya kan kita kumpulkan dulu.
- Yang menarik disini kan pilleg ya pak kalo pilpres pilgub itu jelas calonnya satu itu. Kalau pileg kan calonnya banyak pak apakah ada orang yang ngotot pak tolong bantu saya misalnya gitu?

Ya nggak kan itu semua pendaftar kan sudah itu kan sudah disaring itu kemudian setelah mau masuk itu kan pendaftaran sudah cukup lama nah pada waktu mau berjuang itu nah saya pada waktu pertemuan pertemuan para caleg saya minta untuk mereka berjuang, bekerja sendiri dan bekerja sama. Bekerja sendiri artinya bahwa kemenangan mereka itu juga tergantung pada sosialisasi, penampilan mereka, kampanye mereka. Tapi juga perlu diingat bahwa itu juga bisa terjadi karena ini pembagian suaranya kan berdasarkan daerah pemilihan. Masing-masing dapil jumlah suara membaginya beda-beda, maka itu kita bekali supaya mereka mencari suara yang sebanyak banyak nya. Karena pernah terjadi, wes suarane okeh tapi nggak bisa mewakili partainya, tapi dipartai lain suaranya lebih kecil tapi jadi karena dia pembagiannya tidak memperoleh. Dan itu didukung dengan jumlah teman temannya ada disini cuma dua ribu jadi ada tapi yang empat ribu itu nggak ada itu partai yang kecil kecil seperti Nasdem Golkar. Kalo yang besar umumnya sekarang yang besar itu PDI, Gerindra, PKB. Gerindra sekarang udah 8 atau 9.

- Bapak sendiri pas mau menggerakkan pas pileg itu bagaimana pak. Cara bekerjanya? Kalo pileg kan pada masing-masing calon untuk bergerak di daerahnya masing-masing. Saya hanya menggerakkan kaitannya dengan kampanye-kampanye yang di tingkat kabupaten. Tapi kalo kampanye dimasing-masing wilayah kita serahkan pada mereka begitu.
- Bapak berarti nggak ngurusi alat alat kampanye mereka? Nggak itu kan anggaran mereka sendiri tapi untuk kampanye di kabupaten kita menggunakan alat peraga. Kemudian kita mengadakan kaos spanduk untuk mensuplai aja kan dari pusat sudah membantu kaos tapi sebenarnya intinya yang bersangkutan sendiri mau mensosialisasi apa nggak, yang mana memang itu butuh biaya. Saya ngundang rapat ngumpulkan warga satu RW atau kita ngundang RW yang lain minimal sanga rokok minimal kasih wedang perlu biaya juga.
- Berarti bapak memperkenalkan calon-calon itu juga pak ? maksudnya setiap dapil bapak kesana nggak pak? Kenapa harus dikenalkan. Nggak, ada tapi ada beberapa tapi nggak full. Dan itu kan jadwal yang mengatur mereka sendiri, kita hanya mengatur jadwal kampanye di tingkat Kabupaten kemudian membantu untuk kaos kampanye di tingkat Kabupaten. Itu yang mengadakan ya dari DPC.
- Waktu pileg terjadi konflik nggak pak karena setahu saya walaupun antar kader antar partai terjadi konflik? Malah enggak. Saya kemarin juga takut, kalau karena waktu itu kan kampanye bareng-bareng terjadi. Kan kemaren nggak ada karena menurut saya beda disbanding beberapa tahun lalu. Kalau tahun lalu kan dijalan ketemu rame-rame gitu kan. Kemaren nggak, kemaren kita itu PKB dengan PDI bareng lo. Kebetulan bareng. Ya nggak tahu ternyata pilihan presiden PDI dan PKB jadi satu saya nggak tahu. Waktu itu kita sampai khawatir jangan ketemu tapi setelah ketemu kok bagus Alhamdulillah nggak ada kericuhan. Dulu

kan khawatir kalo ketemu terjadi sesuatu. Dulu di jogja pernah terjadi PPP sama apa gitu. Disini dulu kita PPP, PKB dengan PDI yang bareng.

- Kalo konflik kepentingan antar kader pak waktu pencalonan?
Nggak ada
- Jadi nggak ada yang saling sikut gitu kan saling berkompetisi itu?
Nggak ada kalo saya amati nggak ada. karena kita sudah beri peraturan pokonya masing masing silahkan mencari massa tapi supaya tidak jadi bentrokan. ya mungkin kalo cuma artinya teguran dan lain sebagainya wajar, tapi nggak sampai bentrok. Dan kita dulu mentargetkan ya minimal 14 lah ternyata naik target kan harus naik dan itu masih jadi 10. Mungkin banyak yang lari ke Gerindra karena yang banyak massa itu Gerindra. Kalo PKB kan dulu disini ada partai PKNB, akhirnya kembali ke PKB. Karena pada lima tahun-lima tahun ini kan PDI sebelumnya kan yang menang PKB. Sebenarnya disini basis hijau PPP dan PKB. Kalo Gerindra kan Pecahan dari Golkar dan Pdi. Karena Golkar kan turun, kalau saya amati mungkin itu pecahannya pada masuk dari Golkar dan PDI.
- Saya beberapa wawancara juga bilang beberapa kader itu pindah ke Gerindra. Bahkan berjuang ke Gerindra. Bapak melihatnya karena apa pak?
Karena duit, nggak tahu saya. Tapi nggak tahu benar apa salah yang di PDIP ada support dari pusat. Seperti kantor, dan mobil ambulan. Dan yang jadi kader, yang di anggota dewan itu di PDI nggak punya duit. Sekarang masyarakat nggak bodoh. Masyarakat itu mau nyoblos aja pake duit, tingkat partisipasi tinggi itu karena dia dapet uang, iya to. Ya Cuma dari PDI nggak punya uang. Waktu Pileg kalo waktu pilbup nggak terlalu kan dari partai kalo ini kan perorangan. Kadang saya itu merasa kasihan ada salah satu calon untuk pilihan itu duitnya hutang kok.
- Jadi bapak nggak memungkir kalo dalam partai ini ada money politik gitu?
Ya banyak, tapi untuk membuktikan kan susah. Enggak hanya di Pileg, di pilbup juga ada pasti ada tapi waktu saya pilbup saya juga nggak ada dana. Kalau sekarang itu kan pemilihan kepala daerah juga sulit, harus punya modal, di koran kan ada mahar mahar itu, kita dari kader juga nggak pake. Dulu dari PAC terus jadi anggota dewan terus pengurus DPC. Pak Zainal pengurus DPC, masih muda, umurnya 40 tahun kok.
- Ada partai lain yang ngajak bapak?
Ohh ada, semula ada yang mendekati saya. Dari partai baru apa saya nggak tau mau mendirikan itu. Terus nggak jadi. Pernah ngajak saya saya ya kita lihat saja terus nggak kesini lagi ternyata nggak jadi ada. Nggak lolos partainya.
- Kalo besok ada partai yang mengajak bapak mau apa tidak?
Nggak. Nanti ndak dikira plinplan gitu. Kalo beda partai nggak. Menurut saya orang-orang juga nggak menawari lagi. Karena sudah pada tahu mulai dari Pilbup Pilleg Pilpres kan sudah ngurusi kegiatan yang berat kan nggak mungkin pada nawari. Andai kata ada, ya nggak lah. Disamping itu saya juga sudah tua.

- Menurut bapak PDI partai yang seperti apa?
Semula partai yang gesrut, partainya orang kecil lah ya. Dan pada umumnya mereka-mereka yang mau masuk ke PDI karena melihat partai itu didirikan dari PNI dari sejarahnya gitu. Yang menjadi daya tariknya itu dari sejarahnya satu: Bung Karno dan yang kedua: Bu Mega. Kemudian partai yang paling tua sejak orde baru. Dulu kan hanya ada PPP Golkar dan PDI yang masih kan hanya bu mega saja yang pecah pecah kan PDI dan PDIP. Tapi yang Golkar kan sudah pindah ke Gerindra, pindah ke lain. Ini kan menunjukkan bahwa ideologinya kan nggak kuat. PPP kan ada PKB, jadi maksud saya ideology partai ini lebih kuat dari partai lain. Menurut saya Gerindra itu dibentuk saat setelah dia nggak puas, Pak Prabowo nggak puas bikin Gerindra, Pak Wiranto gak puas, pak SBY nggak puas gitu. Tapi kalo PDI kan emang jatuh bangun. Menurut saya PDI itu partai idealis bukan partai dadakan. Bukan kayak sekarang itu partai sudibyo itu kan punya duit. Kalo PDI itu nggak punya duit sehingga anggaran itu juga dari masyarakat dari anggota.
- Nilai dan ideology apa yang bapak sukai dari partai ini?
Ya ideologinya Pancasila itu kita tetep Pancasila dan mempertahankan ajaran Bung Karno. ... ya berdiri diatas kaki sendiri. Utamanya mempertahankan NKRI dan Pancasila itu. Dan ideologi Marhaenya pasti itu kan partai rakyat kecil ya kan pasti. Tapi kan ideologinya mempertahankan Pancasila dan NKRI dan mengamalkan ajaran Bung Karno. Itu kan nggak pernah lepas nggak pernah luntur.
- Bapak melihat partai ini itu ada nilai positif dan negatifnya apa pak?
Plusnya itu punya panutan sendiri, kan orang melihat partai PDI itu melihat Bung Karno dan Bu Mega. Setelah itu saya nggak tahu plusnya itu punya panutan itu kalo minusnya apa ya dalam partai ini dananya dari gotong royong Karena juga nggak ada. Kalau yang seperti kita tahu Kalo Gerindra itu seperti pak Prabowo juga duitnya banyak. Demokrat juga. Kan yang bergabung itu orang-orang punya duit. Sehingga menurut saya kurangnya ya karena suatu organisasi kan butuh anggaran kalau nggak untung pemerintah sekarang menyediakan anggaran bantuan politik. Tapi kan kalo dari itu kurang masih perlu ada tambahan tambahan yang lain. Anggaran yang belum memadai untuk partai. Kan idealnya memang mulai dari bawah dari Desa dari Ranting itu kan anggarannya cukup, ternyata kan cari uang kan sulit. karena partainya wong cilik yo cilik.
- Kalo pembedanya pak?
Kalo pembedanya ya karena partai ini yang paling tua itu tadi. Paling tua dan tidak pecah. Golkar kan sudah pecah-pecah. Kemudian yang partai baru itu kan juga. Tapi menurut saya partai ini paling tua dan tahan uji. Di goyang masih tetep terus, baik dulu dipemerintahan atau nggak. Dan ada konsekuensi dulu waktu kalah ya nggak dipemerintahan, tapi sekarang ini seng nyalahi wingi ra ndukung saiki ndukung. Kan kemarin ada pemerintah sama merah putih dan Indonesia Hebat kan hanya PDI Hanura Nasdem dan PKB. Yang sini kan 10 ternyata rontok kan ndak konsekuensi. Kalau PDI dulu konsekuensi diluar pemerintahan ya diluar pemerintahan. Iya to, dulu waktu zaman pak SBY nggak dapet ya gapapa yang penting jalan terus. Konsekuensinya itu menurut saya.

- Ini yang menarik adanya sosok pemersatu Bu Mega itu ya pak?
Iya sama bung karno
- Kalo suatu saat bu mega turun, bapak memprediksi bagaimana?
Saya nggak tahu. Nggak berani ngeramal lah. Itu masih karena kelebihanya tegak lurus itu. Kalo nggak tegak lurus, nggak satu komando, nggak bisa lo bisa terpecah coba lihat partai yang lain bisa berontak tapi ini kan tegak lurus. Begitu Bu Mega seperti contoh pemilihan calon bupati, kalau nggak tegak lurus geger. Karena tegak lurus aman. Itu termasuk salah satu kelebihan tegak lurus Itu kalo nggak ada bu mega nggak tau nanti kita lihat saja. Mudah mudahan masih ada yang jadi panutan.
- Kalo mbak puan sendiri?
Saya nggak bisa banyak ngomong, karena kalau dibawah mbak puan anggota-anggota partai pengurus pengurus DPP kemudian itu kan semua diatas mbak puan, Cahyo Kumolo juga diatasnya mbak Puan, nggak banyak yang sejajar yang sejajar dan diatasnya. Jadi nggak mudah. Dia memang anaknya bu Mega tapi kan kepemimpinan itu kan nggak temurun itu. Kan dari pengalaman, dari pembelajaran kan gitu tidak terus otomatis gitu. Kedepannya itu kan dipilih anggotannya nggak langsung otomatis nggak. Pasti ada mekanismenya, jadi ketuanya saya tidak bisa memprediksi. Nggak langsung dari Bu Mega nggak. Beda sama pak SBY sudah jadi presiden masih jadi ketua partai, anaknya juga didik jadi sekretaris partai tapi kan waktu itu, nggak tahu sekarang pak Ibas itu posisinya apa gitu. Sering jadi bp karena dulu sekretaris. Kalo menurut saya kepemimpinan itu nggak terus turun temurun gitu nggak tapi juga pembelajaran yang diberikan dan hal itu juga tidak mudah kan dikelilingnya itu orang orang juga pengen kan sekarang orang gak berani bersaing sama Bu Mega. waktu munas nggak ada yang nyalon, Karena masih tegak lurus itu. Jadi mereka masih mengakui karisma bu Mega. Kalo nggak mau mengakui ya berantakan. Begitu diatasnya berantakan, ke bawah itu pasti ikut.
- Nanti ketika bu mega turun akan terjadi gejolak nggak pak?
Ya mudah mudahan tidak. Tapi orang orang ingin berebut iya.
- Karena yang lain juga seperti itu ketika sosoknya nggak ada langsung berebut?
Lahiya. Kira kira gitu kita berdoa mudah mudahan nggak.
- Bapak tahu sejarah perjuangan partai ini berdiri dilingkungan magelang pak?
Saya nggak tahu sih karena saya masuk tahun 1998, hanya saya dengar-dengar saja bahwa orang-orang akarnya pak Singgih nggak sengaja, mungkin pak Singgih itu kan loro-loponya PDI. Pak Singgih waktu PDI nggak punya apa-apa. Pada jaman orde baru pdi dipinggirkan itu pak Singgih pertahankan temen-temennya. Sehingga tahun 98 itu PDI bisa berjuang kan tahun 98 setelah reformasi itu. Sebelumnya kan terpinggirkan PDI itu, nggak bisa bergerak. Saya sejarahnya nggak tahu hanya saya dengar bahwa tokoh PDI itu disini ya pak Singgih, PDIP lho bukan PDI. Sehingga pak singgih itu juga nggak dekat, ya dekat lah sama Bu Mega artinya dekat itu bu Mega sampai tahu itu namanya Pak Singgih.

Sehingga Pak Singgih waktu itu jadi anggota dewan terus jadi ketua DPR, ketua DPC. Sejak 98 itu sampai beliau turun jadi Bupati jadi ketua DPC ya hampir 3 periode. Dulu kan nggak ada peraturan itu baru akhir-akhir ini aja hampir disemua tempat jabat Bupati kemudian di partai-partai politik memperbolehkan 2 periode kan baru akhir-akhir ini saja, Jaman pak Harto dulu kan mau diangkat presiden seumur hidup. Tapi yang sekarang ini kan hampir di semua lapisan itu sekarang pakai perodesasi pak Singgih itu jadi anggota dewan mulai 98, kemudian jadi ketua DPR setelah jadi ketua DPR jadi ketua DPC mulai tahun 2003. Sebelum itu ketua DPR 5 tahun terus beliau jadi anggota dewan tahun 98.

- Pandangan politik bapak sudah sejalan dengan arah politik ini belum pak? Termasuk penentuan calon legislatif calon gubernur?

Menurut saya sudah kalau calon gubernur kita kan mengikuti dari pusat karena itu kan kewenangannya DPP, jadi kalo diputuskan pasti kebawah tegak lurus mendukung calon dari PDI. Kalo Bupati kan dicalonkan dari DPD dan DPP. Bupati kan pakai seleksi wawancara loyalitas kan ada seleksi ditingkat kabupaten yang menyeleksi kan dari DPD. Sehingga nanti siapa yang dicalonkan DPD yang direstui DPP itu ya harus didukung. Dan pasti baik DPD, DPP pasti milihnya kader yang baik. Dan sekarang juga survei dipertimbangkan calonnya due duit opo ora nah kalo nggak punya uang siapa yang mau membiayai.

- Berarti bapak setuju dengan politik tegak lurus itu ya pak?

Iya iya, karena ada pengendali kalo nggak rebutan dewe neng ngisor ada permainan permainan nggak sehat. Karena saya setuju ada tahapan-tahapannya itu juga ada seleksi ada track record dari yang bersangkutan kemudian ditanya siap nggak dananya, karena partai sendiri nggak ada uang. dan di PDI sudah bagus karena yang udah diterima ada diklat juga itu kan itu terbuka bisa dari kader bisa dari siapapun yang ingin. Nanti kan diseleksi kalo bupati/walikota kan di tingkat DPD tapi dari provinsi itupun juga harus menunggu persetujuan dari DPP. Jadi semua kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi dari DPP. Kan itu pertarungan politik jadi kemenangan di kabupaten, kemenangan di provinsi itu jadi kemenangan DPP, karena itu sangunya modalnya untuk pilpres. Jadi pilpres itu sudah disiapkan sejak pemilihan di kabupaten di kota di pilleg itu sudah disiapkan. Loh iya lah nek nggak itu modalnya apa, makannya kemarin kan bu Mega waktu pilpres sudah saatnya yakin beliau kalau menang. Karena apa kita lihat dimasing-masing kabupaten kota gubernur juga banyak kemudian pilegnya juga diperkirakan kalau tidak curang kan menang ternyata menang tipis juga kan.

- berarti bapak mendukung, pas waktu Ahok diajukan bapak juga mendukung?

Ya mendukung itu kan yang tau persis itu kan ya kan yang bertanggungjawab. Kalah atau menang itu kan DPP loh ya to nah karena penanggung jawab itu punya kewenangan hak itu. Walaupun bu Mega itu, Kelebihan bu Mega itu itu, beliau punya feeling contoh waktu Jokowi Ahok itu kan nggak setuju, banyak yang gak setuju, wong deso gowo rono. Padahal waktu itu musuhe pak sby, eh anu Foke. Berarti beliau punya feeling untuk jadi, termasuk milih presiden kan beliau kan yakin jadi politiknya karo seng liyan liyane kan yo bagus, kalo begitu itu mengurangi benturan-benturan kepentingan-kepentingan, kadang-

kadang kita itu juga punya kepentingan-kepentingan. Tapi kalau yang menentukan beliau, DPP kan semua kepentingan hilang beliau ikutnya untuk partai itu kelebihan. Tidak semua partai politik seperti bu Mega. Contoh misalnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno, seng jagokne kan, kan mereka bukan orang partai tadinya Sandiaga, terus jadi itu. Itukan menunjukkan tidak adanya ketegasan. Terlepas secara nyata, situasi macam itu kan diluar dugaan kalo menurut saya orang itu boleh merencanakan, yang menentukan Tuhan.

- Apakah norma dan nilai yang diusung partai sudah menjadi pegangan yang relevan bagi setiap kader, seperti ad/art atau aturan aturan sama nilai nilai yang tidak tertulis?
Ya sama, ya pasti semuanya itu harus ditaati oleh semua kader dan anggota partai, ya memang itu acuannya. Tapi kadang-kadang di lapangan ono seng kesana-kemari kan ada seperti yang pernah terjadi disini juga ada friksi Kepentingan-kepentingan masing-masing. Kalo menurut saya itu perlu ada ad/art dan aturan aturan nilai- nilai dan itu perlu dipahami oleh para kader dan anggota kader dipahami dan perlu menurut saya.
- Dilingkungan kab magelang di lingkungan PDIP sendiri berawal dari gesrut itu mempengaruhi partai nggak sih pak?
Pasti, karena kan tingkat pendidikan tidak sama. Makanya kan sekarang ada di PDI itu sedang membuat sekolah partai politik dan diharapkan oleh bu Mega sebetulnya para kader anggota partai itu sasaran sekarang itu harusnya anak-anak muda itu, sasaran anak muda untuk dijelaskan tentang anggaran tujuan partai itu.
- Komitmen kader terhadap partai sendiri?
Relative, tergantung situasinya kan ada yang mau ikut kemudian dia percaya. Maksudnya relative karena diera sekarang itu kan banyak partai dan banyak iming-iming, iming-iming itu juga yang mengganggu mereka konsoistensi mereka terhadap partai. Jadi kalo menurut saya relatif tergantung yang bersangkutan, tergantung pembinaan partai pada kadernya kalo nggak terus menerus kan ibaratnya anggota kader kalo ra diopeni kan diopeni wong liyo jadi menurut saya sangat relatif. Karena ada juga anak anak masyarakat orang muda yang ikut partai mergo orang tuanya gitu. Itu mungkin sulit tapi kalo tadinya dari keluarganya enggak, kemudian direkrut itu bisa juga suatu saat direkrut orang lain. Jadi menurut saya sangat relatif tergantung kondisi. Bisa latar belakang orang tuanya, keluarganya, latar belakang organisasi diluar politik.
- Bapak menilai disini banyak dari temen temen kader itu dari turun temurun istilahnya banteng holic lah?
Banyak disini seperti Pak Grengseng itu, itu orang tuanya juga tokoh PNI. Pak Saryan kalau nggak salah juga. Kalau pak singgih itu keluarga besarnya juga PDI, kalo itu gak bakal tergoyahkan. Tapi kalo cah nom nom seng melu grubyak grubyuk rono rene itukan gampang terpengaruh itu. Pengaruh macem macemlah, fasilitas mungkin apa lah kadang kan orang melihat kegiatan partai politik sesaat menjelang pileg, sekarang kan nggak kelihatan sopo seng ngurus nggak kelihatan, sehingga tugas partai itu menurut saya mereka menggalang voting mass, massa-massa yang mengambang, massa-massa yang belum punya pendirian itu tugasnya partai untuk mempengaruhi. Itu pada umumnya dilakukan

hanya menjelang pileg, seharusnya dilakukan makin lama makin bagus, tapi kan juga butuh tenaga butuh biaya dan menurut saya persoalan itu sama terjadi di semua partai kuncine kui duit kok kalo ada kegiatan Pembinaan kan butuh duit. Makannya tingkat keberhasilan menurut saya butuh kader-kader yang handal. Utamanya yang kerja dalam artian membimbing, mendekati memelihara voting mass itu. Voting mass menurut saya tidak hanya mudanya saja tapi ibu ibu menurut saya juga voting mass juga, itu massa mengambang ibu-ibu. Kan banyak to. nggak ada partai mu opo, takon nyoblos opo yo ora dijawab, kan gampang tuh sing ngeki duit keru sopo, seng ngeki duit akeh sopo sekarang sudah begitu. Jadi pada umumnya banyak yang nyoblos bukan karena partai politik tapi karena ada beberapa faktor, tetangga masih bagus itu keberhasilan partai politik mempengaruhi orang lain, itu masih upaya politik. Tapi sing cilokone sekarang kan masyarakat sudah sudah pinter contoh pilihan lurah aja nggak enek sanguine ra mangkat wes enek sanguine mangkat delok seng sanguine akeh kui seng dicoblos itu kan imbasnya kepada politik. Sekarang kadang-kadang dia nyoblos juga ki sopo nggak tau, nah ini menurut saya dibutuhkan kader-kader yang handal maupun diperkokoh mensosialisasikannya selama nggak ada kader kader seperti itu nggak berhasil. Apalagi kayak gitu misalnya didaerah magersari itu memang daerahnya PDI itu gampang itu sudah daerah PDI. Kalo disini ada daerahnya hijau daerahnya PPP seperti di tegalrego Gus Isum itu pasti daerah PKB sebetulnya magelang itu daerah hijau. Coba itu kalo PPP dan PKB gabung aja sudah no satu karena PKB sudah 9, PPP entah nomor berapa.

- Pas koalisi antar partai pak zam zam bapak ikut nggak?
Ohh zam zam, saya sudah terima jadi zam zam dan itu juga prosesnya lama dan paling terakhir daftar ya zam zam itu.
- Pak ada kader yang pragmatis dan mencari kesempatan untuk kepentingan pribadi nggak pak?
Ada pasti ada, ya kira kira ada pasti ada saya fikir nggak hanya di PDI tapi semua partai kira-kira ada. Yang pragmatis atau yang nggak itu ada. Jalan pintas itu kan, biasanya itu seng duwe duit artinya itu bisa mereka beli karena punya uang dan itu kelihatan saat pilleg dia gak aktif pengen nyalon itu kan yang pragmatis itu. Sebetulnya yang bagus itu kalo pilleg yang mereka berpengalaman mulai di ranting anak cabang di cabang itu, tapi di PDI saya amati nggak ada yang apa artinya khusus untuk pileg naik tidak jadi apa apa terus, semua ada jengangnya.
- Kalo untuk memperoleh jabatan di partai ada yang pragmatis tidak pak?
Nggak ada karena pilihan disini. sebab kalo dia, menurut saya nggak ada artinya sekarang ini yang jadi pengurus partai yang di DPC itu semuanya sudah punya pengalaman sudah duduk di kepengurusan juga artinya tidak ada pengurus DPC yang baru sama sekali. Kan kelihatan kalo baru sama sekali ndedit dadi ketua DPC atau anggota iki mesti beli jabatan karena keinginan.
- Budaya politik apa yang dipakai partai PDIP sendiri?

Kalo menurut saya budaya politiknya ya budaya politik di kab magelang ini kan kepengurusan, yang jelas budaya politik setiap 5 tahun sekali ada pileg, setelah pilihan legislatif ada penempatan DPR. Setelah itu ada kepengurusan yang baru mulai dari anak ranting, ranting, sampai ke DPC, dan menurut saya budayanya ya mekanisme itu melalui ad/art dan menurut saya itu yang paling penting jadi mengelola partai itu harus berdasar ad/art. Dan budaya itu sudah dilaksanakan ditepati oleh dpc tersebut seperti kemarin setelah pilleg selesai ada yang diangkat kemudian dpc pak singgih juga habis masa waktunya kemudian diadakan rapat pemilihan pengurus di anak ranting, di ranting, kemudian di PAC, kemudian di Cabang. Menurut saya budaya baik itu ya melaksanakan partai ini mengacu kepada ad/art itu yang harus dipertahankan budaya itu menurut saya yang terjadi sampai disini masih menggunakan budaya anggaran dasar anggaran rumah tangga.

- Tapi apakah ada budaya politik transaksional dalam partai ini?
Kalo saya amati belum ada, seng nggo transaksi wong anggotapartai yo radue duit wong yang jadi anggota dewan aja nggak punya uang kok uangnya sedikit. Jadi kalo transaksi kan identik dengan politik uang kan. Dan nanti ketua DPC itu kan ditentukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh DPD dan ini budaya bagus di PDI ini transparan. Kan biasanya kalo pilihan partai banyak yang kisruh, PDI juga partai tapi sekarang kan tegak lurus tadi kalo ada perselisihan diselesaikan DPP. Kemudian keputusan tidak melalui voting, kan kalo di PDI nggak melalui voting, melalui musyawarah. Budaya musyawarah sudah ditentukan pengurus DPC, DPD sudah nggak ada voting.
- Menurut bapak apakah ada yang salah dalam sistem partai ini pak atau malah sebaliknya?
Menurut kacamata saya nggak ada yang salah, ya sekarang sudah jalan dan sadar ternyata partai ini sudah berjalan cukup lama tanpa bergejolak saya nggak tau kalo yang kecil-kecil nggak kelihatan. Tapi pasti ada gejolak itu pasti ada, tapi kan besar atau kecil kita nggak tau biasanya nganti ribut neng partai, dulu pernah terjadi disini sekretarisnya ada masalah dan sampai ke pengadilan Akhirnya selesai dan yang bersangkutan cabut laporan.
- Jadi secara sistem nggak ada yang salah ya pak?
Ya menurut saya nggak ada, nah ini bisa dibuktikan karena sampai sekarang partai ini berjalan baik nggak ada yang nuntut ketua DPC dan lain-lain nggak ada. Kemudian ada pengurus yang minta diganti kan nggak ada. Ini menunjukkan semua sistem berjalan kalo nggak jalan kan pasti ada protes, andaikata ada protes kemudian diam-diam nggak sampai muncul kan juga bisa. Ini menunjukkan nggak terlalu besar gejolaknya.
- Bagaimana partai ini melakukan perekrutan kader?
Saya nggak tau, perekrutan kader itukan diserahkan kepada masing-masing PAC. Kan yang punya massa masa itu kan pengurus anak cabang, karena kita kan berjenjang organisasinya jadi kan mestinya pengaderan itu juga melalui yang dikader oleh DPC itu kan pengurus-pengurus PAC, pengurus-pengurus ranting, itu dikader oleh DPC. Mereka kemudian ditugasi dan utamanya ini menurut saya kalo ingin partai ini kuat kuat ya kader

di ranting itu harus kuat dan yang banyak bekerja disitu sebenarnya. Kalo pengurus-pengurus ranting nggak kerja nggak melakukan kaderisasi nggak melakukan pendekatan opo yo isoh.

- Jadi ujung tombak utamanya itu di ranting?
Iya diranting itu menurut saya sekarang belum berjalan seperti di harapkan dan itu masih sporadic hanya menjelang pileg.
- Jadi menjelang pilleg ada orang baru gitu pak?
Iya biasanya gitu
- Berarti belum ada yang terstruktur ya pak? Misalnya open rekrutmen kalo di mahasiswa?
Belum. Sebenarnya kalo dijadikan pemudanya bagus-bagus juga, tapi kan juga butuh biaya. Iya to, misalnya jatah mencetaknya dan mensosialisasikannya kemudian pendidikan politiknya itu bagus, tapi sekali lagi saya katakan kalo dilakukan butuh biaya kendalanya menurut saya di biaya. Dan itu mungkin tidak hanya di kami semua partai yo ngono.
- Dalam melakukan rekrutmen tadi dari ranting apa menurut bapak sudah baik dan optimal belum?
Kalo menurut saya belum. Ya itu tadi banyak yang dilakukan menjelang pileg, seharusnya kan nggak seharusnya itu ada atau tidak ada pileg pengkaderan itu terus menerus. Harus bergerak dan tingkat karakteristik kader tiap tahun ditingkatkan pemahamannya tapi sekali lagi kalo itu dilakukan butuh biaya, ya pendidikan ngumpulke orang mendatangkan pembicara.
- Dalam mendapatkan kader harapan bapak memperoleh kader yang seperti apa sih?
Ya kader yang handal, artinya kader yang menguasai ad/art partai, kader yang memperjuangkan visi misi kader dan yang paling akhir tujuan akhirnya itu pada saat pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, presiden dia bisa meyakinkan masyarakat apa yang diajukan oleh PDI itu menjadi pilihan rakyat. Dan itu tugas para kader mempengaruhi masyarakat. I nek kader ora memasyarakat kok disebut kader, bukan kader itu. Kader itu bekerja sukarela tulus ikhlas untuk kepentingan rakyat menurut saya itu, kalo mengharapakan sesuatu itu bukan kader.
- Ada nggak pak di lingkup ranting yang mengharapakan sesuatu?
Ya ada pasti ada.
- Bergerak kalo ada uang?
Iya. Kondisi sekarang kan gitu nggak bisa nggak. Ya misalnya kita ngajak kemana butuh sepeda motor karena seorang kader belum tentu punya pekerjaan tetap penghasilan tetap. Jadi munafik kalo kita mengatakan kalo nggak ada pak semua kadernya nggak butuh duit itu munafik, pasti iya.
- Pernah nggak pak kader ranting terbeli partai lain?

Saya nggak tahu, sejauh ini menurut saya, karena saya nggak ngelihat nyata ya, tapi kalo melihat hasil itu, bisa juga kader kita kebeli. Bisa juga dulu pengikut kita pemilih kita dipengaruhi itu. Karena menurut saya massa mengambang itu bisa kesana-kemari, setiap tahun bisa berubah-ubah. Kaderpun bisa berubah karena tidak kepuasan mereka terhadap perlakuan partai terhadap dia. Misalnya di pengurus ranting kelurahan paling banyak kan di pak lurah kui paling banyak 5 orang, kui ono 10 nek ra kepilih lak mutung yo isoh to. Tapi kita cari jumlah yang banyak nggak bisa menjadi bisnis semacam itu nggak bisa, karena jumlah desa kita ada 300 berapa yang tersebar di 21 kecamatan. Kalau ada kasus seperti itu ya yang tahu ya pengurus-pengurus anak cabang, pengurus anak cabang kan jumlahnya 5 atau tujuh tidak bisa menguasai beberapa desa yang luas, sedangkan operasional anak cabang itu juga sangat-sangat terbatas, kita akui terbatas, dan organisasi bisa bergerak kalo ada dana nya.

- Bapak sendiri menilai kader itu apa pak?
Kader itu orang yang mau berjuang untuk partainya tanpa pamrih tanpa mengharap suatu imbalan, itu namanya kader dan mempunyai loyalitas yang tinggi. Utamanya kader itu harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap partai. Selama kader itu nggak punya loyalitas, loyalitas itu artinya tulus ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu, itu yang ideal. Kader yang ideal itu mempunyai loyalitas yang tinggi, indicator loyalitas tinggi itu dia mau berjuang untuk kepentingan partai tanpa mengharapkan sesuatu. Kui ideal tapi yo ra ono, tapi menurut saya yang ideal seperti itu tadi. Apa yang dia lakukan semata-mata untuk kepentingan partai.
- Bapak bagaimana berkomunikasi dengan kader lain selain pak singgih?
Ya komunikasi saya baik, kadang-kadang lewat telepon, kadang-kadang kalo ketemu ngobrol, kalo lewat perkumpulan saya nggak saya banyak dirumah saja, Kalo pas perkumpulan pas rapat-rapat membicarakan pileg, tapi diluar itu ya kadang telpon ngobrol tapi nggak terjadwal.
- Ada kesulitan nggak pas pas komunikasi?
Nggak ada, ya masih menghargai saya selaku orang yang lebih tua, saya juga selalu menghargai menghormati kader-kader.
- Pengelolaan kader dilingkup dpc itu seperti apa sih pak setahu bapak? Intens mengadakan perkumpulan atau gimana?
Kalo yang saya tahu DPC itu sering mengadakan pertemuan dengan pengurus DPC maupun pengurus PAC. hanya waktunya yang saya amati nggak rutin, yang intens menjelang pileg pilbup pilpres itu intens bahkan sebulan bisa 2-3 kali menjelang event-event itu. Kalo tidak menjelag event 3 bulan sekali, setahun sekali ada muscab ada rakercab.
- Rakercab itu membahas apa saja?
Kalo rakercab membahas rencana kegiatan tahun yang akan datang mungkin menjelang ultah PDI.

- Apa ada sebuah budaya pak untuk menunjang pengelolaan kader?
Kalo itu biasanya dilakukan ulangtahun aja dan itupun dilakukan ditingkat kabupaten, karena kalo setiap kecamatan ya biayanya itu. Budayanya setiap ulang tahun menyelenggarakan di DPC tingkat kabupaten.
- Struktur organisasi yang ada di partai ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan partai dan masyarakat?
Struktur itu dibutuhkan sesuai AD/ART. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua-ketua bidang sesuai dengan AD/ART. Sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kan ada wakil ketua bidang sosial dan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga kinerjanya kan juga tergantung masing-masing orang. Kan juga semua program itu juga tergantung anggaran.
- Apakah bapak sering pandangan negative atau pendapat negatif tentang partai ini?
Kalo negatif iya, negatif itu orang-orang yang nggak seneng karena dikaitkan dengan Bupati wong PDI terus sing dipikir PDI wae. Padahal sebetulnya kan nggak gitu. Sebetulnya kalau sudah jadi bupati itu ya bupatinya semua orang. Tapi kadang-kadang orang itu kan kaya gitu. Seperti bantuan politik kan juga sama, sesuai dengan aturan besar kecilnya. Tapi yang negatif menurut saya itu saja.
- Komunikasi yang terbangun di partai ini, selain tegak lurus apakah dari bawah juga menyampaikan ke atas juga?
Kalau yang saya lihat sementara ini kelihatannya kok belum terbangun itu. Kalau usul-usul yang mempengaruhi keputusan dari atas juga nggak ada. Itu tapi kan anunya tegak lurus dari atas ke bawah semua apa yang dikerjakan dari atas ya dikerjakan. Sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari atas ke bawah yang menyimpang dari apa yang diperintahkan dari pusat.
- Di lingkup DPC seberapa sering konflik kepentingan atas nama pribadi?
Saya nggak mengamati itu, saya pikir kok nggak ada ya yang terlibat. Kalau Pak Susilo itu bukan kepentingan ya, kalau saya katakan itu kesalahpahaman atau apa ya. Komunikasi yang kurang baik, komunikasi yang kurang serasi. Kalo sekarang kan DPC nya baru, saya amati ya baik-baik saja. Karena baru setahun ya. Biasanya gitu itu menjelang pileg menjelang pilbub, nek rung ono kepentingan itu ya baik-baik saja.
- Berarti adanya konflik itu mendekati pemilihan?
Iya, Karena waktu itu pak Susilo kepengen nyalon. Padahal DPC punya usul yang lain yang disetujui oleh DPP. Sebenarnya kalau DPC mengusulkan siapapun kalo DPP nya nggak mau ya yang digunakannya yang dipercaya oleh DPP. Karena partai itu kan miliknya pusat bukan miliknya daerah. Ketua partainya kan di sana. Karena itu bukan ketua DPP tapi ketua partai Bu Mega. Tapi kalau ketua sini ketua DPD ketua DPC tapi ada yang mengatakan ketua DPP, ya ketua partai. Ketua partai yang kemudian disana ada Dewan

Pimpinan Pusat yang terdiri dari ketua, wakil dan sebagainya itu. Tapi pemilik partai itu ya ketua. Jadi punya otoritas, jadi kelebihan di PDI kan itu. Dan nggak ada kubu mana-kubu mana. PPP kan ada kubu mana kubu mana, kemudian PKB juga demikian. Kalau PDI kan nggak ada kubu-kubunan.

- Itu bukannya malah seperti feodal?

Ya mendekati itu lah. Tapi kan bisa dikendalikan, kaitannya dengan era sekarang itu lebih memerlukan mana. Demokrasi nek kebablasen kan terus angel diatur. Seperti Golkar kemarin itu lah Golkar ARB sama Agung, itu kalau Golkar nggak bisa selesai kerugian Golkar sendiri. Kan akhirnya bingung ameh melu sopo. Termasuk PPP itu. Boleh dikatakan feodal juga boleh. Tapi demi keutuhan kan baik yang mana, yang feodal atau yang liberal? Pasti semua ada kelebihan ada kekurangan.

- Bukannya malah tidak sesuai dengan namanya ada nama demokrasi disitu.?

Ya demokrasi terpimpin. Ya kalau feodal ya boleh, tapi itu kan figur. Figur yang masih mempunyai magnet yang kuat.

- Jadi masih relevan untuk keadaan demokrasi sekarang ini?

Menurut saya masih bisa. Termasuk demokrat. Coba sekarang yang megang bukan SBY, kalang kabut. Orang dipegang Anas saja kalang kabut gitu kok, bener nggak. Nyatanya setelah dipegang pak SBY agak tenang kan. Semua itu ada plus minusnya.

- Berarti kalau partai sebaiknya feodal?

Bisa juga sepanjang untuk mengharapkan tidak terjadi perpecahan. Tapi kalau dibawah sudah paham, artinya misalnya sudah demokrasi nek wes kepilih yowes manut. Tapi kan yang terjadi kita nggak. Sudah diputuskan ora puas. Akhirnya maju ke pengadilan. Kan demokrasi itu harusnya kalau sudah menjadi keputusan ya menerima. Tapi yang terjadi kan nggak. Jadi ada keuntungannya juga. Makanya seperti PDI kan nggak pecah Karena musyawarah mufakat. Semua daerah masih menghendaki bu Mega, uwes. Tidak ada yang maju lagi calonnya. Karena semuanya ingin berkuasa. Kan sekarang nggak ada yang berani dengan Bu Mega.

- Dalam pengelolaan SDM kader partai apa tanggapan dan sikap bapak?

Kalau menurut saya ditingkat DPP ditingkat DPD ditingkat DPC, kalau SDMnya menurut saya sudah memadai. Artinya banyak orang-orang yang duduk di DPD di DPP, tingkat Pendidikan formalnya juga sudah memadai minimal S1. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang politik juga banyak yang baik artinya bukan orang-orang karbitan, namun sudah lama di partai. Sehingga menurut saya itu pengkaderan yang baik. Walaupun ada di satu, beberapa daerah itu miss itu ya tapi kan hanya satu dua. Tapi kan secara umum secara nasional kan baik, kabupaten pada umumnya juga baik. Memang yang kita harapkan kinerja dari temen-temen pengurus cabang itu lebih meningkat lagi. Diharapkan. Tapi kan kadang-kadang banyak yang pengurus DPC itu yang anggota legislatif. Sehingga mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga malah lali gaweane neng partai.

- Berarti sikap bapak mendukung dengan pengelolaan kader sekarang ini?
Ya, ya. Kan sekarang juga ada to sekolah. Kan kemaren itu untuk menjadi pengurus DPD, pengurus DPC, harus ada test. Setelah jadi pengurus juga ada diklat. Itu kan sekarang sudah dilakukan oleh partai. Bahkan sekarang ini PDI membentuk sekolah partai untuk kader-kader partainya. Baik yang menjabat di legislative, eksekutif maupun yang tidak. Kan sekarang baru buat sekolah partai.
- Apakah anda melihat semua kader partai berinteraksi dengan mudah?
Kalau interaksi mereka saling kenal, mudah. Kalau disini ya wilayahnya kan nggak terlalu besar. Kalau saya semua kader berinteraksi dengan baik.
- Apakah ada evaluasi kinerja guna meningkatkan target tertentu? Apalagi bapak pernah menjadi BP.
Ada evaluasi kita ada. Jadi kita mengevaluasi hasil kinerja pencapaian kegiatan tahun lalu. Dengan evaluasi itu kita lalu menyusun target. Target itu juga kita evaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Seperti saya juga punya evaluasi tentang pileg, pilpres dan pilpub pun saya punya evaluasinya. Daerah-daerah mana yang merupakan daerah merah. Evaluasi itu, buku itu kita gunakan untuk pilpub yang akan datang, pileg yang akan datang. Sehingga sebenarnya kita sudah tahu daerah-daerah mana yang rawan, daerah-daerah mana yang daerah orang, kita tahu.
- Kalau evaluasi kinerja kader?
Belum, belum ada. Secara spesifik belum. Penilainnya masih pengamatan saja, tapi penilaian secara detail belum ada.
- Apakah ada sosok yang bapak panut dan sukai?
Ya kalau saya Pak Singgih itu. Memang dia pengalamannya banyak, nasionalismenya tinggi, wawasan partainya juga luas, wawasan kenegaraannya juga luas. Beliau low profile, perlu dijadikan panutan. Orangnyanya juga tidak berapi-api tetapi pasti dan beliau sangat menguasai tentang partai, menguasai ilmu pemerintahan.
- Kalau kader secara nasional?
Saya pilih pak Jokowi. Karena beliau itu menurut saya manusia kerja. Kedua juga tahan banting dan ternyata sekarang kinerjanya bisa dilihat. Dan orangnyanya kan tidak meledak-ledak seperti pak Ganjar. Selain itu Seneng turun ke bawah.
- Kalau sekarang ini di dalam DPC ada yang berpengaruh dalam keberlangsungan organisasi tidak ?
Kalau saya yang berpengaruh sekarang ya harusnya ketuanya. Pak Saryan, sangat menggantungkan kepada beliau. Dia kan baru menjabat sekali ini dan juga masih muda. Sehingga sangat diharapkan bisa mewarnai, lebih maju lagi kepengurusan yang dia pimpin. Mesti harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan anggotanya mulai dari

sekretaris, bendahara dan para wakil ketua. Perlu diketahui bahwa partai itu nggak bisa sendirian. Menciptakan suasana collegial itu bukan kerjaan yang mudah. Dimuali dari tingkat kepercayaan anggotanya, kemudian dilihat dari panutannya, bisa dijadikan panutan apa nggak.

- Pandangan bapak mengenai pimpinan partai ketua umum megawati bagaimana?
Menurut saya beliau itu tegas, punya karakteristik, tegas dan berwibawa gitu aja. Dan kalau punya pendirian kan nggak goyah. Tapi orang mengatakan kaitannya dengan pak SBY, mungkin beliau punya prinsip.
- Mengenai kader yang sudah keluar seperti Rustriningsih dan Bibit Waloyo seperti apa pandangan bapak?
Kalau pak bibit itu bukan orang partai. Iya dia diangkat, tapi kan dia karena pengen jadi gubernur saja. Makannya beliau pernah mengatakan bahwa saya kan bukan gubernurnya PDI tapi gubernurnya masyarakat Jawa Tengah. Tapi beliau nggak bahwa dia jadi gubernur lewat PDI. Makannya untuk yang kedua PDI nggak mau mencalonkan. Bu Rustri itu kesalahannya karena dia pernah masuk ke Nasdem. Ternyata Nasdem jadi partai politik. Dia keluar dari Nasdem terus Nasdem jadi partai politik. Tapi menurut saya dia kader PDI tingkat nasional kok terus masuk ke Nasdem menurut saya ya nggak pas. Lho itu menunjukkan loyalitasnya nggak tinggi kepada bu Mega. Maka oleh bu Mega terus nggak di pakai, waktu pilihan gubernur nggak dipakai.
- Pendapat bapak mengenai sikap mereka yang keluar atau dikeluarkan dari partai?
Saya nggak bisa berpendapat, wong wes ditokke kok pie. Itu kan hak mereka nggak bisa dikomentari. Dia keluar itu karena apa kan kita juga nggak tahu. Kita kan tahu kalau misalnya pak Bibit, nggak mau karena dia nggak mau di dikte lagi. Kan bekas tantara pangkat jendral. Tapi kan saat mau jadi Gubernur juga nyembah-nyembah kepada Bu Mega. Tapi setelah nggak, saya nggak bisa komentari. Seperti Bu Rustri itu juga harusnya kita nggak bisa ngomentari. Kan sebabnya bu Rustri itu kader handal. Kalau saya ya eman-eman gitu aja. Tapi mengapa dia pindah kan punya latar belakang tersendiri.
- Bagaimana tanggapan dan sikap bapak mengenai kepemimpinan dari ketua umum, DPP, DPD, DPC sampai PAC.
Sini PAC Mertoyudan tapi yang baru saya belum kenal. Ini kan baru terbentuk sehingga saya belum bisa menilai maupun DPC juga masih setahun juga jadi belum bisa menilai. DPD pak Bambang Pacul baru setahun juga. Tapi yang sudah kita lihat lama kan Bu Mega itu. Kalau Bu Mega itu karena tegas itu aja. Tegas, konsisten. Kalau yang baru seperti Pak Bambang Pacul itu dilihat dari keberhasilan calon-calon yang ikut Pilbub dan Pilihan Walikota. Itu juga ukuran prestasinya disitu. Karena beliau juga punya tanggungjawab mengkondisikan DPC-DPC dimana yang ada Pilgubnya.
- Berarti Ukuran suksesnya ketua di hasil Pemilu?
Iya, ukurannya di DPP, DPC, ukurannya di hasil Pileg, hasil Pilbub dan hasil Pilpres.

- Bukan memperoleh kader yang berkualitas?
Lho itu kan otomatis. Sekarang ukurannya kader-kadernya berkualitas. Tapi bagaimana bisa mengatakan dia berkualitas kalau hasil pilegnya nggak berhasil, berkualitas nggak dia? Ukuran kualitas itu karena apa, ukuran kualitas kader itu bisa dari hasil pilpres, hasil pileg, hasil pilbub. Kader e apik-apik pemilihan kalah. Berarti kalah baik dibanding partai yang lain. Kita mengatakan baik dan tidak kan ukurannya dibandingkan dengan partai yang lain. Kalau kemarin kita katakana Pak Singgih berhasil karena pilihan Bupati, Pileg, masih menang walaupun selisih satu. Kemenangan itu kan kerja gesrut, bukan pekerjaan saya dan Pak Singgih, bukan. Tapi karena pekerjaan mereka-mereka dibawah. Karena mengurus partai itu kan tujuannya kekuasaan. Saiki nek melu partai ora kekuasaan nggo opo. Jadi semua partai yang diatas itu ngincernya jadi presiden. Kalau di provinsi ngincernya ya gubernurnya. Politik itu identic kekuasaan. Yo kalah ya gagal, ojo kondo apik. Walaupun dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya karena Bergeraknya kader, di dukung oleh kinerja dan kader-kader yang militan.
- Bapak pernah melihat adanya reward atau punishmen terhadap kader yang berprestasi atau melanggar aturan?
Sepanjang yang saya lihat kalau punishmen itu yang melanggar-melanggar di proses secara organisasi diberikan sanksi -sanksi. Tapi kalau reward kita belum ada penghargaan. Tapi pada umumnya penghargaan itu diberikan kepada misalnya PAC-PAC yang bagus itu terus diusulkan menjadi caleg. Kemudian setelah itu di anak ranting-anak ranting yang bagus dijadikan caleg, itu penghargaannya begitu. Kemudian kalau nggak caleg, mungkin PAC-PAC yang bagus dijadikan di DPC. Itu penghargaannya hanya sampai situ saja. Tapi berbentuk materi belum.
- Kalau bapak sendiri dalam hasil memenangkan pemilu dapat reward apa tidak?
Nggak, rewardnya apa? Rewardnya ya terimakasih aja. Terimakasih dari anggota-anggota itu. Tapi saya sudah seneng ketika mereka jadi saya seneng. Tapi saya katakan itu bukan usaha saya tapi usaha mereka. Karena dia yang mendanai dirinya sendiri. Saya kan hanya memfasilitasi, membuat laporan mereka, laporan pendanaan, administrasi, kemudian mendata hasil perhitungan suara, itu saja.
- Bagaimana cara bapak menjalankan tugas dari partai?
Ya, saya selaku tim sukses kami berupaya untuk bagaimana melakukan komunikasi dengan teman-teman PAC, dengan pengurus DPC, pengurus ranting, dan komunikasi dengan tokoh masyarakat sekitar. Pada waktu jadi bapilu ya kami melakukan koordinasi dengan mereka-mereka. Memfasilitasi masalah laporan keuangan, kemudian memfasilitasi bagaimana strategi mereka, seberapa jauh langkah mereka. Karena ada teman-teman yang yakin nanti jadi ya tenanan. Tapi yang penggembira juga ada. Tapi saya minta yag penggembira, anda andaikata tidak terpilih silakan untuk mensosialisasi diri anda sendiri untuk memperoleh suara untuk PDI. Karena itu suara anda juga berpengaruh. Makannya teman-teman yang jadi itu kudune maturnuwun sama kanca-kancane sing nragati. Tapi kenyataannya kan enggak, rampung yowis, bubar. Harusnya nggak gitu. Harusnya kita

temukan mereka sing menang-menang kui kudune menyampaikan terimakasih pada semua. Karena itu juga suara mereka yang kalah mendukung dia jadi.

- Setiap dapil ada yang jadi?

Ada, setiap dapil ada, kan ada 6 dapil ada yang dua ada yang satu.

- Bagaimana bapak menggerakkan massa?

Kalau menggerakkan massa kita adakan rapat dengan DPC, kemudian dengan PAC yang kita tugasi untuk menggerakkan massa. Dan PAC bekerjasama dengan ranting. Seperti pada wakt pilbub, kita adakan yang terakhir di gunung pring itu kita minta pada semua ranting untuk mengirimkan. Kemudian waktu pileg juga begitu. Waktu pileg masing-masing untuk bergerak di satu titik. Kalau waktu pilpres kita mengerahkan massa juga melalui anak ranting, yang PDI yang PKB juga begitu. Kita kumpulkan di Borobudur waktu itu. Jadi saya nggak bisa menggerakkan sendiri. Mesti harus menggandeng mulai dari DPC, PAC, anak ranting maupun kelurahan. Karena yang punya massa sebenarnya mereka. Kita perlu koordinasi yang baik dengan mereka. Selama kita nggak punya koordinasi, komunikasi yang baik selamanya nggak akan berhasil. Tapi disamping itu juga kudu ono duite. Lha saiki nekakke uwong ra ono bensine pie? Kita berupaya memberikan uang bensin kepada masing-masing daerah. Untuk pancingan saja dan jelas kurang. Tapi ya harus kita beri, sebab nek ora yo ga enak. Kalau yang pilpres dari pusat. Disamping pusat kan kita juga ada dari DPD dari sini juga.

- Ada iuran nggak pak?

Kalau iuran kita nggak. Iuran dari anggota legislative misalnya kita minta memberikan doorprize dan sebagainya. Tapi iuran nggak, kita cari donasi.

- Peran dan tugas apa saja yang diberikan partai kepada para kadernya?

Tugasnya untuk mensosialisasikan. Kalau Pilbub mensosialisasikan kalau calon dari kita. Dan diharapkan untuk menggerakkan massa untuk mereka mau datang ke TPS. Supaya datang nyoblos caleg dari PDI. Kalau Pileg kita serahkan pada caleg di dapilnya masing-masing. Kalau yang pilpres kemarin juga sama untuk datang ke TPS dan memilih nomor 2.

- Tugas lainnya selain di luar pemilihan?

Tugas lain mengawasi jalannya pencoblosan. Kalau selain tugas pemilu ya saya katakan tadi tugas dia itu musiman, kalau pas pileg saja. Kalau pas nggak pileg santai-santai saja. Kala menjalankan roda organisasi ya biasa, tapi tugas yang khusus itu.

- Bagaimana sikap bapak dengan tugas-tugas yang diberikan?

Kalau kaitannya pada waktu itu ya kita hanya minta untuk mereka melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari partai. Kemudian supaya juga mempertahankan hasil yang sudah peroleh. Kemudian mengawasi gerak-gerik dari pihak lain. Kemudian mengamankan alat peraga gambar kampanye, kan banyak media-media kampanye itu. Itu kalau nggak di amankan nggak diawasi kan banyak di copoti.

- Cara bapak menjalin hubungan baik dengan konstituen bagaimana?
Saya sering mengundang kelompok-kelompok tertentu kita kumpulkan disuatu tempat, kita sampaikan maksud tujuan, kita sampaikan visi misi calon bupati dan kita minta partisipasinya untuk mendukung. Atau kita datang ke daerah-daerah untuk memperkenalkan calon bupati kita, memperkenalkan visi misinya. Dan mengajak mereka untuk membantu kerja kita. Jadi yang kita bangun, satu kita mendatangkan mereka kita ajak omong, atau kita datang ke tempat mereka. Pada umumnya responnya baik.
- Pernah mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada pemangku kebijakan di DPC?
Waktu itu kepemimpinan pak Singgih akan berakhir. Kemudian juga kita masih konsentrasi pada pilbub, pileg. Sehingga kami tidak bisa menyampaikan, kerja terus itu. Urutan itu mulai Agustus sampai pemilihan, sampai ke mahkamah konstitusi terus pileg terus jadi hampir satu setengah tahun nggak berhenti. Jadi nggak sempat menyampaikan kebijakan apa-apa.
- Berarti keputusan perihal pencalonan dan sengketa bapak yang menangani?
Misalnya masalah pilbup sama saya, pilpres kan nggak ada masalah, pileg juga nggak ada masalah. Kalau yang pilbup itu sampai ke mahkamah saya tetap ngawal. Pasti lapor kepada pak Singgih karena ada ini kan kita menunjuk pengacaranya. Setelah setuju yang jalan kita dan teman-teman sampai ke mahkamah konstitusi. Di sini tinggal terima laporan dan memonitor saja. Sampai kita yang mencari saksi-saksinya. Mesti yang menggugat punya saksi kita juga punya saksi. Dan itu semua kegiatan saya lapor sama Pak Singgih, lapor sama ketua partai.
- Dalam kesempatan apa saja bapak bisa berkomunikasi maksimal tentang partai?
Setiap ketemu dengan Pak Singgih selalu ngomongin. Setiap pada saat pertemuan dengan DPC dengan PAC. Kalau menjelang pemilihan kita hampir setiap waktu lebih banyak ketemu dengan DPC dan PAC. Kalau ke ranting itu kita menjelang hari H saja.
- Status bapak sebagai kader, apakah membuat bapak menjadi penghubung antara masyarakat ke partai?
Saya nggak merasa. Tapi yang menilai itu mereka. Pada umumnya mereka kalau ada kesulitan-kesulitan minta untuk disampaikan kepada pak Bupati. Artinya mereka kalau menghadapi kesulitan, jalan buntu, kadang-kadang datang kesini baiknya bagaimana, jadi masih ada komunikasi. Untuk mengurus partai ini ke depan bagaimana kadang-kadang masih minta saran. Termasuk Pak Singgih kalau ada kaitannya dengan politik kadang-kadang kita diskusikan masa depan partai. Tapi Pak Singgih walaupun tidak berdiri di structural tapi perhatian terhadap partai yang pernah dia pimpin masih sangat tinggi.
- Bagaimana bapak menyampaikan gagasan politik ke Pak Singgih?
Ya meyakinkan pada beliau, ya hanya diskusi saja. Tapi kan beliau itu pengalamannya juga banyak. Kalau saya hanya ke Pak singgih, kalau yang lain hanya pertemuan biasa saja.

- Dalam merumuskan sebuah aspirasi, DPC cara merumuskannya bagaimana?
Kalau yang lama itu kan langsung Pak Singgih dengan pengurus partai. Kalau saya kan bukan pengurus DPC. Mestinya Pak Singgih kalau ada apa menyampaikannya kepada pengurus DPC.
- Bapak tahu sikap politik dari DPC?
Sikap politiknya pada dasarnya partai itu menyerap aspirasi dari masyarakat, apa yang diinginkan kemudian di bahas internal kemudian di perjuangkan pada waktu penyusunan Anggaran Belanja Daerah. Dan usulan-usulan itu diperkuat oleh masing-masing anggota dewan. Karena anggota dewan itu punya kepentingan konstituennya masing-masing di dapilnya masing-masing. Dan yang harus mengawal itu anggota legislative dari dapilnya masing-masing.
- Bapak selalu mendukung dengan sikap-sikap politik partai ini?
O iya, yang paling peting bahwa aspirasi masyarakat ya harus diperjuangkan. Utamanya kaitannya dengan infrastruktur, dan utamanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kan masyarakat pendukung PDI itu masyarakat yang kecil-kecil, masyarakat yang lemah-lemah itu. Kaitannya dengan penambahan modal, kaitannya dengan jamkesmas, BPJS.
- Bagaimana sikap bapak kepada kebijakan partai dalam menentukan calon legislatif dan eksekutif?
Kalau untuk caleg itu dibicarakan ketua partai dengan anggota DPC. Dan itu juga ditentukan pertimbangan dari PAC masing-masing sesuai dengan dapilnya masing-masing. Dengan ketentuan dari partai berapa persen laki-laki berapa persen perempuan. Caleg itu ada yang lama dan yang baru. Diharapkan yang lama itu masih bisa dapat suara, kemudian yang baru diharapkan bisa bersaing. Dan biasanya beberapa kali lipat jumlah yang kita peroleh dulu. Sekitar ada 40 an dari 12 yang ada. Jadi ada sekitar 28 yang baru. Itu kewenangannya DPC dan PAC yang menentukan. Kalau yang menentukan legislatif itu kan berdasarkan pemilihan. Kalau yang eksekutif kan kaitannya dengan pejabat, karena pejabat itu yang menentukan bupati, partai hanya sekedar mengusulkan. Berarti yang menentukan Bupati kalau jabatan eksekutif itu seperti kepala dinas. Hanya mungkin partai mengusulkan saja, tapi keputusan terakhir pada Bupati. Seperti pilihan gubernur itu yang menentukan dari DPP, pilihan bupati juga dari DPP, tapi kalau pilihan pejabat di daerah itu tergantung bupati.
- Sikap bapak mengenai kebijakan partai yang menentukan calon legislative-eksekutif yang SDM nya kurang bagaimana?
Ya itu karena begini, kita nggak bisa SDm uyang jadi di legislative itu semuanya baik. Karena apa yang baik tidak dipilih rakyat tapi yang jelek di pilih rakyat. Kita ada tapi ada yang lulusan SMA, pasti kalah dengan yang lain. Tapi itu dipilih rakyat. Ya kita mengharapkan kepada mereka yang terpilih harus bisa menjaga nama baik partai, juga harus bisa memunculkan aspirasi yang ada di wilayah masing-masing. Kalau kaitannya dengan legislative. Kalau kaitannya dengan pejabat kepala dinas ya partai itu mengusulkan

saja tapi penentunya tetep di Bupati. Bupati kan punya tim batimja disana, badan pertimbangan jabatan.

- Berarti dalam penentuan legislative-eksekutif tugas BP nggak ada hambatan?
Nggak ada, ya karena begini tugas BP nek wis sing penting rampung, terpilih, kemudian jadi anggota itu kan ketentuannya harus dia menang. Emang kita harapkan setelah mereka menjadi anggota legislatif dia banyak belajar. Tapi kan itu bukan kewenangan BP lagi. Nek dia sak sak e yo ra popo.
- Pengalaman hidup bapak selain menjadi BP apa lagi?
Ya pengalaman saya hanya tiga itu tadi, sebagai tim sukses badan pemenangan pemilu. Waktu jadi kepala dinas nggak boleh membantu. Kalau komunikasi dengan komunikasi dari partai-partai yang duduk di dewan ya baik-baik saja. Tapi kalau bantuan finansial mengarah ke anu nggak. Kan setelah orde reformasi kan semua PNS dilarang melakukan politik praktis.
- Bapak tidak tertarik masuk partai waktu itu?
Nggak, saya begini, kalau partai mesti orang mikirinya ingin menjadi pimpinan partai atau jadi anggota dewan. Saya nggak kepincutnya apa? Sebab nyalon anggota dewan kudu ndue duit, dan saya nggak punya uang, pensiunan duite ko ngendi. Gaji untuk makan sehari-hari sudah cukup. Padahal itu juga butuh uang banyak. Dan menurut saya untuk menjadi seorang yang ikut pileg itu mereka harus siap kalah bukan siap menang. Kadang-kadang banyak yang nggak siap kalah, njaluk e menang wae. Kalau siap kalah, duite sing ngetokke okeh dan seko utang, nak stress to. Jadi saya nggak tertarik karena biayanya besar.
- Banyak nggak yang nggak siap kalah?
Ya banyak. Kalau yang siap kalah itu terus kampanyenya sing penting melu. Karena adanya kuota yang penting ikut, kan sudah tahu saingannya kan tahu. Yang beda-beda tipis agak semangat. Banyak yang nggak semangat, kalau yang penggembira kan nggak semangat. Kemarin banyak yang nggak jadi sudah keluar banyak juga ada. Makannya harus siap kalah. Jadi kalau nggak punya uang sendiri jangan nyalon. Nek utang bar kalah mbalekke ne ko ngendi? Menang masih bisa ngembalikan. Dan menurut hitungan sebenarnya menjadi anggota dewan banyak ruginya. Missal penghasilan bersih sebulan katakanlah 20 juta, setahun 240 juta. Itu ada iuran partai berapa juta. Itu kalau dihitung sama metune ya nggak imbang. Malah kadang ada yang mengeluarkan 500 juta, 1 milyar, itu nek dihitung cara dagangan rugi. Nggak pulang uangnya. Tapi kalau yang PDI sedikit-sedikit keluarnya.
- Berarti kemarin pas pilihan Bupati jarang banget ada money politik?
Ada, ada. Jadi calon-calon yang lain ada. Tapi kalau dari calon saya nggak, darimana uangnya.
- Kalau itung-itungan berapa persen dari pribadi berapa persen dari partai?

Saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu dari partai yang lain itu dia mesti bayar untuk partainya. Karena dia mesti bayar untuk kendaraannya itu. Kalau ini kan dari PDI sendiri kan nggak bayar. Kemudian dari anggaran kan Pak Zainal itu kan nggak punya uang. Tapi kan yang nyalonkan Pak Singgih. Jadi yang membiayai Pak Singgih. Pak Singgih ditugasi Bu Mega dari partai. Jadi kita nggak pakai bayar-bayar gitu, dari mana uangnya. Backgroundnya Pak Zainal itu wong cilik juga, dia dicalonkan.

- BP sendiri melakukan penganggaran?
Ya penganggaran untuk pilihan saja. Kalau sekarang penganggaran kampanye dari KPU, waktu kemarin masih belum. Kan sekarang kan sepanduk-spanduk tidak begitu rame. Spanduk wae di jejer-jejer yang pasang wae KPU. Kalau dulu kan nggak, kita jor-joran. Apalagi sekarang ada EO, EO pilbud itu ada, biayanya mahal. Wes digorok i tok kui bupatine. Kalau saya kan nggak pakai EO, saya sendiri langsung.
- Waktu itu bapak tetap melakukan penganggaran kan?
O iya, biayanya dari Pak Singgih semua. Tapi ketat prosesnya, jadi langsung ke Pak Singgih. Jadi nggak bisa diapusi. Kalau yang EO itu diapusi EO. Kalau EO kan duit sak manute EO. Kan ada EO seperti itu, sekarang pekerjaannya objeknya ya pileg itu. Mulai dari buat materi, ngejadwal kampanye, pasangannya, dia semua. Saya dulu nggak, pasang ya gerakkan kader dibawah. Bukan pakai uang.
- Ada proker bapak seperti mimbar terbuka?
Mimbar terbuka kita juga sendiri nggak pakai EO. Jadi semua kerja sendiri gotong royong sendiri. Nggak pakai uang. Yang nggak ngerti kalau saya duit okeh, padahal nggak pegang uang. Pak Singgih uangnya juga terbatas. Kalau yang lain pakai EO duit akeh itu.
- Proses-proses politik apa saja yang pernah bapak alami di partai ini?
Mulai dari bawah yang saya lihat, rapat-rapat di PAC, rapat-rapat di DPC menjelang pilbud pilpres, pileg. Kemudian pencoblosannya, kemudian kampanyenya, kemudian melihat penghitungan di kecamatan, kemudian melihat penghitungan di kabupaten. Yang paling besar seumur-umur mengikuti siding di MK. Pengaduannya cepat, kan harinya dibatasi. Kan yang jadi yang dituntut kan KPU. Kalau kita kan yang terkait tapi kan juga sangat menentukan. Jadi disana itu kan ditanya, kemudian mengajukan saksi-saksi, kemudian diputuskan. Itu yang paling tertarik disana.
- Kejadian di MK itu relaitas politik paling menarik bagi bapak?
Iya, artinya mengawal pilbud sampai ke MK. Sampai mulai siding pertama sampai putusan yang terakhir. Dan putusan terakhir kita dinyatakan aman.
- Apa yang membuat bapak betah di partai ini?
Ya saya senang saja. Senang, enjoy, kemudian saya merasa dibutuhkan. Jika nggak merasa dibutuhkan saya nggak ada. Dan semua teman-teman kader, semua pengurus sikapnya terhadap saya baik. 2018, 2019 siap, selama teman-teman partai masih membutuhkan siap

saya. Tapi kan nggak bisa saya menyodorkan diri kan nggak bisa. Karena pimpinan DPC nya kan Pak iyan.